PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju Keren

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2025-2029

Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si
Bupati Mamuju

Yuki Permana, S.T
Wakil Bupati Mamuju

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum daerah;
   c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
   d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   e. penutup.
(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
   b. pelaksanaan RPJMD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. pelaksanaan RPJMD; dan
   c. hasil RPJMD.
(4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan

sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra perangkat daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangungan, Bupati dan wakil bupati wajib menyusun RKPD Tahun 2030.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJMD 2025-2029.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2030.

(4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025-2029.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 5 NOMOR 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan sebagai langkah awal yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di pusat maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah juga menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, serta kondisi sosial yang berada di dalamnya.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pemerintahannya diwajibkan dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 263 ayat (1) mengamanatkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada Pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa "RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Rancangan RPJMD ini mempedomani beberapa ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR ...

BUPATI MAMUJU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pendampingan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju dapat disusun dengan baik. RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai bahan untuk mempersiapkan landasan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan masukan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kami juga menyadari bahwa dokumen ini masih membutuhkan penyempurnaan seiring dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi dokumen ini di masa mendatang.

Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak terkait.

Bupati Mamuju,

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 10
1.4 Maksud dan Tujuan 14
1.5 Sistematika Penulisan 16
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **19**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 19
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 19
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 27
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) 29
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 31
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 35
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 36
2.1.7 Aspek Demografi 37
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 43
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 43
2.2.2 Kesehatan untuk Semua 58
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 62
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 67
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 68
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 69
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 73
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 73
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 73
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 81
2.3.4 Transformasi Digital 83
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 84

2.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 88
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 92
2.4 Aspek Pelayanan Umum 94
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 94
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial 98
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 101
2.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 102
2.4.4.1 Pendidikan 104
2.4.4.2 Kesehatan 106
2.4.4.3 Pekerjaan Umum 108
2.4.4.4 Perumahan Rakyat 110
2.4.4.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 111
2.4.4.6 Sosial 112
2.4.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah 114
2.4.5.1 Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 115
2.4.5.2 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar. 156
2.4.5.3 Layanan Urusan Pilihan 202
2.4.5.4 Unsur Pendukung 212
2.4.5.5 Unsur Penunjang 216
2.4.5.6 Unsur Pengawasan 224
2.4.5.7 Unsur Kewilayahan. 228
2.4.5.8 Unsur Pemerintahan Umum 229
2.4.6 Daya Saing Investasi 249
2.5 Gambaran Umum Keuangan Daerah 251
2.5.1 Penjelasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 251
2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 251
2.5.1.2 Neraca Daerah 254
2.5.1.3 Belanja Daerah 262
2.5.1.4 Analisis Pembiayaan 266
2.5.2 Kerangka Pendanaan 266
2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 267

2.5.2.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan 269
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis 271
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 271
2.6.1.1 Urusan Pendidikan 271
2.6.1.2 Urusan Kesehatan 271
2.6.1.3 Urusan Sosial 272
2.6.1.4 Inovasi 272
2.6.1.5 Ekonomi 272
2.6.1.6 Perhubungan 273
2.6.1.7 Ketenagakerjaan 273
2.6.1.8 Investasi 273
2.6.1.9 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 274
2.6.1.10 Komunikasi dan Informatikan 274
2.6.1.11 Perencanaan dan Pengawasan 274
2.6.1.12 Ketentraman dan Ketertiban Umum 274
2.6.1.13 Kebudayaan 274
2.6.1.14 Gender 275
2.6.1.15 Lingkungan Hidup 275
2.6.1.16 Pemberdayaan Masyarakat Desa 275
2.6.2 Isu Strategis Daerah 275
2.6.2.1 Isu Global 276
BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 325
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 325
3.1.1 Visi 325
3.1.2 Keterkaitan Visi 326
3.1.3 Misi 328
3.1.4 Keterkaitan Misi 329
3.1.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 332
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 339
3.2.1 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 339
3.2.2 Arah kebijakan RPJMD 2025-2029 352
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 360
3.2.4 Lokasi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mamuju 370
3.2.5 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) 372

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 378

4.1 Program Perangkat Daerah 378

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah 378

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 451

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 451

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) 452

4.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 478

4.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 482

BAB V PENUTUP 504

5.1 Kaidah Pelaksanaan 505

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan dan Desa di setiap Kecamatan Kabupaten Mamuju 19
Tabel 2. 2 Luas Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju 22
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju 2024 37
Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mamuju 2024 38
Tabel 2. 5 Rasio Penduduk Kabupaten Mamuju 2024 39
Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju 2024 40
Tabel 2. 7 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju 2025-2029 42
Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 44
Tabel 2. 9 Perkembangan Garis Kemiskinan Terhadap Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 45
Tabel 2. 10 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mamuju 46
Tabel 2. 11 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 48
Tabel 2. 12 PDRB Per Kapita Kabupaten Mamuju 50
Tabel 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 51
Tabel 2. 14 Indeks Gini di Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 53
Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Setiap Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 54
Tabel 2. 16 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 59
Tabel 2. 17 Prevalensi Stunting di Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024 62
Tabel 2. 18 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 62

Tabel 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 64
Tabel 2. 20 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 64
Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mamuju 2020-2024 65
Tabel 2. 22 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mamuju 2020-2024 . 66
Tabel 2. 23 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2020-2024 68
Tabel 2. 24 Indeks Kerukunan Umat Beragama 2020-2024 68
Tabel 2. 25 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 70
Tabel 2. 26 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 72
Tabel 2. 27 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 72
Tabel 2. 28 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 75
Tabel 2. 29 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Mamuju ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 76
Tabel 2. 30 PDRB ADHK Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 77
Tabel 2. 31 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 79
Tabel 2. 32 Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Makan dan Minum Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 79
Tabel 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 81
Tabel 2. 34 Indikator Terkait Transformasi Digital Kabupaten Mamuju . 83
Tabel 2. 35 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 88
Tabel 2. 36 Indeks Desa Membangunan Kabupaten Mamuju 90

Tabel 2. 37 Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 95
Tabel 2. 38 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 101
Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Urusan Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 234
Tabel 2. 40 Realisasi APBD Tahun 2020-2024 252
Tabel 2. 41 Neraca Daerah Tahun 2020-2024 256
Tabel 2. 42 Perhitungan Rasio Likuiditas pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 258
Tabel 2. 43 Perhitungan Rasio Solvabilitas pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 259
Tabel 2. 44 Rata-rata Umur Piutang pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 260
Tabel 2. 45 Rata-rata Umur Persediaan pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 261
Tabel 2. 46 Proporsi Belanja Kabupaten Mamuju 2020-2024 262
Tabel 2. 47 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 264
Tabel 2. 48 Proyeksi APBD Tahun 2026-2030 268
Tabel 2. 49 Isu Strategis Daerah 293
Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi Nasional dan Kabupaten Mamuju 327
Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi Nasional, Misi Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju 330
Tabel 3. 3 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Target RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 334
Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran dan Strategi 339
Tabel 3. 5 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju 354
Tabel 3. 6 Penahapan Pembangunan RPJMD 357
Tabel 3. 7 Program Prioritas RPJMD 361

Tabel 3. 8 Lokasi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mamuju 2025-2029 370
Tabel 3. 9 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Kabupaten Mamuju 2025-2029 372
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah yang Disertai dengan Pagu Indikatif Kabupaten Mamuju, 2025-2030 379
Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mamuju 2026-2030 451
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ... 453

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju 23
Gambar 2. 2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mamuju 25
Gambar 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju 31
Gambar 2. 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 32
Gambar 2. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 33
Gambar 2. 6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak 34
Gambar 2. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Mamuju 2024 41
Gambar 2. 8 Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju ... 56
Gambar 2. 9 Indeks Zakat Nasional 57
Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Mamuju 71
Gambar 2. 11 PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mamuju 74
Gambar 2. 12 Jumlah produksi perikanan tangkap Kabupaten Mamuju tahun 2022-2023 82
Gambar 2. 13 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Mamuju 91
Gambar 2. 14 Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju 93

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBAGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah upaya pemerintah daerah yang secara sistematis dan terencana dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah, serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai macam unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bentuk kepatuhan untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku yaitu Inmendagri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju hasil Pilkada serentak tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2025, sesuai dengan siklus nasional pemerintahan daerah. Momentum ini menandai dimulainya masa jabatan kepala daerah terpilih untuk periode 2025–2030, yang sekaligus menjadi penanda dimulainya tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju.

Pelantikan kepala daerah bukan sekadar seremoni serah terima kekuasaan, melainkan titik krusial dalam penyusunan arah pembangunan jangka menengah daerah. Setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati memiliki waktu maksimal 6 bulan untuk menyusun, menetapkan, dan mengesahkan dokumen RPJMD. Artinya, penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju harus tuntas paling lambat Agustus 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju selama periode Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD tersebut juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, tetapi juga sebagai penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPJMD tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas daerah dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif. Kedudukan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 khususnya periode kesatu yaitu tahun 2025-2029. Dengan begitu tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Mamuju di tahun yang berkenaan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPJMD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039. Penyusunan RPJMD juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya RPJMD, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan dengan pembangunan yang terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan yang berlaku. Dalam proses penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini senantiasa mengedepankan keterlibatan beberapa pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu yang dihadapi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

28. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
43. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;

44. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 103).
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 1);

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sebagai salah satu dokumen strategis yang memberikan arahan tindakan intervensi program dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam periode lima tahunan, RPJMD akan banyak berinteraksi secara substantif dengan berbagai dokumen kebijakan rencana pembangunan

lainnya maupun regulasi-regulasi tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan. Secara ilustratif, hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara lebih terperinci, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Presiden menetapkan 8 (delapan) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim *industry* di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan *industry* berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 -2029

Sulawesi Barat memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat bisa tumbuh bersama sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

1.3.4 Hubungan RPJMD dan RIPJPID

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang tersaji dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.3.5 Hubungan RPJMD dan KLHS Kab Mamuju tahun 2025-2029

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengatur visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah dalam periode lima tahun, sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mamuju merupakan kajian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tersebut tidak mengabaikan dampak lingkungan, baik positif maupun negatif. KLHS berfungsi untuk menilai kelayakan lingkungan dari rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dengan memperhitungkan faktor-faktor ekologis, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

KLHS, sebagai instrumen dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan atau memperbaiki kebijakan pembangunan dalam RPJMD, agar lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan di masa depan. Dengan demikian, RPJMD dan KLHS saling terkait dalam memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

1.3.6 Hubungan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2025-2045 yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.

1.3.7 Hubungan RPJMD dan Rencana Strategis SKPD

Rencana Strategis (Renstra) SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;

1.3.8 Hubungan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju

RKPD Kabupaten Mamuju berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

1.3.9 Keterkaitan RPJMD dengan kebijakan sektoral

RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat, karena kebijakan sektoral tersebut dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perumusan isu strategis dalam RPJMD kabupaten.

Keterkaitan antara RPJMD dan kebijakan sektoral terletak pada bagaimana RPJMD kabupaten mengintegrasikan prioritas nasional dalam konteks lokal. Kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pusat berfungsi sebagai acuan dan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah, agar pembangunan yang dilakukan di tingkat daerah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan dapat mendukung pencapaian target-target sektoral yang lebih luas.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai:

a. Pedoman bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
b. Pedoman pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
c. Pedoman bagi *stakeholders* untuk ikut memberikan kontribusi sebesar besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 ini adalah:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan dan juga sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
c. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.
e. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamuju sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mamuju periode 2025-2029.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Mamuju secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

Selain itu, bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mamuju untuk jangka menengah. Bab ini juga memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

Kemudian, bab ini juga menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga memuat Pengembangan Wilayah Terpadu jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. Bab ini juga menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah beserta pagu indikatif pendanaannya. Dalam bab ini juga ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Mamuju dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RPJMD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RPJMD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Mamuju secara geografis terletak pada 10º 38' 110" – 20º 54' 552" Lintang Selatan dan 110º 54' 47" – 130º 5' 35" Bujur Timur. Mamuju berada di tepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan terdapat Teluk Lebani. Ketinggian wilayah Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah ± 4.936.02 km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Mamuju terdiri dari 11 Kecamatan yang dibagi menjadi 13 Kelurahan, dan 88 Desa, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan dan Desa di setiap Kecamatan Kabupaten Mamuju

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Bonehau		9	Desa	Banua Ada
				Bonehau
				Buttu Ada
				Hinua
				Kinatang
				Lumika
				Mappu
				Salutiwo
				Tamalea
Kalukku	4	10	Desa	Belang Belang
				Beru-Beru
				Guliling

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Kabuloang
				Kalukku Barat
				Keang
				Pammulukang
				Pokkang
				Sondoang
				Uhaimate
			Kelurahan	Bebanga
				Kalukku
				Sinyonyoi
				Sinyonyoi Selatan
Kalumpang		13	Desa	Batu Makkada
				Kalumpang
				Karama
				Karataun
				Kondo Bulo
				Lasa’
				Limbong
				Makkaliki
				Polio
				Salumakki
				Sandapang
				Siraun
				Tumoga
Kepulauan Balabalakang		2	Desa	Balabalakang Barat
				Balabalakang Timur
Mamuju	4	4	Desa	Bambu
				Batu Pannu
				Karampuang
				Tadui
			Kelurahan	Binanga
				Karema
				Mamunyu
				Rimuku
Papalang		9	Desa	Batu Ampa
				Boda-Boda
				Bonda
				Papalang
				Salukayu
				Sisango
				Sukadamai
				Toabo
				Topore

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Sampaga		7	Desa	Bunde
				Kalonding
				Losso
				Salubarana
				Sampaga
				Tanambuah
				Tarailu
Simboro dan Kepulauan	2	6	Desa	Botteng
				Botteng Utara
				Pati'di
				Saletto
				Sumare
				Tapandullu
			Kelurahan	Rangas
				Simboro
Tapalang	3	7	Desa	Bela
				Kopeang
				Orobatu
				Rantedoda
				Taan
				Takandeang
				Tampalang
			Kelurahan	Dayanginna
				Galung
				Kasambang
Tapalang Barat		7	Desa	Ahu
				Dungkait
				Labuang Rano
				Lebani
				Pangasaan
				Pasabu
				Tanete Pao
Tommo		14	Desa	Buana Sakti
				Campaloga
				Kakullasan
				Kalepu
				Leling
				Leling Barat
				Leling Utara
				Malino
				Rantemario
				Saludengen
				Sandana
				Tamejarra
				Tamemongga

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Tommo

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2024

Kecamatan terluas yang berada di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah 1.580,07 km^2 atau 32,01% dari luas keseluruhan Kabupaten Mamuju, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bala-balakang dengan luas wilayah 5,31 km^2 atau hanya 0,11% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Mamuju. Ibukota Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Mamuju memiliki luas 224,90 km^2. Berdasarkan jarak terhadap ibu kota kabupaten, jarak terjauh terdapat pada Kecamatan Balabalakang yang memiliki jarak sekitar 118,62 km, sedangkan jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Mamuju yang merupakan sebagai ibukota kabupaten.

Untuk lebih jelas mengenai letak dan luas Kabupaten Mamuju, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Luas Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
Tapalang	Galung	10	284,42	5,76
Tapalang Barat	Dungkait	7	110,84	2,25
Mamuju	Binanga	8	224,90	4,56
Simboro	Rangas	8	140,11	2,84
Kepulauan Bala balakang	Pulau Salissingan	2	5,31	0,11
Kaluku	Kalukku	14	460,65	9,33
Papalang	Topore	9	200,69	4,07
Sampaga	Bunde	7	110,96	2,25
Tommo	Campaloga	14	987,90	20,01
Kalumpang	Kalumpang	13	1.580,07	32,01
Bonehau	Bonehau	9	830,17	16,82

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

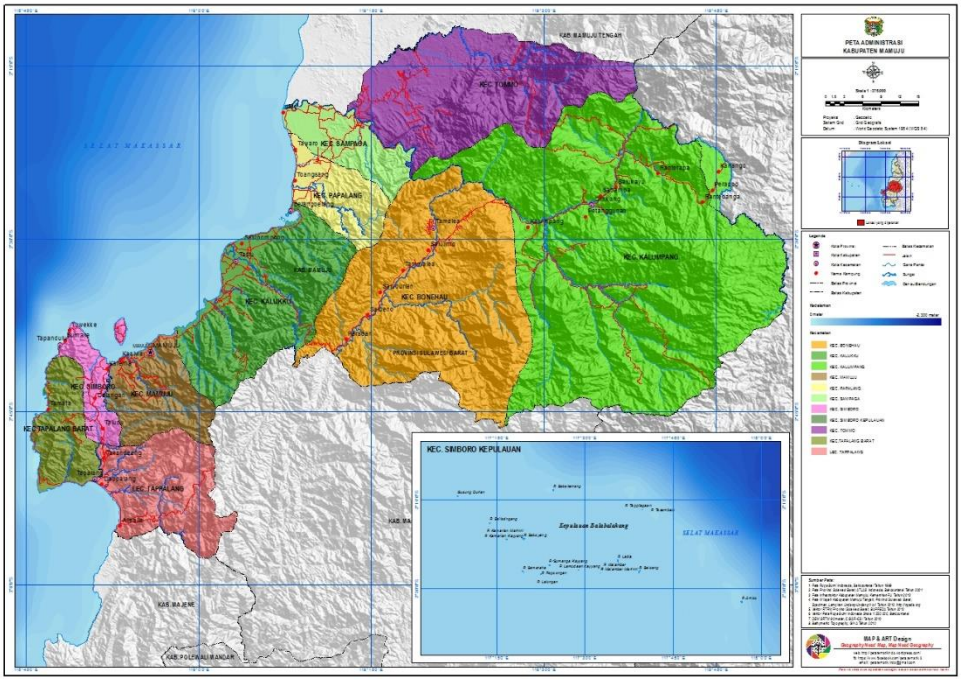

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Mamuju
Sumber: Mamuju Dalam Angka, 2025

Secara geologi, wilayah Kabupaten Mamuju tersusun oleh batuan formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapili, breksi bersisipan lava, batu pasir dan batu lempung. Sedangkan wilayah lembah yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema tersusun atas formasi Mamuju berupa napal, kalkerenit dan batu gamping koral bersisipkan tuf dan batu pasir. Kota Mamuju memiliki beberapa sungai-sungai besar, diantaranya adalah Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan Sungai Malunda, dll.

a. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan tidak curam dengan kelerengan antara 15-45%. Kondisi ini berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai hingga agak curam.

Dari segi topografi Kabupaten Mamuju secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 395 mdpl. Kemiringan lereng yang memiliki porsi terbesar adalah kemiringan antara 12-25% dengan luas cakupan sebesar 224.910 Ha. Kemiringan lereng seperti ini terdapat hampir di semua

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dengan wilayah Kecamatan Tapalang yang memiliki porsi terbesar seluas 32.613 Ha.

b. Geologi

Berdasarkan penelitian lapangan, struktur geologi daerah Mamuju dan sekitarnya terbentuk setelah pengendapan Formasi Mamuju yang berumur Miosen Akhir dan Formasi Larian yang berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal (Ratman dan Atmawinata, 1993), yang diakibatkan oleh gaya kompresi regional barat–timur. Gaya kompresi ini diperkirakan berhubungan dengan peristiwa tumbukan antara benua mikro (pecahan Benua Australia) dengan Mintakat Geologi Busur Magmatik Tersier Sulawesi Barat yang mencapai klimaksnya pada Miosen Akhir (Coffield dkk, 1993).

c. Hidrologi

Keadaan hidrologi Kabupaten Mamuju, berdasarkan hasil observasi lapangan dibedakan antara lain air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah permukaan (air tanah). Air dibawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

d. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Mamuju tergolong cukup basah sampai sangat basah, yang menurut klasifikasi iklim oldeman, digolongkan kedalam kelas iklim C2, C1, B2 & B1 (mayoritas) dan A yang digolongkan sebagai cukup basah sampai sangat basah. Variasi jumlah bulan kering dari nol sampai dua hingga tiga bulan pertahun. Jumlah curah hujan tahunan dapat mencapai sekitar 5.119,8 mm di tahun 2020. Musim hujan dominan terjadi sepanjang bulan januari hingga november dengan peningkatan terbesar pada bulan oktober yaitu sebesar 519,2 mm, sedangkan terendah pada bulan Desember sebesar 55,9 mm.

e. Penggunaan Lahan

Luas lahan sawah di Kabupaten Mamuju adalah sekitar 15.395 ha atau 3,12 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten ini.

Lahan sawah tersebut menyebar hampir di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Mamuju dan Balabalakang, Kecamatan yang memiliki lahan sawah yang terluas adalah Kecamatan Tommo yaitu sekitar 5.295 ha dan Kecamatan Kalukku sekitar 3.493 ha.

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju menetapkan adanya PKNp Matabe yang akan memberikan arahan pengembangan Kecamatan Simboro sebagai pusat kota Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya pengembangan tersebut akan disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tiap kecamatan sehingga akan semakin jelas memberikan arahan pembangunan di Kabupaten Mamuju.

Gambar 2. 2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mamuju

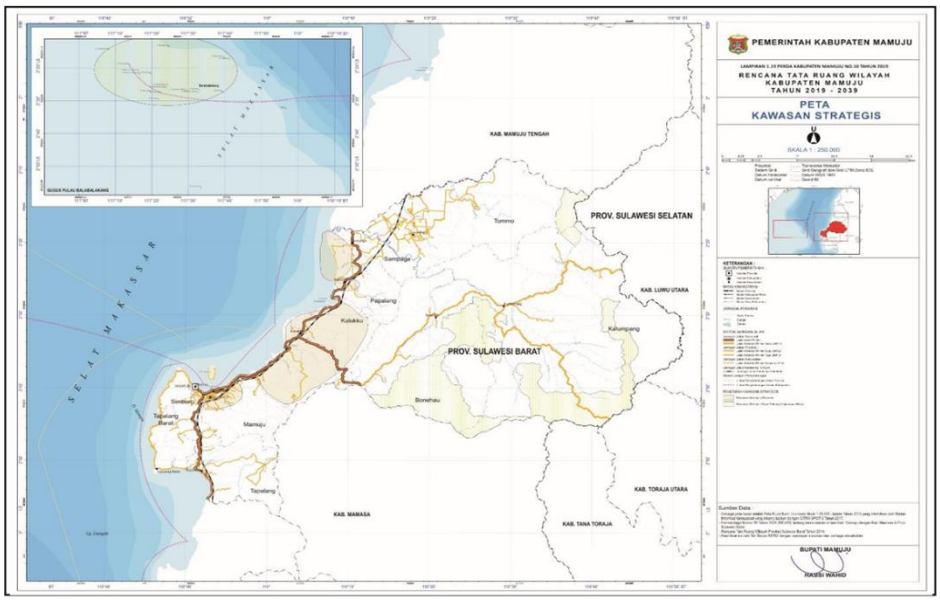

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju juga ditetapkan sebagai wilayah dengan pengembangan kawasan konservasi dan pengembangan pulau kecil sesuai dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat melalui peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata konservasi perairan, peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelola wisata alam

dan wisata bahari secara berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Bahari, peningkatan kapasitas usaha dan investasi sektor pariwisata bahari. Selain itu, pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, pengembangan input produksi perikanan budidaya, dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistic perikanan.

Selain itu, Rencana pembangunan jalur kereta api sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap dalam tiga periode waktu strategis. Pada periode pertama tahun 2025–2029, fokus diarahkan pada pembangunan jalur awal yang menjadi pondasi jaringan transportasi kereta api di wilayah tersebut, mencakup pembebasan lahan, pembangunan prasarana dasar, serta pengadaan sarana pendukung. Selanjutnya, pada periode 2030–2034, pengembangan diarahkan pada perluasan jaringan, peningkatan kapasitas lintasan, dan integrasi konektivitas dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan, serta kawasan industri untuk memperkuat arus distribusi barang dan penumpang. Memasuki periode 2035–2039, pembangunan difokuskan pada penyempurnaan jalur, modernisasi sistem operasi, dan penerapan teknologi transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga diharapkan mampu menciptakan jaringan kereta api yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara jangka panjang.

Kemudian, pengembangan wilayah juga berfokus pada kecamatan Kalukku dan Kecamatan Simboro dengan mempertimbangkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyiapkan dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Simboro dan Pelabuhan Mamuju, sebagai pusat strategis dalam menyuplai berbagai kebutuhan bagi daerah-daerah sekitarnya. Kedua pelabuhan ini berperan penting dalam memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus

menjadi simpul utama dalam mendukung aktivitas perdagangan antarwilayah. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Penyeberangan Tapandullu serta pelabuhan lokal lainnya untuk memperkuat jaringan distribusi logistik daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transportasi, menekan biaya distribusi, dan memperluas jangkauan pelayanan logistik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas wilayah di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

g. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi wilayah Kabupaten Mamuju terdiri dari wilayah dengan topografi >45 persen, terdapat daerah resapan air dan kawasan perkotaan yang setiap tahun mengalami banjir perkotaan. Berdasarkan hasil survey (pendataan dan identifikasi) yang telah dilakukan di lapangan, Kemungkinan bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Mamuju adalah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan tsunami. Daerah rawan bencana tersebut perlu dikenali sedini mungkin agar upaya pencegahan dan evakuasi dapat dilakukan secara efektif. Di Kabupaten Mamuju terdapat 3 kategori bencana yang rentan terjadi yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan gempa bumi.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Mamuju merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi melayani kegiatan skala nasional, internasional, atau beberapa provinsi. PKN Kabupaten Mamuju bermula dari lokasi geografisnya yang strategis, kekayaan sumber daya alam khususnya sumber daya laut dan pertanian, serta potensi pariwisata. Semua faktor ini telah memicu pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan layanan publik di wilayah ini, menjadikannya sebagai pusat pengembangan Nasional. Kabupaten Mamuju memiliki beberapa sektor andalan yang telah menjadi pendorong utama perkembangan wilayah ini, yaitu:

1) Sektor Perikanan

Selain pertanian dan peternakan, potensi Perikanan juga cukup menjanjikan karena Kabupaten Mamuju berbatasan dengan Selat Makassar dengan garis pantai 415 kilometer. Berdasarkan buku Kabupaten Mamuju dalam Angka 2024, produksi perikanan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 adalah 56.451,8 ton. Produksi tersebut terdiri dari hasil perikanan tangkap 21.272,62 ton dan perikanan budidaya sebesar 35.179.18 ton.

2) Sektor Pertambangan

Kabupaten Mamuju memiliki potensi tambang berupa tambang batuan, mineral logam, mineral bukan logam dan batubara yang terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju.

3) Sektor Pariwisata

Menurut data BPS Kabupaten Mamuju, obyek wisata di Mamuju tercatat sebanyak 39 tempat. Sejumlah tempat wisata itu adalah Anjungan Pantai Manakarra, Pantai Bone Tangnga, Pantai Rangas, Pantai Tanjung Ngalo, Gua Dungkait, Gua Lida, Gua Padang Panga', dan Gua Salletto. Kemudian ada pula Air Terjun Lebani, Air Terjun Tammasapi, Pemandian Air Panas Padang Panga', Pemandian So'do, Gunung Anjoro Pitu, Pulau Karampuang, dan Gunung Gandang Dewata. Di kabupaten in, juga terdapat kerajinan tenun Kalumpang Sekomandi khas Kabupaten Mamuju. Kain tenun ini sarat dengan nilai sejarah dan budaya lokal. Sementara makanan khas Mamuju, antara lain bolu paranggi, kue kui-kui, bau peapi, sambusa, dan roti pawa (KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029).

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Berdasarkan pada daya dukung, terdapat hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Mamuju. Secara umum dari tahun 2025 hingga 2029 daya dukung air di Kabupaten Mamuju mash mencukupi meskipun trendnya mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan terdapatnya pengurangan pada laju infiltrasi air hujan. Pengurangan laju infiltrasi air hujan akibat berkurangnya tutupan hutan yang memiliki laju infiltrasi air hujan yang tinggi. Merujuk pada kondisi daya dukung air di Kabupaten Mamuju yang sangat bergantung pada curah hujan, maka direkomendasikan Kabupaten Mamuju dapat meningkatkan upaya pengelolaan potensi air dari air hujan dengan meningkat penutupan lahan melalui rehabilitasi dan pembangunan penyimpan air seperti kolam retensi, waduk, bendungan dan reservoir air tanah.

Selanjutnya terdapat analisis daya dukung ketersediaan air bersih. Ketersediaan pasokan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju tidak mencukupi bila dibandingkan dengan kebutuhan air bersih penduduk. Sampai tahun 2029 diproyeksi pemenuhan air bersih hanya sekitar 9,69%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyediaan air bersih, di mana air yang disalurkan oleh unit produksi belum dalam mencukupi kebutuhan penduduk hingga tahun 2029. Untuk mengatasi situasi ini, langkah-langkah yang perlu diambil adalah penyediaan sumber air tambahan seperti pencarian sumber air tambahan lainnya, pembaharuan dan peningkatan infrastruktur air, dan pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk mengurangi kebocoran air. Selain itu, penting untuk melakukan kampanye edukasi penghematan air serta kerjasama dengan pihak eksternal.

Berkaitan pada daya dukung pangan, produksi beras di Kabupaten Mamuju memiliki trend yang meningkat dengan asumsi terjadi pencetakan sawah pada periode tertentu berdasarkan kebutuhan beras. Selain pencetakan sawah, produksi beras dipengaruhi juga oleh ketersediaan air dan produktivitas varietas yang digunakan. Meskipun proyeksi produksi beras meningkat di Kabupaten Mamuju, namun kebutuhan beras juga terus

mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan produksi beras di Kabupaten Mamuju masih tidak mencukupi dari permintaan beras. Keadaan ini menegaskan bahwa daya dukung pangan dalam keadaan yang tidak mencukupi. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangan, Kabupaten Mamuju akan tetap melakukan impor pangan dari luar daerah hingga tahun 2029.

Persentase pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamuju ditemukan bahwa, pengelolaan persampahan tahun 2029 tanpa upaya tambahan hanya sekitar 46,28%, hal ini berarti terdapat sekitar 53,72% sampah yang tidak terkelola. Untuk itu diperlukan upaya tambahan melalui skenario moderat dan optimis. Skenario moderat dilakukan dengan upaya peningkatan pelayanan melalui penambahan kapasitas pengangkutan sampah ke TPA sebesar 1,4%. Pada akhirnya terjadi peningkatan pengelolaan sampah namun volume sampah yang masuk ke TPA juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan daya tampung TPA akan lebih cepat melampaui kapasitas. Untuk itu diperlukan skenario lain, di mana tidak hanya mengandalkan penanganan sampah ke PA tetapi inga diperlukan upaya pada pengurangan sampah dari sumbernya (KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029).

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Gambar 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

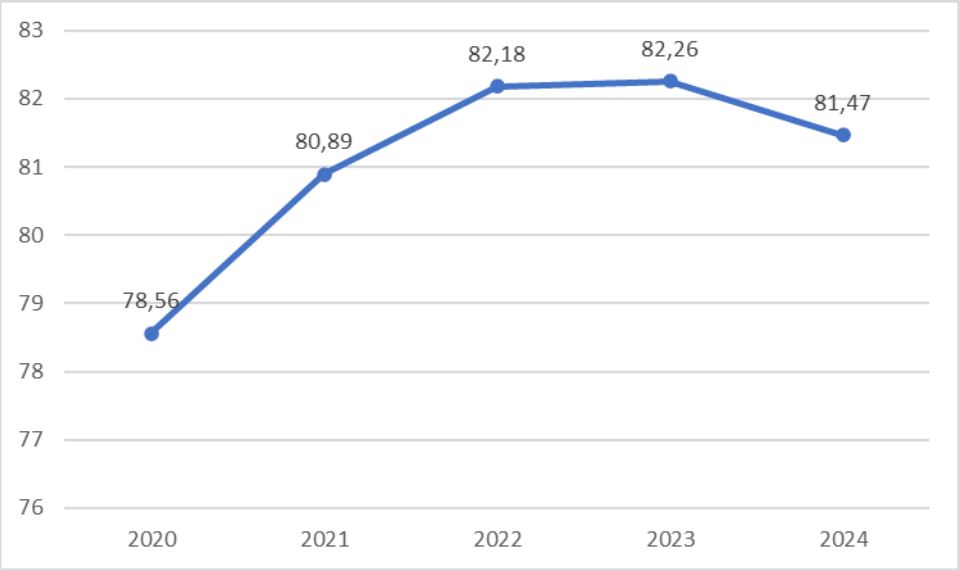

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil selama periode tahun 2020 hingga 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, nilai indeks berada di angka 78,56 yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Peningkatan terjadi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu mencapai 80,89 di tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 82,18 pada tahun 2022. Kinerja ini terus berlanjut dengan capaian 82,26 pada tahun 2023 yang menjadi titik tertinggi selama periode lima tahun tersebut.

Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan indeks menjadi 81,47. Penurunan ini meskipun tidak terlalu signifikan, menunjukkan adanya tantangan baru yang perlu direspons, seperti gangguan distribusi pangan, dampak perubahan iklim terhadap hasil pertanian, atau ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan lokal. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju cukup terjaga, tetapi perlu terus diperkuat dengan

strategi yang adaptif dan berkelanjutan agar tidak terjadi penurunan yang lebih besar di masa mendatang.

Gambar 2. 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

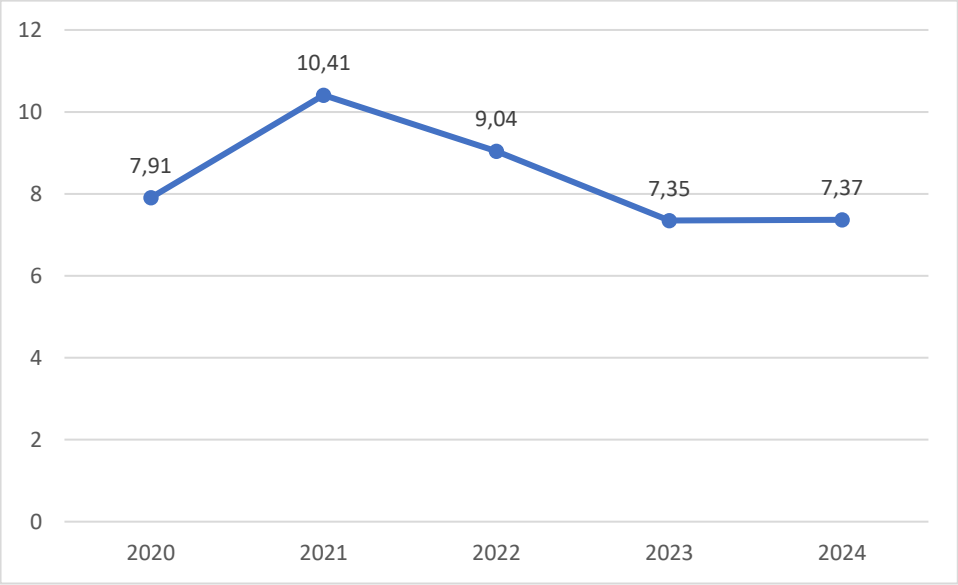

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Data capaian kinerja pada indikator *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan* menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 7,91 persen, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 10,41 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap distribusi pangan, daya beli masyarakat, dan kestabilan harga bahan pokok. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, terlihat adanya upaya perbaikan dari sisi ketahanan pangan daerah. Tahun 2022 mencatat penurunan prevalensi menjadi 9,04 persen, dan terus membaik menjadi 7,35 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, prevalensi berada pada angka 7,37 persen, relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan konsumsi pangan masyarakat, meskipun tantangan masih tetap ada. Konsistensi dalam program penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan aksesibilitas pangan

bergizi, serta edukasi konsumsi sehat perlu terus diperkuat agar indikator ini dapat terus ditekan ke level yang lebih ideal.

a. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Gambar 2. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

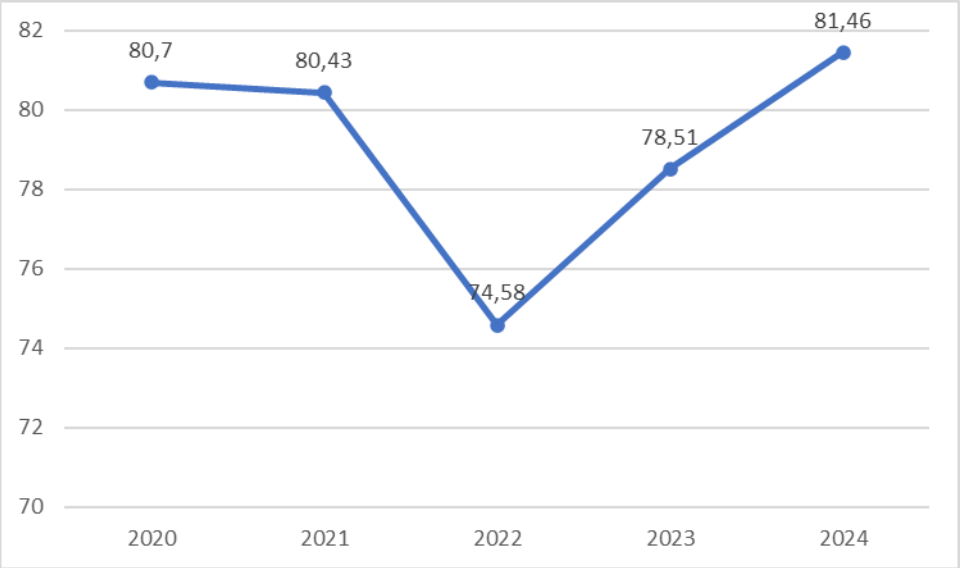

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian akses sanitasi layak berada di angka 78,56 persen. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 80,89 persen dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 82,18 persen. Tren positif ini berlanjut di tahun 2023 dengan persentase tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 82,26 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 81,47 persen.

Secara umum, grafik menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik dalam penyediaan akses sanitasi layak bagi rumah tangga, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan infrastruktur, pertambahan rumah tangga baru tanpa

akses memadai, atau berkurangnya intensitas program sanitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang aman dan layak. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan SDGs poin 6 tentang akses air bersih dan sanitasi untuk semua.

b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Gambar 2. 6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak

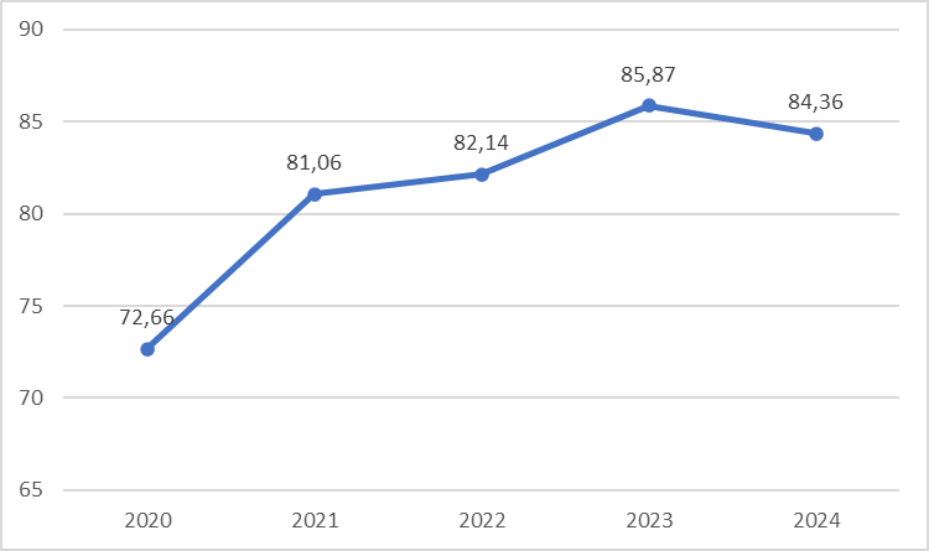

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tercatat sebesar 72,66, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 81,06 pada tahun 2021. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2022, di mana menjadi 82,14, menunjukkan adanya gangguan atau penurunan ketersediaan dan kualitas akses air minum yang layak pada tahun tersebut.

Kemudian, mulai tahun 2023, tren kembali menunjukkan arah positif dengan kenaikan persentase menjadi 85,87, dan pada tahun

2024 capaian ini meningkat lebih lanjut hingga mencapai 84,36.. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan upaya pemulihan dan peningkatan layanan penyediaan air minum layak, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan regulasi, maupun peningkatan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa program peningkatan akses terhadap air minum layak berhasil dikembalikan ke jalur positif. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, dibutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor serta pemeliharaan infrastruktur secara berkala agar seluruh rumah tangga dapat menikmati akses air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-6.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Untuk menggambarkan kondisi lingkungan di Kabupaten Mamuju secara utuh pada tahun 2022. maka perlu dilakukan analisis alternatif skenario kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada level kabupaten, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator komposit yang dibangun dari indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH). Untuk itu dalam pembuatan model IKLH maka terlebih dahulu dibuat model IKA, IKU dan IKTL.

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada tahun 2021, Kabupaten Mamuju mencatat capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 63,33, lebih tinggi dari target sebesar 60,10. Kemudian memasuki tahun 2022, capaian kinerja lingkungan Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan. IKA meningkat menjadi 60,00 (dari target 60,20).

IKA di Kabupaten Mamuju cenderung mengalami penurunan di tahun 2022 ke 2021. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah lokasi dengan indek pencemaran tercemar ringan dan sedang.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 92,96, juga melampaui target 89,58. Memasuki tahun 2022, capaian kinerja lingkungan Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan. IKU naik signifikan menjadi 94,19 dari target 89,69.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tahun 2021, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) berada di angka 83,25 dari target 83,41. Kemudian di tahun 2022, capaian kinerja lingkungan Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan. IKTL menunjukkan perbaikan dengan capaian 83,25 dari target 84,26. Kenaikan ini adalah hasil dari upaya tambahan dilakukan dengan meningkatkan tutupan lahan hutan lebih besar dari sebelumnya dan mengurangi pengurangan luasan tutupan hutan primer.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 dan 2022, terlihat adanya tren peningkatan capaian yang menunjukkan arah perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut. IKLH 2021 secara keseluruhan mencapai 79,69 dari target 77,14. Di tahun 2022, 78,94, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dan di 2024 IKLH Kabupaten Mamuju Adalah 74,66. Penurunan capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas udara dan air, serta pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Upaya perbaikan kualitas air dan lahan perlu terus diperkuat, termasuk pengendalian limbah, konservasi sumber daya air, serta rehabilitasi dan tata kelola ruang yang lebih berwawasan lingkungan.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) mengukur risiko bencana dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: *hazard* (bahaya), *vulnerability* (kerentanan), dan *capacity* (kapasitas adaptif). Wilayah Kabupaten Mamuju, bersama daerah lain di

Sulawesi Barat (Sulbar), tergolong dalam **zona risiko tinggi** (kategori "merah") dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.7 Aspek Demografi

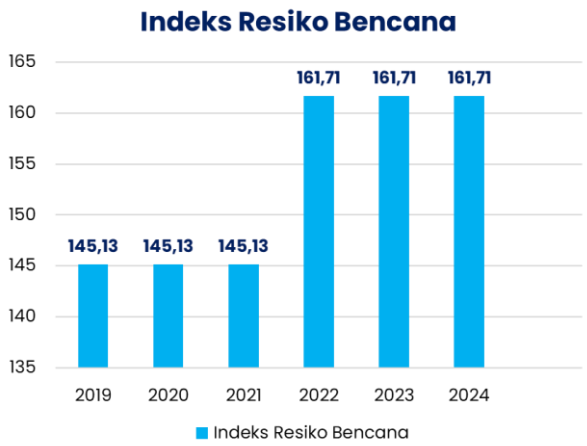

Aspek Demografi yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan penduduk. Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten mamuju dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 1.906,12 jiwa per km^2, karena luas wilayahnya yang sempit. Sementara itu di Kecamatan Kecamatan Kalumpang merupakan wilayah dengan kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan sebesar 6,87 jiwa per km^2.

1) Jumlah Penduduk

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tapalang	21.374
2	Tapalang barat	12.107
3	Mamuju	66.427
4	Simboro	39.505
5	Balabalakang	2.242
6	Kalukku	60.155
7	Papalang	24.768
8	Sampaga	15.809
9	Tommo	24.633
10	Kalumpang	12.020
11	Bonehau	9.342
Jumlah		278,764

Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka (BPS Kabupaten Mamuju, 2025)

Berdasarkan data 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 278.764 jiwa yang tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan Mamuju tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 66.427 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kalukku dengan 60.155 jiwa, dan Kecamatan Simboro dengan 39.505 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Balabalakang, yaitu 2.242 jiwa, yang merupakan wilayah kepulauan. Persebaran penduduk yang tidak merata ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur yang proporsional dan berkeadilan di setiap kecamatan.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mamuju 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2024 (%)
Tapalang	21.374	0,19
Tapalang Barat	12.107	0,3
Mamuju	66.427	0,29
Simboro	39.505	0,43
Kepulauan Bala Balakang	2.242	0,17
Kalukku	60.155	0,07
Papalang	24.768	0,08
Sampaga	15.809	0,75
Tommo	24.633	0,27
Kalumpang	12.020	0,14
Bonehau	9.342	0,52
Kabupaten Mamuju	**288.382**	**0,29**

Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka (BPS Kabupaten Mamuju, 2025)

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju pada 2024 menunjukkan tren yang bervariasi antar kecamatan. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk kabupaten berada pada angka 0,29% per tahun. Kecamatan Sampaga mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 0,75%, diikuti oleh Kecamatan Papalang dengan 0,56%, dan Kecamatan Mamuju sebesar 0,29%, yang sejalan dengan jumlah penduduknya yang relatif besar. Di sisi lain, Kecamatan Simboro mengalami pertumbuhan

paling rendah sebesar 0,12%, disusul oleh Kecamatan Kepulauan Bala Balakang (0,17%) dan Kalumpang (0,14%). Variasi laju pertumbuhan ini mencerminkan dinamika migrasi, kelahiran, dan mobilitas penduduk yang berbeda-beda di setiap wilayah.

3) Rasio Penduduk

Tabel 2. 5 Rasio Penduduk Kabupaten Mamuju 2024

No	Kecamatan	Rasio jenis Kelamin
1	Tapalang	104
2	Tapalang barat	107
3	Mamuju	103
4	Simboro	104
5	Balabalakang	108
6	Kalukku	105
7	Papalang	104
8	Sampaga	102
9	Tommo	109
10	Kalumpang	110
11	Bonehau	110
Jumlah		105

Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka, 2025

Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Mamuju tahun 2024 menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin berada pada angka 105, yang berarti terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Beberapa kecamatan memiliki rasio di atas rata-rata kabupaten, seperti Kalumpang (110), Bonehau (112), dan Tommo (109), yang menunjukkan dominasi penduduk laki-laki di wilayah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Mamuju memiliki rasio paling rendah yaitu 103, namun tetap mencerminkan keseimbangan gender yang cukup baik. Pemantauan rasio jenis kelamin penting

untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan publik yang responsif gender, serta mendukung perencanaan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

4) **Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
Tapalang	7,41	75,15
Tapalang Barat	4,20	109,23
Mamuju	23,03	295,36
Simboro	13,70	281,96
Kepulauan Bala Balakang	0,78	422,22
Kalukku	20,86	130,59
Papalang	8,59	123,41
Sampaga	5,48	142,47
Tommo	8,54	24,93
Kalumpang	4,17	7,61
Bonehau	3,24	11,25
Kabupaten Mamuju	100,00	58,42

Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka 2025

5) Struktur Kependudukan

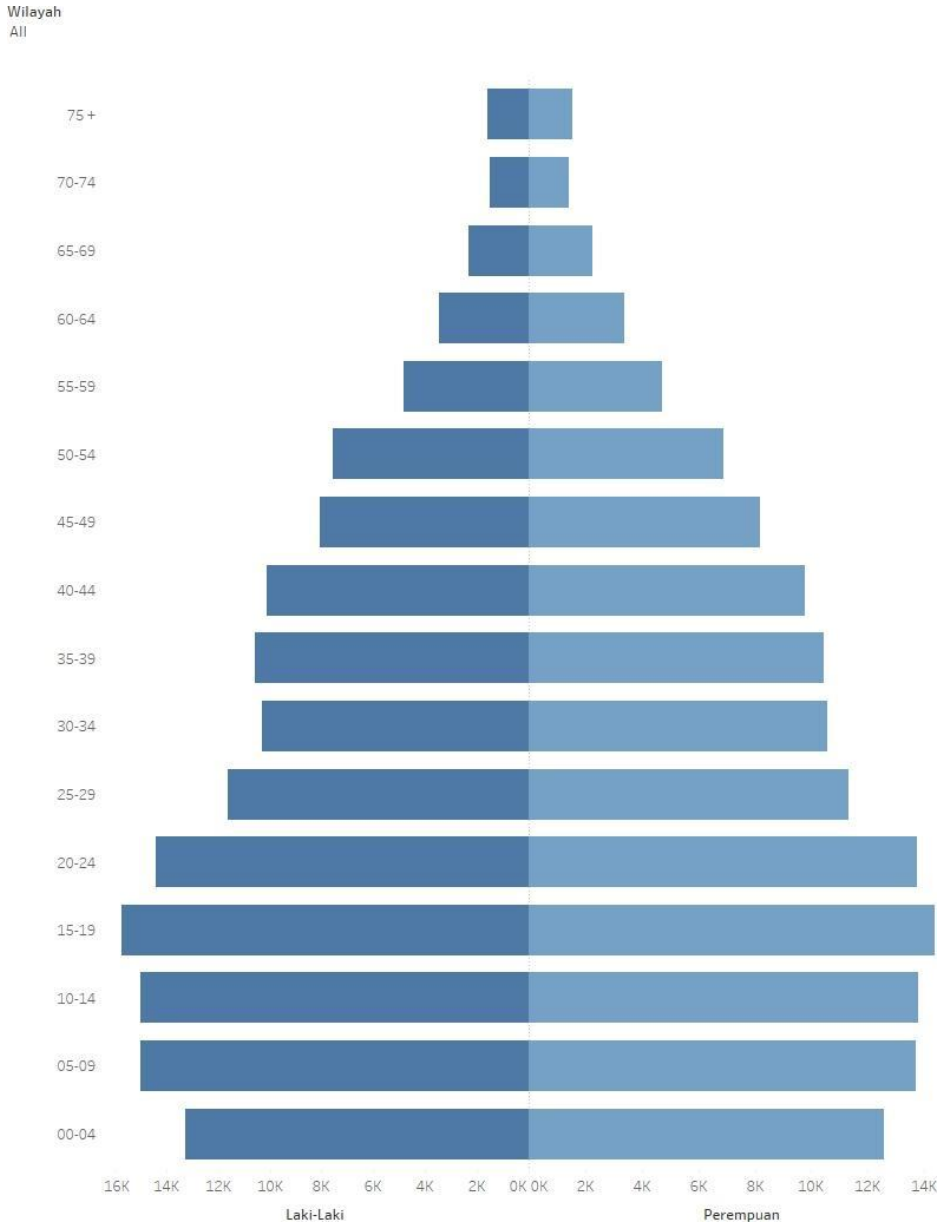

Gambar 2. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Mamuju 2024
Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka 2025

Struktur kependudukan Kabupaten Mamuju berdasarkan piramida penduduk menunjukkan pola ekspansif dengan jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) dan usia produktif awal (15–29 tahun) yang cukup besar, mencerminkan tingginya angka kelahiran dan potensi bonus demografi. Dominasi usia produktif (15–64 tahun) menandakan bahwa Mamuju memiliki peluang besar dalam pembangunan ekonomi jika sumber daya manusianya dikelola

secara optimal. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) masih relatif kecil, menggambarkan tingkat harapan hidup yang sedang. Kondisi ini menuntut perhatian pada penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja untuk mendukung pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.

6) Proyeksi penduduk

Tabel 2. 7 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju 2025-2029

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
292.395	301.900	306.562	311.224	315.886	320.548	352.210

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk 2025-2035

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju diperkirakan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2029. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 293.395 jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 320.548 jiwa pada tahun 2029. Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang stabil, yang perlu diantisipasi dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang responsif, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sosial dan ekonomi untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Secara umum, keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu dapat ditinjau dari progresi aspek sosial dan perekonomian. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah, makin baik kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat akan mengungkit daya saing dan keberdayaan masyarakat.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil.

Selain IPM, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dinilai dari tiga fokus yaitu: 1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang ditinjau dari PDRB, Tingkat Inflasi, Kemiskinan dan ketimpangan; 2. Fokus Kesejahteraan Sosial ditinjau dari Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kriminalitas; serta 3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peranan penting dalam memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi dan perkembangan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, selama periode tertentu. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Pada dasarnya, PDRB menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua bisnis dan unit ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan

nilai tambah barang dan jasa yang diukur menggunakan harga pada saat itu, sementara PDRB dengan harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur dengan harga patokan pada tahun tertentu, yang di Indonesia adalah tahun 2000.

PDRB memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kinerja ekonomi di suatu wilayah. Hal ini memungkinkan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi. Melalui analisis PDRB, perubahan dalam nilai tambah ekonomi dapat dipantau seiring berjalannya waktu, memberikan indikator yang relevan untuk menilai efektivitas langkah-langkah pembangunan serta upaya ekonomi lainnya.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju	Persentase	-2,29	2,35	3,24	4,37	6,47
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat	Persentase	-2,34	2,57	2,31	5,25	4,76

Sumber: BPS Prov.Sulawesi Barat 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,29% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Namun, kondisi ini perlahan membaik, ditandai dengan pertumbuhan positif yang terus meningkat hingga mencapai 6,47% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa Mamuju berhasil melakukan pemulihan ekonomi secara bertahap dan konsisten, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi perencanaan pembangunan ke depan,

karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil merupakan salah satu pondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju menunjukkan kinerja ekonomi yang kompetitif. Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami kontraksi sebesar -2,34% pada tahun 2020, namun pertumbuhannya relatif lebih lambat, dengan capaian sebesar 4,76% pada tahun 2024. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Mamuju memiliki daya dorong ekonomi yang lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, yang kemungkinan didukung oleh sektor-sektor unggulan lokal, investasi daerah, dan peningkatan konsumsi masyarakat pasca pandemi.

b. Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan adalah jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi makanan dasar dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang benar-benar dikonsumsi oleh penduduk, lalu dihitung dalam satuan kalori per orang per hari. Dengan kata lain, garis kemiskinan menunjukkan jumlah minimum yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ukuran garis kemiskinan ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Mamuju dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Perkembangan Garis Kemiskinan Terhadap Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan Kab.Mamuju	Rp/Kapita/ Bulan	277,078	287,896	319,586	340,795	356.903
Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi	Rp/Kapita/ Bulan	352,874	384,598	426,299	433,131	454.879

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Barat						
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/ Bulan	458,947	472,525	504,469	550,448	582.932

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat, 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp277.078 per kapita per bulan dan meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp356.903 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan biaya hidup serta tekanan inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat, garis kemiskinan Mamuju cenderung lebih rendah. Provinsi mencatat angka yang lebih tinggi yaitu Rp454.879 pada tahun 2024, yang dapat dikaitkan dengan struktur ekonomi wilayah yang lebih luas dan kompleks. Sementara itu, secara nasional, garis kemiskinan bahkan jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp582.932 per kapita per bulan pada tahun yang sama.

Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan biaya hidup dan kebutuhan dasar antarwilayah, sekaligus menegaskan perlunya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif dan berbasis lokal. Meskipun kenaikan garis kemiskinan tidak selalu menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin, tren ini tetap menjadi indikator penting yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, terutama dalam memastikan ketersediaan kebutuhan dasar dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.

Tabel 2. 10 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,92	7,46	7,63	7,57	7,15

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,92 persen, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 7,46 persen pada tahun 2021. Lonjakan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi serta penurunan aktivitas usaha masyarakat. Pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali naik tipis menjadi 7,63 persen, sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan di tahun-tahun berikutnya, yaitu 7,57 persen pada 2023 dan turun lebih lanjut menjadi 7,15 persen pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Mamuju yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, serta kondisi internal seperti ketersediaan lapangan kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta efektivitas program perlindungan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa pemulihan ekonomi mulai berjalan, meskipun masih diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tajam dan berkelanjutan untuk menekan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju antara lain program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non-tunai, beasiswa untuk siswa miskin, serta program dari Pemerintah Kabupaten Mamuju, salah satunya adalah bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP). FOP bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran non-konsumsi rumah tangga, meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, mengembangkan usaha kecil dan mikro, serta meningkatkan sinergi dan kerjasama antara

sektor pemerintah, swasta, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat dalam penanganan masalah kemiskinan.

Tabel 2. 11 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Mamuju	Ribu Jiwa	20,57	22,30	23,26	23,50	22,64
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat	Ribu Jiwa	152,02	157,19	165,72	164,14	162,19
Jumlah Penduduk Miskin Nasional	Ribu Jiwa	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat, 2025

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan secara nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, jumlah penduduk miskin di ketiga level mengalami tren yang berbeda, yang mencerminkan dinamika ekonomi dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah. Di Kabupaten Mamuju, jumlah penduduk miskin meningkat dari 20,57 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 23,50 ribu jiwa pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun menjadi 22,64 ribu jiwa di tahun 2024. Peningkatan ini cukup signifikan, terutama antara tahun 2020 hingga 2022, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi lokal, kemungkinan akibat dampak pandemi dan bencana alam.

Sementara itu, di tingkat Provinsi Sulawesi Barat, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 152,02 ribu jiwa (2020) menjadi 165,72 ribu jiwa (2022), kemudian menurun pada dua tahun berikutnya hingga menjadi 162,19 ribu jiwa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi secara umum mampu

menurunkan jumlah penduduk miskin setelah mencapai puncak di tahun 2022. Di sisi lain, pada tingkat nasional, terjadi peningkatan dari 26.424,02 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 27.542,77 ribu jiwa pada tahun 2021, namun kemudian terjadi penurunan konsisten hingga mencapai 25.219,20 ribu jiwa pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan nasional cenderung lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan setelah tahun 2021 dibandingkan dengan capaian di daerah.

Jika dibandingkan, Kabupaten Mamuju menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin yang relatif lebih tajam di awal periode dibandingkan dengan provinsi dan nasional, serta penurunan yang lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju masih lebih berat dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten.

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 mencapai 6.121 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu mereka yang pengeluarannya jauh di bawah standar minimum kebutuhan dasar. Kenaikan ini terjadi meskipun secara umum persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan, yakni dari 11,49% pada Maret 2023 menjadi 11,21% pada Maret 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara agregat kemiskinan umum menurun, jumlah penduduk yang berada dalam kategori termiskin justru mengalami peningkatan signifikan di Mamuju. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan distribusi bantuan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan atau terpencil. Oleh karena itu, diperlukan

kebijakan yang lebih terfokus dan menyentuh akar permasalahan, guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

c. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita Salah satu indikator lain dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB per Kapita. PDRB per Kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, di mana semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk, meskipun masih terdapat keterbatasan indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro.

Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu dalam periode tertentu, maka akan dihasilkan angka PDRB perkapita. PDRB per kapita yang dimaksud adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sehingga menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk sesuai dengan periode waktu tertentu tersebut.

Tabel 2. 12 PDRB Per Kapita Kabupaten Mamuju

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Miliar Rp)	11.700	12.421	13.385	14.402	16.024
Jumlah Penduduk (jiwa)	300,32	282,84	287,62	292,40	297,14
PDRB perkapita HB (Juta Rp)	42,08	43,92	46,54	49,26	53,93
PDRB perkapita HK (Juta Rp)	29,29	29,47	29,93	30,76	32,22

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan persentase dari total angkatan kerja yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Angkatan kerja meliputi individu yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja, memiliki pekerjaan, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti mereka yang aktif mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha, mereka yang merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi, dan individu yang tidak mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan meskipun belum memulai aktivitas.

Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka adalah langkah penting dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah atau negara. Hal ini membantu pemerintah, peneliti, dan organisasi lainnya untuk memahami sejauh mana lapangan kerja tersedia, ketimpangan dalam akses ke pekerjaan, dan dampak dari kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, data mengenai tingkat pengangguran terbuka juga dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan kebijakan yang bertujuan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di masyarakat.

Tabel 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengangguran Terbuka	Persentase	3991	5723	4776	4265	4452
TPT Kabupaten Mamuju	Persentase	2,89	3,79	3,06	2,99	2,77
TPT Sulawesi Barat	Persentase	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju menunjukkan dinamika yang berfluktuasi selama periode 2020-

2024. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran mencapai angka tertinggi, yaitu 5.723 orang, sedangkan tahun 2020 mencatat angka terendah sebesar 3.991 orang. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 4.265 orang, jumlah pengangguran kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 4.452 orang. Dari sisi persentase, TPT Kabupaten Mamuju mengalami puncaknya pada tahun 2021 sebesar 3,79%, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 2,77% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Sementara itu, TPT Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 3,32% pada tahun 2020 menjadi 2,68% di tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana TPT mencapai 2,34%. Jika dibandingkan, TPT Kabupaten Mamuju sempat lebih rendah daripada tingkat provinsi pada tahun 2020 dan 2021, namun kemudian lebih tinggi di tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, TPT Mamuju kembali lebih rendah dengan selisih tipis. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta program pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pertumbuhan tenaga kerja dapat seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga angka pengangguran dapat ditekan lebih lanjut.

e. Indeks Gini

Indeks Gini, atau koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur sejauh mana ketimpangan pendapatan terjadi. Indeks ini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz, yang menggambarkan pengeluaran kumulatif dan membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi yang merata di seluruh persentase penduduk. Indeks ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana pendapatan tersebar di antara berbagai kelompok pengeluaran, baik pengeluaran untuk pangan maupun non-pangan. Rentang nilai Indeks Gini adalah antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, semakin merata pendapatan di masyarakat, sedangkan semakin mendekati 1, semakin besar ketimpangan pendapatan. Berikut adalah klasifikasi ketimpangan yang lebih rinci:

Tabel 2. 14 Indeks Gini di Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini	Indeks	0,37	0,37	0,39	0,37	N/A
Kriteria Ketimpangan	Kriteria	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju 2024

Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk melihat bagaimana pendapatan tersebar di suatu kelompok orang. Nilai Indeks Gini berada di antara 0 dan 1, di mana 0 berarti pendapatan terbagi rata (semua orang memiliki pendapatan yang sama), dan 1 berarti pendapatan sangat tidak merata (satu orang memiliki semua pendapatan). Semakin tinggi angka Indeks Gini, semakin tidak merata pendapatan. Pada tahun 2020 dan 2021, Indeks Gini stabil di angka 0,37, yang menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang masih relatif tinggi. Kemudian, pada tahun 2022, angka Indeks Gini meningkat lagi menjadi 0,39, menunjukkan kembalinya ketidakmerataan pendapatan. Pada tahun 2023, Indeks Gini kembali mencapai 0,37. Perubahan nilai Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mencerminkan fluktuasi dalam distribusi

pendapatan sepanjang periode tersebut, yang penting untuk dipahami dalam rangka merencanakan kebijakan yang dapat mengurangi ketidakmerataan pendapatan.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi ini memiliki arti yang luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup saat lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar, yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan capaian pembangunan dalam hidup yang layak.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial memiliki hubungan positif dan sejalan dengan IPM. Artinya, semakin tinggi tingkat IPM, maka pembangunan menuju kesejahteraan akan semakin dekat, dan jika kesejahteraan sosial tercapai, IPM suatu daerah akan tinggi. Untuk lebih jelasnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju dibandingkan dengan wilayah se-Sulawesi Barat pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Setiap Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Prov/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	66,91	71,10	71,64	72,44	73,25
Polewali Mandar	68,42	67,85	68,42	69,24	69,88
Mamasa	66,02	66,97	67,53	68,14	68,68

Prov/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju	68,15	69,80	70,35	71,07	71,86
Pasangkayu	67,79	69,37	69,94	70,42	71,04
Mamuju Tengah	65,71	66,38	67,07	67,63	68,53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Kabupaten Mamuju menunjukkan kemajuan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2020-2024 dengan peningkatan dari 68,15 menjadi 71,86, menempatkannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan IPM tertinggi kedua setelah Majene (73,25). Polewali Mandar mencatat pertumbuhan stabil di kisaran 68-69, sementara kabupaten lainnya seperti Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah juga menunjukkan peningkatan bertahap meskipun dengan angka lebih rendah. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia di Sulawesi Barat.

g. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat di suatu wilayah memiliki kesempatan dan kemampuan dalam memanfaatkan layanan keuangan formal, baik perbankan maupun non-bank. Indeks ini menggambarkan tingkat inklusi keuangan yang meliputi akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, maupun layanan digital seperti mobile banking dan fintech. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula keterjangkauan dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat.

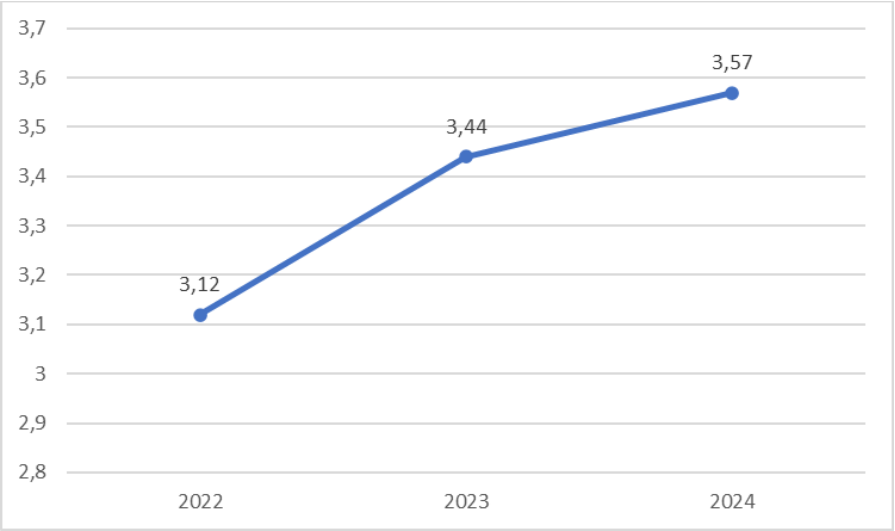

Gambar 2. 8 Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju
Sumber: Bappenas, 2025

Grafik tersebut menggambarkan perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai indeks tercatat sebesar 3,12, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,44, dan kembali naik pada tahun 2024 dengan capaian 3,57. Pola grafik menunjukkan tren positif yang konsisten, tanpa adanya penurunan nilai dari tahun ke tahun.

Kenaikan indeks ini dapat diartikan sebagai hasil dari semakin luasnya jangkauan layanan keuangan formal di daerah, meningkatnya literasi keuangan masyarakat, serta bertambahnya jumlah masyarakat yang menggunakan produk keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi. Pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun 2023 kemungkinan dipengaruhi oleh akselerasi digitalisasi layanan keuangan, termasuk penggunaan aplikasi perbankan dan layanan fintech yang semakin mudah diakses. Sementara itu, peningkatan yang lebih moderat pada tahun 2024 menunjukkan proses penguatan keberlanjutan, di mana layanan keuangan telah menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat namun tantangan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur

digital di daerah tertentu dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terkait produk keuangan formal.

h. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan zakat di Indonesia berjalan secara efektif, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Indeks ini mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menilai peran zakat dalam mendukung pembangunan nasional, seperti kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kesejahteraan umat. Sementara itu, dimensi mikro menitikberatkan pada aspek tata kelola organisasi pengelola zakat, mulai dari kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, hingga inovasi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.

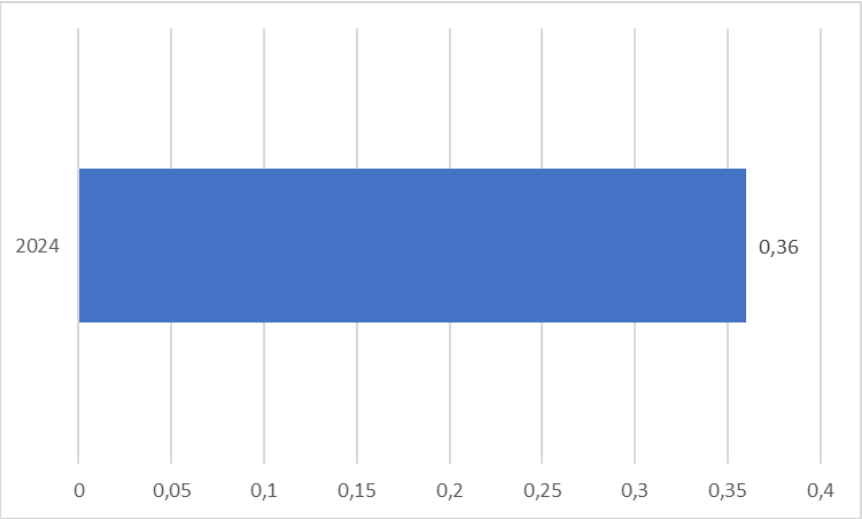

Gambar 2. 9 Indeks Zakat Nasional

Sumber: Bappenas, 2025

Grafik tersebut menunjukkan capaian Indeks Zakat Nasional pada tahun 2024 yang berada pada angka 0,36. Nilai ini merepresentasikan kondisi tata kelola, penyaluran, serta dampak zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski grafik

hanya menampilkan satu titik data untuk tahun 2024, capaian ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai upaya penguatan kelembagaan zakat, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, serta optimalisasi distribusi zakat agar lebih tepat sasaran. Jika dibandingkan dengan potensi zakat yang cukup besar di Indonesia, capaian indeks 0,36 menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masih belum maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat literasi zakat masyarakat yang belum merata, masih terbatasnya inovasi dalam penghimpunan zakat, rendahnya kepatuhan sebagian muzakki, serta tantangan dalam digitalisasi sistem zakat di daerah. Namun demikian, tren peningkatan indeks zakat di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya potensi besar untuk mendorong peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang lebih kuat dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah ukuran statistik yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun seseorang diperkirakan akan hidup berdasarkan kondisi saat ini, termasuk faktor kesehatan, sanitasi, ekonomi, dan layanan medis di suatu wilayah. Ini adalah indikator penting untuk menilai kualitas hidup dan kesehatan suatu populasi. Usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gizi, akses terhadap perawatan kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Berikut adalah perbandingan usia harapan hidup antara Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat:

Tabel 2. 16 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup Kabupaten Mamuju	Tahun	67,52	67,77	68,21	71,79	72,13
Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	65,06	65,25	65,63	70,76	71,03

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Usia harapan hidup saat lahir adalah perkiraan rata-rata panjang usia yang diharapkan bagi bayi yang baru lahir, yang mencerminkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan. Peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Mamuju dari 66,37 tahun pada tahun 2014 menjadi 72,13 tahun pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor kesehatan. Meskipun demikian, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka harapan hidup di Sulawesi Barat yang tercatat sebesar 71,03 tahun pada tahun 2024. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam kualitas layanan kesehatan serta kondisi sosial ekonomi yang ada di berbagai wilayah.

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai kesehatan masyarakat. IKS mencakup 12 indikator yang melibatkan berbagai aspek, seperti kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Dalam Program PIS-PK, terdapat 12 indikator kesehatan yang perlu dicapai oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

IKS dihitung dengan membandingkan jumlah keluarga yang mencapai status sehat berdasarkan 12 indikator di atas, dengan jumlah keluarga yang telah mendapatkan intervensi awal.

Tabel 2. 17 Capaian 12 Indikator PIS-PK Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Keluarga mengikuti program KB *)	41.44	47.14	56.05	63.08
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	71.05	74.64	80.79	84.53
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	80.14	83.74	89.5	91.75
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	74.65	76.69	78.53	80.79
5	Pertumbuhan Balita dipantau	69.25	72.91	77.08	80.65
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	39.03	39.95	52.49	58.17
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	28.16	29.43	33.48	38.67
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	0.31	12.89	20.19	32.36
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	39.12	41.25	41.75	43.35

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	42.73	48.64	63.02	74.67
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	85.56	87.75	89.98	92.95
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	69.81	74.84	78.62	82.86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, 2024

Namun, pada tahun 2024 karena adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga program Indonesia dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) tidak berlanjut dan Beralih ke transformasi kesehatan dengan 6 pilar. Transformasi Kesehatan 6 Pilar adalah inisiatif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem kesehatan nasional. Enam pilar tersebut adalah: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Di banyak daerah, stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor gizi, tetapi juga berkaitan erat dengan pola asuh, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan pendekatan yang holistik dan lintas sektor agar dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dalam konteks ini, penting untuk melihat kondisi terkini prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju sebagai dasar perumusan strategi penanganan yang tepat.

Tabel 2. 18 Prevalensi Stunting di Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (Persen)	30,3	33,8	32,8	38,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, 2025

Prevalensi Stunting di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2024 berdasarkan SSGI adalah sebesar 38,6 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terus berupaya melakukan aksi konvergensi stunting dengan melibatkan kerjasama lintas sektor dengan membentuk Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting Kabupaten Mamuju.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Mamuju menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah rata-rata tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh berbagai jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung berdasarkan pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mamuju pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 19 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama sekolah Kab. Mamuju	Tahun	7,95	7.96	8.09	8,16	8,35
Rata rata lama Sekolah	Tahun	7,89	7,96	8,08	8,13	8,15

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Sulawesi Barat						
Rata rata lama sekolah Nasional	Tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah adalah 7,95 tahun, dan meningkat menjadi 8,35 tahun pada tahun 2024, yang sudah mencapai target sebesar 7,8 tahun. Angka ini sebanding dengan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat, namun masih di bawah angka rata-rata nasional. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,15 tahun, sedangkan rata-rata nasional pada tahun 2024 adalah 8,85 tahun, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat. Jika dikaitkan dengan tingkat kelulusan, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju setara dengan tamat kelas 2 SMP. Oleh karena itu, untuk mencapai RLS maksimal 9 tahun (setara dengan Wajar 9 tahun), masih diperlukan perbaikan dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Asumsinya adalah bahwa peluang anak untuk terus bersekolah pada usia-usia berikutnya sama dengan peluang yang dimiliki oleh penduduk pada usia yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang menggambarkan berapa lama pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perbandingan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Angka Harapan Lama Sekolah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah Kab. Mamuju	Persen/ Tahun	13,19	13,24	13,25	13,26	13,29
Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat	Persen/ Tahun	12,77	12,86	12,87	12,88	12,89
Harapan Lama Sekolah Nasional	Persen/ Tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator perkembangan di bidang pendidikan, yang tercermin dari peningkatan di Kabupaten Mamuju, dari 13,19 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,29 tahun pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat yang tercatat 12,89 tahun 2024, dan juga melebihi rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif, dengan semakin banyak penduduk Kabupaten Mamuju yang melanjutkan pendidikan, di mana anak-anak berusia 7 tahun memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA.

c. Angka Literasi/Numerasi

Berikut adalah tabel capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi (SD, usia 7–15 tahun) di Kabupaten Mamuju berdasarkan data Asesmen Nasional serta Capaian dan Target SPM dari 2021 hingga 2024.

Tabel 2. 21 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	N/A	38,51	43,82	51,24	52,7
Numerasi SD	N/A	29,67	33,23	42,10	51,71
Literasi SMP	N/A	51,34	54,96	57,09	57,76
Numerasi SMP	N/A	50,87	50,58	54,83	54,86

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Mamuju, 2025

Pada tahun 2021, Kabupaten Mamuju mencatat rata-rata skor literasi SD sebesar 38,51, dan numerasi SD sebesar 29,67 serta literasi SMP sebesar 51,34 dan numerasi SMP sebesar 50,87. Pemerintah daerah sendiri telah menetapkan target ambisius: mencakup 100% partisipasi sekolah dan Data capaian riilnya belum diungkap, kemungkinan karena proses pemrosesan laporan Asesmen Nasional dan SPM yang mendalam.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi merupakan pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan kebiasaan dalam membaca serta memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan literasi tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, tetapi juga pada sektor ekonomi, sosial, dan partisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sarana prasarana perpustakaan, program pemberdayaan literasi, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan membaca turut memengaruhi indeks ini. Untuk itu, penting untuk mengetahui posisi dan capaian IPLM Kabupaten Mamuju guna melihat sejauh mana literasi masyarakat telah berkembang dan area mana yang masih perlu diperkuat.

Tabel 2. 22 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mamuju 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	N/A	52,54	43,41

Sumber: Laporan Akhir Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mamuju, 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan partisipasi dalam kegiatan literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Di Kabupaten Mamuju, capaian IPLM menunjukkan tren fluktuatif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Berdasarkan data, pada tahun 2023 indeks literasi masyarakat mencapai angka 52,54, namun mengalami penurunan menjadi 43,41 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan infrastruktur literasi, minimnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, serta kurang optimalnya program pemberdayaan literasi masyarakat. Dalam era transformasi digital saat ini, literasi bukan hanya menyangkut kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital yang menuntut masyarakat mampu mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak.

e. Indeks Literasi Digital

Di era transformasi digital, literasi digital menjadi kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam ruang digital. Indeks Literasi Digital mencerminkan tingkat pemahaman, keterampilan, dan keamanan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara bijak. Literasi digital tidak hanya relevan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga penting dalam menjaga keamanan data pribadi, menghindari disinformasi, dan membentuk masyarakat digital yang inklusif. Melihat hal tersebut, pemetaan terhadap tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Mamuju menjadi langkah penting dalam menyusun strategi penguatan kapasitas digital masyarakat ke depan.

Tabel 2. 23 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mamuju 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital	N/A	N/A	31,06	43,88	41,24

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital RI, 2024

Perkembangan Indeks Masyarakat Digital di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Data indeks baru tersedia mulai tahun 2022, di mana nilai indeks tercatat sebesar 31,06. Kemudian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang

cukup signifikan menjadi 43,88. Namun, pada tahun 2024, nilai indeks mengalami penurunan menjadi 41,24. Meskipun demikian, secara umum terlihat adanya peningkatan kapasitas digital masyarakat dalam dua tahun terakhir yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat strategi literasi dan inklusi digital di berbagai sektor pembangunan. Fluktuasi ini juga mencerminkan pentingnya pemetaan kondisi dan kebutuhan digital masyarakat guna menciptakan intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan sosial di daerah.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mencapai universal coverage (UCJ) bagi seluruh tenaga kerja, termasuk di Kabupaten Mamuju. Hingga April 2025, cakupan kepesertaan di Sulawesi Barat baru mencapai sekitar 44 % dari target 65 % yang ditetapkan pada Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) UCJ tahun 2025.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menjalankan kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan bagi tenaga kerja non-ASN dan informal di wilayahnya. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), seluruh tenaga kerja non-ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten telah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JKK, JKM, dan JHT. Namun, data cakupan spesifik untuk seluruh tenaga kerja di Kabupaten Mamuju belum tersedia publik.

Sebagai gambaran luas, secara nasional pada akhir tahun 2023 tercatat sekitar 61 juta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari target potensial 99 juta pekerja, dengan tingkat realisasi mencapai 61,7%, serta 94,6% peserta aktif dari target sektoral.

Tabel 2. 24 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	N/A	48,20	57,50	60,55	64,71

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, 2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks KUB di Kabupaten Mamuju mencatat skor rata-rata 3,03, yang diklasifikasikan dalam kategori tinggi. Penelitian dilakukan melalui survei terhadap 360 responden, dan menyimpulkan bahwa kerukunan antarumat beragama di Mamuju termasuk kuat dan didorong oleh nilai-nilai kearifan lokal.

Survei lanjutan pada pertengahan 2024 juga menunjukkan proses penguatan kerukunan melalui pendekatan moderasi beragama. Tim monitoring menyampaikan bahwa pelaksanaan survei berjalan lancar dan tanpa hambatan berarti, walaupun mencatat adanya kehati-hatian masyarakat dalam menjawab survei—indikator bahwa sikap toleran dalam masyarakat sudah terinternalisasi dengan baik.

Peringkat Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan menempatkan daerah ini pada posisi ke-15 dari 16 provinsi dengan Indeks KUB di atas rata-rata nasional (sekitar 74,1%). Ini menunjukkan bahwa Sulbar termasuk Mamuju memiliki komitmen tinggi dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama.

Tabel 2. 25 Indeks Kerukunan Umat Beragama 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	79,61	79,65	76,10	77,9

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju, 2025

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan sektor kebudayaan suatu daerah—meliputi pelestarian warisan budaya, pengembangan ekonomi

kreatif berbasis budaya, literasi budaya, pengelolaan kekayaan budaya, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.

Akan tetapi, hingga saat ini data IPK khusus untuk Kabupaten Mamuju tidak tersedia secara terbuka publik. Meski demikian, kita dapat menyimpulkan arah perkembangan di Kabupaten Mamuju dari tren pembangunan yang mengedepankan kolaborasi budaya, penguatan komunitas kreatif, serta revitalisasi warisan lokal, sesuai dengan apa yang mulai dijalankan di banyak daerah.

Secara umum, Kabupaten Mamuju telah meningkatkan perhatian pada sektor kebudayaan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Pelestarian budaya lokal, seperti penyelenggaraan festival seni, revitalisasi adat, dan digitalisasi warisan budaya tak benda.
- Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya melalui pengembangan kerajinan tradisional dan kuliner khas Mamuju.
- Peningkatan literasi budaya, yaitu memasukkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan kegiatan masyarakat.
- Pengelolaan budaya secara sistematis, melalui pendokumentasian, arsip digital, dan capaian partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.

Untuk tahun-tahun mendatang, Kabupaten Mamuju perlu menyusun dan mempublikasikan nilai IPK tahunan agar bisa dipantau perkembangan dan dijadikan dasar evaluasi. Langkah ini penting agar perencanaan kebijakan kebudayaan dapat lebih terukur dan akuntabel—sesuai fungsi IPK sebagai instrumen kebijakan.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Berikut ini adalah tabel data capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Mamuju tahun 2020–2024

Tabel 2. 26 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	N/A	53,52	53,95	52,72	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa indeks ini mulai tersedia sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, data belum tercatat atau tidak tersedia. Kemudian pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 53,52, yang menunjukkan tingkat perlindungan anak yang sedang dalam proses penguatan. Tahun berikutnya, yakni 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 53,95, mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam kebijakan, program, atau pelayanan yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Namun, pada tahun 2023, nilai indeks mengalami penurunan menjadi 52,72, yang dapat mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, baik dari sisi anggaran, koordinasi kelembagaan, maupun dampak kondisi eksternal seperti pemulihan pasca bencana atau pandemi. Untuk tahun 2024, data belum tersedia atau belum dipublikasikan secara resmi hingga saat ini.

Secara umum, tren capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju cenderung stagnan dengan fluktuasi kecil, dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam hal kebijakan afirmatif, penganggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat kemajuan perlindungan anak secara menyeluruh.

b. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Mamuju menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga

2024. Pada tahun 2020, data capaian belum tersedia. Namun, pada tahun 2021, capaian iBangga tercatat sebesar 54,42 yang bersumber dari data PK21. Nilai ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 53,22 (PK22), namun kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 60,94 berdasarkan PK23. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian meningkat lagi menjadi 62,15 (PK24).

Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Mamuju

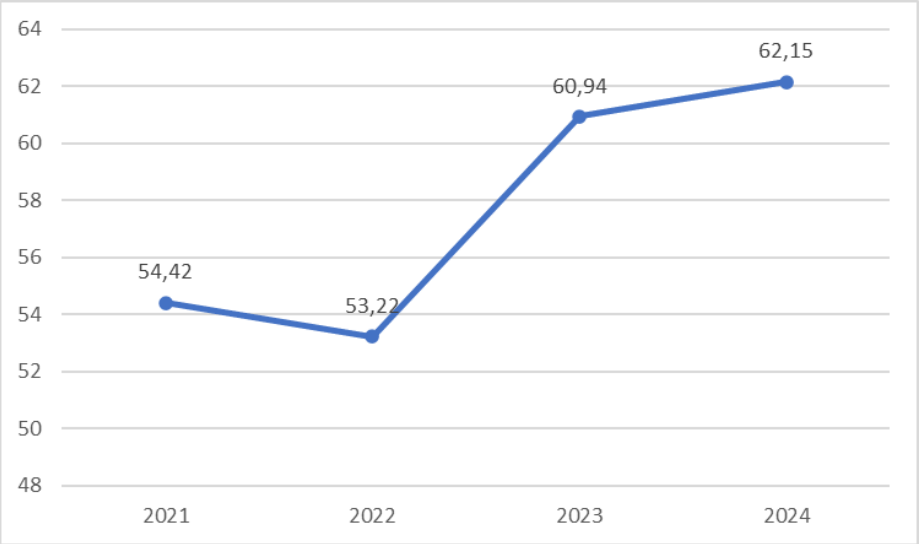

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Pergerakan nilai iBangga ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan keluarga, yang mencakup dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pembangunan keluarga oleh pemerintah daerah, khususnya yang menyasar aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Mamuju, mulai menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Berikut ini adalah tabel data capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mamuju tahun 2020–2024

Tabel 2. 27 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	0,581	0,596	0,524	0,546	0,501

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mamuju selama periode 2020–2024 menunjukkan tren perbaikan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,581, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan gender yang tergolong tinggi. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan reproduksi, partisipasi angkatan kerja, dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Memasuki tahun 2022, indeks ini mengalami penurunan menjadi 0,524. Penurunan ini menandakan mulai membaiknya akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kesadaran terhadap isu kesetaraan gender. Namun, pada tahun 2023, IKG kembali naik menjadi 0,546 Dan Kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,501 yang menempatkan Mamuju dalam kategori ketimpangan sedang.

d. Indeks Pembangunan Gender

Berikut ini adalah tabel data capaian Indeks Pembangunan Gender Gender (IPG) Kabupaten Mamuju tahun 2020–2024.

Tabel 2. 28 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	90,57	90,62	90,46	90,57	90,92

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Dari tabel tersebut, terlihat tren IPG di Kabupaten Mamuju yang relatif stabil selama periode 2020–2024. Tahun 2020 ke 2021 terdapat peningkatan kecil dari 90,57 ke 90,62, menunjukkan adanya perbaikan dalam capaian perempuan dalam dimensi umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kemudian di 2022 terjadi

sedikit penurunan ke 90,46, mengindikasikan tantangan atau stagnasi dalam beberapa dimensi terutama mungkin terkait pemulihan pandemi. Mulai meningkat kembali ke 90,57 di 2023 dan 90,92 di 2024. Meskipun masih tergolong tinggi, hal ini bisa mencerminkan penurunan akses atau kualitas layanan dasar bagi perempuan, atau melemahnya kesetaraan gender di bidang tertentu.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, ciri khusus daerah, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan yaitu optimalisasi potensi daerah secara optimal.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen kunci dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Mamuju. SDM yang berkualitas tidak hanya mencerminkan capaian pembangunan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjadi modal penting untuk menjawab tantangan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan persaingan di dunia.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Mamuju menunjukkan peran penting namun belum dominan dalam struktur perekonomian daerah. Kontribusi sektor ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis utama perekonomian Mamuju. Meskipun demikian, industri pengolahan tetap menjadi sektor strategis karena berfungsi sebagai penggerak hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, khususnya dalam

pengolahan kelapa sawit, kakao, dan produk perikanan. Fluktuasi rasio PDRB sektor industri pengolahan di Mamuju dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, dinamika harga komoditas, serta

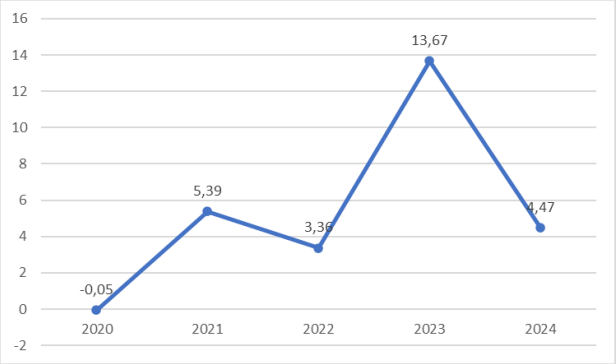

kapasitas industri lokal dalam meningkatkan nilai tambah produk. Dengan memperkuat investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong penggunaan teknologi tepat guna, sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Mamuju di masa mendatang dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber: BPS Kab. Mamuju, 2025

Total Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga

Gambar 2. 11 PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mamuju

konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 tercatat sekitar 6,47 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa sektor usaha (yang sudah terlepas dari dampak inflasi), pelonggaran pembatasan mobilitas pasca pandemi Covid-19, serta yang paling signifikan adalah besarnya aktivitas rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur pasca gempa. Untuk detailnya, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.06	0.42	3.58	3.91	4.49
2	Pertambangan & Penggalian	-6.31	9.19	-0.54	7.96	12.9
3	Industri Pengolahan	-0.05	5.39	3.36	13.67	4.47
4	Pengadaan Listrik Gas	9.11	-2.89	7.09	10.38	10.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.35	-3.06	-0.19	6.2	4.43
6	Konstruksi	-15.54	16.74	0.06	4.18	6.87
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	-3.25	2.25	1.36	5.45	9.22
8	Transportasi dan Pergudangan	-8.14	-3.28	7.61	8.73	7.02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-8.46	-1.71	17.16	12.30	8.54
10	Informasi dan Komunikasi	10.29	-1.14	2.57	9.08	8.97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.72	10.13	-0.09	-4.85	5.28
12	Real Estate	1.6	-5.62	6.55	3.84	8.53
13	Jasa Perusahaan	-5.89	1.58	4.85	5.58	9.33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6.97	2.88	3.03	1.59	5
15	Jasa Pendidikan	-10.5	-6.02	4.89	0.31	7.86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.36	-3.69	19.96	0.32	12.03
17	Jasa Lainnya	-5.04	2.1	7.66	6.73	3.9
PDRB		**-2.29**	**2.35**	**3.28**	**4,47**	**6.47**

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2024 yang tercatat dalam tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada setiap sektor. Artinya, setiap sektor yang dihitung dalam PDRB mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju dalam 5 tahun terakhir adalah 6,47 persen. Selama setahun terakhir, Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk memperbaiki dan mendorong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju tercatat

mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2020, dan kondisi ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk terus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi agar dapat terus berkembang dengan baik.

Lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan tertinggi kedua adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang mengalami peningkatan sebesar 17,16 persen. Hal ini disebabkan oleh lonjakan penjualan makanan dan minuman yang semakin meningkat pada tahun 2023, seiring dengan dicabutnya larangan berkumpul. Kafe dan warung kembali beroperasi normal setelah dampak gempa dan pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 30 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Mamuju ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	37.7	37.76	38.18	38.68	39.50
2	Pertambangan & Penggalian	3.28	3.41	3.26	3.35	3.61
3	Industri Pengolahan	3.48	3.76	3.92	4.03	3.98
4	Pengadaan Listrik Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.37	0.32	0.31	0.30	0.29
6	Konstruksi	9.07	10.38	10.16	10.17	9.96
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	10.03	9.9	9.82	10.00	9.98
8	Transportasi dan Pergudangan	1.82	1.69	1.9	2.09	2.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0.25	0.24	0.27	0.28	0.28
10	Informasi dan Komunikasi	7.81	7.31	6.97	7.10	6.95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.78	3.04	3.05	2.72	2.58
12	Real Estate	2.2	2	2.06	2.07	2.06
13	Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.31	11	10.06	10.08	9.76
15	Jasa Pendidikan	4.99	4.55	4.52	4.19	4.20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.12	1.94	2.19	2.08	2.12
17	Jasa Lainnya	2.67	2.6	2.67	2.73	2.59
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Berdasarkan distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor, dapat diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyumbang porsi produk terbesar hingga tahun 2024, dengan rata-rata per tahun sebesar 39,50 persen. Sementara itu, sektor pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi paling kecil, yaitu 0,05 persen. Jika diperhatikan, sektor jasa perusahaan juga menunjukkan rata-rata kontribusi tahunan yang rendah, yaitu 0,08 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sektor-sektor yang berkembang pesat memiliki laju pertumbuhan tinggi, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan iklim usaha yang kondusif, kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi target investasi yang menjanjikan.

Tabel 2. 31 PDRB ADHK Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.755,97	2.767,44	2.866,50	2.978,45	3.112,16
2	Pertambangan & Penggalian	272,33	297,35	295,73	319,25	360,42
3	Industri Pengolahan	298,94	315,05	325,65	370,17	386,71
4	Pengadaan Listrik Gas	8,41	8,17	8,74	9,65	10,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,32	34,24	34,17	36,29	37,90
6	Konstruksi	744,03	868,55	869,04	905,40	967,64
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	781,41	799,01	809,86	854,02	932,80
8	Transportasi dan Pergudangan	173,12	167,44	180,19	195,91	209,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	22,21	21,83	25,58	28,73	31,18
10	Informasi dan Komunikasi	761,42	752,71	772,09	842,17	917,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	230,08	253,39	253,17	240,89	253,61
12	Real Estate	196,72	185,65	197,81	205,40	222,92
13	Jasa Perusahaan	8,34	8,47	8,89	9,38	10,25

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	984,45	1.012,76	1.043,44	1.060,06	1.113,06
15	Jasa Pendidikan	445,97	419,14	439,63	440,98	475,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179,70	173,06	207,59	208,27	233,32
17	Jasa Lainnya	245,59	250,75	269,96	288,14	299,38
PDRB		8.144,00	8.335,01	8.608,03	8.993,17	9.574,96

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemulihan perekonomian nasional yang mulai membaik. Selain itu, struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang banyak bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan bahwa sektor-sektor ini masih menjadi tumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja, yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah melakukan penghematan anggaran atau *refocusing*, yang berlaku dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk adanya moratorium pada pengadaan barang modal dan pembangunan infrastruktur. Kejadian-kejadian tersebut tentu memengaruhi pengeluaran pemerintah dan secara langsung berpengaruh pada pola pembentukan PDRB.

Salah satu indikator lain untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB per Kapita. PDRB per Kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB per Kapita suatu daerah, semakin baik pula tingkat perekonomian daerah tersebut. Meskipun indikator ini belum mencakup kesenjangan pendapatan antar penduduk, namun sudah cukup representatif untuk menggambarkan tingkat perekonomian daerah secara makro. PDRB per Kapita dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB), yang menunjukkan nilai PDRB per individu sesuai dengan periode waktu yang ditentukan.

Tabel 2. 32 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Miliar Rp)	11.700	12.421	13.385	14.402	16.024
Jumlah Penduduk (jiwa)	300,32	282,84	287,62	292,40	297,14
PDRB perkapita HB (Juta Rp)	42,08	43,92	46,54	49,26	53,93
PDRB perkapita HK (Juta Rp)	29,29	29,47	29,93	30,76	32,22

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mamuju, baik yang dihitung dengan harga berlaku maupun harga konstan, terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Mamuju meningkat dari sekitar 49,26 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 53,93 juta rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, jika dihitung berdasarkan harga konstan, PDRB per kapita Kabupaten Mamuju meningkat dari 30,76 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 32,22 juta rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas masyarakat di Kabupaten Mamuju semakin berkembang, terutama dalam menjalankan profesi atau usaha yang dijalani. PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk setiap tahunnya.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Tabel 2. 33 Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Makan dan Minum Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan minum	-8,46%	-1,71%	17,16%	12,30%	8,54%

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2024

Laju pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan dan Minum di Kabupaten Mamuju selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dengan pola

naik-turun. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi tajam sebesar -8,46%, yang terutama dipicu oleh pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan mobilitas, penurunan daya beli masyarakat, serta berhentinya aktivitas pariwisata membuat kinerja usaha restoran, rumah makan, dan hotel mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2021, kontraksi kembali terjadi meski lebih ringan (-1,71%), mencerminkan kondisi pemulihan yang masih lambat akibat keterbatasan interaksi sosial dan aktivitas ekonomi. Namun, memasuki tahun 2022 terjadi lonjakan pertumbuhan hingga 17,16%. Peningkatan ini didorong oleh normalisasi aktivitas masyarakat, mulai meningkatnya pergerakan wisatawan, serta tumbuhnya kembali usaha kuliner dan jasa akomodasi. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan pertumbuhan 12,30%, sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, tumbuhnya event-event lokal, serta perbaikan iklim usaha pasca-pandemi. Meskipun pada 2024 laju pertumbuhan melandai menjadi 8,54%, angka ini tetap menunjukkan kinerja yang sehat karena sektor tersebut memasuki fase stabilisasi setelah pemulihan cepat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Mamuju cukup responsif terhadap dinamika eksternal, di mana pemulihan ekonomi, geliat pariwisata, dan peningkatan konsumsi masyarakat menjadi faktor utama penggeraknya.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). TPAK diukur dengan persentase jumlah angkatan kerja (baik yang bekerja maupun yang menganggur) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, atau berusaha berkontribusi dalam memproduksi barang atau jasa dalam periode tertentu.

Tabel 2. 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja	138 144	150 881	155 961	142.459	160.827
Jumlah Penduduk Usia Kerja	209 709	214 813	219 897	208.749	213.059
TPAK	65,85	70,24	70,92	68,24	75,48

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2024

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan nilai TPAK dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan dan penurunan yang terjadi. Namun, dalam lima tahun terakhir, rata-rata nilai TPAK terus mengalami kenaikan. Peningkatan nilai TPAK ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan penduduk dalam memproduksi barang atau jasa semakin meningkat.

d. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan tahun 2021 sampai tahun 2024. Berdasarkan data BKSDN Kemendagri, tahun 2021 IID Kabupaten Mamuju sebesar 0,08, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2,80, dan kemudian mengalami peningkatan signifikan pada 20,70 pada tahun 2023 menjadi 44,69 pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengadopsi berbagai inovasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi. BSKDN Kemendagri mengapresiasi capaian ini dan menekankan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan dan meningkatkan inovasi secara berkelanjutan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Ekonomi hijau

menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang efisien, rendah emisi, serta ramah lingkungan melalui praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Sementara itu, ekonomi biru fokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara lestari dengan memperhatikan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut. Integrasi kedua pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi daerah, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga sebagai penopang kehidupan masyarakat. Dengan demikian, transformasi ekonomi berbasis hijau dan biru diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan keberlanjutan ekologi, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dalam hal ini, indikator ekonomi hijau dan ekonomi biru belum tersedia data dari Kabupaten Mamuju, akan tetapi terkait penerapan ekonomi hijau dan biru terdapat beberapa data yang sekiranya masih cukup relevan, yaitu sebagai berikut:

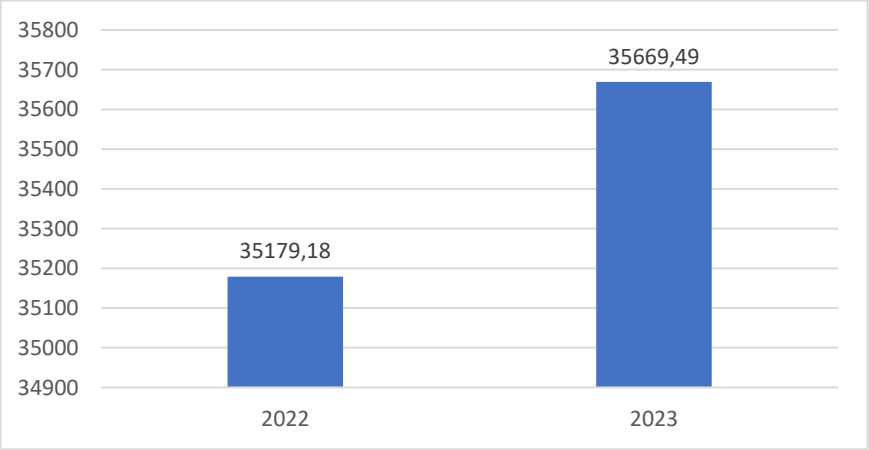

Gambar 2. 12 Jumlah produksi perikanan tangkap Kabupaten Mamuju tahun 2022-2023

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2024

Data produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, volume produksi tercatat sebesar 35.179,18 ton, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 35.669,49 ton. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan

sebesar sekitar 490,31 ton, atau naik sekitar 1,4% dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi ini dapat mencerminkan beberapa hal positif, seperti membaiknya kondisi ekosistem perairan, peningkatan jumlah armada dan nelayan yang beroperasi, atau adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung sektor perikanan, seperti bantuan sarana penangkapan ikan, penguatan kelembagaan nelayan, atau peningkatan akses pasar.

Meskipun kenaikannya relatif moderat, tren ini menunjukkan potensi sektor perikanan tangkap yang masih menjanjikan. Namun demikian, penting untuk tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar peningkatan produksi tidak mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan. Diperlukan pengelolaan yang berbasis konservasi dan data, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik penangkapan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya perikanan di masa mendatang.

2.3.4 Transformasi Digital

Kabupaten Mamuju telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Barang Milik Negara.

a. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara kondisi belum tersedia di Kabupaten Mamuju karena belum pernah dilakukan pengukuran maupun penilaian. Akan tetapi dari beberapa data yang masih relevan terkait transformasi digital yaitu:

Tabel 2. 35 Indikator Terkait Transformasi Digital Kabupaten Mamuju

URAIAN	Tahun 2024
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	41,24
Keterampilan Digital	56,19

Sumber: SPBE Provinsi Sulawesi Barat, 2025

Berdasarkan data tahun dari SPBE Provinsi Sulawesi Barat, Indeks Masyarakat Digital Indonesia berada pada angka 41,24, yang menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi digital oleh masyarakat masih berada pada kategori menengah dan perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Sementara itu, Keterampilan Digital memperoleh nilai 56,19, yang relatif lebih tinggi dan mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi digital, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek literasi digital lanjutan. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa masyarakat mulai adaptif terhadap perkembangan digital, namun dukungan berupa peningkatan kapasitas, akses, dan sosialisasi literasi digital tetap menjadi kebutuhan penting untuk mendorong transformasi digital yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam rangka memperkuat posisi Kabupaten Mamuju dalam perekonomian nasional maupun internasional, integrasi ekonomi domestik dan global menjadi salah satu strategi utama yang perlu dike depankan dalam RPJMD 2025–2029.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Atau dengan kata lain, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari pengeluaran untuk berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Komponen PMTB terdiri atas dua sub komponen yaitu bangunan dan non bangunan. Berdasarkan Tabel 2.35 Nilai PMTB Kabupaten Mamuju cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. Nilai PMTB Kabupaten Mamuju atas dasar harga berlaku meningkat dari 3,44 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,78 triliun rupiah di tahun 2024. Meskipun tren nilai pertumbuhan PMTB baik bangunan dan non bangunan memiliki pola yang berfluktuasi, Dimulai dari tahun 2020, PMTB mengalami kontraksi sebesar mengalami kontraksi sebesar 8,12 persen tahun 2020 hingga akhirnya kembali tumbuh positif bahkan hampir menyentuh dua digit, yakni sebesar 9,00 persen pada tahun 2021 dan mengalami perlambatan pada tahun 2024, yang tercatat hanya tumbuh sebesar 4,20 persen.

Tabel 2. 36 Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total PMTB					
a. ADHB (milliar rupiah)	3.438,13	3.857,19	4.061,71	4.400,70	4.759,66
b. ADHK (milliar rupiah)	2.419,20	2.636,82	2.621,97	2.726,25	2.840,77
Proporsi Terhadap PDRB (%ADHB)	29,39	31,05	30,35	30,56	29,70
Struktur PMTB					
a. Bangunan (milliar rupiah)	2.390,12	2.777,44	2.944,84	3.211,65	3.472,63
Persentase	69,52	71,88	72,50	72,98	72,96
b. Non Bangunan (milliar rupiah)	1.048,02	1.048,75	1.116,86	1.189,05	1.287,03
Persentase	30,48	28,12	27,50	27,02	27,04
Total PMTB (milliar rupiah)	3.438,13	3.857,19	4.061,71	4.400,70	4.759,66
Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan					
a. Bangunan (%)	-11,46	12,22	-1,08	3,61	4,33
b. Non Bangunan (%)	0,50	1,66	0,73	4,88	3,89
Pertumbuhan Total PMTB	-8,12	9,00	-0,56	3,98	4,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2025

Berdasarkan jenisnya, PMTB dibagi menjadi dua yakni PMTB bangunan dan PMTB non bangunan. Secara stuktur, PMTB bangunan Mamuju proporsinya lebih besar dibanding PMTB non bangunan. Nilainya tercatat selalu lebih dari 70 persen (kecuali tahun 2020) sepanjang tahun 2020-2024. Dari segi pertumbuhan, nilai pertumbuhan kedua sub komponen PMTB ini relatif berfluktuasi. Namun demikian, nilai pertumbuhan sub komponen bangunan pada tahun 2021

meningkat drastis mencapai 12,22 persen disebabkan perbaikan bangunan yang terdampak gempa diawal tahun. Serta, realisasi belanja modal pemerintah untuk merenovasi bangunan juga turut bertambah. Kemudian pada tahun 2024, PMTB bangunan tumbuh sebesar 4,33 persen salah satunya disebabkan oleh meningkatnya aktifitas pembangunan seperti unit-unit perumahan BTN, rumah sakit, dan penambahan jumlah kamar hotel. Namun demikian di sisi lain, pertumbuhan sub komponen non bangunan tergolong relatif stabil. Ini terlihat dari nilai pertumbuhan yang tetap positif bahkan pada masa pandemi di tahun 2020.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Potensi ekspor komoditas unggulan seperti hasil pertanian dan perikanan menunjukkan bahwa Mamuju memiliki peluang besar untuk terhubung dengan rantai pasok global. Untuk mendorong keterhubungan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju menempatkan pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM sebagai prioritas, yang tercermin dalam alokasi APBD 2025 yang menekankinan perbaikan jalan dalam kota dan dukungan konektivitas antarwilayah.

Net ekspor didefinisikan sebagai nilai total ekspor dikurangi total impor, dalam hal ini yang dimaksud adalah antara Kabupaten Mamuju dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat, luar provinsi Sulawesi Barat, maupun luar negeri. Untuk level kabupaten selama ini penghitungan ekspor-impor tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung atau indikator penggerak nilai net ekspor. Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor

menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik (residen), tetapi diperuntukkan bagi konsumsi oleh pihak luar negeri (non residen), baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula di dalamnya ekspor pembelian barang dan jasa oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal udara maupun kapal laut yang singgah dalam periode singkat dalam suatu wilayah. Berkontraposisi dengan itu, aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Mamuju sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Total nilai Net Ekspor Mamuju sejak tahun 2020 selalu negatif dengan besaran yang cenderung fluktuatif baik ADHB maupun ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor Kabupaten Mamuju masih lebih besar dibanding nilai ekspor. Kontribusi net ekspor terhadap total PDRB Mamuju sepanjang tahun 2020-2024 berada di kisaran -2,74 sampai dengan -3,47 persen. Sejalan dengan nilai nominal dan riilnya. Dikarenakan bencana gempa bumi yang terjadi di Januari 2021, membuat penyediaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju yang berasal dari impor luar daerah meningkat cukup besar (utamanya untuk bantuan penanganan gempa). Dan pada tahun 2024, kontribusi net ekspor semakin mendalam karena dipengaruhi oleh impor barang konstruksi dan acara UMKM dari luar kabupaten yang mengikuti event yang diselanggarakan di Kabupaten Mamuju.

Tabel 2. 37 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor ADHB (milliar rupiah)	-320,62	-463,56	-618,92	-1135,66	-555,95
Net Ekspor ADHK (milliar rupiah)	-33,43	-180,89	-327,98	-324,64	-163,40
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	-2,74	-3,73	-4,62	-7,89	-3,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2025

2.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur mampu memberikan layanan yang memadai, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Indeks ini mencerminkan kondisi fisik, ketersediaan, aksesibilitas, keandalan, dan tingkat pemanfaatan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan, transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna, kesesuaian dengan standar teknis, serta kemampuan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas layanan infrastruktur di suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. 38 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKLI	Indeks			100	68	82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, 2024

Data mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2021 tidak tersedia. Namun, pada tahun 2022, IKLI tercatat mencapai angka 100. Pada tahun berikutnya, 2023, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 68, Meskipun demikian, pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan

menjadi 82, meskipun angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan yang tajam antara 2022 dan 2023 menunjukkan kemungkinan adanya menandakan adanya tantangan atau gangguan terhadap aspek ketahanan lingkungan yang mungkin berkaitan dengan faktor-faktor seperti bencana alam, degradasi ekosistem, atau keterbatasan tata kelola lingkungan saat itu di Kabupaten Mamuju. Walau demikian, fluktuasi yang terjadi pada 2023 menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan lebih meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa depan.

b. Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan kerangka pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju 2025–2029, kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini memiliki kemampuan untuk saling melengkapi. Wilayah perdesaan, yang mencakup sebagian besar dari 11 kecamatan di Mamuju, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal melalui sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang lebih dari 30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024.

Di sisi lain, kawasan perkotaan, khususnya Kecamatan Mamuju, berperan sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan layanan, dengan dominasi sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta jasa pemerintahan. Berdasarkan data BPS, sekitar 60% penduduk Mamuju tinggal di wilayah perdesaan, sedangkan 40% di wilayah perkotaan, mencerminkan pentingnya sinergi pembangunan antara dua kawasan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar di desa, penguatan pusat layanan ekonomi di kota, dan peningkatan konektivitas antarwilayah melalui transportasi dan logistik yang efisien (BPS Mamuju, 2025).

Tabel 2. 39 Indeks Desa Membangunan Kabupaten Mamuju

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,611	0,653	0,653	0,66	0,667

Berdasarkan data capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten, meskipun dengan variasi laju pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IDM berada pada angka 0,611, yang mencerminkan kondisi desa yang masih berada pada tahap berkembang menuju kemandirian. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,653, mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan desa seperti pelayanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat desa.

Selanjutnya, capaian indeks tahun 2022 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetap berada pada angka 0,653, yang menunjukkan adanya stagnasi atau perlambatan dalam proses pembangunan desa pada periode tersebut. Namun demikian, tren positif kembali berlanjut pada tahun 2023 dengan peningkatan menjadi 0,660, dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 0,667. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan bahwa secara umum, pembangunan desa di Kabupaten Mamuju mengalami perbaikan secara bertahap, menuju kategori desa yang lebih maju dan mandiri sesuai indikator Indeks Desa Membangun.

Kinerja ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan desa, meskipun perlu perhatian khusus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi pada tahun 2022 agar tidak terulang di masa mendatang.

c. Rumah Layak Huni

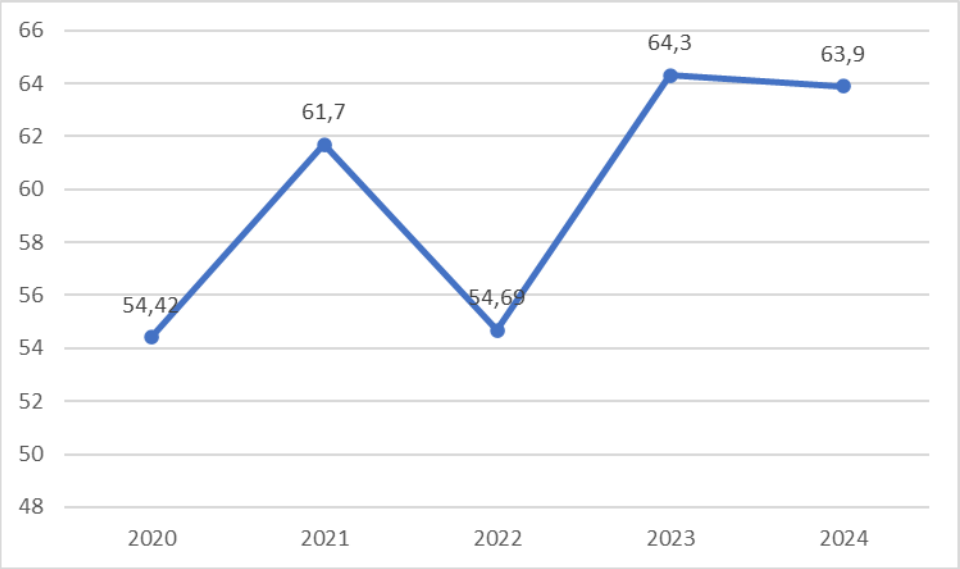

Gambar 2. 13 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Mamuju

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju, 2025

Perkembangan capaian indikator rumah layak huni di suatu wilayah selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni berada di angka 54,42%, yang mencerminkan bahwa baru sekitar setengah dari rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi layak. Kemudian, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 61,7%, menandakan adanya perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat selama periode tersebut.

Akan tetapi, capaian ini kembali menurun tajam pada tahun 2022 menjadi 54,69%, hampir setara dengan capaian awal tahun 2020. Tren ini kembali membaik pada tahun 2023 dengan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 64,3%, yang merupakan capaian tertinggi selama periode lima tahun tersebut. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 63,9%. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa program peningkatan kualitas perumahan di Kabupaten Mamuju masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ketersediaan anggaran, infrastruktur

pendukung, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun secara umum, tren kenaikan dalam jangka panjang tetap menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Mamuju dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif, menjadi pondasi penting bagi perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Pertumbuhan ekonomi Mamuju meningkat dari 2,44% pada tahun 2021 menjadi 3,15% pada tahun 2022, mencerminkan proses pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 dan bencana gempa bumi (BPS Mamuju, 2025). Seiring dengan itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 4,28% pada tahun 2021 menjadi 3,97% pada tahun 2022 (BPS Mamuju, 2025).

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 7,89% menjadi 7,45% dalam periode yang sama (BPS Mamuju, 2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menunjukkan peningkatan dari 68,90 pada tahun 2021 menjadi 69,45 pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Mamuju (BPS Mamuju, 2025). Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi makro Kabupaten Mamuju berada dalam tren yang stabil dan kondusif untuk menopang arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Pemda Mamuju, 2025).

a. Tingkat Inflasi

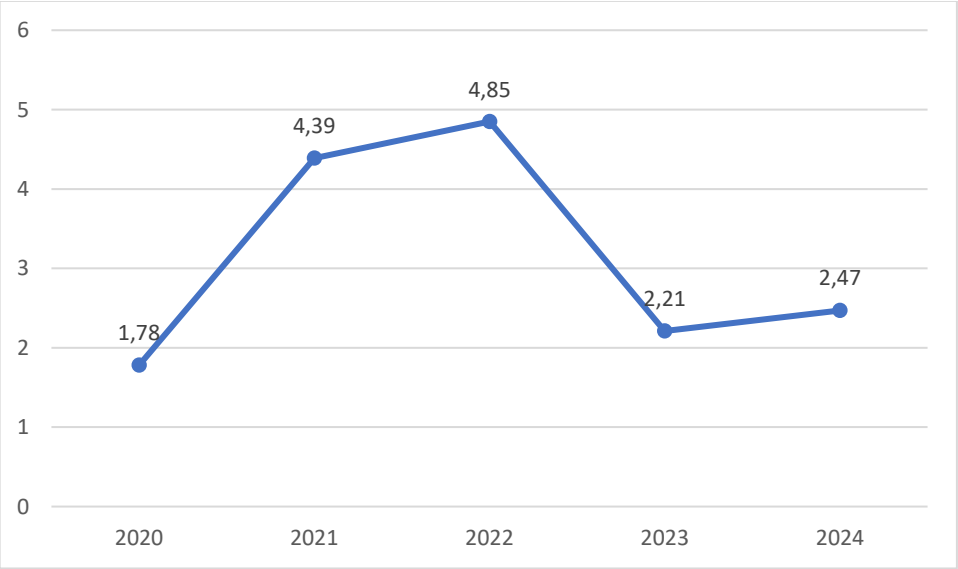

Gambar 2. 14 Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja indikator Tingkat Inflasi dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ekonomi, baik secara lokal maupun nasional. Tingkat inflasi diukur dalam satuan persen, dan menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi daerah.

Pada tahun 2020, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,78%, yang mencerminkan kondisi inflasi yang relatif rendah dan stabil. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan inflasi cukup signifikan hingga mencapai 4,39%, dan berlanjut meningkat di tahun 2022 menjadi 4,85%. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada rantai pasok dan harga komoditas, serta peningkatan permintaan masyarakat pasca pemulihan ekonomi.

Memasuki tahun 2023, tingkat inflasi berhasil ditekan kembali menjadi 2,21%, menandakan adanya upaya pengendalian harga dan kebijakan stabilisasi ekonomi yang mulai efektif. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan tingkat inflasi yang tetap

terkendali di angka 2,47%. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami lonjakan, capaian ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi. Pengelolaan inflasi yang baik sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju, baik pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang. Tata kelola pemerintahan adalah serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan administrasi publik. Tata kelola yang baik (*good governance*) meliputi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum.

Transparansi berarti bahwa keputusan dan kebijakan diambil dan dilaksanakan dengan cara yang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan. Akuntabilitas mengharuskan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diaudit oleh masyarakat serta lembaga pengawas. Partisipasi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberi mereka kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi. Efektivitas dan efisiensi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Supremasi hukum berarti bahwa setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berikut adalah data mengenai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju terkait dengan capaian kinerjanya.

Tabel 2. 40 Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	43,38	47,01	48,65	54,21	70,49
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,34	3,39	3,73	2,65	2,87
3	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	61,62	61,62	62,65	62,67	62,97
4	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3,154
5	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	N/A
6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, 2024

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya terkait dengan aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur. Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mamuju menunjukkan perkembangan yang positif antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks meningkat menjadi 47,01, menandakan adanya perbaikan di beberapa aspek tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks mencapai 48,65, yang menunjukkan bahwa upaya reformasi terus berlanjut dan memberikan hasil yang lebih baik. Puncaknya, pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju mencapai 70,41, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik, serta memperkuat tata kelola yang baik.

Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan,

Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Mamuju menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, nilai indeks berada pada angka 3,34, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik di daerah ini memerlukan perbaikan besar. Pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan dengan indeks menjadi 3,39, yang menunjukkan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Perbaikan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2022, dengan indeks mencapai 3,73, menunjukkan adanya kemajuan yang lebih substansial dalam pelayanan publik di Kabupaten Mamuju. Namun, pada tahun 2023, indeks turun drastis menjadi 2,65, yang mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi ini menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik serta langkah-langkah strategis untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Nilai SAKIP suatu daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah tersebut dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Penilaian SAKIP daerah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui evaluasi berbagai komponen utama, seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Pemerintah daerah dengan nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai target pembangunan

secara efektif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mamuju menunjukkan konsistensi yang cukup baik dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Kabupaten Mamuju tercatat 61,62 dengan predikat B, yang menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik meski masih ada ruang untuk perbaikan. Nilai ini tetap stabil pada tahun 2021 di angka yang sama, 61,62, dengan predikat B. Pada tahun 2022, nilai meningkat sedikit menjadi 62,65, meskipun tetap dengan predikat B, menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Pada tahun 2023, nilai SAKIP meningkat sedikit lagi menjadi 62,67 dengan predikat B. Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja dan akuntabilitas, meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan, predikat B yang konsisten menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang baik, tetapi masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai predikat yang lebih tinggi.

Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tahap kematangan yang menunjukkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Proses pencapaian maturitas SPIP melibatkan pengembangan dan penerapan kontrol internal yang kuat, pemantauan yang rutin terhadap operasi pemerintahan, serta evaluasi yang terus-menerus terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mencapai maturitas SPIP, entitas pemerintahan dapat meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maturitas SPIP di Kabupaten Mamuju menunjukkan tingkat konsistensi yang baik antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, maturitas SPIP Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 3, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sudah terimplementasi, tetapi masih perlu perbaikan di beberapa aspek. Tingkat maturitas ini tetap stabil pada tahun 2021, 2022, dan 2023, yang menandakan bahwa upaya peningkatan SPIP terus berlanjut meski belum ada perubahan signifikan.

Meskipun nilai yang stabil menunjukkan konsistensi dalam penerapan SPIP, evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan memastikan pengelolaan risiko serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah yang berkelanjutan.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Mamuju menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, kapabilitas APIP tercatat sebesar 3, yang menunjukkan bahwa fungsi audit internal pemerintah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai ini tetap stabil pada tahun 2021, 2022, dan 2023, menandakan bahwa kapabilitas APIP tetap terjaga tanpa perubahan signifikan selama periode tersebut. Meskipun nilai yang stabil menunjukkan konsistensi dalam kapabilitas APIP, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi audit internal terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Dengan mempertahankan kapabilitas yang baik, APIP dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik di Kabupaten Mamuju.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) setiap tahunnya. Opini WTP menunjukkan bahwa BPK telah menilai laporan keuangan Kabupaten Mamuju disajikan secara wajar, transparan, dan dapat dipercaya, serta mencerminkan kinerja keuangan yang baik.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melaksanakan komitmennya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Capaian ini dihitung berdasarkan pelaksanaan berbagai aksi konkret yang telah direncanakan dalam dokumen RANHAM, seperti pembentukan regulasi yang mendukung HAM, penyediaan layanan publik yang inklusif, edukasi dan sosialisasi HAM kepada masyarakat, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Persentase capaian ini biasanya dievaluasi secara berkala, baik secara kuantitatif melalui data laporan kegiatan dan output, maupun secara kualitatif berdasarkan dampak implementasi aksi HAM terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya.

Semakin tinggi persentase capaian yang diraih, maka semakin menunjukkan keseriusan dan efektivitas pemerintah dalam mengarusutamakan HAM dalam proses pembangunan. Sebaliknya, rendahnya capaian menjadi catatan penting atas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan aksi HAM.

2) Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)

Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). IKD merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang bertujuan mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dan bertanggung

jawab dalam mengarusutamakan HAM dalam kebijakan dan pelayanan publik.

Penilaian IKD dilakukan secara berkala oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM, dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencakup aspek kelembagaan, regulasi, program/kegiatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok minoritas.

Nilai IKD disajikan dalam bentuk skoring dengan kategori tertentu, seperti sangat patuh, patuh, cukup patuh, dan kurang patuh. Semakin tinggi nilai IKD suatu daerah, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjamin pemenuhan HAM melalui kebijakan yang berperspektif HAM dan layanan publik yang inklusif.

IKD tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam hal penghormatan dan pemajuan HAM. Dengan adanya IKD, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

3) Indeks Rasa Aman

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat rasa aman masyarakat terhadap kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Indikator ini mencerminkan persepsi subjektif masyarakat terhadap keamanan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kriminalitas, kehadiran aparat keamanan, pencahayaan jalan, kepadatan permukiman, serta hubungan sosial antarwarga.

Rasa aman merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi salah satu aspek utama dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ketika penduduk merasa aman untuk berjalan sendirian, terutama pada malam hari, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal tersebut relatif stabil, kondusif, dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi warganya.

Sebaliknya, rendahnya proporsi penduduk yang merasa aman menunjukkan adanya potensi masalah keamanan atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang bersifat fisik seperti kejahatan jalanan, maupun non-fisik seperti intimidasi sosial, diskriminasi, atau ketimpangan sosial.

Data mengenai indikator ini umumnya diperoleh melalui survei, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) atau Survei Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan pendekatan persepsi individu. Oleh karena itu, kebijakan untuk meningkatkan rasa aman harus menyentuh aspek preventif, pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kehadiran dan peran aktif aparatur keamanan di tingkat lokal.

Dengan meningkatnya proporsi penduduk yang merasa aman, maka kepercayaan terhadap lingkungan sosial dan pemerintah juga akan tumbuh, menciptakan iklim yang lebih harmonis dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur komposit yang disusun untuk menilai dan membandingkan tingkat daya saing antar daerah kabupaten/kota di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut data capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Mamuju pada lima tahun terakhir.

Tabel 2. 41 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	N/A	N/A	3,01	3,24	3,60

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2022 IDSD Kabupaten Mamuju sebesar 3,01, yang kemudian terus meningkat menjadi 3,24 pada tahun 2023, dan mencapai 3,60 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek pembangunan daerah seperti kualitas tata kelola pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, serta layanan publik. Meski demikian, peningkatan yang terjadi perlu dilihat secara kritis apakah bersifat substansial dan berkelanjutan, atau hanya mencerminkan perubahan administratif atau metodologis. Evaluasi mendalam terhadap kontribusi setiap pilar dalam indeks ini menjadi penting, agar upaya peningkatan daya saing benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum; d. Perumahan rakyat; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, meskipun dengan dinamika fluktuasi pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian SPM berada pada angka 54,27 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 56,04.

Mulai tahun 2022, capaian SPM melonjak cukup tajam hingga mencapai 69,71, yang menandakan adanya perbaikan kinerja pelayanan dasar di berbagai urusan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu 86,57. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya pemulihan pasca bencana gempa bumi, perbaikan infrastruktur dasar, serta optimalisasi layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan sosial.

Namun demikian, pada tahun 2024 capaian SPM mengalami penurunan menjadi 76,57. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian awal periode, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja pelayanan dasar, baik dari sisi pendanaan, keterbatasan sumber daya, maupun dampak lanjutan pemulihan daerah.

Secara keseluruhan, capaian SPM Kabupaten Mamuju selama lima tahun terakhir dapat dikatakan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan dasar. Ke depan, dibutuhkan strategi penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan agar capaian SPM dapat kembali meningkat dan lebih stabil sesuai target nasional.

Capaian SPM Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

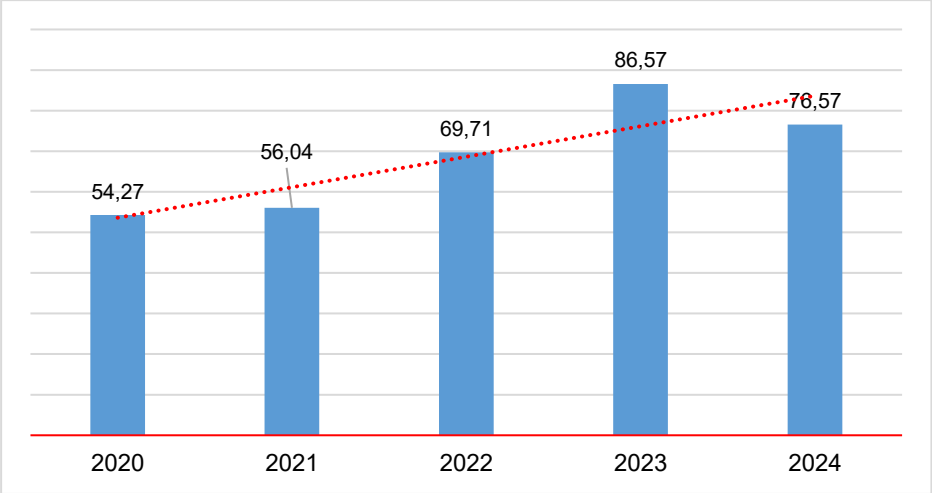

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.4.1 Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang setiap warga berhak peroleh secara minimal. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan urusan wajibnya. Peraturan ini diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021. Dalam konteks pendidikan, SPM ditetapkan oleh Permendikbud Ristek RI nomor 32 Tahun 2022, yang mengatur jenis layanan dasar, mutu layanan, pencapaian SPM, serta proses pelaporan

dan evaluasi. Secara umum SPM pendidikan dalam kurun waktu lima Tahun terakhir mengalami kenaikan yang stabil dan hanya pada Tahun 2021 mengalami penurunan, pada Tahun 2019 SPM capaian SPM Pendidikan sebesar 0 persen dikarenakan masalah pelaporan. Tahun 2023, Capaian SPM Pendidikan sebesar 96 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam lima Tahun terakhir.

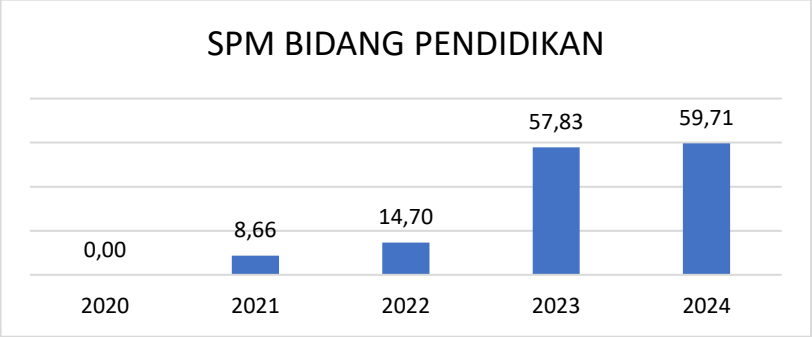

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	**PENDIDIKAN**		**0**	**8,66**	**14,70**	**57,83**	**59,71**
1,1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun	Persen		-	31,76	73,79	80,19
1,2	Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Persen		-	35,54	28,13	29,49
1,3	Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4	Persen		-	35,2	52,29	52,3
1,4	Angka Partisipasi Sekolah 7 sd 15	Persen		98,92	88,38	93,85	95,47
1,5	Skor Kemampuan Literasi SD	Persen		-	1,6	51,24	52,7
1,6	Skor Kemampuan Literasi SMP	Persen		-	1,5	57,09	57,76
1,7	Skor Kempuan Numerasi SD	Persen		-	1,46	42,1	48,85
1,8	Skor Kempuan Numerasi SMP	Persen		-	1,55	54,83	54,86
1,9	Iklim Inklusivitas SD	Persen		-	1,85	54,68	57,57
1.10	Iklim Inklusivitas SMP	Persen		-	1,84	53,77	54,46
1,11	Iklim Keamanan SD	Persen		-	2,03	72,53	73,82

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1,12	Iklim Keamanan SMP	Persen		-	2,08	67,12	67,51
1,13	Iklim kebinekaan SD	Persen		-	1,98	71,54	69,54
1,14	Iklim kebinekaan SMP	Persen		-	2,06	71,63	69,26
1,15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 sd 18 tahun	Persen		31,02	11,62	22,89	31,83

2.4.4.2 Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diatur sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar.

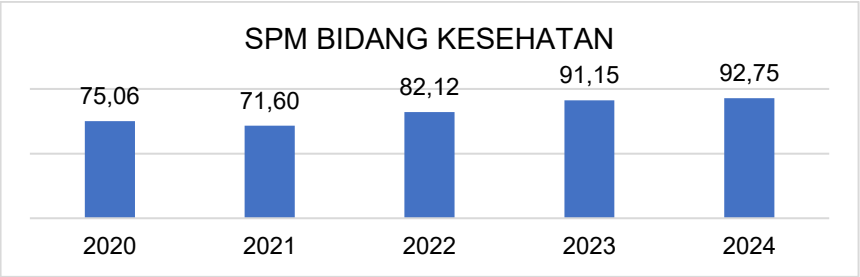

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Mamuju dalam periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 75,06, namun sempat mengalami penurunan menjadi 71,60 pada tahun 2021. Penurunan ini tidak terlepas dari kondisi daerah yang pada periode tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19 serta bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju, sehingga memengaruhi kinerja pelayanan dasar kesehatan.

Meski demikian, sejak tahun 2022 capaian SPM Bidang Kesehatan kembali mengalami peningkatan signifikan, mencapai 82,12, dan terus melonjak pada tahun 2023 menjadi 91,15. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian 92,75, yang menunjukkan perbaikan kinerja

layanan kesehatan dasar di daerah, baik melalui peningkatan akses pelayanan, penguatan sarana-prasarana, maupun dukungan program kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan di awal periode, capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan semakin mendekati target pelayanan dasar nasional. Hal ini menjadi indikator positif bahwa upaya pemulihan pasca bencana dan optimalisasi layanan kesehatan dasar di Kabupaten Mamuju mulai menunjukkan hasil nyata.

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
2	**KESEHATAN**		**75,06**	**71,60**	**82,12**	**91,15**	**92,75**
2,1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	72,7	74,35	85,48	89,2	94,59
2,2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	75,7	75,99	93,45	96,5	94,76
2,3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	96	93,69	97,16	96,6	97,69
2,4	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	62	67,63	71,77	87,07	80,35
2,5	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	56	61,91	82,53	83,64	93,16
2,6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	74,31	62,47	63,99	78,81	85,11
2,7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	64,43	75,13	79,13	88,92	90,55
2,8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	87,1	40,55	87,62	100	98,67
2,9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 Tahun keatas yang	Persen	100	111,32	95,6	100	98,53

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
	mendapatkan pelayanan Kesehatan						
2.10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	76,88	66,85	72,65	82,3	89,43
2,11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	79,63	61,17	84,53	100	97,92
2,12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	56	68,1	71,49	90,75	92,2

2.4.4.3 Pekerjaan Umum

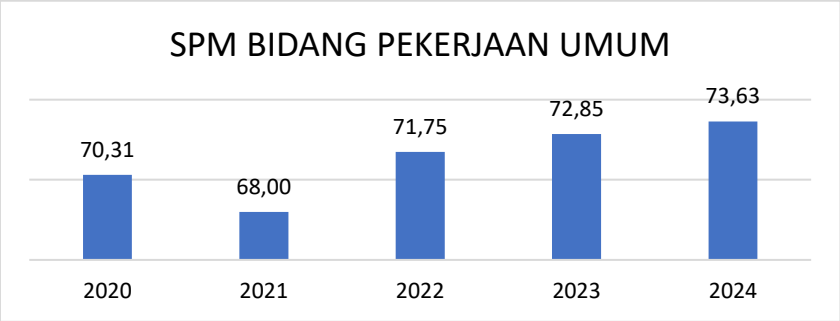

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju dalam periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi namun dengan tren peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 70,31, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 68,00. Penurunan ini erat kaitannya dengan kondisi daerah yang terdampak bencana gempa bumi di awal tahun 2021,

yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dasar dan menurunkan kualitas pelayanan di sektor pekerjaan umum.

Seiring dengan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana, capaian SPM mulai kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 71,75, kemudian berlanjut naik menjadi 72,85 pada tahun 2023. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian 73,63.

Kenaikan capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur dasar secara bertahap, terutama pembangunan kembali jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Selain itu, adanya dukungan program pemerintah pusat dan daerah dalam pemulihan infrastruktur serta peningkatan akses pelayanan dasar juga berkontribusi terhadap peningkatan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju.

Secara keseluruhan, meskipun sempat menurun akibat bencana alam, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju menunjukkan arah pemulihan dan peningkatan kinerja yang konsisten, menjadi indikasi positif bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
3	**PEKERJAAN UMUM**		**70,31**	**68,00**	**71,75**	**72,85**	**73,63**
3,1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	68,61	69	70,49	71,7	72,02
3,2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	72	67	73	74	75,24

2.4.4.4 Perumahan Rakyat

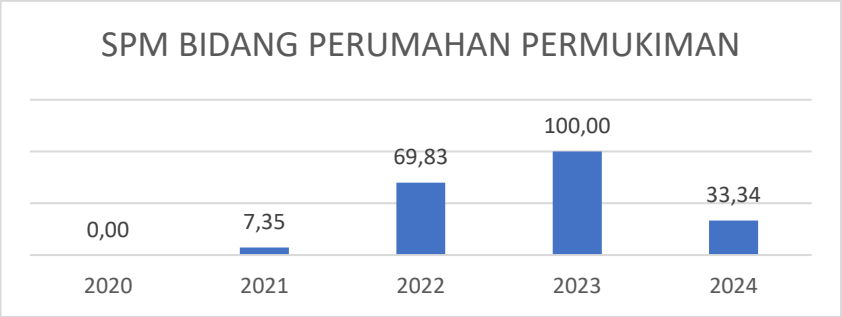

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, capaian masih berada di angka 0,00, yang menandakan belum adanya capaian terukur pada indikator layanan dasar di bidang ini. Memasuki tahun 2021, capaian mulai meningkat meski masih relatif rendah, yakni 7,35.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian melonjak hingga 69,83, mencerminkan adanya percepatan program perumahan dan penataan permukiman, terutama sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, ketika capaian SPM mencapai 100,00, yang menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan standar pelayanan dasar di sektor perumahan dan permukiman.

Namun demikian, pada tahun 2024 capaian kembali mengalami penurunan cukup tajam menjadi 33,34. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran daerah, pergeseran prioritas pembangunan, serta masih adanya tantangan dalam keberlanjutan program perumahan dan penataan kawasan permukiman yang terdampak bencana.

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
4	**PERUMAHAN PERMUKIMAN**		**0,00**	**7,35**	**69,83**	**100,00**	**33,34**
4,1	Jumlah warga negara korban bencana yang	Persen	0	14,7	39,65	100	66,67

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
	memperoleh rumah layak huni;						
4,2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persen	0	0	100	100	0

2.4.4.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren yang cukup stabil sejak tahun 2020 hingga 2022, dengan nilai sekitar 80 an persen. Pada tahun 2020, capaian SPM berada di angka 80,264 dan sedikit naik pada tahun 2021 menjadi 80,654, kemudian mengalami penurunan kecil menjadi 79,858 pada tahun 2022.

Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan pada capaian SPM menjadi 97,56, yang menunjukkan adanya peningkatan tajam dalam penegakan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Tahun 2024 capaian berhasil mencapai angka sempurna 100, menandakan bahwa Kabupaten Mamuju telah mencapai target maksimal dalam pelayanan SPM di bidang ini.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, yang mungkin mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, penegakan peraturan daerah, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum dan perlindungan diri, membawa dampak positif nyata. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam menciptakan kondisi aman dan tertib dalam masyarakat sebagai prioritas utama pemerintah daerah

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
5	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**80,26**	**80,65**	**79,86**	**97,56**	**100,00**
5,1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	99,87	59,29	96,28	100
5,2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	80	100	100
5,3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	75	90	80	100	100
5,4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	26,32	13,4	80	96	100
5,5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	95,52	100

2.4.4.6 Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan semua indikator mencapai 100 persen secara konsisten dari tahun ke tahun.

Indikator yang meliputi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, seluruhnya tercapai 100 persen. Demikian pula untuk indikator perlindungan dan jaminan sosial bagi warga korban bencana, capaian juga berada di angka maksimal 100 persen.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah berhasil memastikan kelompok rentan di masyarakat memperoleh pelayanan sosial dasar sesuai standar, baik melalui rehabilitasi sosial di luar panti maupun perlindungan saat dan setelah tanggap darurat bencana. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen dan keberpihakan yang kuat terhadap kelompok rentan, terutama pasca bencana gempa bumi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius.

Dengan capaian yang konsisten 100 persen, SPM Bidang Sosial Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sudah terpenuhi secara optimal. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan pelayanan ini agar tidak hanya sekadar memenuhi standar angka, tetapi juga memastikan kualitas layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial semakin baik dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

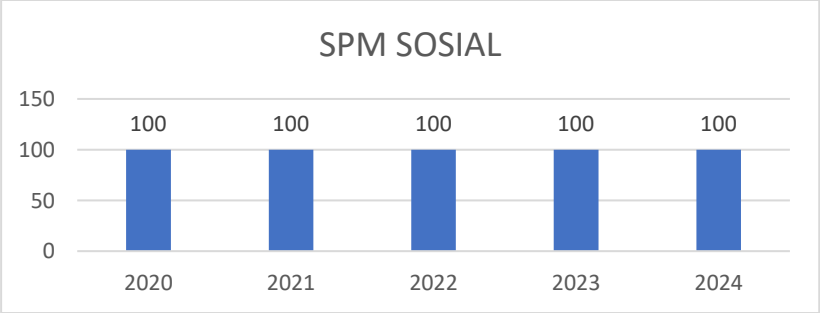

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
6	SOSIAL		100	100	100	100	100

No	SPM	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
6,1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
6,2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
6,3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
6,4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
6,5	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100

2.4.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintah daerah merupakan cerminan dari sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan daerah mencakup berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga perlindungan sosial.

Penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan masing-masing urusan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Setiap urusan memiliki indikator kinerja yang spesifik dan terukur, baik dari sisi input, proses, *output*, maupun *outcome*.

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan, seperti Sistem Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah (e-SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta identifikasi terhadap area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Kinerja urusan pemerintahan daerah juga menjadi dasar dalam penentuan alokasi anggaran, pemberian insentif fiskal, hingga penilaian kinerja kepala daerah. Semakin tinggi capaian kinerja pada masing-masing urusan, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja di setiap urusan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

2.4.5.1 Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintahan Kabupaten Mamuju selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial- emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).

Dalam tiga tahun terakhir jumlah siswa PAUD/TK di Kabupaten Mamuju berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, jumlah peserta didik pra sekolah (PAUD/TK) yang terdaftar di Dinas Kabupaten Mamuju mengalami penurunan 2.15 % atau kurang dari 156 peserta didik dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2024. Di Kabupaten Mamuju, pada tahun 2024 jumlah peserta didik sebanyak 7.113 siswa dari usia 4 sd 6 tahun dari 193 sekolah PAUD dengan jumlah pendidik sebanyak 530 orang yang tersebar di 10 Kecamatan. Jika dilihat berdasarkan jumlah sekolah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4.93 % atau ada 10 sekolah yang tutup disebabkan terkait adminitrasi seperti tidak melakukan ijin operasional dan update data di aplikasi data pokok pendidikan (DAPODIK).

Tabel 2. 42 Jenjang Pendidikan PAUD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Murid	9.467	5.010	7.269	7.113
Jumlah Sekolah	286	205	203	193
Jumlah Guru	500	544	648	530
Rasio Guru dan Murid	1:19	1:9	1:11	1:13

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

b) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam mengukur akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia. APS dihitung sebagai persentase jumlah penduduk usia sekolah yang sedang menempuh

pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia tersebut.

Berdasarkan data angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam kurung waktu 4 tahun terakhir menunjukkan ditunjukkan dalam table berikut.

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	97.89	98.47	98.09	98.53
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/PAket B	86,50	86.17	86.02	89.03

Sumber : IKR BPS Kabupaten Mamuju Tahun 2024

2. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) dimaknai sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Diinterprestasikan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi Pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Pada tahun 2024 perhitungan angka putus sekolah sudah menggunakan data dari ATS Pusdatin, yang merupakan singkatan dari Anak Tidak Sekolah Pusat Data dan Teknologi Informasi, adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memantau data anak yang tidak bersekolah digunakan untuk proses verifikasi dan validasi data ATS, memastikan data yang tercatat

di Basis Data Pendidikan Nasional (BDPN) akurat dan valid sehingga ada perbedaan metode pengukuran dari tahun sebelumnya yaitu menggunakan data mandiri sedangkan tahun 2024 sudah menggunakan sinkronisasi dari Aplikasi Dapodik.

Pada tahun 2024 angka putus sekolah dijenjang Sekolah Dasar 0.07 % atau Jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun padat tahun 2024 sebanyak 34.329 jiwa dan berdasarkan data ats pusdatin sebanyak 2.243 anak yang terbagi 3 indikator yaitu putus sekolah/Drop out (DO),Lulus tidak melanjutkan (LTM) dan Belum Pernah Bersekolah (BPB) sedangkan angka putus sekolah dijenjang Sekolah Menengah Pertama adalah 0.14 % atau Jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun pada tahun 2024 sebanyak 17.323 jiwa dengan jumlah dan berdasarkan data ats pusdatin sebanyak 23.54 anak yang terbagi 3 indikator yaitu putus sekolah/Drop out (DO),Lulus tidak melanjutkan (LTM) dan Belum Pernah Bersekolah (BPB)

Tabel 2.44 Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024.

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,9	0,8	0,8	0,07
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTS	0,8	0,9	0,8	0.14

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah baik jenjang SD maupun SMP adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial dan menganggap Pendidikan cukup sampai di jenjang SD.

3. Angka Kelulusan Sekolah (AL)

Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah

peserta didik atas ketuntasan kriteria dan standar nilai yang ditetapkan. Kondisi angka kelulusan tahun 2020-2024, menunjukan capaian 100 persen dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi kesiapan siswa menghadapi/menelaah soal dalam ujian nasional atau telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Tabel 2.45 Angka Kelulusan Sekolah (AL) Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	100	100	100	100

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

4. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sejak 2021 hingga 2024. Berdasarkan data Aplikasi Dapodik jumlah peserta didik yang lulus dijenjang Sekolah Dasar dari 311 Sekolah di 11 Kecamatan sebanyak 5.039 peserta didik sedangkan jumlah peserta didik baru di jenjang pendidikan SekolahMenengah Pertama di 65 Sekolah sebanyak 4924 Peserta didik atau 97.72 %.

Tabel 2.46 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP	100	100	95.31	97.72

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

5. Fasilitas Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam rangka mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Kemendikdasmen melalui portal data pendidikan terkait data aset dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami penuruan dari tahun 2022 merupakan kondisi dimana mengalami kerusakan akibat gempa bumi di awal tahun mulai ruang kelas/TU/Guru/Kepala sekolah ,laboratorium serta sanitasi juga saran penunjang seperti mebel dan alat praktek siswa mengalami rusak berat dari jenjang pendidikan PAUD,SD dan SMP.

Kondisi bangunan sekolah untuk jenjang Pendidikan SD/MI periode 2020-2022 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan bangunan sekolah yang berada diwilayah Kabupaten Mamuju yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di awal tahun 2021 mendapatkan biaya rehab bangunan di tahun 2022. Pada tahun 2022 tercatat jumlah bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 310 Unit. Capaian tersebut juga belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 333 Unit dan berdampak pada capaian pemenuhan target dan juga Data Dapodik yang tidak memenuhi syarat bantuan karena input data Dapodik tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Dapodik merupakan satu- satunya penilaian/tolak ukur pemberian bantuan rehabilitasi sehingga kurangnya biaya anggaran setiap tahunnya.

Kondisi bangunan sekolah untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs periode 2020-2023 juga mengalami sedikit kenaikan sebanyak 1 unit bangunan dalam kondisi baik di tahun 2022, hal ini juga karena adanya bantuan rehabilitasi untuk perbaikan gedung sekolah.

Tabel 2.47 Fasilitas Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	2.317	904	2.822	2.797
Fasilitas Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	636	323	763	761

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

6. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai Pada tingkat pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD)

hingga sekolah menengah pertama (SMP). Di tahun 2024 ketersediaan sekolah Kabupaten Mamuju memiliki jumlah gedung pendididkan dijenjang SD/MI sederajat 332 (SD sebanyak 311 unit sekolah dan Mi sebanyak 21 unit) dan jumlah gedung pendidikan tingakt SMP/Mts sederajat sebanyak 107 (SMP sebanyak 65 Unit dan Mts sebanyak 42 Unit)

Tabel dibawah menjelaskan bahwa kondisi rasio ketersediaan sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2024 untuk usia sekolah SD/MI mengalami penurunan pada tahun 2024 yang tercatat 1:97 dibandingkan pada tahun 2023, dan untuk usia sekolah SMP/MTS juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan tercatat 1:56 Hal ini disebabkan karena sudah mampunya fasilitas penunjang pendidikan untuk menampung semua penduduk usia sekolah disebabkan sudah ada fasilitas pendidikan yang direhab akibat dampak gempa di awal januari 2021.

Tabel 2.48 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI	1 : 122	1:95	1 : 119	1:97
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS	1 : 43	1:64	1 : 56	1:62

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

7. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sebaliknya nilai rasio yang rendah menunjukan adanya penguasan kelas yang lebih sehingga mutu pengajaran cenderung membaik.

Tabel 2.49 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	1 : 13	1 : 8	1 : 28	1:11

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar pada periode 2021-2024 mengalami fluktuatif, pada Tahun 2024 rasio guru/murid dirata-ratakan dari dari jumlah guru 2.891 dari 311 sekolah yang tersebar di 11 Kecamatan dengan jumlah siswa sebanyak 31.879 siswa. Walapaun rasio guru/murid menunjukkan adanya penguasaan kelas yang lebih baik namun indeks distribusi guru yang tidak merata banyak guru berpusat pada wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan sehingga menjadi perhatian dalam mengidentifikasi wilayah yang kekurangan guru khsusunya di wilayah 3 T.

8. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar

Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah guru pada satuan pendidikan (SD sederajat) per kelas dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan (SD sederajat). Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi penguasaan kelas oleh guru semakin tidak efetif.

Tabel 2.50 Rasio Guru/Murid Perkelas Rata Rata Sekolah Dasar Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024.

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Guru/Murid Perkelas Rata Rata Sekolah Dasar	1 : 69	1 : 61	1 : 63	1:63

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata sekolah dasar Kabupaten Mamuju tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif dan menunjukan pengelolaan kelas yang semakin efektif. Dengan angka capaian yang menunjukan pada satuan pendidikan (SD sederajat) mengatur jumlah kelompok belajar sesuai ketentuan Standar Sarana Prasarana Pendidikan sehingga penguasaan materi bagi siswa memperlihatkan kompetensinya dan bagi guru dapat

memperlihatkan penguasaan bahan ajar/materi. Pada tahun 2024 capaian rasio guru/murid per kelas rata-rata sebesar 1 : 63.

9. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah pertama

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.51 Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas Rata Rata Sekolah Menengah pertama Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Guru Jenjang SMP Terhadap Murid Perkelas Rata Rata	1 : 54	1 : 45	1 : 52	1 : 49

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Kabupaten Mamuju tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan sebaran guru di beberapa wilayah terpencil sudah ada penambahan. Pada tahun 2024 capaian guru terhadap murid per kelas rata- rata sebesar 1 : 49.

10. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar.

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Kabupaten Mamuju tahun 2022-2024 mengalami stagnan, pada tahun 2024 capaian kinerja pada indikator Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar tercatat sebesar 100 persen. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.52 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024.

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	100	100	100

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

11. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus.

Tabel 2.53 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki Laki Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024.

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki laki	93.03	93.86	94.52	95.32

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Angka melek huruf Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Pada tahun 2024 angka melek huruf Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 95.32 persen. Hal ini membuktikan tingkat kesadaran masyarakat terhadap begitu pentingnya baca tulis seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat.

12. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melaluipengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan

bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya.

Tabel 2.54 Guru Yang Memenuhi Kualikasi S1/DIV Kabupaten Mamuju 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	66.30	79.81	60.47	78.64

Sumber : DIKPORA Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari pada tahun 2024 daripada tahun sebelumnya sebesar 78.64 % atau jumlah guru di jenjang pendidikan PAUD,SD,SMP dan nonformal sebanyak 3.262 guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dari jumlah 4.148 guru disemua jenjang pendidikan.

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan.

1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan.

Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tahun 2024 Jumlah Posyandu di tahun 2023 adalah 424, dengan jumlah posyandu aktif adalah 424 atau 100%. Kategori penilaian posyandu aktif merujuk pada permenkes 13 tahun 2022 yaitu melakukan kegiatan rutin Posyandu satu kali dalam sebulan minimal 8 kali per tahun, memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau balita dan atau remaja dan atau usia produktif dan atau lansia, dan memiliki minimal 5 orang kader.

Berdasarkan tabel di bawah pada periode tahun 2022-2024 Rasio Posyandu per satuan balita masih fluktuatif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kualitas pelayanan posyandu yang belum maksimal. Pada tahun 2024 Rasio Posyandu per satuan balita mengalami penurunan dimana tercatat 16,40 per

1000 penduduk balita dan sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 15 per 1000 penduduk balita.

Tabel 2.55 Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Rasio Posyandu Persatuan Balita	17,43/1.000 PDDK BALITA	17,44/1.000 PDDK BALITA	16.40/1000 PDDK BALITA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

Pada tabel di bawah periode tahun 2020 – 2023 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk cenderung stabil. Pada tahun 2024 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 0,29 per 1000 penduduk karena pustu ada yang berkurang.

Tabel 2.56 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit per satuan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk	0,29 /1000 Penduduk	0,29 /1000 Penduduk	0,30 / 1000 Penduduk	0,29 / 1000 Penduduk
Rasio Rumah Sakit PerSatuan Penduduk	0,014 / 1000 Penduduk	0,017 / 1000 Penduduk	0,017 / 1000 Penduduk	0,020 / 1000 Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada periode tahun 2021 – 2023 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk tercatat sebesar 0,017 per 1000 penduduk sedangkan di Tahun 2024 mengalami peningkatan 0,20 hal ini berkaitan dengan adanya Rumah Sakit baru (RS. Punggawa Malolo).

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2024 tercatat ada 4 jumlah Rumah Sakit Umum terdiri dari RSUD Kabupaten Mamuju (1 Unit), Rumah Sakit Umum Provinsi (1 Unit) dan Rumah Sakit Swasta Mitra Manakarra (1 Unit) dan Rumah Sakit Bhayangkara (1 unit) untuk Rumah Sakit Khusus belum ada di Kabupaten Mamuju.

2. Ketersediaan Tenaga Kesehatan.

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di daerah tersebut selalu berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan dengan berbagai macam alasan yang mereka ajukan.

Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan melakukan penugasan khusus namun beberapa daerah tetap kosong peminat untuk bertugas didaerah tersebut.

Jumlah tenaga dokter di Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 sebanyak 99 orang. Jumlah tenaga dokter ini terdiri atas tenaga dokter PNS, tenaga dokter penugasan khusus, tenaga dokter sukarela dan tenaga dokter kontrak puskesmas.

Tabel di bawah menjelaskan bahwa pada periode tahun 2020 – 2024 Rasio Dokter per satuan Penduduk cenderung meningkat. pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,29 per 1000 penduduk dibandingkan sebelumnya di tahun 2021 sebesar 0,27 per 1000 penduduk. Pencapaian di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,30 per 1000 penduduk dan pada tahun 2024 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,34 per 1000 penduduk. Hal ini disebabkan adanya pemenuhan ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Mamuju.

Tabel 2.57 Rasio Dokter per satuan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Dokter PerSatuan Penduduk	0,27/1000 Penduduk	0,29/1000 Penduduk	0,30/1000 Penduduk	0,34/1000 Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,55 /1000 Penduduk	0,67 /1000 Penduduk	0,61/1000 Penduduk	0,68 /1000 Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada periode tahun 2020 – 2024 Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,55 per 1000 penduduk lalu mengalami peningkatan menjadi 0,67 per 1000 Penduduk pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,61 per 1000 penduduk lalu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 dimana rasio tenaga medis per satuan penduduk menjadi 0,68 per 1000 penduduk.

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan yang terdiri dari beberapa cakupan pelayanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani	574 (39)	793 (97,4)	564 (50,0%)	832 (99%)
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetisi Kebidanan	5.338 (76)	5.509 (98.1)	5.084 (89,3%)	4521 (97%)
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	31,4	58,8	33,3	31,6
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	90,1 %	85,2%
Cakupan Balita Pneumonia Yang ditangani	1,86	7,14	7,28	21,33
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	54,55	61,96	82.93 %	1054 (120,20%)
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderitaan Penyakit DBD	100	100	100	100
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	5.469 (74,3)	5.509 (98,1)	4.489 (78,8%)	4423 (95%)
Cakupan Pelayanan Nifas	5.538 (78,8)	5.546 (98,85)	4.936 (86,7%)	3989 (86%)

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	245 (24,4)	334 (42)	488 (61,4%)	576 (62%)
Cakupan Pelayanan Anak Balita	16.213 (67,6)	18.659 (78,4)	1.4534 (61,2%)	21.003 (81%)
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan	100	-	71 %	81%
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Setingkat SD	61,90	75,3	90,2	85,07 (data sementara)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan tahun 2024 bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2024 sebesar 99 persen yang mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 50,0 persen. Sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2024 sebesar 97 persen mengalami peningkatan dari tahun 2023 dimana cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 89,3 persen. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya peningkatan SDM yang kompeten dalam pelayanan komplikasi ibu hamil, meningkatkan deteksi dini komplikasi atau masalah kehamilan sejak dini oleh petugas kesehatan, serta adanya kerjasama lintas sektor dalam pelayanan tersebut.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mengalami penurunan sejak tahun 2022 sebesar 56,8% sampai tahun 2024 menjadi 31,6%. Hal ini dipengaruhi beberapa hal, di antaranya banyaknya orangtua yang tidak ingin anaknya diimunisasi, hoax yang beredar (anak sakit, lumpuh bahkan meninggal setelah mendapatkan imunisasi, efek simpang yang terjadi pasca imunisasi (demam, ruam, bengkak di bekas suntikan dan beberapa reaksi yang umum terjadi pasca imunisasi).

Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Mamuju yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 89,5 persen persen pada tahun 2023 mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 85,2% persen. Seluruh balita Gizi buruk sudah mendapatkan pelayanan kesehatan akan tetapi tidak semua sesuia standar tatalaksana gizi buruk, hal tersebut dipengaruhi oleh bebrapa Faktor seperti belum tersedia secara khusus bahan untuk membuat F75 dan F100 (formula dalam tata laksana Gizi) selain itu juga tidak sedikit keluarga yang menolak anaknya dirawat inap di PKM terlebih lagi kalau harus dirujuk ke Rumah Sakit sehingga perawatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih lebih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dan lain lain (Intervensi Sensitif dan Spesifik).

Cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Mamuju cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 Cakupan balita pneumonia yang ditangani sebesar 7,14 persen mengalami peningkatan menjadi 7,28 persen, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,28 persen dan di Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 21,33 persen hal ini disebabkan adanya pelacakan kasus secara aktif di wilayah Puskesmas.

Pada periode 2020 - 2023 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 65,71 persen mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 92,11 persen, hal ini disebabkan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA aktif massif, beberapa aspek sosial budaya yang melatar belakangi pertimbangan masyarakat dalam upaya pencarian pengobatan dan dianggap berkaitan dengan rendahnya cakupan penemuan TBC BTA yaitu masalah ekonomi, pendidikan/pengetahuan, dan persepsi, kebiasan/adat istiadat, dan kepercayaan, serta stigma social dan akses jangkauan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2021-2024 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama tiga tahun berturut– turut stagnan di angka 100 persen. Tingkat keberhasilan capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dipengaruhi antara lain, Jumlah penderita DBD yang ditangani dalam kurun waktu sesuai dengan SOP, adanya pemutusan rantai penularan melalaui penyemprotan fogging DBD.

Untuk cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4) untuk tahun 2024 sebesar 95 persen mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang cakupannya sebesar 78,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar. Pelayanan cakupan nifas tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 86% ini disebabkan karena adanya kujungan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan sebanyak 4 kali sampai 42 hari setelah persalinan untuk pelayanan kesehatan nifas dan edukasi tentang tanda bahaya nifas. Cakupan Komplikasi neonates tahun 2024 sebesar 62% mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 61,4 % ini disebabkan karena adanya grup konsultasi dokter spesialis anak dan spesialis Obgyn.

Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Mamuju tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 cakupan pelayanan anak balita sebesar 67,6 persen, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 78,4 persen, dan mengalami penurunan menjadi 61,2 persen pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 81 persen ini mengalami peningkatan dari tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarak urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan. Wasting merupakan sebuah kondisi ketika seorang anak memiliki berat badan rendah sehubungan dengan tinggi badannya. Seorang anak kurus memiliki berat badan rendah namun tinggi yang cukup. Tabel di bawah ini menunjukkan data Prevalensi Stunting/Underweight/Wasting di Kabupaten Mamuju dari Tahun 2021-2024.

Tabel 2.59 Prevalensi Stunting/Underweight/Wasting di Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	30,3% (SSGI)	33, 8% (SSGI)	32,8% (SKI)	SSGI Rencana rilis Maret 2025 (Data Rutin : 30,9

				Data Pengukuran Entry E-PPGBM))
Prevalensi Underweight	8,4% (SSGI)	8,2% (SSGI)	9,9% (SKI)	SSGI Rencana rilis Maret 2025 (Data Rutin : 20,9 Data Pengukuran Entry E-PPGBM))
Prevalensi Wasting	23,2% (SSGI)	21,5% (SSGI)	23, 3% (SKI)	SSGI Rencana rilis Maret 2025 (Data Rutin : 7,3 Data Pengukuran Entry E-PPGBM))

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 Prevalensi Stunting di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan dari tahun sebelumnya walaupun belum signifikan. Perevalensi stunting tahun 2022 di Kabupaten Mamuju adalah sebesar 33,8 persen menjadi 32,8 persen pada tahun 2023. Sedangkan untuk balita wasting dan underweight justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Prevalensi wasting tahun 2023 9,9% dari 8,2% pada tahun 2022, dan prevalensi Underweigth 23,3% pada tahun 2023 dari 21,5% pada tahun sebelumnya. Untuk data Survey satatus Gizi Indonesia tahun 2024 rencana akan rilis di Maret 2025, jadi sampai bulan bulan Februari 2025 belum ada data terkait Prevalensi Balita stunting, Prevalensi Balita Underweight dan Prevalensi Balira wasting.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan berbagai upaya baik dari intervensi spesifik maupun sensitif. Dengan melihat angka di atas maka perlu dilakukan upaya pencegahan yang lebih maksimal lagi dan secara kolaboratif baik lintas Program maupun Lintas Sektor dan stakeholder. Pencegahan harus menjadi prioritas dalam melakukan percepatan penurunan stunting di kabupaten Mamuju.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Cakupan pelayanan kesehatan puskesmas dalam setiap Kecamatan dalam bentuk persentase menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani warganya, khususnya dibidang kesehatan. Berdasarkan Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tercatat Jumlah Puskesmas Kesehatan Masyarakat sebanyak 23 Unit yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap sebanyak 10 unit, Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap 13 unit. Dan Puskesmas Pembantu sebanyak 57 Unit.

Tabel 2.60 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Cakupan Puskesmas	100%	100%	100%	100%
Cakupan Puskesmas Pembantu	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

a) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, namun kembali menurun di tahun 2023 menjadi 85,7%. Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 60,2%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya banyaknya orangtua yang tidak ingin anaknya diimunisasi, hoax yang beredar (anak sakit, lumpuh bahkan meninggal setelah mendapatkan imunisasi, efek simpang yang terjadi pasca imunisasi (demam, ruam, bengkak di bekas suntikan dan beberapa reaksi yang umum terjadi pasca imunisasi). Stok vaksin yang sering mengalami kekosongan juga memengaruhi pelayanan imunisasi yang diberikan pada bayi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat tetap diberikan edukasi terkait pentingnya imunisasi pada tahun-tahun mendatang mengingat pentingnya kekebalan anak terhadap penyakit campak yang merupakan investasi masa depan.

Tabel 2.61 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang dilmunisasi Campak Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak	75,6%	86,8%	85,7 %	60,2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

b) Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Acute Flaccit Paralysis atau lumpuh layu merupakan kelumpuhan atau paralisis secara fokal. Dari laporan Berdasarkan laporan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Tahun 2023 terjadi peningkatan kasus, dimana ditemukan 13 kasus AFP. Sedangkan pada tahun 2021 Jumlah 1 Kasus AFP. Pencapain penemuan kasus tersebut 3 kali lipat dari terget yang ditentukan yaitu 3 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2024 terjadi penurunan penemuan kasus, ditemukan 4 kasus AFP Rate dengan

target 2 / 100.000 penduduk, dikarenakan kurangnya respon keluarga sehingga mengakibatkan tidak adekuatnya spesimen.

Pemerintah Daerah telah melakukan penanganan diantaranya melakukan pelacakan kontak yang di curigai, memperluas jejaring informasi terkait kasus AFP dan memutus mata rantai penularan virus.

Tabel 2.62 Non Polio AFP Rate 100.000 Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
NonPolio AFP Rate 100.000 Penduduk	3 /100.000 Penduduk	2 / 100.000 Penduduk	2 / 100.000 Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

c) Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi.

1) Tuberkulosis (TBC)

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2024 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan fluktuatif menurun setiap tahunnya dari tahun 2020-2024. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan kesehatan dan dilaporkan di program terus meningkat. Ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC, keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena sigma yang masih ada di masyarakat, pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

Beberapa hal yang juga menjadi permasalahan tidak tersedia data temuan, hal ini kemungkinan disebabkan antara lain, belum adanya kewajiban pelaporan dari Rumah Sakit dan layanan Kesehatan dalam penemuan dan tatalaksana TB (mandatory notification), belum mengembangkan jejaring eksternal dalam program TBC, jejaring internal rumah sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus TBC yang ditemukan di beberapa poli RS tidak tercatat dan terlaporkan dengan baik di unit DOTS RS.

Tabel 2. 63 Tingkat Capaian Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	220 / 100.000 Penduduk	366 / 100.000 Penduduk	383 / 100.000 Penduduk
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk	10/ 100.000 penduduk	21 / 100.000 Penduduk	16 / 100.000 Penduduk
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	61,96%	92,11%	120,20%
Proporsi Kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS	86,49	87,87	85,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2022

2) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Walaupun angka kesakitan dan kematian akibat malaria di Indonesia saat ini cenderung menurun, namun demikian Pemerintah memandang malaria masih merupakan ancaman terhadap status kesehatan masyarakat terutama pada masyarakat yang hidup di daerah terpencil.

Tabel 2. 64 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka Kejadian Malaria	API<1 /1000 Penduduk	API<1 /1000 Penduduk	API<1 /1000 Penduduk	API<1 /1000 Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

Berdasarkan tabel diatas data dari tahun 2021-2024 Angka kejadian malaria dibawah 1 per 1000 penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah kasus malaria dalam satu tahun sangat rendah, menandakan keberhasilan dalam mengurangi penularan penyakit. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang berkontribusi dalam menekan angka kejadian malaria antara lain penemuan dini kasus malaria, penyelidikan epidemiologi malaria, surveilans migrasi, dan pengendalian vektor.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung eliminasi malaria juga berkontribusi besar terhadap penurunan angka API (Annual Parasite Incidence). Program eliminasi malaria yang mencakup pendistribusian alat pencegahan, vaksinasi di daerah, serta peningkatan pemantauan kasus telah mempercepat penurunan insidensi malaria.

3) HIV/AIDS.

*Virus imunodifisiensi manusia (*Human Immunodeficiency Virus) adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS virus ini menyerang kekebalan/imunitas tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi, dengan kata lain kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi (kekurangan) system imun. Perlu diketahui bahwa tubuh menjadi terinfeksi HIV bukan berarti kita menderita AIDS.

Pada periode 2022-2024 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi sebesar 0,005 persen. Hal ini menyatakan bahwa kasus HIV di Kabupaten Mamuju masih terkonsentrasi pada kelompok populasi kunci, Kurangnya tenaga penjangkau untuk penjangkauan menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pencegahan dan pengendalian HIV AIDS.

Tabel 2. 65HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,001%	0,002%	0,004%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

Pada periode tahun 2022-2024 Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 90 persen, tahun 2023 sebesar 96,50%, tahun 2024 sebesar 98,50%. Capaian sudah sesuai dengan target kinerja, hal ini disebabkan mulai adanya Sosialisasi pada penduduk Usia 15 - 24 Tahun terutama di sekolah – sekolah tingkat SMP dan SMA Sederajat dan perguruan tinggi dan juga genjarnya publikasi bahaya pergaulan bebas di media sosial tentang HIV AIDS dan IMS.

Tabel 2. 66 Proporsi Jumlah Peduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pegetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	52.401	56.447	57.641

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2022

4) Penderita Diare Yang Ditangani

Diare merupakan penyakit menular berbasis lingkungan. Penyakit ini akan tinggi apabila kondisi sanitasi lingkungan yang rendah dan tidak memenuhi syarat- syarat kesehatan, selain itu juga perilaku yang kurang sehat seperti mengonsumsi makanan yang tidak higienis juga sangat berpengaruh terhadap kejadian diare. Pada periode tahun 2021 – 2024 capaian kinerja penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan cakupan penemuan jumlah penderita.

Pada tahun tahun 2023 cakupan penemuan penderita diare yang ditangani adalah sebesar 72,65 persen. Kemudian pada tahun 2024 mengalami lonjakan yang cukup drastis yakni sebesar 197,14 persen, hal ini disebabkan karena kementerian mengurangi target penemuan kasus diare balita yang hanya sebesar 20% dari prevalensi penderita diare balita 15,6 % (berdasarkan SKI 2022), dan target penemuan diare semua umur sebesar 10% dari prevalensi diare semua umur sebesar 8,4% (berdasarkan RISKESDAS 2018).

Tabel 2. 67 Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Penderita Diare yang ditangani	24.9	49,78	72,65 %	197,14%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2025

5) Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Pada periode tahun 2022-2024 Penggunaan kondom bagi hubungan seks berisiko tinggi tiga tahun terakhir di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir sebesar 1.144 pengguna. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu sebesar 95%, Pada tahun 2023 sebesar 1.584 dan pada tahun 2024 sebesar 1.728 pengguna, capaian tersebut sudah melebihi

target kinerja, hal ini disebabkan banyaknya persediaan kondom yang tersedia di Layanan HIV dan IMS dan semakin teredukasinya kelompok populasi kunci dan populasi rentan terhadap pentingnya penggunaan kondom untuk mencegah penyakit menular seksual termasuk HIV dan IMS.

Tabel 2. 68 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	1.144	1.584	1.728

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 2024

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan daerah kabupaten/ kota tentang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup: Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Air Limbah; Drainase; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang.

Salah satu kebijakan dalam RPJMD yaitu: Meingkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan. Fokus pada urusan pekerjaan umum adalah peningkatan pembangunan jalan dan jembatan; peningkatan fungsi sarana dan prasarana drainase; peningkatan sarana air minum dan sanitasi.

Secara umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Mamuju masih dalam kondisi belum optimal. Kondisi ini terlihat dari beberapa capaian kinerja indikator yang cukup rendah. Capaian pelayanan urusan pekerjaan umum dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Jalan

NO KEC	NAMA KECAMATAN	PANJANG KM	TOTAL							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	Kecamatan Mamuju	**66,793**	28,15	42,14	11,63	17,4	4,20	6,28	22,83	34,18
2	Kecamatan Tapalang	**48,705**	6,55	13,45	1,89	3,88	0,54	1,11	39,72	81,56
3	Kecamatan Kalukku	**75,961**	27,71	36,48	9,86	12,98	5,00	6,58	32,38	42,63
4	Kecamatan Kalumpang	**43,788**	0,80	1,83	1,00	2,28	0,40	0,91	41,59	94,98
5	Kecamatan Papalang	**57, 202**	31,07	54,32	2,76	4,83	0,80	1,40	22,57	39,46
6	Kecamatan Sampaga	**37,439**	12,11	32,36	1,77	4,73	0,92	2,46	22,63	60,46
7	Kecamatan Tommo	**96,258**	9,82	10,20	4,40	4,57	3,00	3,12	79,04	82,11
8	Kecamatan Simboro	**64.026**	26,95	42,09	6,97	10,88	1,35	2,11	28,76	44,92
9	Kecamatan Tapalang Barat	**17,032**	5,23	30,70	0,84	4,91	0,15	0,88	10,82	63,51
10	Kecamatan Bonehau	**18,965**	2,28	12,02	0,84	4,43	0,41	2,16	15,43	81,39

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju 2024

Untuk mendukung progam percepatan pembangunan pada wilayah pelosok dan perbatasan guna mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Mamuju harus didukung dengan kondisi infrastruktur yang memadai seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Mamuju. Infrastuktur jalan merupakan sarana vital untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain. Semakin `1baik mutu jalan akan semakin cepat, mudah dan murah biaya angkutan barang/ jasa dari dan ke suatu daerah. Siklus kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat sehingga perekonomian dapat berkembang pesat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/97/kpts/1/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Mamuju, bahwa panjang jalan di Kabupaten Mamuju sebesar 666,86 km. Dan di cabut sejak 03 Januari 2023 di ganti dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 68 Tahun 2023.

Untuk penetapan ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Mamuju pada tahun 2016-2021 masih menggunakan panjang jalan yang secara keseluruhan 666,86 km sampai dengan akhir tahun 2022, namun pada tahun 2023-sampai dengan tahun berjalan (2025) total panjang keseluruhan sebesar 526,169 Km.Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kondisi jalan mantap mengalami tren kenaikan dari tahun 2020,2021,dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,4% dan 3,28% berturut turut, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian secara persentase secara signifikan di karenakan adanya ruas jalan kondisi baik yang berpindah kewenangan dari kewenangan kabupaten ke kewenangan Provinsi Sulawesi Barat Maupun ke Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat . Setelah mengalami perubahan SK jalan kewenangan,akhir tahun 2024 sesuai survey kondisi jalan yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, Kembali mengalami kenaikan sebesar 3,05%. Penyebab utama kerusakan jalan di Kabupaten Mamuju antara lain adalah Kapasitasi Jalan tidak sesuai dengan kendaraan yang akan melintas (Tonase), kondisi alam berupa pergerakan tanah yang intensitasnya sering dan curah hujan turut berkontribusi pada kerusakan kerusakan jalan.

Dari Tabel di atas diketahui bahwa terjadi pemerataan perbaikan jalan di seluruh wilayah kabupaten Mamuju yang tersebar di beberapa kecamatan. Seperti pada Kecamatan Mamuju dengan jumlah panjang jalan sepanjang 66,793 km terdapat sebesar 42,14% Jalan dalam kondisi Baik, sedangkan sebesar 34,18% masih dalam kondisi Rusak Berat. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi jalan Rusak Berat banyak terdapat di wilayah Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Bonehau

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju 2024

Secara umum lingkup Kabupaten Mamuju dapat dilihat bahwa Jalan Kondisi Baik sebesar 28,64%, Kondisi Sedang sebesar 7,97%, Kondisi Rusak Ringan 3,19% dan dalam Kondisi Rusak Berat sebesar 60,20% sehingga masih perlu perbaikan lebih siginifikan untuk mencapai Kondisi Jalan yang baik lebih dari 50%.

2) Drainase

Pemahaman secara umum mengenai drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.

Keberadaan drainase di Kabupaten Mamuju masih perlu mendapatkan perhatian karena persentase salurah drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 27,64% meskipun, setiap tahunnya menunjukkan trend peningkatan. Kerusakan drainase ini perlu segera ditangani karena drainase berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan. Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan serta bangunan yang ada. Pentingnya peningkatan kualitas saluran drainase salah satunya untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

3) Air Minum

Tabel 2. 69 Proyeksi Rumah Tangga atau Warga Negara di Kabupaten Mamuju Masyarakat (rumah tangga atau warga negara) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi

No.	Kecamatan	Target (Total Unit Rumah)	Terlayani JP (Rumah)	Terlayani BJP (Rumah)	Belum Terlayani (Rumah)
1	BONEHAU	2,327	974	961	392
2	KALUKKU	14,830	4,386	6,978	3,466
3	KALUMPANG	2,958	1,707	740	511
4	KEPULAUAN BALA BALAKANG	561	-	551	10
5	MAMUJU	16,350	8,301	1,794	6,255
6	PAPALANG	6,109	1,342	3,623	1,144
7	SAMPAGA	3,935	1,721	2,077	137
8	SIMBORO	9,616	3,890	4,875	851
9	TAPALANG	5,274	1,018	2,956	1,300
10	TAPALANG BARAT	2,986	383	948	1,655
11	TOMMO	6,069	629	1,292	4,148
	Grand Total	**71,015**	**24,351**	**26,795**	**19,869**

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan

dan dapat langsung diminum.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang urusan wajib pelayanan dasar SPM dan di harapkan melalui peraturan ini Kabupaten Mamuju dapat melaksanakan kewajiban dan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatatkan tren kenaikan kinerja setiap tahun hingga pada akhir pada tahun 2024 cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Mamuju sudah mencapai 72,02% dengan rincian sebesar 24.351 Rumah Tangga yang terlayani melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan sebesar 26.795 Rumah Tangga yang terlayani melalui Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dimana jenisnya seperti sumur, sumur bor dan media lainnya yang bukan perpipaan.

4) Penataan Ruang

Pelaksanaan kebijakan penataan ruang dilakukan dengan penyusunan dokumen rencana tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah sangat penting untuk mengarahkan pembangunan, baik fisik maupun sosial dan ekonomi. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersediannya dokumen perencanaan tata ruang juga terlihat dari indikator lain salah satunya rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB kabupaten Mamuju sebesar 1:1,6 kondisi ini perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan didalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Mamuju.

Sejauh ini telah selesai 2 dokumen RDTR, dari 11 target yang di rencanakan, tahun 2025 berjalan 2 wilayah perencanaan yang sedang di kerjakan, sementara layanan penerbitan KKPR, pertahun 2024 terbit sebanyak 122 rekomendasi.

5) Jasa Konstruksi

JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA OPERATOR DAN TEKNIS/ANALIS DI WILAYAH KABUPATEN MAMUJU					
TAHUN 2024					
NO	PEKERJAAN KONSTRUKSI APBD DAN NON APBD	JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI		JUMLAH	KET
		OPERATOR	TEKNISI /ANALISIS		
1	JALAN	4	6	10	
2	JEMBATAN	1	2	3	
3	TALUD	2	4	6	
4	IRIGASI	3	6	9	
5	AIR BERSIH	4	8	12	
6	SANITASI	2	4	6	
7	DRAINASE	1	2	3	
8	GEDUNG	4	6	10	
JUMLAH				59	

Jasa konstruksi adalah layanan yang mencakup tiga jenis kegiatan utama: jasa konsultasi perencanaan, jasa pelaksanaan pekerjaan, dan jasa konsultasi pengawasan untuk mewujudkan bangunan atau bentuk fisik lainnya. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti konsultan perencana, kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas, dan mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan.

Pentingnya Jasa Konstruksi yakni berdampak pada Pembangunan Infrastruktur: Jasa konstruksi menjadi pilar utama dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Dampak Ekonomi: Berkontribusi pada kegiatan ekonomi dengan membuka lapangan kerja dan menunjang kelancaran produksi serta distribusi barang dan jasa. Kualitas dan Keselamatan: Mengatur dan memastikan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas tinggi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat pengguna bangunan.

Dalam beberapapa tahun terakhir, kegiatan jasa konstruksi tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, selama ini tenaga jasa konstruksi mengikuti sertifikasi pada kegiatan yang dilakukan oleh Balai Kementrian PUPR atau Dinas PUPR Provinsi. Sebenarnya tahun ini Dinas PUPR Kabupaten Mamuju menganggarkan untuk kegiatan jasa kontruksi akan tetapi dilakukan refocusing.

Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	N/A	75.7	45%	45,01	54,55
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	N/A	10	10	10	10
3	Rasio panjang jalan Kondisi Mantap	Persen	315.62 / 666.86	324.87 / 666.86	365.11 / 666.86	194.34 / 526.17	210,45 / 526.17
4	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	N/A	58	45%	45,01	54,55
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	N/A	C	B	B	B
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	47.32	48.72	52%	36,94 %	39,99
7	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	N/A	55	41.92	41	43,30
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	N/A	25	13	15,49	17,29
9	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	68	69	70	71,7	72,02
10	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	N/A	N/A	N/A	15.33	N/A

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase rumah tangga yangmemperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	60.01	73	73.87	74.05	75,24
12	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	26	21.49	27	27,10	27,64
13	Persentase infrasturktur jalan permukiman kondisi baik	Persen	N/A	30	30	47	N/A
14	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	N/A	24.3	26.99	25	28,34
15	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	Persen	N/A	10.3	N/A	N/A	N/A
16	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	N/A	10	N/A	N/A	N/A
17	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	N/A	N/A	N/A	9	18

Sumber: DPUPR Kabupaten Mamuju, 2025

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Di Kabupaten Mamuju masih terdapat rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan. Dalam rangka meningkatkan kelayakan tempat tinggal penduduk miskin, pemerintah daerah setiap tahun melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga memenuhi standar rumah layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu menjadi prioritas dalam pembangunan perumahan. Pengembangan kerjasama dengan pengembang dalam penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak. Selain itu pemerintah daerah juga perlu mendorong agar pengembang meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai. Pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dari segi kuantitas relatif tercukupi, namun perlu adanya peningkatan kualitas terkait pemenuhan kelayakan untuk di huni dan pemenuhan persyaratan kesehatan. Penyediaan Rumah layak huni lebih banyak dilakukan Oleh SATKER SNVT perumahan di Kabupaten Mamuju,

Seluruh wilayah Kabupaten Mamuju terbagi menjadi beberapa kawasan penggunaan lahan, diantaranya adalah lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman masih terbagi atas beberapa kawasan salah satunya adalah kawasan pemukiman kumuh.

Permukiman kumuh disebabkan adanya perpindahan penduduk luar kota dari desa yang terus menerus terjadi. Perpindahan ini menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan, sehingga untuk keberlanjutan hidup para penduduk tinggal didaerah daerah yang tidak layak huni.

Kawasan kumuh Perkotaan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Mamuju. Kawasan permukiman kumuh Perkotaan yang perlu menjadi prioritas seluas 71,52 ha, meliputi empat Kelurahan di Kecamatan Mamuju, yaitu: Simboro, Binanga, Rimuku, dan Karema. Kawasan kumuh perkotaan Danga seluas 10,8 ha terletak di Kelurahan Binanga, Kawasan Kasiwa Seluas 16,44 Ha terletak di Kelurahan Binanga, Kawasan Kanal Rimuku Seluas 12,14 Ha terletak di Kelurahan Rimuku, Kawasan Karema Selatan Seluas 6,12 Ha Di kelurahan Karema, Kawasan Terminal Simbuang Seluas 5,86 Ha Terletak di Kelurahan Simboro, Kawasan Korongana Seluas 11,44 Ha Terletak di Kelurahan Korongana dan Kawasan Lingkungan Padang Panga Seluas 9,33 Terletak di kelurahan Karema. Pemerintah Kabupaten Mamuju terus melakukan pembenahan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh melalui perbaikan sistem drainase lingkungan, pembangunan jalan lingkungan, dan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

Untuk capaian indikator kinerja utama RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 71 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju

No	Uraian	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	%	10	N/A	10	N/A	N/A	N/A
2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	55	N/A	81,23%	76,03%	83,42%	76,68%

No	Uraian	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Rasio Rumah layak huni		1:6	1:6	1:5	1:6	1,4	1,5
4	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,85	N/A	0,01	1	0,01	1
5	Nilai AKIP OPD	Level	B	B	B	B	B	B
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	79,39%	75,41%	79,39%	75,41%	83,42%	76,68%
7	Persentase Permukiman yang tertata	%	11	0,08	11	0,08	15,79%	15,79%
8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	%	80	4,5	20%	20%	50%	60%
9	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	%	30%	0	40%	0	45%	N/A
10	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	49,64	71,52	49,64	71,52	4,9	21,31

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Pemrmukiman dan Pertanahan, 2024

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perkataan aman mengandung 4 (empat) pengertian dasar antara lain; security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, surety yaitu persaan bebas dari kekhawatiran, safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya dan percaya itu perasaan damai secara lahiriah dan batiniah.

Amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal148 ayat (1) menyebutkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 149 (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian secara teknis dalam mengaplikasikan UU 32 Tahun

2004 tersebut sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertibanumum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas dalam mengamankan dan menegakkan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan peraturan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP dalam melaksanakannya mengalami beberapa kendala dan permasalahan ketika berada di lapangan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Permasalahan dan kendala yang timbul terjadi ketika Satpol PP melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang akan berimplikasikan pada sudut pandang masyarakat melihat kinerja Satpol PP dipersepsikan kurang memihak kepada masyarakat, persepsi yang kurang mendukung terhadap kinerja Satpol PP merupakan bagian dari permasalahan dan kendala yang muncul di lapangan.

Untuk mengetahui capaian kinerja Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dapat dilihat melalui 4 (empat) indikator sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian target kenerja, antara lain ; Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu 95 persen mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2023 capaiannya 90 persen hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya peningkatan dan pengawasan serta penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satunan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dengan tingkat capaian 95 persen di tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 95 persen. Selanjutnya Berdasarkan tabel dibawah indicator Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum mencapai yang ditargetkan 100 persen, tahun 2024 mencapai 90 Persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5 persen, rata- rata masih menggunakan waktu diatas 15 menit, hal ini dikarenakan semakin

cepat response time yang di lakukan oleh personil pemadam Kebakaran hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya kinerja Dinas satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju dalam melayani masyarakat. Adapun hal lainnya yang menyebabkan tingkat capaian response time rate masih belum tercapai sesuai yang ditargetkan adalah dikarenakan keterbatasan sebaran pos damkar yang ada, jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran, serta jumlah personil jika dibandingkan luas wilayah volume permasalahan yang dihadapi. Sedangkan untuk indikator Persentase Penegakan PERDA di tahun 2023 mencapai 90 persen hal ini mengalami peningkatan, di tahun 2024 sebesar 95 persen dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung sudah memadai serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan Hukum yang ada mengalami peningkatan.

Dengan adanya capaian kinerja Urusan wajib pelayanan dasar ini maka telah mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Gambaran capaian kinerja Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu 2021-2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	90%	95%
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	95%	95%
3	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	85%	90%
4	Persentase Penegakan PERDA	80%	90%	95%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Mamuju, 2024

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dijelaskan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut.

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Sementara wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Adapun Hasil kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah Pada Tahun sesuai Indikator pada RPJMD Tahun 2021-

2026 dapat dilihat melalui 4 (empat) indikator utama sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian kinerja, antara lain : yang pertama Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 31,01 persen hal ini mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan pada tahun 2023 dengan mencapai 7.64 Persen peningkatan ini di karenakan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di desa Siraun dan Desa Karataun Kecamatan Kalumpang mengakibatkan 4 Desa terisolasi yang disebabkan oleh tumpukan material longsoran berupa tanah dan batu. Upaya yang dilakukan BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR dalam rangka mengarahkan sumber daya yang dimiliki berupa alat berat exkapator 2 unit untuk mengeruk atau menyingkirkan longsoran dan batu besar yang berada dibadan jalan sehingga akses jalan tersebut dapat di gunakan kembali agar masyarakat tidak terisolasi

Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai angka 100 persen sama dengan Tahun 2023 juga mencapai 100% hal ini dikarenakan;

1. Peningkatan pelayanan dalam hal respon cepat layanan informasi
2. Tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan.
3. Komunikasi Informasi dan edukasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
4. Meningkatkan layanan Informasi dengan cara memasang papan-papan informasi di lokasi rawan bencana.

Persentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan ditahun 2024 telah mengalami peningkatan dengan mencapai target 100 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 80 persen, hal ini disebabkan BPBD telah melakukan kegiatan pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kepada kelompok masyarakat, dalam rangka penguatan kapasitas kawasan, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi (RENKON) walau dokumen tersebut belum dinyatakan syah / legal ,juga telah diadakan Pengelolaan Resiko bencana, dalam rangka penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada pada tahun 2024 tingkat

capaiannya sebesar 100 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang capaiannya 96 persen, hal ini disebabkan:

1. Tersedianya Tenaga Penanganan bencana (TRC) yang melakukan posko 24 jam untuk merespon cepat keadaan darurat bencana di wilayah kabupaten Mamuju .
2. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemerintah semakin sadar akan pentingnya penyelamatan dan evakuasi korban dalam situasi darurat
3. Meningkatnya sarana melalui dukungan BNPB
4. Kemudahan akses dalam menjangkau lokasi bencana
5. Peran aktif pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha)

Persentase Desa Tangguh Bencana pada tahun 2024 angka capaian 41,58 masih sama dengan di tahun 2023, dikarenakan minimnya anggaran untuk melakukan pengukuhan Desa tangguh bencana di beberapa kecamatan.

Cakupan pelayanan Penanggulangan bencana untuk tahun 2024 dengan target 65 persen realisasi mencapai 70 persen dengan capaian diatas 100 hal ini disebabkan karena Peningkatan kualitas Pelatihan dan pendidikan bagi personil penanggulangan bencanajuga berkontribusi pada peningkatan cakupan layanan disamping itu peningkatan kesadaran kepedulian masyarakat dan pemerintah semakin sadar akan risiko bencana dan pentingnya penanggulangan bencana.

Capaian Indikator tersebut diatas telah mendukung pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Gambaran capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang juga dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu 2022-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	23,42	7.64	31.01

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
2	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	80	100	100
3.	Presentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	80	100	100
4	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	80	86	100
5	Cakupan Pelayanan Penanggulanagan Bencana	Persen	65	98	70
6	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	41,58	41,58	N/A

Sumber : BPBD Kabupaten Mamuju 2025

F. Urusan Sosial.

Permasalahan sosial merupakan permasalahan kompleks, dan membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif dari pemerintah, salah satunya adalah masalah fakir miskin, sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial menyebutkan Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat Miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan

sosial. Pada Tahun 2024 jumlah PMKS adalah 141.063 jiwa yang telah terlayani dengan jumlah fakir miskin sebesar 139.702 jiwa. Data selengkapnya selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2022-2024) dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 74 Kategori dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

No	Jenis PMKS	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	1 org	Tidak ada data balita terlantar	2 org
2	Anak Terlantar	3 org	47 org	-
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	50 org	65 0rg	49 org
4	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	2 org	4 org	13 org
5	Lanjut Usia Terlantar	16 org	427 org	15 org
6	Penyandang Disabilitas	6 org	301 org	37 org
7	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	6 org	Belum ada data dari Lembaga yang menangani ODHA	N/A
8	Korban Bencana Alam	8839 kk	274kk/546 jiwa	271 kk/1128 jiwa
9	Korban Bencana Sosial	23 kk	108kk/1109 jiwa	24 kk/104 jiwa
10	Fakir Miskin	148.529 RTM	145.294 RTM	139.702 RTM/47.385 KK
	JUMLAH	**157.475**	**147.905**	**141.063**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, 2025

Pembangunan pada urusan sosial masih dihadapkan pada masalah banyaknya PMKS (dapat dilihat pada tabel II-71). Penanganan PMKS menjadi tanggung jawab bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Lembaga terkait lainnya. Penanganan PMKS di Kabupaten Mamuju masih perlu upaya penanganan yang serius dan terkoordinasi disemua level pemangku kepentingan.

Selain Kesejahteraan Sosial Urusan Sosial juga memiliki kewenangan dalam penangulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

2) Bantuan Sosial.

Urusan sosial masih terfokus pada kesiapan bantuan bencana alam, penanggulangan permasalahan kemiskinan serta peningkatan taraf hidup penyandang cacat, anak balita terlantar, dan lanjut usia terlantar. Upaya untuk mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Mamuju dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pemberian pelatihan kepada para PMKS dengan tujuan meningkatkan keterampilan mereka. Fakir miskin dan PMKS yang menerima kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Gambaran PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dapat dilihat pada tabel II-72 berikut ini :

Tabel 2. 75 Gambaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Mamuju

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	100%	100%	100 %
2	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100 %
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	100 %
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100 %
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial	100%	Tidak ada	Tidak ada terpilah

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, 2024

Secara umum menurut data dari table diatas penyandang masalah kesejahteraan social yang memperoleh bantuan social di Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 sebanyak 100 persen dan PMKS yang tertangani di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2024 juga sebanyak 100 persen.

PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan korban bencana alam yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat masing masing dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah mencapai target sebesar 100 persen.

Sedangkan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima bantuan social pada tahun 2022 sebesar 100 persen, mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu menjadi 0 persen, karena tidak ada data terpilah dari Dinas, dari tabel diatas menandakan bahwa pemerintah kabupaten Mamuju telah serius dalam menagani masalah PMKS khususnya dalam pemberian bantuan. Namun mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 0 persen dikarenakan tidak adanya data terpilah dari Dinas.

2.4.5.2 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar.

A. Urusan Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten dalam urusan tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Disamping meningkatkan kapasitas tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menyediakan/membuka lapangan kerja serta dapat menciptakan iklim yang kondunsif yang tercermin dalam hubungan industrial tenaga kerja yang harmonis antara perusahaan/ instansi selaku pengguna dengan tenaga kerja.

Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehinggs tidak mampu terserap dengan baik. Pengangguran seringkali menjadi permasalahan perekonomian, karena produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Untuk itu pengangguran terbuka menjadi salah satu fokus dari pemerintah Kabupaten Mamuju, karena modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Disamping itu pemerintah juga berusaha meningkatkan kapasits tenaga kerja, pemerintah kabupaten juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam hubungan industrial tenaga kerja yang harmonis antara perusahaan dengan tenaga

kerja. Berikut pencapaian kinerja ketenagakerjaan berdasarkan permendagri 86 tahun 2017:

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Sesuai Permendagri 86-2017 Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2022	2023	2024
1	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	150.881	155.018	159,252
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,24	70,92	70,83
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,79	3,06	3,46
4	Rasio penduduk yang bekerja	Orang	145.158	156.163	224,846

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlah perselisihan buruh dan pengusaha tergolong tidak banyak masih dibawah 10 kasus dari 1439 perusahaan.

Tabel 2. 77 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda	7	9	0

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda tidak ada kasus. Hal ini terjadi karena sudah ada kesepahaman terkait perselisihan hak dan kepentingan antar pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja, oleh karena itu sangat penting untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan kerja yang kondusif.

Adanya keluwesan dalam pengaturan dan komunikasi merupakan kunci dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang akan atau telah terjadi.

Keluwesan dalam melakukan managerial yang didukung oleh budaya kedua pihak, tidak hanya berguna untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, namun juga mempererat hubungan diantara pekerja dan pengusaha. Budaya lokal seperti musyawarah dan mufakat untuk melakukan evaluasi dan penyampaian pendapat dengan komunikasi yang baik, mampu menutupi dan memperbaiki perselisihan yang terjadi. Mediator sebagai penjembatan tentunya harus bersifat netral dan memiliki kesadaran untuk mampumenyelesaikan permasalahan berdasar objektif kedua pihak.

2. Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB).

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini harus menjadi perhatian bagi mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi berwenang untuk melakukan mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada Kabupaten/Kota; Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Provinsi; dan memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 78 Yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	9	2	3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025

3. Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang tiga tahun terakhir jumlah pencari kerja yang ditempatkan

menunjukkan jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 512, dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 620. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut dibawah ini.

Tabel 2. 79 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	512	620	620

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024

Dari table diatas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 disebabkan karena permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja, selain itu disebabkan karena ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu perlunya menciptakan lahan baru agar pasar kerja dapat menyerap pencari kerja yang siap untuk bekerja.

4. Jumlah Pekerja/Buruh peserta JAMSOSTEK

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil dan bersalin.

Tabel 2. 80 Jumlah Pekerja/Buruh peserta JAMSOSTEK Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Pekerja/Buruh peserta JAMSOSTEK	8.135	7.719	4.693

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024

Dari table di atas terlihat bahwa kepesertaan pekerja/buruh dalam JAMSOSTEK menurun di tahun 2023 yaitu sebanyak 7,719 peserta dan pada tahun 2024 masih mengalami penurunan sebesar 4.693 pekerja/buruh. Hal ini karena perusahaan masih ada yang belum memasukkan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan social tenaga kerja, begitu pentingnya perusahaan

tersebut melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi.

5. Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar.

Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada pejabat yang telah ditunjuk. Wajib lapor perusahaan memiliki arti yang cukup penting bagi perusahaan. Dengan melapor wajib lapor tenaga kerja, berarti perusahaan telah menghindari sanksi pidana.

Tabel 2. 81 Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar	1.430	1.430	1.433

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024

Dari table diatas terlihat bahwa di Tahun 2023 ada sejumlah 1.430 perusahaan yang telah mendaftarkan/melaporkan keadaan ketenagakerjaannya secara pertama dan berkala sesuai dengan prosedur dan perundang undangan yang berlaku dan pada tahun 2024 telah ada peningkatan sebesar 1.433 perusahaan.

6. Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat, dan Pelatihan Kewirausahaan.

Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari pelatihan di lembaga pelatihan/off the job training, penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, on the job training, penilaian/asesmen di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi.

Tabel 2. 82 Jumlah Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	15	20

Jumlah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	40	10
Jumlah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	60	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024

Dari table diatas dapat dilihat pendaftar pelatihan hanya pada pelatihan berbasis masyarakat di tahun 2023 sebanyak 40 pendaftar dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10 pendaftar.

7. Jumlah Lulusan S1/S2/S3

Jumlah lulusan S1 tahun 2022 sebesar 80 orang, namun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 127 orang dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 204 orang. Jumlah Kelulusan di Tahun 2024 meningkat Dari Keterangan tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 83 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Lulusan S1	80	127	204
Jumlah Lulusan S2	0	2	0
Jumlah Lulusan S3	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024

Dapat juga kita lihat tabel capaian kinerja tenaga kerja sesuai RPJMD tahun 2021 – 2026 sebagai beriku:

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Sesuai RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Mamuju 2 tahun terkahir (2022-2024)

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
1	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	3,15	3,2	3,5
2	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B
3	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	100	100	100
4	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	%	0	15	20
5	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45	50	65
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	44	46	46

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, di kabupaten Mamuju di Pimpin oleh perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 2. 84 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	58,46	61,83	53,7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, baik eksekutif dan yudikatif di Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 berada pada angka 58,46 persen, kemudian pada Tahun 2023 terjadi peningkatan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan sebesar 61,83. Dan pada tahun 2024 angka Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan mengalami penurunan sebesar 53,7 persen. Hal tersebut terjadi karena jumlah ASN pada lembaga pemerintah menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah ASN Laki-laki dan perempuan tidak terjadi kesenjangan yang signifikan, Hal ini didukung karena Bupati Mamuju yang menjabat saat ini adalah seorang Perempuan sehingga sudah mulai memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.

2. Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPRD

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam

dunia politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Tabel 2. 85 Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	10	10	6,67

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat di Kabupaten Mamuju, persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami stagnan sebesar 10 persen. Hal ini karena periodesasi anggota DPRD Kabupaten Mamuju adalah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Berdasarkan data yang tercantum, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Jika dilihat data pada dua tahun terakhir, pada tahun 2022 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 persen.

Tabel 2. 86 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	77	88	57

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Pada table di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ini terjadi pada perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan sebesar 77 Orang, Pada tahun 2023 Korban Kekerasan

Perempuan dan Anak sebesar 88 Orang dan Tahun 2024 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebanyak 57 Orang yang mendapatkan penanganan . Jadi dari tabel di atas menunjukkan tahun 2022 Terjadi kenaikan korban Perempuan dan Anak Sebanyak 88 Orang ditahun 2023 dan dari tahun 2024 ini terjadi penurunan angka yang cukup signifikat pada korban perempuan dan anak sebanyak 57 orang.

Semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih, hal ini merujuk pada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban.

4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit realisasi sebesar 59,61 persen pada tahun 2024. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 61,36 persen. Semua kasus korban kekerasan akan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasien/klien difasilitasi kesehatan akan terlayani berdasarkan tingkat keterpaparannya/diagnose hasil pemeriksaan, terkecuali pada kasus kasus tertentu pasien/klien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau pelayanan khusus.

Tabel 2. 87 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit	60	61,36	59,61

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

5. Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang mengalami disfungsisosial/ traumatik sehingga klien/korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat, lembaga/petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka menindak lanjuti kasus klien. Berdasarkan tabel bahwa cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2022-2023 rata-rata korban yang mendapatkan rehabsos sebanyak 17.05 persen, pada tahun 2024 korban kekerasan tidak ada.Diharapkan semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih.

Tabel 2. 88 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu.	20	17,05	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 ini terdapat hanya 17.05 persen cakupan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya kualitas layanan perlindungan khusus perempuan dan anak itu sendiri Pada tahun 2024 tidak ada korban kekerasan Perermpuan dan anak Yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi sosial.

6. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju sejak dua tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 56 persen. Kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar 52 persen dan tahun Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh Penyidik seluruhnya terproses dan dikawal oleh pendamping dari P2TP2A Maupun Unit PPA, Polres/Polsek ketingkat pengadilan, demikian pula tingkat kejaksaan tetap terproses dengan baik hingga putusan.

Tabel 2.88 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyedikan sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	56	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Meningkatnya layanan perlindungan khusus perempuan dan anak mengakibatkan Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum kurun waktu dua tahun (2022-2023 dan 2024) data realisasi 100 persen. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

Tabel 2.89 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	80	88	57

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Semua korban yang lanjut ditingkat Penyelikan yang lanjut ketingkat kejaksaan dan Tingkat Pengadilan mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan . kecuali korban yang bisa diselesaikan kasusnya secara damai atau dicaput laporannnya.

8. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15- 24 Tahun Dalam kurun waktu (2020-2021) di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa masih ada perempuan yang buta huruf pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki belum mencapai nilai 100 persen namun dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami stagnan disetiap tahunnya.

Tabel 2.92 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia15-24 Tahun	99,81	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Dari tabel di atas, Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun cukup memprihatinkan ditahun 2022 ini, dimana pada kasus ini terjadi kenaikan pada angka 99,81 persen yang dimana pada tahun sebelumnya besaran nilainya sebanyak 85 persen.

C. Urusan Pangan

Kabupaten Mamuju dalam rangka melaksanakan penguatan pangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga pangan pada saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (Penguatan-LDPM). Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

Gambaran capaian kinerja urusan Pangan yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sesuai indikator Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras) dengan realisasi capaian kinerja ditahun 2023 sebesar 45,7 % (79,5 Ton) sedangkan untuk tahun 2024 realisasi sebesar 63,7 % (111 Ton) sehingga mengalami kenaikan sebesar 18 % sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Bapanas sebesar 95 Ton. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mamuju akan digunakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan pada saat terjadi bencana alam atau gagal panen akibat kemarau panjang. Pangan utama di Indonesia identik dengan beras karena jenis ini merupakan makanan pokok utama, di Kabupaten Mamuju ketersediaan beras atau pangan utama tahun 2023 dengan jumlah 125.42 kg/Thn (beras/jiwa) meningkat menjadi 130,77 kg/Thn (beras/jiwa) di tahun 2024.

Berdasarkan capaian ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Mamuju diperoleh capaian ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2024 sebesar 3.122 kkal lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.121 kkal hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya perkiraan ketersediaan energi kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula, untuk ketersediaan protein per kapita per hari di tahun 2024 diperoleh sebesar 106,83 gram lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 124,70 gram, karena turunnya perkiraan ketersediaan protein dari kelompok pangan hewani. Dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnnya, skor PPH ketersediaan mengalami peningkatan yaitu 95,25 pada tahun 2023 menjadi 95,28 pada tahun 2024. Skor PPH ketersediaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan pada skor kelompok bahan pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula.

Capaian kinerja Persentase Keamanan Pangan diperoleh capaian kinerja sebesar 100 % dari target 100 %, berdasarkan hasil pengujian rapid test pestisida secara kualitatif sebanyak 20 sampel buah dan sayur yang diuji, hasil pengujian rapid test pestisida secara keseluruhan diperoleh hasil negatif sehingga pangan aman untuk dikonsumsi dan bebas dari cemaran pestisida.

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/Thn (Beras/Jiwa)	121,8	130.8	125,42	130,77
2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/Kap/Hr	2.981	3.009	3.121	3.122
3	Ketersediaan protein perkapita	Gr/Kap/Hr	105,81	102,77	124,70	106,83
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	85	85	85	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

D. Urusan Lingkungan Hidup

Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup (IPLH) atau izin persetujuan penggunaan lahan (IPLH) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah proses penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi peraturan lingkungan dan tidak merusak lingkungan hidup.

Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses pengawasan ini:

- Pemeriksaan Administrasi: Memastikan bahwa semua dokumen izin dan laporan lingkungan telah disiapkan dan lengkap.
- Pemeriksaan Lapangan: Mengunjungi lokasi usaha atau kegiatan untuk memeriksa ketaatan terhadap izin yang diterbitkan.
- Evaluasi Dampak Lingkungan: Menilai apakah usaha atau kegiatan tersebut memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.
- Pemberian Sanksi: Memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan.
- Pengawasan Berkala: Melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terus-menerus.

Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan bahwa usaha dan kegiatan tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan Pada tahun 2024 DLHK cuma dapat melakukan pengawasan terkait pelaku usaha yaitu 16 (Enam Belas) Peku

Usaha / Kegaiatan yang di mana di target pada tahun 2024 yaitu 30 Pelaku Usaha / Kegiatan.

Tabel 2.95 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izinlingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	39	16	16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, 2025

1. Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air menjadi istilah sederhana misalnya Excelent, good, and bad. Ini mencerminkan tingkat kualitas air di sungai, sungai, dan danau.

Hasil pengukuran indeks kualitas air di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 53.89, hal ini disebabkan karena Kurangnya Jumlah Pemantauan dan Keterbatasan Anggaran, yang dimana Jumlah titik pantau air yaitu 30 yang terdiri 10 sungai dan 3 titik pengujian sampel di setiap sungai.

Tabel 2.96 Indeks Kualitas Air Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	**0**	**60**	**55,67**	**53,89**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, 2025

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Pengukuran indeks kualitas udara di Kabupaten Mamuju menggunakan data dari Passive Sampler, yang mana diambil pada 4 (empat) titik, yaitu: daerah padat transportasi, daerah/kawasan industri, pemukiman penduduk, dan kawasan komersil/perkantoran.

Tabel 2.97 Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	102,04	94,19	98,89	88,96

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki Realisasi sebesar 94,89 dan memeiliki target 89.90. Ditahun 2024 Indeks Kualitas Udara memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,76 %, data ini menunjukkan adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 dan memiliki 5 Titik pemantauan di anata lain yaitu AQM, Industri, Pemukiman, dan Transportasi.

3. Indeks Kualitas Lahan

Hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat vital baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh kabupaten Mamuju. Berdasarkan data, Tutupan Vegetasi di Kabupaten Mamuju sebesar 12.933276 ha, dan Luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 155.279696, yang dimana capaian IKL ini sebesar 83.88 dan melebihi target yang telah ditentukan

Tabel 2.98 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	2022	2023	2024
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	83,25	83,45	83,88

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, 2025

4. Pembuangan Sampah Penduduk

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2024 jumlah timbunan sampah perkotaan (Kecamatan Mamuju dan Simboro) yang tertangani sebesar 17,71 persen. Di tahun 2024 cakupan area pelayanan persampahan tetap sama ditahun sebelumnya yaitu sebesar 6,62 persen. Hal ini tidak adanya perubahan luasan area pelayanan pengelolaan sampah dari Kecamatan Mamuju sekitar 22,159 Ha dan Kecamatan Simboro sekitar 3,301 Ha. Jumlah di bawa dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.99 Cakupan Pembuangan Sampah Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Sampah	16.48 %	15.33%	14.95%	17.71%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, 2025

E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Akta kelahiran merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah terhadap bayi yang lahir, pemenuhannya harus dilakukan oleh orang tua bayi yang bersangkutan. Bayi merupakan anak berusia 0-5 tahun, pada tahun 2022 dan tahun 2023 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 92 % atau sebesar 21.146 dari total jumlah penduduk 22.876 jiwa. Sementara kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk sebesar 84.496 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Mamuju 0-18 Tahun sebesar 106.026. Hal ini menunjukkan masih banyak penduduk Kabupaten Mamuju yang belum memiliki akta kelahiran.

Pada Tahun 2023 Berdasarkan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 Tahun Penduduk Usia 0-17 Taahun Laki2 52.735 Perempuan 48.688 Jumlah 101.423 Jiwa, Kepemilikan akte kelahiran Laki2 48.056, Perempuan 44.778 Total 92.834 (92%) dan yang belum memiliki 8.589 atau 8.47%. Adapun 8,47% yng belum memiliki disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyrakat untuk melaporkan peristiwa kelahiran anaknya untuk dibuatkan akte kelahiran serta Masyarakat Mamuju masih menilai bahwa akta kelahiran bukanlah sesuatu yang penting untuk dimiliki. Masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran jika diperlukan, seperti saat anak akan sekolah.

Sedangkan terkait Akta nikah merupakan bukti yang sah telah terjadinya pernikahan satu pasangan. Besaran pasangan yang melakukan pernikahan dan memiliki akta nikah tahun sebelumnya di Kabupaten Mamuju masih sangat rendah yaitu sebesar 35.616 jiwa dan jumlah penduduk yang belum memiliki akta nikah sebesar 86.544 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2023 Berdasarkan akte perkawinan dari peristiwa perkawinan yang dilaporkan berdasarkan jenis kelamin Laki2 : 60.652, Perempuan 61.751 Jumlah 122.403, adapun jumlah akta perkawinan yang diterbitkan berdasrkan jenis kelamin Laki2: 24.720 Perempuan : 24.460 jumlah 49.180 atau 40.18%.

Dengan melihat Indikator Rasio bayi berakte Kelahiran Pada Tahun 2022 Tercapai 92%, Pada Tahun 2023 tercapai 92% dan pada Tahun 2024 Tercapai sebesar 93%. Rata-rata capaian pada 3 Tahun Terakhir sebesar 92%.

Indikator Rasio Pasangan yang berakte Nikah pada tahun 2022 42%, pada tahun 2023 sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2024 Sebesar 43%. Rata-rata capaian pada 3 Tahun terakhir sebesar 42%.

Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Pada Tahun 2022 Tercapai 92%, Pada Tahun 2023 tercapai 92% dan pada Tahun 2024 Tercapai sebesar 93%. Rata-rata capaian pada 3 Tahun Terakhir sebesar 92%.

Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dari pasangan yang telah melakukan pernikahan masih sangat minim.Gambaran capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga dilaksanakan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	2022	2023	2024
Rasio bayi berakte kelahiran	92%	92%	93%
Rasio pasangan berakte nikah	42%	40%	43%
Cakupan penerbitan akta kelahiran	92%	92%	93%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju 2025

F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat teknis dalam pelaksanaan pembangunan di desa Pembangunan di desa yang telah dilaksanakan melalui dana desa dan alokasi dana desa dapat mendongkrak capaian kinerja urusan pemberdayan masyarakat dan desa. Peningkatan kapasitas aparatur di desa merupakan hal yang penting guna peningkatan aksebilitas manajemen dan pengelolaan anggaran di desa. Peningkatan jumlah BUMDes juga sangat dihrapkan karena BUMDes merupakan prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan di desa. Hasil dari pembangunan desa adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa dalam pembangunan desa. Kemandirian desa dapat dilihat dari capaian indeks desa membangun pada strata desa mandiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), persentase capian indikator dapat kita pada tabel berikut:

Tabel 2.101 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju Tahun 2023-2024

INDIKATOR	SATUAN	2023	2024
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	46	54,5
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	1	1
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	5	5
Persentase LSM aktif	Persen	4,54	4,54
Persentase LPM Berprestasi	Persen	0	0
Persentase PKK aktif	Persen	100	100
Persentase Posyandu aktif	Persen	95,45	97,7
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat	Persen	Tdk ada	Tdk ada
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	Tdk ada	Tdk ada

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 23%, dimana tahun 2022 sebanyak 69 Desa dan tahun 2023 sebanyak 46 Desa dan 2024 sebanyak 54,5. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa dan masih rendanya kapasitas/kemampuan sumber daya manausia dalam perencanaan Pembangunan sarana dan prasaranan serta faktor geografis desa yang letaknya sulit untuk dijangkau dan jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan jumlah kelompok binaan PKK berada pada posisi stagnan. Sementara indikator lainnya seperti persentase LSM aktif mengalami penurunan dari 11,36% tahun 2022 menjadi 4,54% tahun 2023 sampai dengan 2024 hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan sumber daya dimana LSM sering mengalami masalah dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia dan banyaknya LSM yang tidak jelas orientasi, visi dan misinya serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas LSM yang menyebabkan seringnya LSM mengalami krisis kepercayaan dimana saat ini LSM memberikan peranan sebagai wadah pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Desa. Dan untuk persentase posyandu aktif juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 20,29% tahun 2022 menjadi 95,45% tahun 2023 meningkat sebesar 75,16% dan tahun 2024 mengalami

peningkatan sebesar 2,25 menjadi 97,7 %, hal ini disebabkan adanya motivasi dan peran aktif kader posyandu dalam kegiatan posyandu.

Untuk capaian indikator berdasarkan target RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026 dapat kita lihat pada Tabel berikut

Tabel 2.102 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Mamuju

INDIKATOR	SATUAN	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7.57	6,7
Persentase Desa Mandiri masyarakat (LPM)	Persen	0	0
Persentase Desa Maju	Persen	25	28,4
Persentase Desa Berkembang	Persen	52,2	47,7
Persentase BUM Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif	Persen	19,15	56,11
Nilai AKIP OPD	Nilai	B	N/A
Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	Persen	28,4	47,7
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	Persen	25	3,40
Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Persen	25	28,4
Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan	Persen	19,15	22,72

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2024

G. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju Pertumbuhan Kabupaten Mamuju Periode 2020-2022 mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1.40 persen. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka kelahiran, meningkatnya angka kematian dan pengaruh menurunnya arus imigrasi ke Kabupaten Mamuju yang dimana adanya dampak gempa di awal tahun.

Tabel 2.103 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk	1.69	1.66	N/A

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka , 2024

2. Total Fertility Rate (TFR)

Tingginya angka TFR ini yaitu angka rata-rata per wanita disebabkan oleh masih tingginya angka unmet need (kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), dan masih relatif tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi. Berdasarkan data capaian pada tahun 2023 Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,62 menjadi 2,14. Sedangkan pada tahun 2024 Angka TFR mengalami peningkatan menjadi 2,47.

Tabel 2.104 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	2022	2023	2024
Total Fertility Rate	2,62	2,14	2,47

Sumber : Dinas PPKB, 2024

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB tahun 2022 dan 2024 tidak mengalami peningkatan dengan nilai 57 persen. Kemudian untuk Tahun 2024, data Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB masih di angka 57%.

Tabel 2.105 Persentase Perangkat Daerah Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	57	57	57

Sumber : Dinas PPKB, 2025

4. Jumlah kerjasama penyelenggaraan Pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 2 kerjasama. Sedangkan pada Tahun

2024 terdapat 13 Jumlah kerjasama penyelenggaraan Pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan dari DPPKB Kab.Mamuju.

Tabel 2.106 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	2	2	13

Sumber : Dinas PPKB, 2025

5. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur yang salah seorang daripadanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program 10.

Rata–rata jumlah akseptor KB di Kabupaten Mamuju pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 persentase Ratio Akseptor KB adalah sebesar 53,46 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 64,42, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 62,48.

Tabel 2.107 Rasio Akseptor KB Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Ratio Akseptor KB	Persen	53,46	64,42	62,48

Sumber : Dinas PPKB, 2025

6. Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sperma bertemu dengan sel telur.

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus

kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama. Di Kabupaten Mamuju Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2024 sebesar 62,48 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan CPR tahun 2023 yaitu sebesar 67,49 persen.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk 3 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 16,52 persen, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 17,18 persen. Dan pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan menjadi 20,08%. Peningkatan ini tidak lepas peran petugas KB dalam memberikan pelayanan kepada akseptor KB, selain itu juga dibutuhkan pembangunan infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan, menyusun rencana aksi daerah percepatan target MKJP yang melibatkan semua sector terkait, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakanteknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2022 adalah sebesar 129,94 persen. Kemudian untuk tahun 2023 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi mengalami penurunan menjadi sebesar 73,43 persen. Angka ini menunjukkan masih terdapat 26,57 persen peserta KB yang masih memungkinkan untuk tidak lanjut memakai kontrasepsi. Sedangkan pada tahun 2024 belum ditemukan data Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi. Sepanjang periode tahun 2022-2024 pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi. Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP. Pendampingan PUS yang ber KB yang mengalami komplikasi dan efek samping, sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Memperbanyak calon fasilitator KB, yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi. Mengalokasikan anggaran yang

memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan.

Dan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 hingga tahun 2024 telah mencapai angka 100 persen. Namun masih terkendala pada stok alokon yang terlambat, Distribusi Alokon dari PKM ke jaringannya yang terlambat, Penyediaan Alokon merupakan Kewenangan Provinsi dan Pusat.

Tabel 2.108 Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia15-49	Persen	46,86	67,49	62,48
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	16,52	17,18	20,08
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	129,94	73,43	N/A
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB, 2025

7. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia15–19 Tahun (ASFR 15–19)

8. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia15–19 Tahun (ASFR 15–19) adalah Banyaknya kelahiran selama setahun per 1000,100.000, atau 1.000.000 wanita pada kelompok umur tertentu. Data Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 sebesar 19,7, sedangkan pada tahun 2024 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia15–19 Tahun (ASFR 15–19) sebesar 43,1

Tabel 2.109 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia15–19 Tahun Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024

Angka kelahiran remaja (perempuan usia15–19)per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun(ASFR15–19)	Persen	57,7	19,7	43,1

Sumber : Dinas PPKB, 2025

9. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Pada tahun 2023 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 1,40 persen, Sedangkan pada tahun 2024 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun sebesar 1,32 persen.

Cakupan PUS Unmeet Need pada tahun 2023 sebesar 15,84 persen sedangkan pada tahun 2024 cakupan PUS unmet need menurun menjadi sebesar 12,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian unmet need semakin meningkat dimana pengukuran unmet need menggunankan perhitungan minimaze dimana semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya. Untuk mengurangi angka Unmeet need ini, maka salah satu yang harus diperhatikan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, khususnya PUS yang berada di daerah terluar, terpencil dan terbelakang, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan. Perlu pelayanan mobile bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas KB, menggalang mitra strategis dengan stakeholder dalam penggerakan program. Mengembangkan sistem rujukan alkon (alat kontrasepsi) yang berkelanjutan.

Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera merupakan suatu wadah kegiatan "beyond family planning" untuk lebih memberdayakan ekonomi keluarga, terutamakeluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I peserta KB melalui proses pembelajaran usaha dalam

rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan keluarga akan bermanfaat bagi program keluarga berancana. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan ber-KB yang masih rendah, UPPKS memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesertaan ber-KB. Sebaliknya bagi wilayah dengan tingkat kesertaan ber-KB yang sudah tinggi, UPPKS akan memantapkan kesertaan dan kemandirian dalam ber-KB. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 sebesar 29,55 persen dan untuk data tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia dari DPPKB Kab.Mamuju.

Tabel 2.110 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	41,65	30,24	N/A
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	25,56	15,84	N/A
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB mandiri	Persen	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas PPKB, 2024

10. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan hingga tahun 2023 terdapat 4 (Empat) PPKS sedangkan pada tahun 2024 jumlah PPKS mengalami peningkatan menjadi 8 PPKS yang tersebar di beberapa Kecamatan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021-2022 yang hanya terdapat 2 (dua) PPKS.

11. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa PIK R merupakan singkatan dari kata Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dalam buku Pedoman Pengolalaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa

(PIK R/M), menyatakan bahwa Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (life skills), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/MahasiswaKabupaten Mamuju pada tahun 2024 sebanyak 609 PIK R/M.

12. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk.

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untukperencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 telah mencapai angka 100 persen. Namun masih ada kendala karena masih terdapat kesenjangan jumlah tenaga penyuluh dengan jumlah desa.

13. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 telah mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap desa/Kelurahan telah memiliki PPKBD, dimana pada setiap Desa/Kelurahan memiliki terdapat 1 PPKBD..

14. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan.

Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS sudah mencapai 100 persen pada tahun 2024, dan untuk Faskes memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan sudah mencapai 100 persen di tahun 2024, artinya seluruh Faskes dan jejaringnya telah bekerjasama dengan BPJS namun dari 38 Faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS dan yang telah memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan terdapat 8 Faskes yang tidak

dapat memberikan pelayanan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

15. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2024 telah mencapai angka 90 persen, masih terdapat beberapa POKTAN yang belum melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga.

16. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 yaitu sebesar 70 persen, hal ini dirasakan belum maksimal disebabkan belum tersedianya data sasaran keluarga balita.

17. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata – rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2024 Kabupaten Mamuju adalah 21 tahun. Pemerintah terus mendorong agar usia nikah terendah bisa naik ke usia 22 tahun dan usia tertinggi yang dipilih 25 tahun. Upaya itu dilakukan dengan terus mengintervensi remaja melalui pusat informasi dan konseling (PIK) remaja serta sosialisasi program Genre.

H. Urusan Perhubungan

1. Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Sebagai Kabupaten yang berstatus Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju terus mengalami perkembangan khususnya di sektor transportasi. Meskipun permasalahan trasnportasi di kabupaten mamuju tidak sekompleks di kota-kota besar lainnya namun fenomena peingkatan jumlah kendaraan di wilayah kabupaten mamuju menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi bagi para pengendara yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah Tahun 2021 sampai 2024 mencapai 30 persen tiap tahunnya itu artinya ketersediaan sarana dan prasarana LLAJ Dinas Perhubungan diadakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas LLAJ didukung dengan Capaian Persentase Ketersediaan Sarana,Prasarana dan Fasilitas Trasnportasi pada tahun 2021 di targetkan 30 % dengan reaslisasi capaian 30 %. Pada tahun 2022 di targetkan sebesar 30 persen dan terealisasi sebesar 30%, tahun 2023 di targetkan sebesar 35 persen dan terealisasi sebesar 17 persen, dan hun 2024 di targetkan sebesar 10 persen dan terealisasi sebesar 8,03 persen. hal ini dapat dilihat dari capaian persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang ditargetkan 100 persen hanya bisa mencapai 7,14 di tahun 2021 Rendahnya capaian ini dikarenakan pada tahun 2021 telah direncakan penyediaan perlengkapan jalan namun baru bisa terealisasi di tahun berikutnya. Pada tahun 2022 diharapakan permintaan ketersediaan sarana, prasarana LLAJ menargetkan 70 persen bisa dapat direalisasikan dan tercapai sebesar 70 persen dari apa yang telah direncanakan. Pada tahun 2023 di targetkan sebesar 35 persen dan terealisasi 17 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 di fokuskan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. Sedangkan Pada tahun 2024 di targetkan sebesar 18 persen dan terealisasi 17,85 persen. dimana kegiatan lebih di fokuskan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi seperti perlengkapan jalan dan terminal Type C.

2. Tingkat Pelayanan Angkutan Darat.

Pelayanan angkutan yang menjadi kewenagan kabupaten mencakup Pengoperasian angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angukutan Desa (AKDES). Untuk mengetahui apakah pelayanan angkutan umum tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum, dapat dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan Pemerintah. Capaian indikator Tingkat pelayanan angkutan darat dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa hasilnya tidak mencapai target karena kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten itu hanya terminal Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan penumpang angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angukutan Desa (AKDES). Namun saat ini yang diminati masyarakat hanya trayek antar kota dalam provinsi (AKDP). sedangkan untuk trayek dalam kota dan antar desa ini yang belum berfungsi dengan baik di karenakan animo masyarakat menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi jarak dekat masih sangat minim.

Tingkat Pelayanan Angkutan Darat didukung oleh indikator persentase layanan Angkutan darat dengan menargetkan 30 persen di tahun 2021 dengan capaian 30 persen dan realisasi 21 persen sedangkan di tahun 2022 menargetkan 40 persen dan realisasi 3.19 persen . di tahun 2023 menargetkan 35 % dengan realisasi 30 %. Sedangkan di tahun 2024 menargetkan 12% dengan realisasi 11,85%. Pelayanan angkutan darat meliputi trayek antar kota antar provinsi (AKAP), antar kota dalam Provinsi (AKDP), yang berpusat di terminal type A simbuang dan terminal tipe c kewenangan kabupaten di komplek pasar regional mamuju untuk trayek antar kota dalam provinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angukutan Desa (AKDES). Terminal type C yang dikelola pemerintah kabupaten mamuju saat ini belum beroperasi secara maksimal dikarenakan dua faktor utama yakni rendahnya animo masyarakat terhadap angkutan umum dan fasilitas terminal yang belum maksimal.

Berdasarkan KM Perhubungan No. 31 Thn 1995 Tentang Terminal Transportasi jalan, faslitas minimal yang harus di adakan untuk terminal type c ada 13 item dan saat ini di terminal type c baru memenuhi 8 fasilitas dengan kondisi yang belum maksimal. untuk indikator Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C pada tahun 2021 mencapai 38,47 persen dengan target 35 persen dan tahun 2022 mencapai 38,47 persen dengan target 35 persen capaian, tahun 2023 mencapai 61 persen dari target 42 persen. Sedangkan tahun 2024 sebesar 61 persen dari target 50 persen Meskipun realisasi capaian selalu melebih target, namun dari aspek kenyamanan pengguna fasilitas terminal, kondisi fasilitas yang ada di terminal tipe c kabupaten mamuju masih belum memenuhi standar pelayanan angkutan darat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pelayanan parkir dengan indikator Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 22 persen dengan capaian 22 persen, pada tahun 2022 target yang ditettapkan sebesar 22 persen dengan capaian 22 persen, pada tahun 2023 target yang ditetapkan 32 persen dan capaian 32 persen, sedangakn pada tahun 2024 target yang ditetapkan 20 persen dan capaian 20 persen. walaupun dari aspek pencapaian target selalu terpenuhi, namun sektor ini masih perlu terus di

evaluasi untuk meningkatkan pelayanan parkir serta meningkatkan PAD dari retribusi perparkian.

3. Tingkat Keselamatan Transportasi

Keselamatan transportasi merupakan sesuatu yang mutlak dalan transportasi agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan. Tinggi atau rendahnya tingakat keselamatan transportasi menjadi indikator kelayakan sarana, prasarana serta pelayanan lalu lintas. semakin tinggi keselamatan transportasi, maka semakin baik pula kondisi sarana, prasarana serta pelayanan transportasi di suatu wilayah. untuk tingkat keselamatan transportasi di Kabupaten Mamuju melebihi target direncanakan, pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 30 persen dengan capaian 48,54 persen, tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 30 persen dengan capaian 33,63 persen dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 30 persen dengan capaian 33 persen. pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 40 persen dengan capaian 38,2 persen Hal ini menunjukkan kondisi lalu lintas di kabupaten mamuju masih di kategorikan aman namun masih ada beberapa catatan penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi, diantaranya pemasangan rambu petunjuk keselamatan di jalan – jalan yang rawan kecelakaan, manajemen rekayasa lalu lintas pada titik titik padat kendaraan serta sosialisasi keamanan berkendara khususnya bagi pengendara usia sekolah.

Tingkat keselamatan transportasi di dukung beberapa indikator yakni kinerja lalu lintas dan persentase perlengkapan transportasi. Untuk kinerja lalu lintas pada tahun 2021 dan 2022 tidak dilakukan perhitungan karena terkendala sumber daya manusia, pada tahun 2023 kinerja lalulintas yang dihitung berdasarkan v/c ratio jalan menunjukka angka 0.44 dari target 0.45 sedangkan pada tahun 2024 kinerja lalulintas yang dihitung berdasarkan v/c ratio jalan menunjukka angka 0.351dari target 0.44 dimana semakin kecil v/c ratio maka semkain baik kinerja lalu lintasnya. mesikpun tidak mencapai target, namun capaian tersebut menujukkan arus lalu lintas di kabupaten mamju masih dalam kondisi lancar. Sedangkan untuk persentase perlengkapan transportasi pada tahun 2021 dan 2022 di targetkan sebesar 13 persen dan terealisasi 13 persen di tahun 2023 di targetkan 35 persen dengan capaian 30 persen. sedangkan di tahun 2024 di targetkan 20 persen dengan capaian 20 persen yang hanya meliputi kegiatan pemeluharaan traffic light.

4. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Konektivitas transportasi sangat mempengaruhi hampir disegala aspek dan aktivitas manusia yang melibatkan banyak pihak. penyelenggaraan konektivitas transportasi. Sektor–sektor ekonomi ada yang terkait langsung dan tidak langsung dengan konektivitas transportasi. Perekonomian Indonesia juga tergantung dari adanya konektivitas transportasi. Indikator ratio konektivitas Di Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 menargetkan 0.32 dengan capaian 0.30 persen, sedangkan tahun 2022 menargetkan 0.32 pada tahun 2023 menargetkan 0.87 dengan capaian 0.87. sedangkan pada tahun 2024 menargetkan 0.88 dengan capaian 0.87.

Pada tahun 2022 – 2024 capaian indikator tergolong rendah karena tidak adanya trayek angkutan darat kewenganan kabupaten/kota yang diakibatkan oleh kurang berfungsinya terminal Tipe C di Kabupaten Mamuju. ini dapat dilihat dari data layanan angkutan pada tahun 2022 target 30 persen tercapai 21,22 persen, sedangkan pada tahun 2022 target 40 persen hanya tercapai sebanyak 3,19 persen. di tahun 2023 di targetkan 35 persen dan tercapai 30 Persen. Sedangkan di tahun 2024 menargetkan 12% dengan realisasi 11,85%. Adapun kendala yang dihadapi adalah angkutan umum tidak melalui terminal sehingga tidak tercatat, untuk terminal tipe A yang kewenaangannya sudah diambil oleh Pemerintah Pusat sangat baik konektivitas antar Propinsi dengan kendaraan transportasi yang lebih baik daripada kendaraan transportasi antar Desa.

Tabel 2.112 Cakupan Urusan Perhubungan Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ	%	30	30	30	30	30	30
2	Tingkat pelayanan angkutan darat	%	30%	3,19%	35	30	12	11.85
3	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	30%	33,63 %	30	33	30	30
4	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	%	30	30	35	17	10	8,03
5	Rasio konektivitas kab/kota	bobot	0.32	0.30	0.87	0.87	0,88	0,87

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
6	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	40%	3,19%	35	30	12	11,85
7	Nilai AKIP OPD	Nilai	B	cc	B	B	B	
8	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	%	0,18	0	0.2	0.4	0,44	0,351
9	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	%	22	22	33	32	20	20
10	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	35	27	40	35	29	28,2
11	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	%	40	3,19	35	30	20	20
12	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	70	70	35	17	18	17,85
13	persentase tersedianya perlengkapan transportasi	%	13	13	35	30	20	20
14	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	35	38,47	42	61	50	61
15	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhui standar kenyamanan dan keamanan	%	30	30	35	35	20	20

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

I. Urusan Komunikasi Dan Informasi.

Dalam rangka mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju di Tahun 2023, telah memanfaatkan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa telah mencapai 100 persen.

Data terakhir menunjukkan bahwa masih ada sekitar 19 Persen wilayah Kabupaten Mamuju yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Bala-Balakang.

Dari persentase cakupan layanan telekomunikasi tersebut, data pada Tahun 2024 menunjukkan berbanding lurus dengan persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon yaitu 79,35 Persen, Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet 70,49 Persen dan proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi yang hanya 79,35 Persen.

Berdasarkan analisis dan pemetaan data dari persentese diatas, maka ditemukan bahwa persentase tersebut lebih banyak berada di daerah perkotaan - pusat Kota Mamuju atau pusat Ibu Kota Kecamatan yang memang cakupan layanan telekomunikasinya sudah terjangkau dan layak.

Selengkapnya mengenai capaian kinerja bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2022-2024

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	51,28	17,00	54,00
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	79,00	80,20	79,81
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	98,22	84,21	79,35
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	84,68	69,1	70,49
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	98,22	84,21	79,35

J. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Perkembangan Koperasi aktif Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sebesar 82 % sampai dengan 2024 menjadi 75,57 %.Hal ini diakibatkan koperasi yang tidak dapat melaporkan hasil Rapat Anggota 3 (Tiga) tahun berturut-turut dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia NOMOR 23/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi pada Pasal 1 (Satu) Ayat 4

(Empat) mengatakan bahwa Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat, hal ini akan bisa diatasi dengan cara Monitoring, Evaluasi terhadap Koperasi dalam Kepatuhan pengurus Koperasi dalam melakukan RAT.

Tabel 2.114 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Persentase koperasi aktif	73,9	74,04	74,13	75,75

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju, 2024

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro dan Kecil adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria yaitu Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

Di kabupaten mamuju Usaha Mikro, Kecil dan menengah terus tumbuh mulai dari 2020 yang tumbuh secara perlahan -lahan dengan 14% sampai di tahun 2024 sebanyak 3,72%.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk terus menjaga pertumbuhan tersebut yaitu memberikan bantuan mesin dan peralatan, pelatihan dan pengembangan kompetensi UMKM dalam meningkatkan sumber daya manusia, sampai fasilitasi pemasaran atau promosi produk UMKM. Namun tantangan pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Tabel 2.115 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	15%	16,01%	0	3,72%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju, 2025

K. Urusan Penanaman Modal

Peningkatan jumlah investasi, DPM-PTSP menyelenggarakan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang di dukung oleh dua kegiatan. Kegiatan pertama berbentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal di Kabupaten Mamuju dan yang kedua, penyusunan

potensi unggulan Kabupaten Mamuju. Meski demikian, tak bisa kita pungkiri bahwa keragaman sektor unggulan yang kita miliki tidak terlalu luas, sehingga jenis usaha/pengusaha tidak memiliki pilihan yang terlalu banyak untuk berinvestasi.

Pada tabel dibawah dijelaskan bahwa jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Mamuju di tahun 2024 yaitu sebesar 85 investor.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp. 1,010,677,136,227.

Tahun 2023 di angka realisasi Rp.696,827,923,282 namun nilai realisasi PMDN/PMA di tahun 2024 mengalami kenaikan 313 milyar atau 45,04 persen dengan angka realisasi Rp. 313,572,565,477. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah investasi yang masuk semakin meningkat.

Adapun gambaran kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Mamuju tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	55	36 *	86	85
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	141.323.398.520	233,011,120,009	696,827,923,282	1,010,677,136,227
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	28.170.398.975	45.617.621.487	463,808,634,378	313,572,565,477

Sumber : Dinas PM-PTSP Kabupaten Mamuju, 2025

L. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Mamuju dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 36 organisasi pemuda dan organisasi yang aktif sekitar 13 organisasi atau 36 % naik dari tahun sebelumnya sekitar 27.90 % dimana mengalami peningkatan 2.81 %. Namun jika dilihat data jumlah keseluruhan organisasi pemuda yang ada di Mamuju masih perlu adanya perhatian mulai dari pemberdayaan pemuda untuk mendorong pemuda untuk aktif dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik serta Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan agar pemuda

memiliki visi yang jelas dalam berkontribusi bagi bangsa melalui pelatihan dan bimtek terkait pemuda pelopor.

Wirausaha pemuda adalah kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh generasi muda untuk menciptakan dan mengembangkan usaha secara mandiri. Pemuda memiliki potensi besar dalam dunia wirausaha karena energi, kreativitas, dan inovasi yang mereka miliki. Pada tahun 2024 peresejumlah pemuda diusia 16 sd 30 tahun berdasarkan jumlah penduduk 80.677 jiwa sedangkan jumlah WiraUsaha Muda yang Aktif baru sekitar 4.202 pemuda yan berwirusaha mandiri atau sekitar 5.22 %. Ada beberapa faktor yaitu Banyak pemuda menghadapi tekanan untuk memilih jalur karier yang lebih konvensional, seperti menjadi pegawai negeri atau karyawan perusahaan ,Kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan dan manajemen bisnis menjadi hambatan besar, Banyak pemuda kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk memulai usaha mereka, Kurangnya akses ke komunitas bisnis dan mentor yang dapat membimbing mereka dalam menjalankan usaha.

Tabel 2.117 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	23,25	25,58	27,90	36.11
Persentase WiraUsaha Muda yang Aktif	Persen	15,38	19,23	23,08	5.22

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Mamuju, Tahun 2024

Selain kepemudaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap atlet atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Mamuju.

Terkait cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2024 jumlah cabang olahraga yang dibina dan dikembangakan sebanyak 23 cabang olahraga atau namun jumlah cabang olahraga yang berprestasi sekitar 9 cabang olahraga baru sekitar 39.13 % yang kurang lebih 500 orang hasil selesi dan ikut berkompetisi diajang lomba baik itu daerah maupun nasional sekitar 112 atlet yang berprestasi.

Jumlah pelatih di Kab.Mamuju sebanyak 139 pelatih dengan 23 Cabang olahraga dengan jumlah pelatih yang telah bersartifikat sebanyak 73 pelatih atau 52.52 % jika berdasarkan data masih perlu ditingkatkan dari segi kompetisi para pelatih untuk memenuhi standar sedangkan jumlah prestasi

olahraga baik tingkat daerah dan nasional jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 112 orang sebanyak 9 cabang olahraga yang berprestasi antara lain tingkat nasional di PON ACEH cabor dayung mendapatkan mendali perunggu sedangkan tingkat daerah yaitu 8 cabor sengan perolehan mendali sebanyak 36 mendali di even olahraga seperti cabor pencak silat, panahan, renang, atletik, atletik kids,bola basket,sepak bola,bola volli.

Tabel 2.118 Perkembangan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	53,84	57,69	61,53	39.13
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	40,69	44,83	46,90	52,52
3	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	58,28	61,49	67,2	22.40
4	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	6	597	281	112
5	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	25	25	26	9

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Mamuju, Tahun 2024

M. Urusan Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi tentang kondisi sosial budaya, kependudukan dan ekonomi yang dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju.

Data dan Statistik Kabupaten Mamuju periode 2021-2024 selalu menyediakan data dan statistik setiap tahunnya. Disamping itu dalam upaya mengembangkan sistem data dan informasi untuk menghasilkan data yang akurat, dilakukan pendampingan dalam penyusunan profil desa/kelurahan yang meliputi kegiatan pelatihan penggunaaan aplikasi pendataan seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Dan salah satu dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan server di kabupaten untuk menampung data-data yang dikelola oleh pemerintah Desa/Kelurahan. Diharapkan dengan penyusunan data secara berjenjang dari desa/kelurahan,

kecamatan dan kabupaten akan menghasilkan data riil sesuai dengan kondisi yang ada.

Penyusunan Buku Kabupaten dalam angka (Daerah Dalam Angka) merupakan kegiatan yang secara rutin selalu dilaksanakan. Dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju sebagai lembaga resmi untuk mengolah dan mempublikasikan data-data statistik. Pada tahun 2021-2024 Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka tidak hanya diperuntukkan Kabupaten saja tetapi Buku Kecamatan Dalam Angka juga disusun.

Dan Penyusunan Buku PDRB, bertujuan untuk mengetahui perkembangan perekonomian Kabupaten Mamuju. Produk Domestik Regional Bruto atau biasa disingkat PDRB merupakan salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Dengan adanya data PDRB dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah kedepan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Buku PDRB juga merupakan kegiatan yang secara rutin selalu dilaksanakan. Dalam penyusunannya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju sebagai lembaga resmi untuk mengolah dan mempublikasikan data-data statistik. Pada tahun 2021-2024 Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Mamuju selalu disajikan setiap tahunnya.

Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada/tidakada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku (PDRB)	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informastika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025

N. Urusan Persandian

Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Urusan persandian pada Pemerintah Daerah mengacu

pada kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara, dari tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana, termasuk pembinaan sumber daya manusia.

Di sisi lain, pengelolaan persandian yang diidentikkan dengan kerahasiaan dan ketertutupan akan berhadapan dengan hak-hak warga negara untuk memperoleh informasi publik sebagai isyarat dan amunisi untuk melakukan pengawasan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekhawatiran publik akan munculnya pemerintahan yang serba tertutup, dan menghindar dari kontrol publik merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah.

Bila persandian diharmonisasikan dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka aktivitas persandian berada pada ruang anti penyangkalan informasi, keontentikan informasi, ketersediaan informasi, keutuhan informasi, dan kerahasiaan informasi. Kriteria informasi dikecualikan terbagi atas informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia. bagi pemda, kriteria kerahasiaannya berada pada tingkat medium dengan sifat terbatas, yaitu informasi dengan dampak memiliki nilai yang penting bagi instansi, menghambat tugas pokok instansi, kerusakan aset organisasi tinggi pengaruhnya bagi instansi, terganggunya penyelenggaraan instansi dan menimbulkan kerugian bagi instansi pemerintah.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan persandian, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menunjukkan persentase yang semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini juga diakibatkan oleh adanya regulasi secara nasional tentang pengamanan informasi sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.. Secara rinci kinerja urusanpersandian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.120 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2022-2024

INDIKATOR	Tahun		
	2022	2023	2024
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	43,00	45,00	46,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2025

O. Urusan Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kabupaten Mamuju selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang penuh dengan beragam budaya. Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya-budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kabupaten Mamuju sebagai kabupaten yang beragam budaya yang dikenal luas di tingkat nasional bahkan mancanegara. Sebagai wahana untuk dapat melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Mamuju setiap tahunnya selalu melakukan penyelenggaran festival seni dan budaya dihari HUT Hari Jadi Mamuju, rangkaian Festival Pameran Adat, dan di festival-festival lainnya. Untuk lebih jelasnya Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya, Karya-karya Budaya, dan Cagar Budaya, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	3	26	7
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	0	4	0
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Obyek	1	1	12	17
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Obyek	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Mamuju Tahun 2025

P. Urusan Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan wadah bagi bahan pustaka baik tercetak maupun terekam yang dikelola secara teratur dan sistematis, disamping itu perpustakaan merupakan suatu aspek yang sangat berperan penting dalam memajukan perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih berwawasan. Sedangkan tinjuan perpustakaannya di Kabupaten Mamuju masih menunjukkan minimnya perpustakaan dan kesadaran masyarakat dalam menyadari betapa pentingnya perpustakaan.

Capaian kinerja urusan perpustakaan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut : Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

Pada tahun 2022 jumlah pengunjung mencapai 4.816orang dan ditahun 2023 meningkat mencapai 5.103 orang, kemudian Tahun 2024meningkat menjadi 7.576 Hal itu terjadi karena minat baca masyarakat yang mulai meningkat dengan dilaksanakannya sosialisasi - sosialisasi dengan semboyan : Membaca itu keren " dan dibangunnya sarana tempat baca berupa Taman (rumah baca) menambah minat pembaca untuk membaca diperpustakaan

Jumlah koleksi buku perpustakaan .Pada tahun 2021 sebanyak 15.463 buku dan tahun 2022 tidak mengalami peningkatan, namun meningkat di tahun 2023 menjadi 19480 koleksi oleh dukungan anggaran yg bertambah Kemudian Bertambah kembali di Tahun 2024 menjadi 26.673Termasuk 97 Buku Braille. Begitu juga dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan Tahun 2021 dan 2022 sebesar 6.563 buku dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 senilai 9740 judul, hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum bidang Pendidikan di Tahun 2023 dan Bertambah Kembali di tahun 2024 sejumlah 8.891 Judul Buku

Indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk diukur dengan Jumlah perpustakaan yang ada dibagi jumlah penduduk dalam satu wilayah yang dilayani dan dikali 1000. khusus di diKabupaten Mamuju (Kec. Mamuju) Pada tahun 2021 terdapat sebnyak 46 perpustakaan Kemudian di tahun 2023 dan 2024 menjadi 58 Perpustakaan. Karena belum adanya regulasi aturan dari Kepala Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan, pembangunan perpustakaan masih terbatas. Sehingga di Tahun 2022 jumlahnya masih sama dengan Rasio perpustakaan persatuan Penduduk sebesar 1 : 1.501 Penduduk yang dilayani, namun karena dukungan support dari pemerintah dan Masyarakat bekerjasama dalam meningkatkan hal tersebut di Tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 1:1.368.

Jumlah rata rata kunjungan perpustakaan untuk Tahun 2021 ketahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan, Kemudian Tahun 2024 Meningkat lagi menjadi 7.576 ini dikarenakan minat baca masyarakat sudah mulai meningkat.

Jumlah pustakaaan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dari tahun 2022 dan 2023 serta 2024 belum ada, namun yang tersedia hanyalah adalah tenaga teknis perpustakaan yang berjumlah 5 orang namun belum bersertifikasi.

Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	4.816	5.103	7.576
Koleksi Judul Buku	Buku	15.463	19480	8.891

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah Perpustakaan	Unit	1:1.501	01:1.860	1:1.860
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3.936	4654	5438
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	exl	6.563	9740	26.673
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	-	-	
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	1:1.501		1:1.368
Indeks Budaya Literasi	Skala	40%	50%	56
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	55,91	65,94%	67.21
Indeks Pembangnan Literasi Masyarakat	Nilai	4.2	8,62%	10.77
Indeks Budaya Literasi Masyarakat	Indeks	40%	50%	66.21
Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	6,43	8,22%	12.91
Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	0.21	0,21%	100
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	1:20	01:22	21:36
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	1:15.000	1:20	122.5
Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	Persen	0	0	0

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat, bahwa Nilai tingkat kegemaran membaca pada tahun 2022 di targetkan sebesar 8,62 untuk skala Kabupaten Mamuju, namun dalam pengukurannya harus melakukan survey dimana dari tahun 2022 tidak ada survey yang dilakukan karena ketidak tersediaan biaya sehingga untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masih menggunakan hasil survey yang dilakukan PERPUSNAS sebesar 55,91, namun di tahun 2023 melalui “Gerakan Membaca Itu Keren” dapat mengukur meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca

Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 10 sudah tercapai sebesar 4,2 dan menjadi 8,62% di tahun 2023 ini terlihat dari 7 unsur pembanguna literasi masyarakat, pemerataan layanan peerpustakaan, ketercukupan koleksi, tenaga perpsutakaan, jumlah kunjungan, perpustakaan berstandar nasional, keterlibatan masyarakat

dalam kegiatan perpustakaan dan anggota perpustakaan hanya 3 unsur yang terpenuhi tenaga perpustakaan, keterlibatan masyarakat dan jumlah kunjungan.

Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat pada tahun 2022 dari target 10% baru mencapai 6,43 % dan meningkat menjadi 8,22% di Tahun 2023 ini dihitung dari jumlah kunjungan sebanyak 5.103 dibagi jumlah penduduk (Kecamatan Mamuju) sebanyak 74.866 x 100 persen

Persentase perpustakaan sesuai standar nasional. Standar nasional perpustakaan nasional terdiri atas standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayayanan perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan. Dikabupaten Mamuju Perpustakaan sesuai standar nasional hanya 1 perpustakaan. Dari target yang ingin dicapai sebesar 0,21 telah mencapai 4,2 persen dan 8,62 Persen tahun 2023.

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk. Menurut standar internasioanal federation of library association and intitution (IFLA), rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1 : 2.500 yang artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk. Untuk Kabupaten Mamuju saat ini kita hanya terfokus pada kabupaten kota tepatnya kecamatan Mamuju dimana dengan target 1:20.000 yang berarti satu tenaga perpustakaan melayani 20.000 orang penduduk. Pada Tahun 2022 dengan jumlah tenaga perpustakaan sebanyak 5 orang dan jumlah penduduk Kec. Mamuju 74.866 jiwa maka rasio tenaga perpustakaan dengan penduduk adalah 1 : 15.000 dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2023 menjadi 1:20.000 dengan hadirnya Relawan Literasi oleh masyarakat.

Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan. Dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sampai ke 2023 indikator ini belum dilaksanakan karena belum tersedia Perbub yang mengatur pelestarian koleksi dan naskah kuno.

Q. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik sangat dibutuhkan dalam dunia organisasi, mengingat bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selalu berkembang dengan sistem penanganan kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan, sederhana dalam penerapan, dan mudah dilaksanakan. Diharapkan arsip yang memiliki nilai guna dapat digunakan secara optimal, ditemukan dengan cepat dan tepat

jika dibutuhkan. Penanganan arsip yang tepat juga dapat mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan. Pemimpin dapat menentukan kebijakan dengan cepat dengan ketersediaan arsip yang cepat dan tepat.

Berdasarkan indikator Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat indikator yang harus dijawab oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang masing masing terbagi dalam dua urusan.

Untuk urusan Kearsipan terdapat 2 indikator yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Peningkatan SDM. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pencapaiannya tahun 2022 sebesar 40 %. Dan pada tahun 2023 sebesar 85 % . pada tahun 2024 86 % ini menandakan pengarsipan disetiap OPD sudah berjalan baik. Namun demikian peningkatan SDM arsip paris untuk seluruh Perangkat Daerah baik dalam penetapan personil maupun pengembangan jabatan fungsional agar lebih ditingkatkan dan perlunya pelatihan terhadap tenaga Arsiparis sementara dalam kurun waktu tahun 2024 belum diadakan pelatihan untuk peningkatan SDM tenaga Arsiparis pada masing masing OPD.

Indeks pemanfaatan arsip pada tahun 2024 tercapai sebesar 45%. penyediaan arsip sdh dilaksanakan baik manual maupun digital begitupun dgn pelayanan informasi kearsipan ssat ini sdh dikembangkan melalui website serta penggunaan aplikasi srikandi sudah berjalan sekitar 80 %. Untuk RB masih terdapat indikator yang belum bisa terpenuhi serta kepatuhan terhadap kebijakan pemnafaatan arsip hanya dapat dimaksinalkan serta Perbub SKKAD telah diselesaikan

Persentase OPD dan lembaga publik Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari target 20 % pencapaainnya sudah melalpauai yaitu sebesar 40 %. ini menandakan pengarsipan disetiap OPD sudah berjalan baik. Namun demikian peningkatan SDM arsip paris untuk seluruh Perangkat Daerah baik dalam penetapan personil maupun pengembangan jabatan fungsional agar lebih ditingkatkan dan perlunya pelatihan terhadap tenaga Arsiparis sementara dalam kurun waktu tahun 2022 belum diadakan pelatihan namun di 2023 menjadi 70 Persen dengan diadakannya Bimbingan SRIKANDI untuk peningkatan SDM tenaga Arsiparis pada masing masing OPD.

Sementara itu, pada indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, diukur dengan mencari rata rata dari 4 indikator yaitu tingat ketersediaan arsip, persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip yaitu dengan menghitung arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip dibagi jumlah seluruh arsip aktif yaitu (215/300)x100% = 72 %, persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip yaitu menghitung arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip dibagijumlah seluruh arsip aktif yaitu (200/525)x100% = 38 %, Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dengan menghitung arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dibagi jumlah seluruh arsip statis = yaitu (50/72)x100% = 69 %, dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN capaiannya masih 0, sehingga untuk menghitung tingkat ketersedian arsip adalah total capaian indkator dibagi 4 = (72+38+69+0)/4 diperoleh nilai 44,75 %. sehingga dari taget 2022 sebesar 9 % dapat mecapai 44,75 % kemudian meningkat menjadi 54,55 % di Tahun 2023 dan ditahun 2024 menjadi 86,76 % Kondisi ini dapat terjadi karena ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan dan Pengelolaan arsip statisyang akan dimasukkan dalam SIKN sistim informasi kearsipan nasional dan JIKN jaringan informasi kearsipan nasional.

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara pencapaiannya tahun 2023 dan 2024 capaiannya sebesar 0,03 %

Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011. Capaian kinerja untuk tahun 2022 kurang lebih sebesar 70 persen naik menjadi 80persen di tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 85 persen. Tingkat kesesuain perizinan penggunaan arsip ini harus didukung dengan Peraturan Bupati dalam pencapaiannya.

Tabel 2.123 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

INDIKATOR	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	40	85	90 %
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	-	70	70
Indeks pemanfaatan arsip	Indeks	25	40%	25.54%
Persentase OPD dan Lembaga Publik yang telah Melakukan pengarsipan secara Baku	Persen	40	9,5%	16.31
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	44,75	54,55%	86.76
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	Persen	0	0,03%	0,03%
Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	70	80%	85 %

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, 2025

2.4.5.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Mamuju dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kabupaten Mamuju memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

Produksi Perikanan Daerah;

Konsumsi Ikan Daerah; dan

Cakupan Bina Kelompok.

1. Produksi Perikanan Daerah.

Berdasarkan Target RENSTRA Produksi Perikanan Daerah yang ingin dicapai Tahun 2024 sebesar 94,87 % atau sebesar 74.000 capaian realisasi sebesar 72,96% atau sebesar 56.908 Ton. Adapun kontribusi produksi perikanan daerah yaitu :

Produksi Perikanan Tangkap dengan target produksi 20.000 Ton atau 90,91 % dengan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 17,65 %. Adapun

capaian relasiasi produksi perikanan tangkap sebesar 21.236 Ton atau 96,53 %. Hal ini dipengaruhi oleh dengan dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap sehingga hasil tangkapan semakin meningkat walaupun kondisi cuaca dan iklim yang kurang baik sepanjang tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dalam peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan sumber anggaran baik DAK berupa pengadaan Mesin Dalam 33 HP, Mesin Dalam 26 HP, Mesin Katinting 9 PK, Mesin Katinting 6.5 PK, dan Mesin Katinting 5,5 PK, Pancing Ulur, Warning, Tandon, GPS, Rumpon Dalam, SERO (Jaring Nilon) dan Alat Komunikasi (HT).

Produks Perikanan Budidaya dengan target produksi 54.000 Ton atau 96,43 % dengan rata-rata kenaikan pertahunya sebesar 5,88 %. Adapaun capaian realisasi produksi perikanan Budidaya sebesar 35.672 Ton atau hanya mencapai 63,70% dari target realisasi tahun 2024 sehingga mempengaruhi realisasi produksi perikanan daerah pada tahun 2024.

Hal ini disebabkan oleh turunnya produksi perikanan budidaya khususnya budidaya rumput laut yang diakibatkan oleh faktor cuaca gelombang tinggi dan hama seperti penyu pada tahun 2022 hingga saat ini ditahun 2024 pelaku pembudidaya rumput laut di kecamatan Kalukku dan Papalang tidak bisa berbuat apa-apa sehingga banyak beralih profesi.

Tabel 2.124 Produksi Perikanan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.248	19.475	21.273	21.235,86
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.763	54.672	35.179,18	35.671,72
Produksi Perikanan Daerah	Ton		56.147	68.282	59.908

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2024

2. Konsumsi Ikan Daerah

Berdasarkan target RENSTRA Target Konsumsi ikan daerah tahun 2024 adalah 44 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 43 kg/Perkapita/tahun atau 102,64 % rata-rata konsumsi ikan sekitar 155,5 gram/orang/hari dari 11 kecamatan dengan kontribusi tingkat komsmsi ikan terbanyak di Kecamatan Simboro, Mamuju dan Balabalakang yang nilai angka komsumsinya diatas 160 Gram/orang/Hari. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi

perikanan tangkap sehingga ikan di Mamuju melimpah dan harga ikan relative stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Tabel 2.125 Konsumsi Ikan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Jumlah Konsumsi Ikan Daerah	Kg/Kapita/ Tahun	40	43	43	43

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2024

3. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Berdasarkan target RENSTRA cakupan bina kelompok sebanyak 370 klp atau 90.24 persen dengan peningkatan rata-rata pertahun sekitar 120 klp atau 6,45 persen yang merupakan jumlah kelompok yang dibantu oleh Pemda baik penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta penyediaan fasilitasi dalam peningkatan SDM kelompok dengan capaian realisasi cakupan bina kelompok sebanyak 748 Klp atau 182.44 persen yang terdiri dari kelompok penerima bantuan sarana prasarana perikanan baik nelayan, pembudidaya, pemasar dan pengolah hasil perikanan fasilitasi peningkatan Sumberdaya berupa kegiatan temu lapang yang berkoordinasi dengan penyuluh perikanan dalam sosialisasi pembentukan kelembagaan,penanggulangan hama penyakit ikan dan fasilitasi pendataan dan penyaluran sertifikat tanah nelayan dan asuransi nelayan, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 2.126 Bina Kelompok Perikanan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Cakupan Bina Kelompok Perikanan	Kelompok	146	298	597	748

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2024

B. Urusan Pariwisata

Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan baik individu maupun grup dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman diluar aktivitas kesehariannya (seperti: bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dll) dalam waktu yang sementara. Hal ini

yang sangat dikejar oleh tiap daerah untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah, untuk mendapatkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju mengamanahkan hal tersebut ke Dinas Pariwisata dengan cara meningkatkan destinasi wisata dan meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata dengan diperkuat oleh 3 (Tiga) indikator sebagai mana yang termuat didalam permendagri 86.

Dinas Pariwisata diharuskan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan memperkuat Promosi dan pemasaran, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Mamuju mengalami fluktuasi selama 5 Tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan mencapai 20.500 orang dan pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis menjadi 8.750 orang disebabkan oleh pandemi Covid – 19 dan Gempa Sulawesi Barat 6,2 SR. Pada tahun 2022 jumlah wisatawan mulai meningkat kembali menjadi 11.100 orang dan juga pada tahun 2023 naik sebanvak 39.200 orang yang merupakan jumlah tertinggi selama periode tersebut, namun pada tahun 2024 kembali turun menjadi 9.100 orang disebabkan karena mungkin fasilitas sarana dan prasarana wisata sudah banyak yang rusak dan banyak wisata swasta yang berkembang yang tidak memberikan data yang valid tentang jumlah kunjungan wisatawan sehingga hal ini harus jadi perhatian bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dengan cara mendukung pengembangan objek wisata, cagar budaya dan kearifan lokal sehingga indikator yang menunjang keberhasilan pariwisata bisa berhasil.

Adapun gambaran indikator kinerja selama 4 (empat) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2024

INDIKATOR	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kunjungan wisata	8.750	11.100	39.200	9.100
Lama kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 Hari	3 hari
PAD sektor pariwisata	17.500 Jt	22.200.00 jt	101.300.000 Jt	110.100.000 Jt

Sumber : Dinas Pariwisata Tahun 2025

C. Urusan Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB diperoleh dengan membandingkan antara jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian terhadap jumlah PDRB dikali 100. Berdasarkan buku PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik kategori pertanian, kehutanan dan perikanan meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Sub kategori usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 49,18 persen.

Tabel 2.128 Capaian Urusan Pertanian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	37,76	38,00	38,17	49,18
Kontribusi Pertanian	15,87	17,27	17,56	49,09
Produktivitas padi atau bahan pangan utama local Lainnya	130,974	132,04	140,01	247,076

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2024

D. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan yang bertujuan untuk mencapai target (1) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya, (2) Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya, (3) Nilai Eksport Bersih Perdagangan Daerah, (4) Persentase Peningkatan Volume Eksport, (5) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, (6) Persentase Penyelesaian Permasalahan Metrologi Legal dan Pengaduan konsumen, (7) Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome). Sebagai upaya untuk mencapai target diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju melakukan upaya-upaya sebagai berikut : (1) Melaksanakan Pasar Murah, (2) Operasionalisasi Sistem Resi Gudang serta

diperlukan adanya kerja sama antar daerah (KAD), (3) Pendampingan kepada para pelaku usaha perdagangan tentang mekanisme dan tata cara ekspor serta pendampingan branding produk, (4) Peningkatan Sarana peralatan dan mobilitas laboratorium tera dan tera ulang. (5) Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM Aparatur, Perdagangan dan Pasar.

Adapun capaian urusan perdagangan Kabupaten Mamuju di tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 sebesar 100% dengan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan berupa laporan pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Area Pasar Desa, laporan pengadaan sepeda Pa'Gandeng, serta laporan pembinaan dan pengawasan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana sebesar 100% yang berupa laporan pelaksanaan pasar murah serta laporan pengawasan pupuk bersubsidi.

Persentase peningkatan nilai perdagangan eksport daerah yaitu data awal untuk nilai eksport daerah belum tersedia, dari hasil identifikasi terdapat semua potensi produk eksport daerah belum ada yang secara langsung terkirim dari Kabupaten Mamuju. Sehingga Dinas Perdagangan tidak bisa mengidentifikasi secara pasti nilai dari komiditi ekport tersebut dan sampai akhit tahun 2024 data tersebut belum ada. Sedangkan untuk persentase volume ekspor mencapai 100% berdasarkan laporan jumlah pelaku ekspor yang dibina/diawasi.

Persentase Penyelesaian Permasalahan Metrologi Legal dan Pengaduan konsumen untuk tahun 2024 mencapai 100% berdasarkan laporan jumlah pelaku usaha yang diawasi atau dibina pada 6 Kecamatan di Kabupaten Mamuju. Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) mencapai 100% berdasarkan laporan jumlah alat UTTP yang ditera sah yang dilaksanakan di setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju.

Tabel 2.129 Capaian Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024

1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.	PDRB Sektor Perdagangan	Persen	10.03	9.91	9.83	10	N/A
3.	Tingkat Inflasi pada Tahun berjalan	Persen	1.78	4.39	4,85	1,82	2.47
4.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	80	72,63	74,04	78,26	100
5.	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100	100	100	100	100
6.	Nilai Eksport Bersih Perdagangan Daerah	Rupiah	N/A	N/A	30,140,600,000	N/A	N/A
7.	Persentase Peningkatan Volume Eksport	Persen	100	100	100	100	100
8.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Metrologi Legal dan Pengaduan konsumen	Persen	0	0	100	100	100
10.	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	28	28	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

E. Urusan Perindustrian

Kelompok pengrajin yang dibina di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2021 mencapai 2.59 persen namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3.45 persen, ini disebabkan bertambahnya pengrajin lokal dalam membuat kerajinan khas daerah dan mulai banyaknya pengrajin lokal berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya daerah.

Tabel 2.89 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021-2024

INDIKATOR	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2.59	3.29	3.45	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Tahun 2025

F. Urusan Transmigrasi

Kabupaten Mamuju adalah salah satu daerah penempatan transmigrasi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Data terakhir adalah sebagai berikut ; Rencana kawasan transmigrasi yang diusulkan ke kementerian untuk ditetapkan seluas 82.000 Ha, termasuk di dalamnya eks UPT sebanyak 1 UPT yang akan ditingkatkan sarana dan prasarananya.

Ada seluas 1.244,78 Ha sudah mendapatkan SK pelepasan alih fungsi lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lokasi transmigrasi di Kecamatan Kalukku UPTD Sinyonyoi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.90 Luas Pencadangan Lahan PermukimanTransmigrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Kecamatan	Luas Pencadangan Lahan Sudah Ditetapkan (Ha)		
	2022	2023	2024
1). Mamuju - Desa Bambu	435.Ha	435.Ha	435.Ha
2). Tapalang - Desa Takandeang - Desa Orobatu - Desa Bela	902.32.Ha 914.55.Ha 926.19.Ha	902.32.Ha 914.55.Ha 926.19.Ha	902.32.Ha 914.55.Ha 926.19.Ha
3). Kalukku	149.21.Ha	149.21.Ha	149.21.Ha
4). Kalumpang	789.07.Ha	789.07.Ha	789.07.Ha
5). Papalang - Desa Topore - Desa Papalang	1.090.46.Ha 745.83.Ha	1.090.46.Ha 745.83.Ha	1.090.46.Ha 745.83.Ha
6). Sampaga	-	-	-
7). Tommo	-	-	-
8). Simboro dan Kep	1.039.03.Ha	1.039.03.Ha	1.039.03.Ha
9). Tapalang Barat	-	-	-
10). Bonehau	471.65.Ha	471.65.Ha	471.65.Ha
11). Kep. Bala Balakang	-	-	-

Sumber : SIPD, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024
**tidak ada kegiatan/penempatan di tahun 2022, 2023, 2024*

Capaian pelaksanaan urusan transmigrasi yang mendukung pembangunan digambarkan sebagai berikut :

Indikator Persentase Transmigran Swakarsa ini sudah tidak ada lagi penempatannya, Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan tidak ada penempatan tranmigran swakarsa. Maka Pemerintah perlu mendorong permukiman yang telah berkembang untuk berusaha secara mandiri dengan cara memfasilitasi mereka dengan pihak pemerintah lokasi tujuan transmigran untuk mendorong masuknya investor, menciptakan/menyediakankebijakan (regulasi, insentif), memberikan informasi lokasi, kesempatan kerja, dan pemberian kredit usaha.

Capaian Indikator jumlah Pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi juga menggambarkan interpretasi yang belum tercapai, hal ini di karenakan kurangnya koordinasi dan keterpaduan baik antar sektor dan antar daerah maupun pemerintah pusat dan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunannya, maka perlunya pemerhatian untuk menfasilitasi hubungan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah, dengan daerah yang memiliki sumberdaya melimpah tetapi kurang tenaga kerja.

Indikator Jumlah Satuan Permukiman Transmirasi yang dikembangkan juga menggambarkan interpretasi yang belum tercapai, hal ini karena pengalaman pembangunan transmigrasi yang lebih mengutamakan pertimbangan demografis-sentris yang ternyata berimplikasi pada rendahnya solusi pemenuhan kepentingan masyarakat (pendatang dan lokal). Kemungkinan besar, masih banyak masyarakat Mamuju yang sebenarnya berminat untuk mengikuti program transmigrasi, tetapi kurang berminat terhadap karakteristik daerah tujuannya. Aspek ini terkait dengan jenis/topografi wilayah, jenis tanah atau komoditas pertanian yang dikelola di daerah permukiman baru. Karena itu transmigrasi kedepan haruslah didasarkan atas paradigma pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu mengusahakan penataan kembali lahan transmigrasi dan pembinaan usaha dikawasan transmigrasi dan penduduk setempat serta dipadukan dengan upaya pengembangan industri terutama yang mengelolah hasil-hasil pertanian dan usaha perdagangan di daerah transmigrasi.

Tabel 2.91 Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Transmigrasi	250	250	250
Jumlah Satuan Permukiman yang Dibangun	1 SP	1 SP	1 SP
Jumlah Satuan Permukiman yangDikembangkan	1 SP	1 SP	1 SP

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju, 2025

G. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Mamuju diarahkan pada Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan bagi generasi yang akan datang serta memperlakukannya sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal serta pemanfaatan Energi dan Sumberdaya Mineral yang diimbangi dengan upaya reklamasi dan sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.

1. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sampai tahun 2023, belum semua wilayah Kabupaten Mamuju tersambung dalam jaringan PLN. Jumlah pelanggan PLN (Persero) Area Mamuju pada tahun 2023 mencapai 82.308 pelanggan. Selain PLN beberapa wilayah Kecamatan terjauh masih menggunakan sumber listrik lain diantaranya PLTS, PLTMH dan Genset yang dimanfaatkan oleh masyarakat di desa.

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan listrik adalah jumlah daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan. Jumlah daya listrik terpasang Kabupaten Mamuju tercatat pada tahun 2023 jumlah daya listrik terpasang sebesar 134.647.240 KW dengan produksi listrik sebanyak 158.671.005,85 KWh, listrik terjual sebanyak 144.368.305,20 KWh.

3. Pertambangan

Secara umum potensi tambang dan energi di Kabupaten Mamuju cukup besar baik dari sisi jumlah cadangan yang ada dan banyaknya aktivitas. Pemanfaatan di sektor pertambangan, namun demikian dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku hal itu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaannya oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengawasan dan pemantauan secara ketat sehingga pelanggaran di sektor pertambangan tidak akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan melakukan kegiatan pengendalian sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.

2.4.5.4 Unsur Pendukung

A. Fungsi Sekretariat Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan administrasi.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian Hukum, bagian Pemerintahan, bagian Kesejahteraan Masyarakat dan bagian Kerjasama, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, meliputi 1) Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana, 2) Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi, 3) Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana, dan 4) Persentase kebijakan dibidang kerjasama daerah yang terlaksana. Kinerja pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024.

Capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan Pembangunan meliputi bagian Perekonomian, bagian Sumber Daya Alam, bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta bagian Administrasi Pembangunan yang diukur dengan 4 (empat) indikator,yaitu:1)Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana, 2) Persentase

pemantauan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana, 3) Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dan 4) Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana.

Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023-2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	
			2023	2024
1	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	Persen	69,75	69,75
2	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	Persen	100	100
3	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	Persen	100	100
4	Persentase kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan otonomi	Persen	80	100
5	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100	83.33
6	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	87,5	100
7	Persentase kebijakan di bidang perundangundangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100	100
8	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	
			2023	2024
9	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100	100
10	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	99,89	100
11	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100	100
12	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum yang terlaksana	Persen	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, 2024

B. Fungsi Sekretariat DPRD

Dasar hukum pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD adalah peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007. Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesektretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki 3 (tiga) Indikator utama dalam Permendagri 86, sebagai berikut :

Indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, pada kondisi indikator ini menunjukkan kinerja yang sudah sesuai sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, namun dalam dalam tahapan Rencana Kerjanya terkadang mengalami perubahan dari yang direncanakan, sehingga diperlukan fokus perencanaan Kerja Tahunan yang konsisten untuk tahun selanjutnya.

Indikator Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) selama periode 3 tahun berjalan dari tahun 2022-2024 kinerja yang ditunjukkan juga sudah sesuai.

Indikator Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, pada kondisi indikator ini juga menunjukkan kinerja yang sudah sesuai ataupun terlaksana setiap tahunnya, namun terkadang ditemukan hambatan dalam penyesuaian jadwal dari setiap dewan, hal ini mengakibatkan rapat-rapat pembahasan anggaran terkadang menemukan masalah dalam waktu pelaksanaan fungsinya.

Tabel 2. 93 Capaian Kinerja dan Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat DPRD 2022-2024

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	ada	ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen encana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran setwan DPRD	ada	ada	Ada
4	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (tujuan OPD)	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
5	Hasil Penilaian kualitas layanan Setwan terhadap DPRD (sasaran OPD)	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2022	2023	2024
6	Persentase Penilain DPRD terhadap pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%
7	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju, 2025

Dalam mewujudkan visi misi Bupati Mamuju DPRD kabupaten mamuju berkontribusi dalam menjawab indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026 , sebagai berikut :

Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan merupakan indikator dari program yang dilaksanakan DPRD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh predikat memuaskan sebagai capaian kinerja dari sekretaraiat DPRD, penilaian ini merupakan predikat yang wajar karena pelayanan keuangan dan admnistrasi yang diberikan secretariat DPRD kepada dewan. Hal ini selaras dengan indikator Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang termuat di Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan capaian hasil 100 persen.

Dengan capaian indikator program memuaskan dan persentase 100 persen, maka ini merupakan tolak ukur bahwa hasil penilaian kualitas layanan Setwan terhadap DPRD dan Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD memperoleh predikat memuaskan. Sebagai penjelasan bahwa indikator Hasil penilaian kualitas layanan Setwan terhadap DPRD merupakan indikator dari sasaran strategis setwan yaitu Meningkatnya pelayanan bagi peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Mamuju, dan Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator dari tujuan Sekretariat DPRD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Setwan bagi pimpinan dan anggota DPRD.

2.4.5.5 Unsur Penunjang

A. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEPAN) merupakan salah satu OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu untuk tugas pemerintah daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang salah satunya meliputi urusan perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mamuju, maka Bappepan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Mamuju selama lima tahun ke depan.

Capaian Indikator RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 94 Capaian Indikator RPJMD 2021-2026 BAPPEPAN Kabupaten Mamuju Tahun 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		Target	2024
Presentase Hasil Penerapan Kelitbangan	Persen	100	87
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD- RKPD diterapkan di Daerah	Persen	100	89.33
Nilai AKIP OPD	Predikat	B	B
Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100
Persentase Indikator Program Daerah Mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100	70.93
Persentase indikator program daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	Persen	100	81.13
Persentase indikator program daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Tercapai	Persen	100	100
Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	87
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	87

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025.

Tabel 2. 95 Ketersediaan Dokumen RPJPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2025

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026.

Tabel 2. 96 Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2025

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahunnya. Namun, dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkualitas.

Tabel 2. 97 Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2025

Kabupaten Mamuju pada Tahun 2019 telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

Tabel 2. 98 Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Mamuju 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2025

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2024 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 89.33 persen.

Tabel 2. 99 Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	98,58	99,48	99,26	89,33

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2025

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2024 Program RKPD yang diakomodir dalam APBD sebesar 89.33 persen.

Tabel 2. 100 Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	99,52	99,52	99,26	89,33

Sumber : BAPPEPAN Kabupaten Mamuju, 2024

B. Fungsi Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mentaati azas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Daerah dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kinerja keungan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, Berikut dijelaskan kinerja Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset ada 9 (Sembilan) Indikator dari tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2021-2024

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	*Proses*
Persentase SILPA	1.95%	2.00%	0.00%	0.00%
Persentase SILPA terhadap APBD	0.00%	0.00%	4,47%	6,50%
Persentase belanja pendidikan (20%)	29,43%	28,66%	31.39%	34,21%
Persentase belanja kesehatan (10%)	22,08%	20,92%	22.50%	19,12%
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung	44,73% : 55,41%	57,75% : 42,25%	61,32%: 38,68%	56,91%: 43,09%
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	10%	10%	10%	10%
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

C. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin dituntut professional maka peningkatan kualitas SDM Aparatur, sarana dan prasarana dan kelembagaan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan PNS semakin profesional dan pelayanan semakin baik di tahun-tahun mendatang.

1. **Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**

Capaian rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Mamuju Tercatat di tahun 2021 – 2024 capaian kinerja pada indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di tahun 2021 tercatat pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebesar 1,59 JP/Tahun jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan. dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,16 JP/Tahun hal ini di sebabkan karena covid 19, dan pada tahun 2023 sebesar 1,57 JP/Tahun menglami peningkatan dari tahun seblumnya yakni tahun 2022 sedangkan pada tahun 2024 belum ada data dari OPD yang masuk untuk dikalkuasi/dihitung.

2. **Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Persentase keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan pelatihan formal Tercatat di tahun 2021 – 2024 capaian kinerja pada indikator Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di tahun 2021 tercatat pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 1,35 % jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,27 hal ini di sebabkan karena covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia selain itu disebabkan karena ketersediaan biaya pada setiap tahun APBD masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ketahun , dan pada tahun 2023 sebesar 1,81 % menglami peningkatan dari tahun seblumnya yakni tahun 2022 sedangkan pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar 10,9 %

3. **Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural**

Persentase Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tercatat di tahun 2021 – 2024 capaian kinerja pada indikator Persentase Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural di tahun 2021 tercatat pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural sebesar 2,61 % jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0 % hal ini di sebabkan karena covid 19 yang melanda dunia

termasuk Indonesia selain itu disebabkan karena ketersediaan biaya pada APBD setiap OPD di setiap tahun masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ketahun , dan pada tahun 2023 sebesar 0 % masih stagnan dari tahun seblumnya yakni tahun 2022 sedangkan pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sebesar 0,21 %

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah Kabupaten yang meliputi sekretariat dewan, sekretariat DPRD, dinas/badan daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah meliputi :

- Kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
- Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Pada periode tahun 2024 jumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Mamuju yakni berjumlah 38 jabatan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan struktur orrganisasi serta tipelogi perangkat daerah.

5. Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas:

- Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III;
- Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV;

- Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada periode tahun 2024 jabatan adminstrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 1.532 jabatan. Yang terdiri dari Jabatan Administrator atau eselon III sebanyak 175, Jabatan Pengawas atau eselon IV sebanyak 260 dan Jabatan Pelaksanan atau staf sebanyak 1.097.

6. Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas

Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.

Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Tabel di bawah menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebesar 2.481 Orang untuk tahun 2022, sedangakan pada tahun 2023 sebesar 2.517 orang

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tercatat di tahun 2021 – 2024, Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di tahun 2021 tercatat sebesar 2.517 Orang jika dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkataan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.561 Orang dan pada tahun 2023 sebesar 2.517 Orang menglami penurunan dari tahun seblumnya yakni tahun 2022 sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat pesat yakni sebesar 3.861 Orang hal ini disebabkan karena adanya Pengakatan PPPK guru dan tenaga kesehatan yang diangkat menjadi pemangku jabatan fungsional tertentu. Dari keenam indicator tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. 102 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	0,20	0.25	1.57	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,81	0.31	1.81	10.09
3	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan structural	Persen	24	0	-	0.21
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	24	38	38	38
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	Jabatan	2.166	5.598	746	1.532
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.227	2.481	2517	3.861

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, 2024

2.4.5.6 Unsur Pengawasan

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju, agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. dengan menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. Fokus pengawasan pada pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) yaitu sejumlah 33 Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Capaian kinerja pengawasan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 ditunjukkan dengan dua indikator kinerja yakni : Persentase tindak lanjut temuan dan Jumlah temuan BPK.

Dalam kurun waktu tahun 2022,2023,2024 indikator Persentase tindaklanjut temuan BPK yang telah sesuai rekomendasi capaiannya meningkat sebesar 26.83% lebih dari tahun 2022,2023 sebesar 69% ,70.74 % dan di tahun 2024 sebesar 97,57%.

Demikian pula halnya dengan indikator jumlah temuan BPK pada tahun 2022 sebanyak 66 rekomendasi dan pada tahun 2023 sebanyak 126 rekomendasi dan pada tahun 2024 sebanyak 51 rekomendasi , adanya Penurunan Jumlah rekomendasi pada tahun 2024 ini disebabkan karena adanya Peningkatan

Pengawasan/Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. Sebelum BPK melakukan pemeriksaan sehingga temua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Meningkat menjadi 38 temuan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 31 temuan terdiri dari temuan berulang seperti permasalahan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang belum memadahi dan terkait Penatausahaan Aset Milik Daerah yang belum memadai dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah temuan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang berulang tersebut antara lain: melakukan validasi data piutang PBB-P2, melakukan perbaikan system pada aplikasi SISMIOP dan membuat perjanjian kerjasama dengan Bank Sulselbar dalam mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah temuan terkait Penatausahaan Aset Milik Daerah yang belum memadai antara lain: Bupati Mamuju memerintahkan para kepala SKPD untuk lebih optimal dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah dan lebih mempertajam aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah adnya temuan berulang antara lain memberikan sangsi yang tegas kepada Obrik yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan, meberikan pemahaman kepada obrik terkait kepatuhan.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa “Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Inspektorat adalah merupakan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan. Berikut gambaran capaian kinerja bidang pengawasan, yaitu :

A. Level Maturitas SPIP

Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau dalam hal ini adalah tingkat maturitas SPIP telah berada pada level 3. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini dilakukan oleh BKP sebagi instansi Pembina SPIP, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didenifisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrument evaluative penyelenggaraan SPIP dan panduan umum untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

B. WBK/WBBM.

Pada tanggal 31 januari 2024 Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mencanangkan 33 OPD sebagai OPD yang memenuhi syarat wilayah Zona Integritas. Pencanangan Zona Integritas tersebut merupakan tahapan awal untuk pengusulan OPD sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBK/WBBM). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencanangan tersebut melalui penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan 33 OPD yang memenuhi syarat menjadi

wilayah Zona Integritas. Hasil penilaian tersebut diusulkan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai lembaga yang berhak memberikan predikat WBK/WBBM disetiap Kabupaten. Target RPJMD untuk WBK/WBBM tahun 2023 untuk pengusulan OPD menjadi WBK/WBBM adalah 5 (Lima) OPD sementara realisasinya sebanyak 33 OPD yang berhasil diusulkan menjadi WBK/WBBM.

C. Persentase OPD yang Menerapkan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Menuru Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian

Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju telah menerapkan 100 persen SPIP, namun masih perlu untuk ditingkatkan dan dievaluasi serta pengawasan maksimal, agar apa yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta tercapainya tujuan organisasi.

D. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Persentase tindak lanjut temuan di tahun 2024 dengan target 90% capaian yang diperoleh adalah 97,14 % .Hal ini dapat dilakukan berkat kerja Tim Tindak Lanjut, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Mamuju serta Mejelis Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

E. Persentase Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan atas laporan/pengaduan masyarakat yang diterima baik melalui aparat penegak hukum maupun melalui APIP. Kegiatan audit ini dilakukan dengan target 100% dan dapat dicapai 100%.

F. Persentase Zona Integritas,

Persentase PMPRB OPD dan asistensi desa, persentase Pejabat/ ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN Dapat diuraikan sebagai berikut :

- Persentase Pencanangan Zona Integritas tahun 2024 telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan melalui tahapan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan menghasilkan 33 OPD yang memenuhi syarat menjadi Wilayah Zona Integritas.
- Presentase PMPRB OPD telah mencapai 100%. Seluruh perangkat daerah Kabupaten Mamuju telah melakukan reformasi birokrasi termasuk di tingkat Kecamatan.
- Presentase Asisten Desa telah mencapai 100%. Seluruh Desa di Kabupaten Mamuju yang berjumlah 88 Desa telah dilakukan asistensi oleh Inspektorat dengan menunjuk auditor sebagai Tim Asistensi.
- Presentase LHKPN/LHKSN capaian 100%. Kewajiban untuk melaporkan LHKPN telah di dukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Gambaran capaian indikator bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 103 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2023-2024

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mamuju, 2024

INDIKATOR	SATUAN	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	99.49	99.08
Level Maturitas SPIP	Nilai	Level 3	Level 3
WBK/WBM	Nilai	0	0
Persentase OPD yang menerapkan SPIP	Persen	100	100
Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	70.74	97,14
Presentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100	100
Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100	100

2.4.5.7 Unsur Kewilayahan.

Kabupaten Mamuju secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 88 Desa, yang terdiri dari 1 kecamatan berada di kepulauan dan 10 kecamatan berada di daratan, sementara desa dan kelurahan terdapat 3 desa berada di kepulauan dan 85 Desa berada di daratan bersama 13 kelurahan. secara terperinci indikator kinerja untuk kecamatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 104 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
Hasil Survei IKM terhadap pelayanan di kecamatan/ kelurahan	Nilai	92	98	N/A	N/A
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan	Persen	100	100	N/A	N/A
Tingkat partisipasi masyarakat Dalam pemberdayaan di kecamatan	Persen	100	100	N/A	N/A
Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	90	90	N/A	N/A
Persentase jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	92	92	N/A	N/A

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Mamuju posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggara urusan Pemerintahan umum. Sebagai pelaksana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Camat melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan yang meliputi Hasil Survei IKM terhadap pelayanan di kecamatan, Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di kecamatan, Persentase desa yang tertib administrasi, Persentase jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan 2023 belum mencapai target yang diharapkan hal ini disebabkan Peran Camat sebagai pelaksana Perangkat Daerah belum maksimal karena belum ditunjang Fasilitas yang memadai dan kondisi akses kewilayahan cukup luas dan segi Sumber daya aparatur Kecamatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat terbatas.

2.4.5.8 Unsur Pemerintahan Umum

Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun sampai 2022 dapat lihat melalui 5 (Lima) indikator sebagi alat ukur, yakni Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani, Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu, Persentase Ormas yang terbina, Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan dan Persentase Potensi Konflik Sosial. Capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju.

Pada indikator Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani tahun 2022 mencapai 100 persen sampai dengan tahun 2024 karena semakin tinggi persentase maka semakin rendah Potensi Konflik SARA di kabupaten Mamuju, indikator Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu telah mencapai 0 persen sampai dengan tahun 2023 karena pada tahun ini tidak dilakukan pemilihan atau pemilu, dan pada tahun 2024 mencapai 83 & 75,10 Persen karena baru ada pemihan atau pemilu, hal ini berarti bahwa capaian kinerja indikator belum memenuhi dari target 100 persen, indikator Persentase Ormas yang terbina tahun 2022 mencapai 100 persen sampai dengan tahun 2024, indikator Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan mencapai 100 persen sampai dengan tahun 2024 dan untuk indikator Persentase Potensi Konflik Sosial mencapai 100 persen sampai dengan tahun 2024 ini menunjukkan data yang nihil, namun demikian pada masa yang akan datang indikator ini akan tetap menjadi salah satu indikator yang diutamakan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dari konflik Sosial mengingat Kabupaten Mamuju adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan heterogen terdiri dari berbagai suku, agama dan ras (Plural and heterogeneous society), dengan demikan perlu adanya konstruksi institusi yang dapat menghambat munculnya sebab-sebab social conflict, kekerasan dll, tidak hanya menekankan pada organisasi social control agents seperti militer dan kepolisian. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2. 105 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

No	Indikator	2022	2023	2024

1	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	100	100	100
2	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	0	0	83 & 75,10
3.	Persentase Ormas yang terbina	100	100	100
4	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	100	100	100
5	Persentase Potensi Konflik Sosial	100	100	100

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Mamuju, 2024

Adapun Hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan dapat dilihat melalui 5 (lima) indikator utama sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian kinerjanya dalam kurun waktu tahun 2021 - 2024 antara lain :

A. Persentase Potensi Konflik Sara Yang Tertangani

Adanya Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang marak akhir-akhir ini menjadi salah satu faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi, Ketika terjadi demonstrasi yang menyangkut isu SARA maka pengusaha menjadi ragu dan menahan partisipasinya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, isu yang sensitif dan berada di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, konflik SARA seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Perbedaan akses atau kesempatan ekonomi yang dapat menyebabkan konflik salah satu penghambat dalam dunia investasi yang menyebabkan para penanam modal tidak merasa aman untuk menginvestasikan uangnya dalam jumlah besar ke kabupaten mamuju, dan ada juga perbedaan ideologi, perbedaan biologis, Latar belakang geografis, kesenjangan ekonomi dan kebudayaan.

Namun Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak adanya kasus konflik SARA diKabupaten Mamuju sesuai dengan data dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik, sehingga indikator potensi penanganan kasus konflik Sara yang tertangani mencapai 100 Persen atau tidak terjadi konflik Sara sehingga semakin tinggi capaian indikator Kinerjanya maka semakin kecil konflik yang terjadi.

B. Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dari tahun 2024 83 persen untuk Pemilu dan 75,10 persen untuk Pilkada Pihak Kesbangpol Terus Berupaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024 Upaya

Tersebut Dilakukan Dengan Memasifkan Sosialisi Dan Edukasi Pemilih Kepada Masyarakat Terutama, Kepada Para Pemilih Pemula Dari Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Yang Di Harapkan Dapat Mendongkrak Capaian Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.

C. Persentase Ormas Yang Terbina

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi masyarakat di Kabupaten Mamuju adalah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Pelaksanaan peran fungsi Kesbangpol terhadap Ormas berdasarkan visi dan misi Mamuju Keren yaitu mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan agama,Budaya serta kearifan lokal.

Pada tahun 2024 ada 4 ormas yang terbina dan tahun 2023 5 orams yan terbina jika dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai 15 ormas yang terbina, Hal ini dikarenakan minimnya anggaran sehingga Pelaksanaan fungsi Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas pelaksanannya belum maksimal. Kalau dihitung menggunakan capaian indikator pertahun maka Persentase ormas yang terbina memiliki capaian sebesar 100 Persen.

D. Persentase Rencana Aksi P4GN Yang Terimplementasikan

Seperti yang kita ketahui Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat dan musuh kita semua karena dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan narkoba membutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat. Hadirnya Inpres Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN tahun 2020-2024, merupakan bentuk respon yang serius dari Presiden RI agar upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Dalam upaya pencapaian tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dalam kurun waktu dua tahun telah dilaksanakan Sosialisasi dan Deklarasi Desa / Kelurahan Bersinar (P4GN) yaitu Tahun 2022-2024 telah meraih pencapaian 100 persen dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah dan BNN serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan regulasi P4GN, dan pembentukan satgas anti

narkotika di Setiap Sekolah- Sekolah SMA sederajat sangat membantu untuk terwujudnya Kegiatan (P4GN) ini.

Tabel 2. 106 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib					
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	61,60	43,96	75,83	89,26
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	102,55	79,45	89,87	98,84
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	93,33	83,52	85,31	81,12
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	31,02	6,82	78,66	42,42
Kesehatan					
Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,04	0,18	0,18	2,75	2,80
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	40	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	72,70	74,32	85,48	89,24	95,26

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	75,70	75,99	93,45	96,46	95,63
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,82	93,69	97,16	96,63	98,56
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	82,66	67,63	71,77	87,07	81,27
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56,07	61,91	75,14	83,64	100
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,31	62,47	61,35	78,81	84,92
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	64,43	71,40	77,48	88,92	90,84
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,10	40,54	87,62	100	99,69
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	111,32	95,60	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76,875	66,85	72,65	82,30	89,39
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	79,63	67,06	91,63	100	100

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	55,50	68,10	71,49	90,75	95,61
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	97,31	97,29	7,75	0	0
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	14,26	14,26	7,44	0	0
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	41,93	41,93	47,45	43,31	43,31
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	87,61	0,07	70,49	71,76	72,02
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	64,03	64,70	73,00	74,05	73,48
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	7,42	100	100	100	100
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	32,50	26,26	53,31	43,77	36,61

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0	0	0	100
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	36,46	40,34	100	36,44
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	5,01	36,46	100	0	0
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,20	0,16	0,19	0,80	3,39
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	24,48	24,18	24,04	20,84	20,43
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,03	2,50	38,87	0,78	2,82
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	83,64	87,5	100	100	100
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0	100	76,78	100	100

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	90	97,35	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8300	0	12,04	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	25	90	100	100
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100	15	10,6	11	11,83
Sosial					
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	140,71	100	100	98,39
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	99,05	100	100	100
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,26	0,86	100	0	100

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0	5,75	5,69	6491598,77	11,36
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	56,50	100	10	100	16,85
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	60,12	45,43	100	12,39	23,04
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	52,93	0,01	33,52	40,82	69,92
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0,01	0,06	100	100	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	63,41	26953,39	23,07	9,96
Pangan					
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	256,97	4894	22,26	92,59	116,84
Pertanahan					
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di	0	0	100	100	100

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	33,33	100	3,84	93,37
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	100	100	100
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	30,4	73,5
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	100	100	100
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	25	0	100	100	100
Lingkungan Hidup					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	55,76	0	78,94	77,63	74,66
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	13,48	25,65	18,97	100,00	1,67
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	57,89	100	0	100
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP elektronik	89,46	91,00	92,10	85,06	96,69
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13,15	18,00	20,41	27,95	29,62
Kepemilikan akta kelahiran	77,78	83,77	88,43	90,78	87,74
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	11,36	16,28	100	100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Persentase pengentasan desa tertinggal	30,77	21,21	25	24	0
Persentase peningkatan status desa mandiri	7,32	24,39	27,08	18	6,38
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
TFR (Angka Kelahiran Total)	2,87	2,65	2,62	2,14	3,9
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,70	75,46	57,57	63,65	60,68
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,16	8,63	28,92	15,84	12,23
Perhubungan					
Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,1	30	0,85	0,87	0,87
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	179,6	0	0	0,496	0,351
Jumlah Uji KIR angkutan umum	1.100	112	81	N/A	N/A
Komunikasi dan Informatikan					

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	0	100	0	0
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	17,65	77,78	100	100	100
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	91,59	91,59	91,46	78,35	97,83
Koperasi, usaha kecil dan menengah					
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	83,46	7,14	7,02	5,42	14,16
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	24,39	12,46	13,11	14,37	1,70
Penanaman modal					
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0	45,72	64,88	198,50	45,04
Kepemudaan dan Olahraga					
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3,40	0	3,05	0,46	0,46
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	88,67	3,26	0,90	4,99	1,25
Peningkatan prestasi olahraga	2	4	0	2	37
Statistik					

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	65,91	74,42	100	15,91
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	0	74,42	100	15,91
Persandian					
Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	0	0	0	15,66
Kebudayaan					
Terlestarikannya Cagar Budaya	28,57	0	0	0	250
Perpustakaan					
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	965	59,46	65,89	65,89
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	39,5	52,54	43,41
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	N/A	3.413	4.816	5.103	N/A
Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	N/A	15.463	19.480	15.463	N/A
Kearsipan					
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	10,86	10,05	61,5	50	16,62

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)					
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	0	0,16	33,33	33,33
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	67,79	99,14	93,45	78,40	76,90
Pariwisata					
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100	-57,32	0	11,11	-58,33
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	23,18	-57,32	26,24	254,34	5,01
Tingkat hunian akomodasi	100	100	53,27	54,00	54,02
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	312803,70	323,59	2,93	0,28	0,28

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	37950000,00	62,5	0,03	4,62	6,02
Pertanian					
Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas & nbsp; pertanian per tahun	441,60	494,62	512,22	97,05	490,87
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	117,75	123,75	-54,69	378,26	1758,18
Kehutanan					
Energi dan Sumber Daya Mineral					
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	63,64	0	100	0	0
Perdagangan					
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	18,22	100	100	100	100
Persentase kinerja realisasi pupuk	100	100	94,91	57,04	81,95
Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,61	80,29	100	54,75	86,34
Perindustrian					
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	13,18	11,39	7,80	5,31	-7,16

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0	0	38,06
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	0	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	0
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	89,77	100	100	2
Transmigrasi					
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
Perencanaan dan Keuangan					
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	61,75	14,34	13,85	9,82	12,29
Rasio PAD	7,02	463,44	7,91	8,46	7,57

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer *expenditures*)	31,36	67,97	70,94	64,07	66,73
Opini Laporan Keuangan	10	1	1	9	10
Pengadaan					
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,78	0	0,19	0	0
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	88,24	37,32	16,38	93,32	59,19
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	21,34	28,35	38,12	48,89	22,67
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	64,33	0,00	97,51	-2,01
Kepegawaian					
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	349,39	193,73	66,91	67,80	67,62
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,15	5,62	19754,21	23,11	23,98

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	9,52	5,32	28,34	29,52	4,82
Manajemen Keuangan					
Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	95,88	11,81	0,31	2,93	1,51
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	60,94	45,67	12,14	12,80	3,83
Manajemen Aset	4	4	100	4	4
Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,98	1,13	7,41	0,52	6,70
Transparansi dan Partisipasi Publik					
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	100	0	93,25	98,37	97,08
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	1,85	100	100	75	75

Sumber: E-LPPD Kabupaten Mamuju, 2025

2.4.6 Daya Saing Investasi

Daya saing iklim investasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah mampu menarik dan mempertahankan minat penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Daya saing ini mencerminkan kualitas lingkungan usaha serta sejauh mana regulasi, infrastruktur, dan layanan pemerintahan mampu menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan investasi.

Daerah yang memiliki daya saing iklim investasi yang baik umumnya ditandai dengan kemudahan perizinan, stabilitas kebijakan, tersedianya infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan, dan jaringan telekomunikasi, serta adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lahan usaha juga menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di suatu wilayah.

Akan tetapi, tantangan dalam meningkatkan daya saing iklim investasi masih cukup besar di berbagai daerah. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah prosedur birokrasi yang belum efisien, kurang optimalnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya insentif fiskal, serta minimnya promosi potensi unggulan daerah. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing iklim investasi memerlukan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan reformasi tata kelola, digitalisasi layanan perizinan, serta penyederhanaan peraturan.

Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, daerah akan memiliki peluang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mamuju saat ini tengah diarahkan untuk diperkuat melalui panduan Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan strategis untuk membangun sistem riset dan inovasi yang terintegrasi, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Bapperida, telah mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga litbang, dan pelaku usaha guna menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif dan adaptif. Selain itu, RIPJPID telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, guna memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan IPTEK mendukung prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang.

Masih terdapat sejumlah tantangan dalam penguatan ekosistem riset di Mamuju, di antaranya terbatasnya sistem informasi riset yang terintegrasi, lemahnya budaya riset dan adopsi teknologi di kalangan pelaku usaha lokal, serta belum optimalnya regulasi dan kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Hal ini menyebabkan potensi riset dan hasil inovasi daerah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah. Oleh karena itu, melalui RIPJPID, diharapkan ke depan Kabupaten Mamuju mampu memperkuat tata kelola riset yang berbasis bukti, membangun pusat inovasi yang inklusif, serta menyediakan infrastruktur digital yang mendukung pengembangan teknologi lokal secara berkelanjutan.

2.5 Gambaran Umum Keuangan Daerah

2.5.1 Penjelasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Pada dasarnya, analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menggambarkan kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Kinerja keuangan masa lalu digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu.

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas-asas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai program serta kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan baik fisik maupun non-fisik.

2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan utama penyusunan APBD adalah untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat, dan mempersiapkan kondisi untuk pelaksanaan anggaran secara efektif.

Tabel 2. 107 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	72.705.099.969,88	58.591.847.149,34	75.894.965.379,88	101.606.766.593,90	91.526.558.186,43	5,85
	B. Pendapatan Transfer	909.278.952.540,00	930.841.852.567,00	959.001.280.743,00	1.046.739.513.501,00	1.097.102.110.527,00	4,81
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.076.881.242,00	46.744.399.316,00	41.358.788.853,00	48.642.558.839,00	16.704.519.461,00	-25,1
	JUMLAH PENDAPATAN	1.035.060.933.751,88	1.036.178.099.032,34	1.076.255.034.975,88	1.196.988.838.933,90	1.205.333.188.174,43	3,87
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	724.307.203.800,00	673.960.813.027,05	748.863.812.962,27	768.188.463.901,00	890.822.464.145,18	5,3
	B. Belanja Modal	148.718.006.943,00	146.838.983.841,00	209.550.476.740,00	243.691.113.934,00	203.968.344.265,00	8,22
	C. Belanja Tak Terduga	22.399.426.029,00	788.019.757,00	323.527.897,00	41.258.973,00	175.006.800,00	-70,27
	D. Belanja Transfer	132.465.614.607,00	154.984.459.386,48	139.200.174.073,00	152.645.074.059,00	156.494.895.835,00	4,26
	JUMLAH BELANJA	1.027.890.251.379,00	976.572.276.011,53	1.097.937.991.672,27	1.164.565.910.867,00	1.251.460.711.045,18	5,04
	SURPLUS/DEFISIT	7.170.682.372,88	59.605.823.020,81	-21.682.956.696,39	32.422.928.066,90	-46.127.522.870,75	
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	11.592.274.099,15	18.794.621.733,72	78.400.444.754,53	56.665.186.379,14	85.088.114.446,04	64,6
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	4.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	11.592.274.099,15	18.794.621.733,72	78.400.444.754,53	52.665.186.379,14	85.088.114.446,04	
	PEMBIAYAAN NETTO	11.592.274.099,15	18.794.621.733,72	78.400.444.754,53	52.665.186.379,14	85.088.114.446,04	64,6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	18.762.956.472,03	78.400.444.754,53	56.717.488.058,14	85.088.114.446,04	38.960.591.575,29	20,04

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Mamuju

Ada beberapa pola dan tren yang dapat dianalisis untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2024. Analisis pendapatan dan belanja menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2020-2024. Pendapatan Asli Daerah tumbuh rata-rata tahunan 5,85%, didorong oleh peningkatan seluruh jenis PAD, yaitu pajak daerah (8,49%), retribusi (23,95%), hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (3,56%), serta Lain-lain PAD yang Sah (1,66%). Pendapatan Transfer mengalami peningkatan rata-rata 4,81%, dengan peningkatan yang signifikan pada dana bagi hasil bukan pajak (76,18%) dan peningkatan yang relatif stabil pada dana alokasi umum (2,37%) dan dana alokasi khusus (12,12%). Di sisi lain, pendapatan dari pemerintah pusat lainnya, Dana Bagi Hasil (-5,96%) mengalami penurunan, sementara Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah mengalami penurunan rata rata sebesar -25,10%

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil maka diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tingkat ketergantungan dengan Dana Perimbangan secara berangsur-angsur dapat dikurangi. Kebijakan umum pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Diantaranya ditempuh dengan cara reviu dan penyempurnaan regulasi pendapatan asli daerah, Perbaikan manajemen pengelolaan PAD, Peningkatan Kebijakan Investasi, serta Optimalisasi Aset daerah.
2. Peningkatan Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.

Belanja operasi meningkat rata-rata 5,30%, dengan peningkatan besar dalam belanja bantuan sosial (57,86%); namun, belanja pegawai dan barang/jasa mengalami peningkatan yang stabil, masing-masing 6,91% dan 7,03%, sementara belanja bantuan hibah mengalami penurunan yang cukup besar (-30,55%). Belanja modal meningkat rata-rata 5,29%, dengan investasi di seluruh jenis belanja modal, sementara belanja tanah

mengalami penurunan yang signifikan (-10,52%). Belanja Tak Terduga turun drastis dengan rata-rata 70,27%. Peningkatan dalam Transfer dan Bantuan Keuangan menunjukkan penambahan bantuan keuangan atau perubahan kebijakan. Secara keseluruhan, kinerja Belanja Kabupaten Mamuju relatif baik karena pertumbuhan rata-rata tahunan dari belanja pegawai jauh lebih rendah dari pertumbuhan belanja barang dan jasa serta modal.

Pertumbuhan Belanja Operasi, serta Belanja Modal yang meningkat tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan belanja di Kabupaten Mamuju lebih berorientasi pada peningkatan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan belanja seperti ini perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah Kabupaten Mamuju masa datang adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
2. Prioritas
3. Tolak ukur dan target kinerja
4. Transparan dan Akuntabel

Kondisi anggaran Kabupaten Mamuju selama 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dalam pendapatan, terutama dari PAD dan transfer, dengan peningkatan signifikan dalam belanja modal. Pengelolaan belanja dan pembiayaan menunjukkan pergeseran menuju investasi infrastruktur sambil mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang tidak stabil. Ke depan, perlu fokus pada diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi belanja, dan pengelolaan risiko yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan pencapaian tujuan pembangunan.

2.5.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu komponen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Didalam Neraca Daerah terdapat pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan posisi keuangan suatu daerah pada akhir periode pelaporan. Tujuan umum pelaporan daerah adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat dalam evaluasi alokasi sumber daya dalam periode pemerintahan tertentu. Neraca Daerah merupakan komponen pelaporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, hutang dan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan Pemerintah Daerah. Neraca Daerah disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah. Komponen yang terdapat dalam Neraca Daerah antara lain adalah Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dalam neraca daerah diklasifikasikan menjadi dua yakni Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Sementara komponen Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam neraca daerah diklasifikasikan menjadi dua yakni Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Adapun Neraca Daerah di Kabupaten Mamuju terkait posisi aset, kewajiban dan ekuitas dalam lima tahun terakhir, disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2020-2024 sebagai berikut ini:

Tabel 2. 108 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	48.205.845.479,94	105.594.709.333,12	95.680.884.310,31	129.426.618.556,91	66.547.815.847,82
	B. Investasi Jangka Panjang	22.898.545.646,89	36.258.120.109,66	99.084.511.203,66	103.349.414.834,66	103.392.982.928,66
	C. Aset Tetap	2.019.199.060.164,77	1.987.076.960.560,99	2.105.389.605.600,40	2.149.390.263.572,27	2.137.682.479.317,03
	D. Aset Lainnya	85.415.493.798,06	86.892.245.206,05	102.071.071.070,47	129.093.331.866,19	107.631.495.322,62
	E. Properti Investasi	-	-	-	-	4.598.139.408,00
2	JUMLAH ASET	2.175.718.945.089,66	2.215.822.035.209,82	2.402.226.072.184,84	2.511.259.628.830,03	2.419.852.912.824,13
	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	35.280.990.873,66	3.566.208.692,28	6.449.490.265,19	5.860.665.764,68	8.715.963.769,16
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	208.687.808,62	280.197.808,62
3	JUMLAH KEWAJIBAN	35.280.990.873,66	3.566.208.692,28	6.449.490.265,19	6.069.353.573,30	8.996.161.577,78
	EKUITAS					
	A. Ekuitas	2.140.437.954.216,00	2.212.255.826.517,54	2.395.776.581.919,65	2.505.190.275.256,73	2.410.856.751.246,35
	JUMLAH EKUITAS	2.140.437.954.216,00	2.212.255.826.517,54	2.395.776.581.919,65	2.505.190.275.256,73	2.410.856.751.246,35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.175.718.945.089,66	2.215.822.035.209,82	2.402.226.072.184,84	2.511.259.628.830,02	2.419.852.912.824,13

Sumber: Diolah dari Neraca Pemerintah Kabupaten Mamuju. 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel Neraca Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting tentang kondisi keuangan dan pengelolaan aset. Posisi kas baik dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 19,76%, menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju memiliki likuiditas yang solid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Pertumbuhan piutang yang cukup kecil, hanya 12% per tahun, bukan sebuah masalah yang berarti, yang justru menjadi hal baik menunjukkan adanya penyelesaian target pendapatan setiap tahunnya bisa terpenuhi. Investasi pada aset tetap seperti peralatan dan mesin tumbuh sebesar 9,92% per tahun, menunjukkan upaya signifikan untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi. Selain itu, investasi jangka panjang daerah mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 45,77% dinilai sangat baik di mana hal ini bisa menjadi sumber PAD berupa deviden. Dalam hal kewajiban, pendapatan yang diterima di muka, mengalami kenaikan sebesar 28,93% per tahun, namun setiap tahunnya masih dalam batas yang normal. Kemudian pertumbuhan utang beban -45,78% dan utang jangka pendek lainnya -44,20%, hal ini menunjukkan manajemen utang dan kas pada pemerintah Kabupaten Mamuju bisa dikategorikan baik.

Berdasarkan data neraca daerah Kabupaten Mamuju tersebut dilakukan analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk menyediakan dana pembangunan. Sekurang-kurangnya, analisis data neraca daerah dilakukan untuk hal-hal berikut:

1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
    a. Rasio lancar = aktiva lancar kewajiban jangka pendek
    b. Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan): kewajiban jangka pendek

Tabel 2. 109 Perhitungan Rasio Likuiditas pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	48.205.845.480	105.594.709.333	95.680.884.310	129.426.618.557	75.262.331.456
Persediaan	14.229.290.764	12.214.326.709	16.032.743.977	23.321.070.002	13.631.885.173
Kewajiban Jangka Pendek	35.280.990.874	3.566.208.692	6.449.490.265	5.860.665.765	5.064.481. 500
Rasio Lancar	**1,37**	**29,61**	**14,84**	**22,08**	**14,86**
Rasio Quick	**0,96**	**26,18**	**12,35**	**18,10**	**12,17**

Sumber: LKPD Kabupaten Mamuju, 2025

Sesuai dengan tabel di atas, kemampuan membayar hutang jangka pendek Kabupaten Mamuju menggunakan aset lancar terlihat mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2019 Aset Lancar yang dimiliki Kabupaten Mamuju dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sebanyak 1 kali yang kemudian meningkat pada dua tahun berikutnya (2021-2022) menjadi 30 kali dan 15 kali. Kondisi ini disebabkan pada dua tahun tersebut (2021-2022) kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Mamuju menurun dan aset yang dimiliki meningkat. Kemudian tahun berikutnya yakni tahun 2023 kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Mamuju mengalami penurunan sedangkan nilai asetnya semakin meningkat. Kondisi ini memperlihatkan kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 menjadi 22 kali di tahun 2023.

Selanjutnya yaitu pada rasio quick yang menggambarkan kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar yang lebih *liquid* (aset lancar-persediaan) menunjukan angka yang kecil pada setiap tahunnya dibandingkan dengan nilai rasio lancar yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan persediaan yang dimiliki Kabupaten Mamuju dalam 5 tahun terakhir mencapai 11% hingga 30% dari total aset lancar. Sehingga aset lancar yang lebih *liquid* pada setiap tahunnya memiliki selisih nilai yang cukup signifikan dari nilai aset lancar secara keseluruhan. Pada

tahun 2020, aset lancar yang lebih *liquid* Kabupaten Mamuju mampu membayar kewajiban jangka pendek sebesar 1 kali yang kemudian meningkat menjadi 26 kali di tahun 2021 dan 12 kali di tahun 2022. Kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar yang lebih *liquid* meningkat menjadi 18 kali di tahun 2023. Secara keseluruhan kemampuan membayar hutang Kabupaten Mamuju baik menggunakan aset lancar maupun aset lancar yang lebih *liquid* (aset lancar-persediaan) masih tergolong baik, yakni lebih dari 1 kali.

2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
   a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang: total aset
   b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang: total ekuitas

Tabel 2. 110 Perhitungan Rasio Solvabilitas pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Total Aset	2.175.718.945.090	2.215.822.035.210	2.402.226.072.185	2.511.259.628.830	2.420.806.433.588
Total Kewajiban/ Hutang	35.280.990.874	3.566.208.692	6.449.490.265	6.069.353.573	5.273.169.309
Total Ekuitas	2.140.437.954.216	2.212.255.826.518	2.395.776.581.920	2.505.190.275.257	2.415.555.077.529
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,01622	0,00161	0,00268	0,00242	0,00218
Rasio Hutang terhadap Modal	0,01648	0,00161	0,00269	0,00242	0,00218

Sumber: Data diolah dari LKPD Kabupaten Mamuju, 2025

Sesuai dengan tabel di atas, melihat pada nilai hutang atau kewajiban yang dimiliki Kabupaten Mamuju dalam 5 tahun (2020-2024) terakhir menunjukan nilai yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan total asetnya, yakni tidak lebih dari 1%. Dengan kondisi tersebut maka pengaruh hutang terhadap nilai aset maupun kekayaan bersih (ekuitas) yang dimiliki Kabupaten Mamuju dalam 5

tahun terakhir berada pada rentang angka 0.16% hingga 0.21%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Mamuju lima tahun terakhir (2020-2024) dalam kondisi sehat.

3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur piutang = 365: perputaran piutang

- Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.
- Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang): 2

Tabel 2. 111 Rata-rata Umur Piutang pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Umur Piutang	10,47	13,32	14,14	6,03	6,58
Perputaran Piutang	34,85	27,40	25,82	60,53	55,45
Pendapatan Daerah	1.035.060.933.752,16	1.036.078.099.032,34	1.076.255.034.975,88	1.196.988.838.933,90	1.205.063.220.760,43
Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	29.704.162.112,08	37.806.538.779,63	41.690.996.334,77	19.775.793.490,04	21.732.616.325,12
Saldo Awal Piutang	27.625.652.354,35	31.782.671.869,80	43.830.405.689,46	39.551.586.980,08	43.465.232.650,24
Saldo Akhir Piutang	31.782.671.869,80	43.830.405.689,46	39.551.586.980,08	43.465.232.650,24	

Sumber: Data diolah dari LKPD Kabupaten Mamuju, 2025

Rata-rata Piutang yang dimiliki Kabupaten Mamuju dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terlihat semakin menurun. Namun kondisi tersebut juga memperlihatkan nilai rata-rata piutang yang meningkat dalam 3 tahun terakhir (2020-2022). Dari 10.4 hari di tahun 2020 menjadi 6,5 hari di tahun 2024. Kondisi ini menjadi progress yang positif dengan semakin singkatnya waktu piutang tertagih. Selain itu, secara keseluruhan rata-rata umur piutang Kabupaten Mamuju juga dalam kondisi aman karena berada dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.

b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur persediaan = 365: perputaran persediaan

- Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan.
- Rata-rata nilai persediaan= (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan)

Tabel 2. 112 Rata-rata Umur Persediaan pada Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Umur Persediaan	401,26	269,84	475,93	653,60	264,50
Perputaran Persediaan	0,91	1,35	0,77	0,56	1,38
Nilai Persediaan yang Digunakan dalam Satu Tahun	12.026.986.643,00	19.104.431.834,00	15.090.695.529,00	10.318.140.430,00	9.405.871.000,00
Rata-rata Nilai Persediaan	13.221.808.736,81	14.123.535.343,09	19.676.906.989,73	18.476.477.587,85	6.815.942.586,63
Saldo Awal Persediaan	14.229.290.764,45	12.214.326.709,17	16.032.743.977,00	23.321.070.002,45	13.631.885.173,25
Saldo Akhir Persediaan	12.214.326.709,17	16.032.743.977,00	23.321.070.002,45	13.631.885.173,25	

Sumber: Data diolah dari LKPD Kabupaten Mamuju, 2025

Rata-rata nilai persediaan yang dimiliki Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Sehingga hal ini juga menghasilkan rata-rata umur persediaan yang juga fluktuatif. Pada tahun 2020 rata-rata umur persediaan Kabupaten Mamuju mencapai kondisi terakhir yakni mencapai 401 hari atau 1 tahun 1 bulan 5 hari. Akan tetapi pada tahun berikutnya 2021, rata-rata umur persediaan Kabupaten Mamuju kembali menurun. Akan tetapi pada tahun 2023 naik menjadi 653 hari. Jika dilihat dari tahun 2022 dan 2023, semakin rendah nilai rata-rata umur persediaan mengindikasikan adanya penurunan efektivitas pengelolaan persediaan untuk memberikan pelayanan publik.

2.5.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan terhadap nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi kedalam 4 pos belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer.

Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 113 Proporsi Belanja Kabupaten Mamuju 2020-2024

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	382.503,24	1.027.890,25	37,21%
2	2021	390.550,35	976.572,28	39,99%
3	2022	421.016,71	1.097.937,99	38,35%
4	2023	424.150,60	1.168.565,91	36,30%
5	2024	499.773,18	1.251.195,78	39,94%
Rata-Rata		**423.598,82**	**1.104.432,44**	**38,35%**

Sumber: Data diolah dari LKPD Kabupaten Mamuju, 2025

a. Pengeluaran Wajib Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah),

Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 114 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**469.243,06**	**400.259,17**	**434.219,52**	**446.240,95**	**555.888,97**	**4,33**
1.1	Belanja Pegawai	382.503,24	390.550,35	421.016,71	424.150,60	499.773,18	6,91
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	86.648,03	9.708,82	13.202,81	22.090,35	55.545,80	(10,52)
1.5	Belanja Bantuan Sosial	91,79	-	-	-	570,00	57,86
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**132.465,61**	**154.984,46**	**139.200,17**	**152.645,07**	**156.494,90**	**0,32**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	1.631,16	2.784,13	3.959,92	4.294,85	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	132.465,61	153.353,30	136.416,04	148.685,15	152.200,05	(0,25)
3	**Belanja Tak Terduga**	**22.399,43**	**788,02**	**323,53**	**41,26**	**175,01**	**(70,27)**
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	4.000,00	-	
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**624.108,10**	**556.031,65**	**573.743,22**	**602.927,28**	**712.558,88**	**3,37**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Mamuju

2.5.1.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut asas-asas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Mamuju dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mamuju dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir

dalam periode tahun 2025-2029 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode 2019–2024 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2025-2029. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (kurun waktu lima tahun) juga memuat aspek perencanaan pada kapasitas keuangan yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Perencanaan pada kapasitas keuangan daerah dilaksanakan dengan melaksanakan proyeksi yang dapat memberikan Gambaran perkiraan Pendapatan Daerah yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030, serta Belanja Daerah dan Pembiayaan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mamuju pada 5 tahun ke depan (2025-2030). Proyeksi pada ketiga komponen keuangan daerah Kabupaten Mamuju dilaksanakan dengan memperhatikan analisis pada data historis selama 5 tahun kebelakang (2020-2024) serta kebijakan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Secara lebih jelas, proyeksi pada masing-masing komponen keuangan daerah Kabupaten Mamuju yang meliputi Pendapatan Daerah yang secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada belanja daerah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan pada Pembiayaan Daerah terdapat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 115 Proyeksi APBD Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*
1	PENDAPATAN		-	-	-	-	-
	A. Pendapatan Asli Daerah	97.503.880.661	145.663.201.717	144.904.352.004	148.477.758.897	151.964.029.955	155.729.167.282
	B. Pendapatan Transfer	1.107.363.999.240	1.119.021.717.452	1.140.820.960.151	1.155.391.996.579	1.172.054.237.481	1.171.808.804.784
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.000.000.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.223.867.879.901	1.264.684.919.169	1.285.725.312.155	1.303.869.755.476	1.324.018.267.436	1.327.537.972.066
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	917.062.470.376	945.769.180.843	898.461.324.063	909.855.788.245	924.076.223.302	922.119.395.935
	B. Belanja Modal	234.129.645.816	170.760.326.040	228.407.554.868	234.273.031.322	237.819.468.631	243.888.211.451
	C. Belanja Tak Terduga	500.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	D. Belanja Transfer	157.263.878.155	159.537.091.632	161.856.433.224	162.740.935.909	165.122.575.503	164.530.364.681
	JUMLAH BELANJA	1.308.955.994.347	1.278.066.598.515	1.293.725.312.155	1.311.869.755.476	1.332.018.267.436	1.335.537.972.066
	SURPLUS/DEFISIT	-85.088.114.446	- 13.381.679.346,00	-8.000.000.000	-8.000.000.000	-8.000.000.000	-8.000.000.000
3	PEMBIAYAAN		-	-	-	-	-
	A. Penerimaan	85.088.114.446	13.381.679.346	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	B. Pengeluaran	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	85.088.114.446	13.381.679.346	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	85.088.114.446	13.381.679.346	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dan diproyeksikan dari data LRA Kabupaten Mamuju

Pada tabel proyeksi APBD menjelaskan proyeksi anggaran dari tahun 2026 hingga 2030 mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan RPJMD dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah diperkirakan meningkat dari Rp 1.223.867.879.901 pada tahun 2024 menjadi Rp 1.327.537.972.066 pada tahun 2030, sesuai dengan strategi peningkatan pendapatan yang dijelaskan dalam RPJMD. Di samping itu, belanja daerah juga meningkat signifikan, dari Rp 1.308.955.994.347 pada tahun 2024 menjadi Rp 1.335.537.972.066 pada tahun 2030, untuk mendukung prioritas infrastruktur dan layanan publik yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun, tantangan defisit anggaran menunjukkan perlunya manajemen keuangan yang hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip RPJMD untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan efektif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di atas 8% periode 2025-2029 sehingga mendorong pendapatan daerah naik. Pendapatan daerah naik mendorong belanja naik untuk menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran dibawah dua digit serta mengurangi ketimpangan.

2.5.2.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan

kapasitas di mana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

c. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan di mana dana tersebut dialokasikan.
d. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju telah memenuhi Belanja Wajib (*mandatory spending*) anggaran Pendidikan sebesar 20%, Kesehatan sebesar 10%, Kewajiban Daerah (Utang) rata-rata sebesar 6%, Dana Transfer rata-rata sebesar 10% dan Belanja Pegawai rata- rata sebesar 14%, serta belanja fungsi pengawasan sebesar 0,3% dan belanja pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,3%.

Pada dasarnya, analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menggambarkan kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Kinerja keuangan masa lalu digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu.

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai program serta kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan baik fisik maupun non-fisik.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran Pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan Pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian Pembangunan sampai dengan tahun 2023 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 tahap kesatu. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalahan dengan *focus group discussion (stakeholder*) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran arah kebijakan RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 tahap kesatu, ditemukan beberapa permasalahan utama di Kabupaten Mamuju, yaitu:

2.6.1.1 Urusan Pendidikan

1) Harapan lama sekolah belum menunjukkan peningkatan yang optimal.
2) Rata-rata lama sekolah masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah.

2.6.1.2 Urusan Kesehatan

1) Angka kematian ibu masih belum menunjukkan penurunan signifikan.

2) Angka kematian bayi belum berhasil ditekan secara optimal.
3) Upaya penurunan angka kematian balita belum menunjukkan hasil yang memadai.
4) Tingkat kesakitan masyarakat masih tinggi dan belum terkendali.
5) Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih belum memenuhi standar gizi seimbang.
6) Kebutuhan ber-KB belum sepenuhnya terpenuhi, menunjukkan masih tingginya *unmet need*.

2.6.1.3 Urusan Sosial

1) Upaya penanggulangan kemiskinan belum dilaksanakan secara efektif.
2) Partisipasi angkatan kerja masih tergolong rendah dan belum mampu mendorong produktivitas ekonomi.

2.6.1.4 Inovasi

1) Tenaga kerja terampil di bidang IPTEK dan inovasi masih sangat terbatas.
2) Akses terhadap internet cepat dan infrastruktur teknologi belum merata, terutama di daerah terpencil.
3) Budaya riset dan inovasi belum tumbuh di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
4) Regulasi untuk mendukung sistem inovasi daerah (SIDa) belum tersedia secara terpadu.
5) Basis data perencanaan dan evaluasi pembangunan IPTEK dan ekonomi masih belum tersedia secara kuat.
6) Sistem informasi inovasi daerah belum terintegrasi dengan baik.
7) Pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan dan jasa masih belum optimal.

2.6.1.5 Ekonomi

1) Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap ekonomi hijau masih rendah.

2) Keterbatasan finansial, teknologi, dan SDM menghambat penerapan ekonomi hijau.
3) Kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali mengorbankan pelestarian lingkungan.
4) Infrastruktur pendukung, seperti pengelolaan sampah dan transportasi publik, belum memadai untuk mendukung ekonomi hijau.

2.6.1.6 Perhubungan

1) Jalan, pelabuhan, dan logistik belum mendukung kelancaran arus barang dan jasa.
2) Koneksi transportasi antarwilayah masih terbatas dan menyulitkan distribusi produk lokal.

2.6.1.7 Ketenagakerjaan

1) Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan industri global.
2) Penguasaan teknologi dan digitalisasi di kalangan pelaku usaha lokal masih rendah.
3) Pelaku UMKM kesulitan menembus pasar nasional dan global karena kurangnya informasi pasar.
4) Dukungan untuk branding produk lokal belum memadai.
5) Prosedur perizinan dan regulasi belum cukup mendukung iklim usaha.

2.6.1.8 Investasi

1) Insentif dan fasilitas investasi masih terbatas, baik untuk investor lokal maupun asing.
2) Ketergantungan pada sektor primer menjadikan ekonomi rentan terhadap gejolak harga dan iklim.
3) Produk lokal masih memiliki nilai tambah rendah akibat kurangnya proses industrialisasi. Pertumbuhan investasi masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.
4) Pengembangan ekonomi kreatif belum mencapai potensi optimal.

5) Pertumbuhan sektor industri belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.
6) Sektor perdagangan dan jasa belum berkembang secara optimal

2.6.1.9 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sistem drainase kota belum tertata dengan baik.
2) Penurunan muka tanah (land subsidence) masih tinggi dan mengancam permukiman.
3) Terdapat ketimpangan kualitas lingkungan permukiman antarwilayah.

2.6.1.10 Komunikasi dan Informatikan

1) Sistem pemerintahan berbasis elektronik belum diimplementasikan secara optimal.

2.6.1.11 Perencanaan dan Pengawasan

1) Pengelolaan layanan publik masih belum optimal.
2) Penataan dan peningkatan kompetensi ASN belum berjalan secara efektif.
3) Akuntabilitas kinerja pemerintah masih perlu ditingkatkan.
4) Akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan.
5) Penerapan SPIP belum optimal dalam tata kelola pemerintahan.
6) Kapabilitas APIP belum mencapai tingkat yang memadai.

2.6.1.12 Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran lalu lintas.
2) Penegakan hukum terhadap korupsi masih lemah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3) Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan kebersihan masih rendah.

2.6.1.13 Kebudayaan

1) Intensitas penyelenggaraan event budaya masih terbatas dan belum merata.

2.6.1.14 Gender

1) Pengarusutamaan gender belum berjalan secara optimal di berbagai sektor.

2.6.1.15 Lingkungan Hidup

1) Pencemaran air masih tinggi dan belum tertangani secara efektif.
2) Tutupan lahan belum optimal untuk menjaga ekosistem.
3) Cakupan pelayanan persampahan kota belum mencakup seluruh wilayah.
4) Layanan air bersih perpipaan belum menjangkau seluruh rumah tangga.
5) Kenaikan permukaan laut menyebabkan abrasi dan banjir rob yang belum tertanggulangi secara efektif.
6) Pola cuaca ekstrem belum dapat diantisipasi dengan baik dan berdampak pada ketahanan pangan serta sumber daya air.

2.6.1.16 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Perlu adanya pendampingan dalam memanfaatkan Transmigrasi data Indeks Desa
2) Percepatan Digitalisasi desa dan perdesaan;
3) Peningkatan kapasitas aparatur desa;
4) Penataan aset desa;
5) Manajemen pembinaan pemerintahan desa;
6) Penguatan aparatur desa, penetapan batas desa;
7) Penguatan kelembagaan dan usaha bumdes dan bumdes bersama;
8) Peningkatan tata administrasi pemerintahan desa yang akuntabel dan sesuai standar;
9) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa atau Kelurahan (peningkatan tata Kelola pemerintahan desa);
10) Perbaikan database desa;
11) Penguatan kelembagaan masyarakat desa;
12) Perlunya Peningkatan kapasitas pendamping desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa.

2.6.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah permasalahan, tantangan, atau peluang utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah atau panjang. Isu strategis biasanya bersifat prioritas karena dampaknya yang besar dan membutuhkan perhatian serta penanganan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

2.6.2.1 Isu Global

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs/*TPB*)* tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang m akses keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim.

SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang meliputi berbagai isu pembangunan berkelanjutan, 17 tujuan global tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) **Tanpa Kemiskinan (*No Poverty)*** – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat;

2) **Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)** – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;
3) **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)** – Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia;
4) **Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)** – Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;
5) **Kesetaraan *Gender* (*Gender Equality*)** – Menjamin kesetaraan *gender,* serta memberdayakan seluruh perempuan;
6) **Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)** – Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7) **Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)** – Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua orang;
8) **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)** – Meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bag semua orang;
9) **Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)** – Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10) **Mengurangi Kesenjangan *(Reduced Inequalities*)**– Mengurangi ketidaksetaraan di dalam, dan di antar negara;
11) **Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)** – Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan;

12) **Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab *(Responsible Consumption and Production*)** – Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
13) **Aksi terhadap Iklim (*Climate Action*)** – Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
14) **Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)** – Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15) **Kehidupan di Darat (*Life on Land)*** – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati);
16) **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions)*** – menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level; dan
17) **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*)** – Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan rencana aksi daerah TBP dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom.

b. Asean Economic Community (*AEC)

AEC adalah produk yang dihasilkan oleh ASEAN karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (*unity*) di kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia sangat diperlukan.

Maka dari itu, perlu dilakukan telaah 5W+1H dalam memasuki era AEC. Pertama "*what*" yaitu apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu institusi kota, daerah, wilayah, atau negara dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan. Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka suatu daerah hanya akan bertahan apabila mempunya daya saing yang tinggi (halwani, 2002:423). Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Kedua, "*Why*" yaitu mengapa daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan pada era AEC. Karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar daya saing nasional. Ketiga "*When*", kapan daya saing negara perlu dibangun dan ditingkatkan. Indikator daya saing negara perlu diperkuat seiring waktu di semua bidang, sektor, dan kegiatan yang semakin signifikan dengan seiring waktu. Keempat "*Where*" yaitu di mana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Level analisis penguatan kembali indikator daya saing negara bukan hanya pada tingkat nasional dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan level daerah otonom yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015, bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (kecamatan,

kelurahan/desa) di masyarakat, sebagai lokus pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki.

Kelima "*Who*" yaitu siapa saja aktor yang berkepentingan terhadap penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aparat pemerintah terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 bidang prioritas pembangunan lainnya yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian. Keenam, "*How*" yaitu, bagaimana cara membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing negara atau daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya melakukan penataan dan revitalisasi fungsi kelembagaan di berbagai bidang dan sektor.

2.3.1.1 Isu Nasional

Mengacu pada dokumen RPJMN 2025-2029, Pembangunan ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa isu jangka menengah yang diambil. Isu jangka menengah tersebut yang masih cukup relevan dengan Kabupaten Mamuju adalah penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global, *aging population* negara maju, hilirisasi bagi perekonomian.

Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global yaitu penggunaan maupun produksi yang berorientasi pada dampak lingkungan sehingga perlu menciptakan produk yang ramah lingkungan. Masalah lingkungan dan iklim mendorong produk-produk di pasaran harus ramah lingkungan, salah satu bentuk menjaga dan menyayangi alam. Agar produk Indonesia dapat terus bersaing dengan produk global, maka perlu diterapkan standar yang tinggi dalam aspek *sustainability.* Kemudian, *aging population* negara maju. Keadaan demografi khususnya pada negara maju yang menurunnya usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang bagi Indonesia, terlebih lagi Indonesia akan masuk pada bonus demografi. Hal tersebut menjadi potensi yang harus didukung oleh setiap daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju. Selain itu, Indonesia juga berpotensi untuk ikut mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia akibat dari adanya *aging population* di negara maju tersebut.

Isu ketiga yaitu hilirisasi bagi perekonomian. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang perlu dilakukan peningkatan nilai pada produk sehingga dapat berdampak pada peningkatan nilai ekonomi dari bahan mentah dengan mengubahnya menjadi produk setengah jadi atau jadi. Fokus nasional pada isu ini yaitu pada sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi pada ekspor. Keempat, tantangan transisi energi di Indonesia akibat dari adanya ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Sehingga ke depannya harus dikurangi dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, atau bioenergi. Diversifikasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan energi.

Terakhir adalah sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi kebijakan sangat penting dalam konteks pemerintahan dan pembangunan karena dapat memastikan efektivitas, efisiensi, dan koherensi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor. Sehingga peran pemerintah sebagai *leading sector* yang mengatur dan membawa pembangunan sebuah wilayah harus terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dan bergerak searah.

2.3.2.3 Isu Regional

A. Provinsi Sulawesi Barat

1) Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam (SDA) karena sejumlah faktor kunci:

i. Keanekaragaman Sumber Daya Alam: Sulawesi kaya akan sumber daya alam seperti tambang mineral (nikel, emas, tembaga), kehutanan yang melimpah, serta potensi pertanian yang subur. Keanekaragaman ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan industri berbasis SDA di pulau tersebut.

ii. Kawasan Logistik dan Transportasi: Sulawesi memiliki posisi geografis yang strategis di antara kepulauan Indonesia. Dengan infrastruktur transportasi yang berkembang, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, Sulawesi dapat menjadi pusat logistik yang penting untuk distribusi barang dan jasa di kawasan Nusantara.

iii. Potensi Industri Pengolahan: SDA yang melimpah memberikan peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan di Sulawesi. Misalnya, nikel dan tembaga dapat diolah menjadi logam, kayu dapat dijadikan bahan bangunan dan furniture, sementara hasil pertanian seperti kakao dan kelapa dapat diolah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi.

iv. Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Untuk mendukung peran Sulawesi sebagai superhub ekonomi dan pusat industri berbasis SDA, diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan dan rel, perluasan pelabuhan dan bandara, serta penyediaan energi dan air bersih yang memadai.

v. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inisiatif Pemerintah: Pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan industri berbasis SDA di Sulawesi melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, dan kemudahan investasi untuk menarik investor domestik dan asing ke daerah tersebut.

vi. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Sulawesi. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik akan mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing regional.

Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong investasi serta pengembangan industri berbasis SDA, Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

2) Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut dan Udara)

Terhubungnya wilayah dalam suatu negara disebut dengan konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Misalnya Indonesia meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan cara membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangunan angkutan massal seperti MRT. Umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah. Sehingga dibutuhkan konektivitas antar wilayah untuk memeratakan pembangunan tersebut. Manfaat konektivitas antar wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

i. Peningkatan aksesibilitas wilayah. Manfaat pertama dari konektivitas antar wilayah adalah kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya. Membuat suatu wilayah yang awalnya terjamah menjadi lebih mudah didatangi. Dengan peningkatan aksesibilitas suatu wilayah, pengembangan dari wilayah tersebut dapat dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya.
ii. Kemudahan akses sumber daya. Konektivitas daerah memudahkan akses sumber daya maupun berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang maupun sumber daya dapat dikirim dari tempat asalnya ke wilayah lain.
iii. Peningkatan pelayanan umum. Konektivitas daerah dapat meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Misalnya pasokan air bersih, aliran listrik, penanggulangan sampah dan limbah, pendidikan, kantor imigrasi, pembuatan surat izin mengemudi, kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), keamanan, juga penjara. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang terdidik. Pemerataan pelayanan umum di bidang kesehatan, memberikan masyarakat kemudahan untuk berobat saat sakit, mengalami kecelakaan, maupun akan melahirkan.
iv. Peningkatan investasi. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, peluang pembukaan bisnis menjadi lebih tinggi. Perkembangan bisnis

yang bagus dalam suatu wilayah menarik para investor untuk memberikan modal, hal ini jelas dapat memajukan ekonomi masyarakat.

v. Peningkatan kesempatan kerja. Dengan berkembangnya bisnis dan ketersediaan investor, lapangan kerja baru akan tersedia. Peningkatan kesempatan kerja bisa menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita.

vi. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal tersebut jelas menjadi peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

vii. Peningkatan sarana dan prasarana. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana akan lebih cepat karena mudahnya transportasi dan juga dana yang tersedia lebih besar. Mudahnya akses ke suatu wilayah, membuat turis dalam negeri walaupun luar negeri bisa berkunjung dengan aman dan nyaman ke berbagai tempat wisata.

viii. Penurunan konflik antar wilayah. Konektivitas antar wilayah dapat menurunkan konflik antar wilayah, baik konflik antar warga maupun konflik pembangunan antar pemerintah suatu wilayah. Hal tersebut karena konektivitas antarwilayah membuat wilayah-wilayah saling bekerja sama untuk memajukan daerah bukannya saling berselisih.

3) Kerjasama Regional Sulawesi

Kerjasama regional adalah kerjasama antara daerah-daerah di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Faktor pendorong kerja sama ini biasanya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan, persamaan latar belakang sejarah (historis), sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor.

Sebagai daerah yang berada dalam wilayah daratan Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat perlu mengembangkan kerjasama regional

yang saling menguntungkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Potensi kerjasama yang dapat dikembangkan, antara lain, pengembangan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup, hingga mitigasi bencana alam.

Sejak tahun 2000, secara kelembagaan telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) untuk mengkoordinasikan kerjasama antar provinsi di Pulau Sulawesi guna memajukan provinsi-provinsi yang menjadi anggotanya. Kantor Sekretariat BKPRS berada di Kota Makassar dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sedangkan Ketua BKPRS adalah para Gubernur yang dipergilirkan setiap periode tertentu. Selain sebagai wadah untuk menjalin kerjasama antar provinsi, keberadaan BKPRS ini juga bisa menguatkan positioning pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi dalam menyampaikan aspirasi dan dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat.

Keberadaan BKPRS menjadi semakin penting dan strategis untuk mengembangkan kerjasama antar daerah, bukan hanya di Pulau Sulawesi tetapi juga dengan Pulau Kalimantan, terutama sejak pemerintah pusat menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Sebagai pulau terdekat dari IKN, Sulawesi berpeluang untuk menjadi penopang utama IKN, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun pemerintah provinsi di Sulawesi mesti berkolaborasi dan saling mendukung untuk mengoptimalkan potensi yang ada di masing-masing wilayah.

Konektivitas wilayah juga terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan daerah–daerah lain. Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan dua pelabuhan yakni Pelabuhan Simboro dan Pelabuhan Mamuju dalam menyuplai berbagai kebutuhan daerah–daerah sekitar. Transportasi menjadi modal utama dalam mendukung konektivitas antar wilayah. Di tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp 1,11 Triliun untuk

pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi dan lain lain. Isu infrastruktur dan konektivitas seperti kondisi jalan dan jembatan serta pengembangan kapasitas bandara perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelum peluang ekonomi tersebut lebih dahulu ditangkap oleh daerah lain yang lebih siap.

4) Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Bencana merupakan isu strategis regional yang dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pulau Sulawesi termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana, terutama bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu kejadian bencana yang pernah terjadi di Pulau Sulawesi adalah gempa bumi di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September tahun 2018. Beberapa daerah yang terkena dampaknya adalah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter dan berpusat di 119,85 Bujur Timur atau 27 km timur laut Donggala.

Saat kejadian bencana tersebut, PBB mencatat setidaknya ada 4.845 orang meninggal, 172.999 pengungsi, dan 110.214 rumah yang rusak. Tercatat total kerugian akibat bencana multidimensi ini adalah Rp 18,48 triliun dengan rincian Kota Palu sebesar Rp 8,3 triliun, Kabupaten Sigi sebesar Rp 6,9 triliun, Kabupaten Donggala sebesar Rp 2,7 triliun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp 640 miliar.

BNPB sudah melakukan kajian terkait dengan risiko bencana yang dihadapi oleh Indonesia tahun 2015. Hasil kajian tersebut menunjukkan Pulau Sulawesi termasuk dalam Kawasan bencana. Peta rawan bencana gempa bumi menunjukkan beberapa daerah di Pulau Sulawesi termasuk dalam kategori rasio yang sangat tinggi. Peta itu (berwarna merah), menunjukkan Sebagian besar daerah tersebut berada di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Meski tak banyak, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Barat juga ditandai sebagai daerah rawan bencana dengan kategori indeks risiko tinggi.

Jika bencana gempa bumi terjadi di Pulau Sulawesi, akan ada 8.888.200 jiwa terdampak, dengan kerugian fisik dan ekonomi masing-masing Rp 58,57 triliun dan Rp 42,52 triliun.

Selain bencana gempa bumi, Pulau Sulawesi juga termasuk rawan bencana tsunami. Peta rawan bencana tsunami yang dirilis oleh BNPB menunjukkan bahwa semua daerah di Pulau Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar berpotensi menghadapi tsunami, termasuk di sepanjang wilayah pantai di Provinsi Sulawesi Barat. Kota Palu dan sekitarnya sudah merasakan gempa bumi yang diikuti oleh tsunami tahun 2018. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, disebutkan bahwa di pesisir pantai Sulawesi sudah terjadi sebanyak 21 kali tsunami dalam 20 tahun terakhir, salah satu yang terparah adalah gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah. Menurut catatan UNICEF, Lebih dari 1.500 sekolah rusak dan menyebabkan sekitar 184.000 pelajar yang tidak bisa belajar, ada sekitar 152.000 orang yang kekurangan akses ke air bersih, sanitasi dasar, dan barang-barang kebersihan.

Provinsi Sulawesi Barat juga mesti mewaspadai kejadian bencana agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Menurut catatan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat sudah mengalami 145 kali kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Jenis bencana yang jumlah kejadiannya paling banyak adalah bencana banjir. Selain paling sering terjadi, banjir juga merupakan jenis bencana yang memberikan kerugian paling besar dari jenis bencana lainnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk keselamatan jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lahan pertanian. Ancaman bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat adalah gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan gelombang ekstrim dan abrasi.

Data IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Provinsi Sulawesi Barat, daerah ini mendapat indeks 160,08 tahun 2023. Angka itu menunjukkan bahwa risiko bencana di Provinsi Sulawesi Barat masuk

dalam kategori “tinggi”. Empat Kabupaten yang memiliki IRBI kategori tinggi adalah Majene, Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju sementara IRBI Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar termasuk kategori “sedang”. Jika tak berhasil diantisipasi, maka kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat akan berpotensi berdampak pada 1.058.857 jiwa (hampir semua penduduk Provinsi Sulawesi Barat), dengan potensi kerugian fisik dan ekonomi masing-masing senilai Rp 6,66 triliun dan Rp 3,55 triliun. Sebagai daerah rawan bencana, Provinsi Sulawesi Barat mesti memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan sebagai bentuk upaya antisipasi terhadap kejadian bencana.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada beberapa isu lingkungan yang dihadapi dan perlu diselesaikan di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku. Isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku pada tahun 2021 terdiri dari alih fungsi lahan, perubahan iklim global, penurunan kualitas air, risiko bencana alam, dan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku sangat berkaitan erat dengan sumber daya pesisir dan laut, membuat isu kerusakan sumber daya pesisir dan laut menjadi salah satu isu prioritas.

Salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam Kawasan Ekoregion Sulawesi Maluku adalah alih fungsi hutan dan lahan. Menurut data KLHK, Tutupan hutan di Ekoregion Sulawesi Maluku mengalami penurunan dalam periode 2019-2020. Penurunan lahan hutan terjadi secara signifikan, terutama di dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Penurunan lahan hutan di Sulawesi Tenggara mencapai 17 persen tahun 2020, sementara di Provinsi Sulawesi Barat menurun 12 persen dari tahun 2019. Kenaikan luas tutupan lahan non-hutan sebagai permukiman dan industri semakin mendorong adanya program reklamasi pantai di Pulau Sulawesi.

Isu lingkungan yang terjadi dalam wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,

terutama pada isu deforestasi karena Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah yang luas wilayahnya sebagian besar adalah kawasan hutan. Selain itu penurunan kualitas air, risiko bencana alam, perubahan iklim global, dan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestic juga perlu menjadi perhatian. Untuk menghadapi isu lingkungan di kawasan, Provinsi Sulawesi Barat mestinya bersinergi dengan daerah lain, terutama dalam wilayah Pulau Sulawesi.

B. Kabupaten Mamuju

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

   Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kabupaten Mamuju merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam setiap aspek pemerintahan. Perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Meskipun telah ada upaya dalam penerapan teknologi informasi, masih diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi untuk memastikan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Selain itu, perlu adanya pengawasan internal yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup

   Pembangunan yang aman dan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2023 mencapai 1,75%, melebihi laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,1%. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Mamuju mencapai 292.395 jiwa, menghasilkan timbulan sampah sekitar 52.124

ton. Peningkatan jumlah penduduk ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah rumah tangga, yang menjadi salah satu isu prioritas lingkungan di Mamuju. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih serius. Selain itu, kebijakan dan implementasi ruang terbuka hijau (RTH). Kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan pemeliharaan RTH dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas dan distribusi sdm yang belum merata. Kualitas SDM di Kabupaten Mamuju masih menjadi permasalahan serius, terutama terkait dengan kinerja pemerintah daerah yang dipandang rendah. Selain itu, distribusi atau penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar dan bidang masing-masing juga menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja aparatur. Selain itu, Pembangunan sumber daya manusia perlu ditingkatkan, mengingat adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Mamuju, disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis, alokasi dana, sumber daya alam, infrastruktur, dan kebijakan daerah. Kesenjangan ini berdampak pada akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan, yang pada akhirnya mempengaruhi pembangunan SDM.

4. Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan jumlah penduduk, terutama pada usia produktif. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sekitar 64,75% penduduk berada dalam usia kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif ini harus menjadi

perhatian pemerintah karena akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi daerah atau akan menjadi meningkatkan angka pengangguran terbuka jika tidak dikendalikan dengan tepat. Kedua, Kabupaten Mamuju memiliki sektor-sektor ekonomi yang potensial, seperti pertanian, jasa, dan industri pengolahan. Pengelolaan yang efektif terhadap sektor-sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Identifikasi dan pengembangan sektor basis yang tepat akan meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi Kabupaten Mamuju.

5. Kehidupan sosial bermasyarakat yang aman dan nyaman

Perubahan sosial budaya di Kabupaten Mamuju merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan pesatnya perkembangan daerah ini, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi, maupun arus urbanisasi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju menjadi pusat pertumbuhan dan daya tarik bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menetap, baik untuk bekerja, berdagang, maupun mengembangkan usaha. Kondisi ini mendorong terjadinya percampuran budaya antara penduduk asli, seperti masyarakat Suku Mandar, dengan pendatang dari luar daerah yang membawa nilai, norma, serta kebiasaan sosial yang berbeda. Meski membawa dampak positif dalam hal keragaman budaya dan perkembangan ekonomi, perubahan dalam struktur sosial ini juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Perbedaan bahasa, adat istiadat, serta pola kehidupan sehari-hari bisa memicu salah paham atau ketegangan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk menjaga keharmonisan sosial, seperti melalui penguatan forum komunikasi antarwarga, peningkatan edukasi multikulturalisme, dan penguatan peran tokoh adat serta tokoh masyarakat sebagai penengah dalam menjaga nilai gotong royong dan toleransi yang telah lama menjadi bagian dari karakter masyarakat Mamuju. Dengan pengelolaan yang tepat, keberagaman sosial budaya

yang ada di Kabupaten Mamuju justru dapat menjadi kekuatan dalam membangun daerah yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh masyarakatnya.

Tabel 2. 116 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perikanan, Pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi besar pada PDRB daerah		Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan keuangan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan ketenagakerjaan	1. *World Economic Forum* 2. *Asean Economic Community* 3. BRICS	Transformasi Digital dan Ekonomi Digital	Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA	Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki kontribusi tinggi terhadap PDRB daerah	Rendahnya angka rata-rata lama sekolah	Belum optimalnya pelayanan Kesehatan, gizi, dan keluarga berencana untuk mendukung kesejahteraan ibu dan anak	*SDG's*			Pembangunan Sumber Daya Manusia
						Kehidupan sosial bermasyarakat yang aman dan nyaman
Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor kontribusi terbesar untuk PDRB Daerah		1. Keterbatasan akses dan kualitas infrastruktur dasar serta sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat 2. Belum optimalnya tata kelola			Kerjasama Regional Sulawesi	Pembangunan yang Aman dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, ketertiban umum serta kesetaraan gender				
	Tingginya Tingkat pencemaran air	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan (IPCC)	Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan	Kebencanaan dan Lingkungan Hidup	
					Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut dan Udara)	
	1. Layanan publik belum dikelola dengan optimal 2. Belum optimalnya penataan dan peningkatan kompetensi ASN 3. Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan 4. Akuntabilitas keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan		Ketegangan Geostrategis dan Keamanan Global (PBB)			Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Sumber: Data diolah, 2025

BAB III

VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju periode 2025–2029 berdasarkan pada nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan yang berpacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju 2025 – 2045, capaian kondisi pembangunan daerah, dan proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Untuk menciptakan sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah maka perlu diketahui visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045 yaitu, **"Kabupaten Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan"**.

3.1.1 Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029, yakni:

"MAMUJU *K E R E N*"
(KREATIF EDUKATIF RAMAH ENERGIK NYAMAN)

Berikut adalah penjabaran dari visi Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029:

A. KREATIF

Pemerintahan yang senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, Jasa dan pariwisata

B. EDUKATIF

Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua

C. RAMAH

Kondisi sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan lokal

D. ENERGIK

Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat, kuat dan penuh semangat

E. NYAMAN

Ketersediaan Infrastruktur yang memadai di kota dan desa

3.1.2 Keterkaitan Visi

Keterkaitan antara visi Kabupaten Mamuju dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045, serta RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 sangat penting untuk melihat keselarasan tujuan dan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah. RPJMN sebagai acuan untuk pembangunan jangka menengah di tingkat nasional menetapkan arah dan prioritas pembangunan yang harus diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mamuju. Visi pembangunan dalam RPJMN memberikan gambaran umum mengenai arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Mamuju sebagai dokumen jangka panjang daerah memuat arah pembangunan yang lebih spesifik untuk wilayah Mamuju, sesuai dengan visi nasional, namun disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Mamuju untuk periode 2025-2029 menjadi penghubung RPJMN dan RPJPD dengan program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Keterkaitan ini adalah upaya untuk menciptakan pembangunan yang terintegrasi, baik antara kebijakan pusat dan daerah maupun antara perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Dengan memastikan adanya konsistensi antara RPJMN, RPJPD, dan RPJMD, Kabupaten Mamuju dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global

yang terus berubah. Berikut adalah tabel penyelarasan visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029:

Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi Nasional dan Kabupaten Mamuju

Visi Nasional		Visi Provinsi Sulawesi Barat		Visi Kabupaten Mamuju	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029
Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, Dan berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif	Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera	Kabupaten Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan	MAMUJU KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman)

Sumber: Data diolah, 2025

Visi nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 mengusung konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang mengarah pada cita-cita Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju, serta menjaga keberlanjutan dalam segala aspek. Visi ini menjadi pijakan untuk mencapai kemajuan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang efisien. Visi ini kemudian dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, yang menargetkan visi berupa Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN ini berfokus pada pencapaian kemajuan bangsa dalam jangka menengah, mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Indonesia Emas. Pencapaian ini melibatkan pembangunan yang merata di seluruh sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi berbasis digital. Berkaitan dengan visi nasional tersebut, RPJPD 2025-2045 Kabupaten Mamuju merumuskan arah pembangunan jangka panjang dengan visi Mamuju K E R E N. Ini mencerminkan komitmen provinsi untuk mendukung tujuan nasional dengan memperhatikan potensi lokal dan

kekhasan daerah, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mamuju mengimplementasikan visi Mamuju K E R E N. Visi ini lebih merinci bagaimana Kabupaten Mamuju, dalam lima tahun ke depan, akan menciptakan mamuju yang kreatif edukatif ramah energik nyaman. Visi ini sangat selaras dengan tujuan nasional dan jangka panjang provinsi, yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD terlihat dalam upaya menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi daerah. Proses ini memastikan bahwa visi dan strategi pembangunan di tingkat provinsi dapat mendukung pencapaian visi nasional, serta memastikan pembangunan yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

3.1.3 Misi

Misi merupakan langkah-langkah yang diimplementasikan guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029. Misi dirumuskan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Oleh karena itu, misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis seperti internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan tantangan) yang ada dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka ditetapkan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2025– 2029, yakni sebagai berikut:

A. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

B. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

C. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

D. Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
E. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi.

3.1.4 Keterkaitan Misi

Keselarasan antara Misi RPJMN 2025–2029 atau biasa dikenal dengan Asta Cita dan RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029 tercermin melalui berbagai tujuan strategis yang saling mendukung dalam mempercepat pencapaian pembangunan nasional dan daerah.

Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi Nasional, Misi Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter	Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.	Membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	1.Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029
Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	kesejahteraan masyarakat 2.Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter	
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama	Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter	Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029
Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur		

Sumber: Data diolah, 2025

Penyelarasan misi RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029 dengan Asta Cita RPJMN 2025–2029 dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan batasan serta ruang lingkup kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, misi-misi nasional yang diadopsi dalam dokumen perencanaan daerah adalah yang memiliki relevansi langsung terhadap urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tetap berada dalam koridor regulasi, efektif dalam implementasi, serta realistis dalam capaian.

3.1.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya

untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju. Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Target RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
MAMUJU KEREN (KREATIF, EDUKATIF, RAMAH, ENERGIK, NYAMAN)													
	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik												
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**BB (70,49)**	**BB (71)**	**BB (72)**	**BB (73)**	**BB (74)**	**BB (75)**	**BB (76)**	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	62,97	70,01	72,85	73,54	75,98	78,02	80	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,42	2,5	2,75	2,8	2,85	2,9	3	
			Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	44,69	46	50	53	55	58	60	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2,87	2.95	3.03	3.11	3.19	3.27	3.35	
			Meningkatnya Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan *Asset* Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3.154	3.155	3.157	3.160	3.163	3.166	3.169	
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73,67	74	74,52	75	75,5	76	76,5	
	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal												

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing		**Laju Pertumbuhan ekonomi**	**Persen**	**6,47**	**6,55**	**6,63**	**6,73**	**6,79**	**6,87**	**6,95**	
				Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	**Nilai**	**0,425**	**0,421**	**0,417**	**0,413**	**0,409**	**0,405**	**0,401**	
			Meningkatkan Kontribusi PDRB Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Kab terhadap PDRB Provinsi	Persen	24.96	25.16	25.36	25.56	25.76	25.96	25.36	
				Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,30	2,47	2,55	2,63	2,72	2,80	2,85	
			Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	45,04	16	16	16,08	16,16	16,24	16,32	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,77	2,73	2,69	2,65	2,61	2,57	2,53	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan pangan (IKP)	Indeks	81,47	82,97	84,47	85,97	87,47	88,97	90,47	
			Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	3,72	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	
	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial												

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**71,86**	**72,15**	**72,26**	**73,63**	**74,37**	**75,11**	**75,8**	
				Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**7,15**	**6,97**	**6,73**	**6,43**	**6,22**	**5,92**	**5,7**	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,13	72,49	72,86	73,58	73,22	73,94	74,3	
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan pembangunan Kepemudaan	Rata rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,35	8,49	8,66	8,81	8,96	9,11	9,24	
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,29	13,83	14,01	14,16	14,3	14,44	14,59	
				Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	64,45	64,85	66,15	67,47	68,82	70,2	71,6	
			Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	43	44	46	48	49	50	51	
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,43	59,66	62,77	64,78	67,15	68,77	71,32	
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keluarga yang Berkualitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	54,41	70	75	80	85	90	100	
				Indeks pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	62,15	61,4	61,51	61,52	61,53	61,54	61,55	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,61	60,96	61,45	61,76	61,84	62,11	62,5	
				Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.501	0,465	0.418	0.370	0.325	0.276	0.233	
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	52,72* (2023)	54	54,6	55	56	57	58	
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa	Indeks	N/A	1	2,5	2,5	5	5	5	
	Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama												
		Terwujudnya daerah yang aman untuk masyarakat serta menjunjung nilai-nilai lokal, beragama serta melestarikan Budaya		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Persen**	**40**	**40**	**40**	**50**	**50**	**60**	**60**	
				Indeks kerukunan umat beragama	**Persen**	**77,9**	**80,02**	**82,09**	**84,11**	**86,08**	**88**	**90,64**	
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persen	56	60	65	70	75	80	85	
			Meningkatkan penyelenggaraan edukasi dan festival seni budaya	Persentase peningkatan pengunjung edukasi dan festival budaya	Persen	33,33	35	40,74	42,86	50	60	66,67	
			Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik Daerah	Persentase penanganan konflik sosial	Persen	82,76	85,24	87,8	90,43	93,15	95,94	98,82	
	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi												

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**74,66**	**85**	**87**	**89**	**91**	**93**	**95**	
			Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,63	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	39,96	41	42	43	44	45	46	
			Meningkatkan Konektivitas Transportasi	Konektivitas Jalan	Persen	NA	0,89	0,95	1,13	1,73	2,33	2,85	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan dan mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,66	85,68	85,81	85,94	86,07	86,2	86,36	
				Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 (Tahunan)	NA	41.104,54	47.163,70	56.739,22	66.107,24	65.724,31	75.098,38	
					Ton CO2 (Kumulatif)	NA	338.194,09	385.357,79	442.097,01	508.204,26	573.928,56	649.026,94	
			Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161,71	159,35	157	154,64	152,28	149,93	147,57	

Sumber: Data diolah, 2025

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Mamuju untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan Pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan keterpaduan dokumen perencanaan daerah dengan sinkronisasi RKPD dan Renja berbasis data sektoral
		Memperkuat sistem evaluasi pembangunan berbasis capaian nyata dan manfaat
		Pemanfaatan maksimal aplikasi e-Monev, e-SAKIP, dan SIPD untuk memastikan pelaporan kinerja yang cepat dan akurat
		Menyusun dan memperkuat regulasi daerah tentang sistem pelaporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah
		Mengembangkan sistem dashboard digital untuk pelaporan kinerja SKPD
		Melakukan audit dan reviu dokumen seperti Renstra, Renja, LKjIP secara berkala
		Menanamkan budaya kerja berbasis capaian
		Menyusun sistem penghargaan tahunan bagi SKPD berkinerja baik dalam implementasi akuntabilitas kinerja
	Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah berbasis elektronik	Pengembangan Data Center Mamuju untuk mendukung integrasi data antar-OPD
		digitalisasi administrasi pemerintahan melalui e-office, e-surat, dan e-arsip untuk efisiensi birokrasi
		Penyusunan arsitektur SPBE dan peta jalan transformasi digital pemerintahan Kabupaten Mamuju
		Penyusunan regulasi daerah terkait perlindungan data dan keamanan informasi digital
		Pembangunan ekosistem sistem informasi terpadu antar-OPD untuk memperkuat sinergi dan efisiensi layanan
	Sasaran 3 Meningkatnya Inovasi Daerah	Membentuk Forum Inovasi Daerah yang melibatkan OPD, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Menyusun regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberian penghargaan atas inovasi perangkat daerah dan masyarakat
		Pelaksanaan lomba inovasi untuk OPD dan masyarakat dalam menjawab tantangan lokal Kabupaten Mamuju
		Menyusun riset, produk unggulan dan solusi riset
		Fasilitasi riset terapan melalui kolaborasi BRIDA, OPD, universitas, dan pelaku usaha local
		Pengembangan *inkubator inovasi daerah yang fokus pada pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM*
	Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	integrasi sistem layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan secara digital
		pengembangan MPP di Kabupaten Mamuju dengan integrasi layanan lintas-OPD
		Pelaksanaan SKM secara berkala dan menyesuaikan layanan berdasarkan hasil survei
		Pengembangan layanan publik berbasis aplikasi mobile untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil
		rotasi dan penempatan SDM pelayanan publik berbasis kompetensi dan kebutuhan wilayah
	Sasaran 5 Meningkatnya Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan *Asset* Daerah	pendampingan teknis kepada OPD dalam penyusunan LKPD agar sesuai standar akuntansi pemerintah
		penertiban dan pembaharuan data aset daerah secara sistematis dan digital
		Penyajian informasi keuangan daerah yang transparan dan mudah diakses masyarakat
		Integrasi berbagai aplikasi keuangan daerah untuk efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
		optimalisasi potensi penerimaan pajak daerah dengan memperluas basis pajak yang belum tergarap
		Pemberian insentif dan amnesti bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan daerah
		Penguatan sistem pengawasan dan audit terhadap potensi kebocoran pajak daerah
		kajian terhadap berbagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD, termasuk KPBU dan CSR
	Sasaran 6 Meningkatnya Profesionalitas ASN	Penyusunan peta jalan penguatan sistem merit ASN yang adil dan berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		evaluasi 8 aspek sistem merit ASN sesuai standar penilaian dari KASN
		Peningkatan kapasitas pejabat fungsional kepegawaian melalui pelatihan dan bimbingan teknis
		Penyusunan kebijakan pengelolaan talenta ASN daerah yang mencakup rotasi, promosi, dan pengembangan karier
		Penerapan sistem seleksi terbuka berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrasi
		Pengembangan Talent Pool ASN Kabupaten Mamuju untuk kebutuhan regenerasi pimpinan dan posisi strategis
		sertifikasi dan pemetaan kompetensi ASN berdasarkan SKP dan peta jabatan
Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Sasaran 1 Meningkatkan Kontribusi PDRB Daerah	Pemetaan sektor unggulan dan penyusunan roadmap peningkatan kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap PDRB
		Revitalisasi sektor pertanian melalui mekanisasi pertanian, pemberdayaan kelompok tani, dan integrasi rantai nilai komoditas unggulan
		Penguatan industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti kakao, kelapa, perikanan, dan hasil bumi lainnya
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan usaha tani, irigasi, dan pasar desa
		Pengembangan kawasan ekonomi strategis dan sentra produksi berbasis kecamatan
		Digitalisasi UMKM dan fasilitasi akses e-commerce bagi pelaku usaha local
		Penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pasar kerja
		Optimalisasi potensi pariwisata melalui pengembangan destinasi, SDM pariwisata, promosi digital, dan kemitraan dengan swasta
		Peningkatan investasi daerah melalui penyusunan profil investasi, temu bisnis, dan promosi potensi daerah
		Penerapan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor sektor produktif
		Peningkatan sinergi antar-OPD dalam program peningkatan produktivitas ekonomi daerah
		Pengembangan ekosistem inovasi ekonomi melalui inkubator bisnis dan dukungan terhadap startup local
		Evaluasi berkala terhadap kontribusi sektoral terhadap PDRB dan penyempurnaan kebijakan daerah berbasis data

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Penguatan sistem data statistik sektoral yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti
	Sasaran 2 Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah	Mendorong digitalisasi sistem layanan perizinan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan publik
		Menyusun dan melaksanakan penyederhanaan alur perizinan
		Meningkatkan kapasitas aparatur perizinan melalui pelatihan teknis
		Membentuk dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik
		Mengintegrasikan seluruh layanan perizinan sektoral
		Menyusun dokumen profil investasi daerah untuk mengenalkan potensi unggulan Mamuju
		Mengintensifkan promosi investasi sesuai sektor potensial
		Menyelenggarakan forum temu bisnis antara pemerintah, pelaku usaha lokal, dan calon investor
		Mendorong kerja sama investasi Mamuju dan investor nasional
		Mengembangkan sistem digital promosi dan pelayanan investasi yang mudah diakses oleh calon investor
		pemetaan dan penetapan kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi daerah
		koordinasi lintas sektor untuk penyediaan infrastruktur penunjang kawasan investasi
		Meninjau dan merevisi regulasi yang menghambat investasi di tingkat daerah
		Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan roadmap investasi jangka menengah daerah
		integrasi kawasan investasi prioritas ke dalam dokumen RTRW Kabupaten
		monitoring dan evaluasi realisasi investasi daerah
		pemberian insentif atau disinsentif bagi pelaku usaha
		forum investasi daerah sebagai wadah komunikasi investor dan pemerintah
		kerja sama lintas sektor dalam rangka percepatan investasi strategis
	Sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis potensi lokal
		Integrasi data pencari kerja & lowongan kerja
		Penguatan Kerja Sama Kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
		Pengembangan Wirausaha Baru
		Penempatan Tenaga Kerja Lintas Wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Perlindungan Tenaga Kerja Rentan
		Konseling Karier Terintegrasi
		Investasi Padat Karya
	Sasaran 4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	pemetaan wilayah rentan rawan pangan berbasis desa
		pembentukan lumbung pangan masyarakat di desa
		Diversifikasi sumber pangan lokal dengan pengembangan pangan
		Membangun dan merehabilitasi infrastruktur pertanian
		penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian kepada kelompok tani
		pembentukan korporasi petani untuk memperkuat skala produksi dan akses pasar
		Peningkatan kompetensi SDM petani dan penyuluh melalui pelatihan teknologi pertanian modern
		Pengembangan program pangan keluarga
		Perda terkait Ketahanan Pangan Daerah yang memperkuat ketahanan daerah terhadap krisis pangan
		Mendorong pertanian berkelanjutan berbasis kawasan dan adaptif terhadap perubahan iklim
		Membina kemitraan BUMDes dengan swasta untuk hilirisasi dan pengolahan pangan lokal
		Membangun sistem informasi ketahanan pangan digital untuk pengambilan kebijakan yang berbasis data
		Integrasi Program MBG dengan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan gizi keluarga.
		Sinergi Program MBG dengan program pengentasan stunting melalui peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis potensi lokal
	Sasaran 5 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	pendataan dan klasifikasi koperasi
		program revitalisasi koperasi tidak aktif dengan dukungan pendampingan teknis
		pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi dalam aspek tata kelola modern
		adopsi sistem digital dalam pengelolaan koperasi
		Fasilitasi koperasi dalam mendapatkan akreditasi dan legalitas operasional yang sesuai regulasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		pengawasan koperasi melalui sistem pelaporan digital berbasis indikator kinerja
		Mengembangkan koperasi berbasis sektor unggulan
		kemitraan koperasi dengan BUMDes, lembaga keuangan, dan e-commerce lokal
		Penguatan kelembagaan dan digitalisasi Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
		Penyediaan insentif daerah bagi koperasi berprestasi
		regulasi yang mendukung pembinaan koperasi dan memperkuat sinergi antar-lembaga koperasi di daerah.
Tujuan 3 Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas baru di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan dasar kesehatan
		Penguatan kapasitas kader Posyandu dan tenaga kesehatan dengan pelatihan berjenjang
		Pemenuhan ketersediaan tenaga medis dan paramedis di wilayah tertinggal melalui kebijakan afirmatif daerah
		Pemenuhan alat kesehatan esensial dan penunjang di fasilitas kesehatan tingkat pertama
		revitalisasi layanan gizi dan sanitasi dengan fokus daerah dengan prevalensi stunting tinggi
		Pengembangan sistem layanan kesehatan digital
		Integrasi komponen gizi keluarga dalam program MBG sebagai upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu-anak.
		Penguatan program imunisasi dan deteksi dini penyakit menular
		Integrasi layanan PAUD dan Posyandu untuk memperkuat layanan ibu dan anak
		Pengembangan program kesehatan produktif (posbindu) dan lansia (homecare) di tingkat desa
		Pengembangan sistem data kesehatan digital yang mendukung kebijakan
		Penguatan kualitas layanan melalui akreditasi dan evaluasi rutin terhadap kinerja Puskesmas
		kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat secara masif melalui komunitas
	Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pembangunan Kepemudaan	Pemetaan dan penataan sekolah berbasis kebutuhan wilayah
		Pembangunan dan rehabilitasi sekolah
		Pengadaan sarana TIK dan pembelajaran digital

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Penguatan pendidikan usia dini dan pendidikan non-formal untuk menjangkau anak tidak sekolah
		Penguatan akses pendidikan non-formal melalui Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan berbasis komunitas.
		Pemanfaatan Program MBG untuk mendukung beasiswa pendidikan, sarana belajar dan penguatan literasi keluarga
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru
		Mendorong sekolah inklusif dan ramah anak melalui pelibatan komunitas dan orang tua
		Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung sekolah melalui forum sekolah dan komite sekolah
		Penguatan pendidikan karakter dan budaya literasi di lingkungan sekolah
		Pembentukan Forum Pemuda Daerah (FPD) sebagai wadah partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
		Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan berbasis potensi local
		Fasilitasi akses permodalan dan inkubasi bisnis pemuda dengan kolaborasi perbankan dan koperasi
		Penyusunan database digital profil pemuda untuk perencanaan program yang tepat sasaran
		Penyelenggaraan Pekan Pemuda Daerah (PPD) sebagai ajang inovasi dan partisipasi public
		Integrasi pemuda dalam pengembangan potensi pemuda dalam ekowisata dan desa wisata
		kolaborasi pemuda dengan perguruan tinggi dan LSM dalam program sosial, lingkungan, dan ekonomi kreatif
		Menyediakan beasiswa dan bantuan pelatihan keterampilan bagi pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan formal
		Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepramukaan melalui pelatihan manajemen dan perencanaan
	Sasaran 3 Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan koleksi buku dan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan local
		Revitalisasi perpustakaan daerah dan pembangunan perpustakaan desa
		Pengembangan perpustakaan digital dan otomasi layanan
		Pembentukan komunitas literasi dan pelatihan relawan baca
		Pelatihan dan sertifikasi pustakawan dan tenaga pengelola

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Kemitraan dengan sekolah, dinas pendidikan, dan media
		Pengembangan layanan inklusif (disabilitas, usia lanjut)
		Survei dan monitoring peningkatan minat baca masyarakat
	Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keluarga yang Berkualitas	Pemetaan dan pemutakhiran data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) berbasis sistem informasi terpadu
		Penguatan sistem layanan terpadu untuk kelompok rentan
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbasis kecamatan/desa
		Pemberdayaan sosial bagi keluarga rentan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sosial
		Penguatan sistem layanan rujukan dan penjangkauan terpadu bagi kelompok marginal
		Penguatan akses pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah dan kelompok rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial
		Pengembangan shelter sementara untuk korban bencana dan kekerasan
		Pemberian bantuan sosial berbasis kebutuhan spesifik
		Penguatan kolaborasi dengan lembaga sosial, komunitas, CSR dan dunia usaha dalam perlindungan sosial dan ekonomi keluarga rentan
		Penyusunan dan sosialisasi Perda tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Kabupaten Mamuju
		Digitalisasi layanan aduan dan pelaporan perlindungan sosial berbasis aplikasi
		Penguatan kampanye literasi perlindungan sosial dan inklusi sosial di masyarakat
		Integrasi program perlindungan sosial dengan sektor lain
	Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemetaan data perempuan dan anak rentan berbasis desa
		Penguatan kapasitas SDM Dinas PPPA dan perangkat desa dalam perlindungan perempuan dan anak
		Penyusunan dan penerapan SOP penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Pembentukan dan penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
		Fasilitasi layanan psikologis dan hukum gratis bagi korban kekerasan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan
		Sosialisasi masif tentang pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak melalui sekolah dan komunitas
		Integrasi program sekolah ramah anak dan desa ramah perempuan dan anak
		Pengembangan layanan berbasis digital untuk pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Peningkatan jumlah ruang bermain ramah anak dan ruang laktasi di fasilitas publik
		Penerapan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) pada seluruh kecamatan dan evaluasi tahunan
		Kolaborasi dengan LSM dan perguruan tinggi dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penilaian dan pemberian penghargaan bagi desa/kelurahan ramah perempuan dan anak
		Penguatan sistem informasi gender dan anak untuk mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak
		Evaluasi kebijakan dan penguatan regulasi daerah terkait perlindungan perempuan dan anak
	Sasaran 6 Meningkatkan Kemandirian Desa	Pemetaan dan klasifikasi status desa berdasarkan IDM, IKD, dan SDGs Desa
		Penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola, keuangan, dan perencanaan
		Pengembangan dan pendampingan BUMDes/BUMDesa Bersama
		Fasilitasi kemitraan desa dengan dunia usaha, koperasi, dan lembaga eksternal
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam Musdes dan perencanaan pembangunan
		Digitalisasi sistem administrasi desa dan layanan publik berbasis desa digital
		Penguatan sistem Monev pembangunan desa berbasis indikator IDM dan SDGs Desa
		Penguatan kolaborasi desa dengan universitas, NGO, dan sektor swasta dalam riset dan inovasi berbasis desa
Tujuan 4 Terwujudnya daerah yang aman untuk masyarakat serta menjunjung nilai-nilai local, beragama dan melestarikan budaya	Sasaran 1 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
		Penyusunan dan penegakan regulasi terkait ketertiban umum
		Penataan dan penindakan aktivitas ilegal di ruang publik
		Pembentukan kawasan tertib prioritas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Pengembangan sistem pelaporan gangguan ketertiban
		Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penertiban
		Penguatan perlindungan masyarakat melalui Linmas
		Peningkatan sarpras operasional Satpol PP
		Kampanye edukasi publik ketertiban umum
		Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan ketertiban
	Sasaran 2 Meningkatkan penyelenggaraan edukasi dan festival seni budaya	Pemetaan potensi seni budaya lokal di seluruh kecamatan sebagai dasar penyusunan program pelestarian dan promosi
		Penyusunan kalender tahunan festival seni budaya tingkat kabupaten dan kecamatan
		Pelatihan dan pembinaan komunitas seni lokal
		Penguatan kurikulum muatan lokal berbasis budaya daerah di sekolah-sekolah dasar dan menengah
		Pengembangan media edukatif digital untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda
		Pelaksanaan Festival Budaya Kabupaten secara rutin dan tematik dengan melibatkan pelaku seni, pelajar, dan masyarakat umum
		Pembangunan dan revitalisasi sarana pertunjukan seni seperti panggung terbuka, taman budaya, dan galeri seni
		Digitalisasi arsip budaya dan penciptaan platform daring untuk dokumentasi dan promosi kebudayaan
		Kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, LSM budaya, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif dalam penyelenggaraan program edukatif budaya
		Pengembangan festival budaya tematik di desa-desa wisata dan penguatan peran desa budaya
		Pelaksanaan kompetisi seni pelajar dan festival budaya antarsekolah untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya
		Kemitraan dengan pelaku pariwisata dan UMKM untuk mengintegrasikan event budaya dengan promosi ekonomi lokal
		Evaluasi dampak program edukasi dan festival budaya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya
		Penyusunan regulasi daerah tentang perlindungan, pelestarian, dan pengembangan budaya daerah berbasis partisipasi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
	Sasaran 3 Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Daerah	Penguatan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial
		Penyusunan peta kerawanan sosial politik berbasis spasial
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan FKDM
		Pelatihan manajemen konflik untuk tokoh masyarakat
		Penguatan FKUB dan dialog lintas agama
		Pemberdayaan ormas, pemuda, dan tokoh adat
		Sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara
		Sistem pengawasan radikalisme dan intoleransi
		Sinergi antarlembaga menjelang pemilu/pilkada
		Pembinaan ormas dan LSM berwawasan kebangsaan
		Fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan adat
		Penyusunan indeks ketahanan sosial dan politik daerah
		Pendidikan politik masyarakat menjelang pemilu/pilkada
		Pemanfaatan media sosial dan sistem pelaporan cepat
Tujuan 5 Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Sasaran 1 Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Sistem Drainase untuk Kabupaten
		Identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh skala prioritas untuk penanganan.
		Perluasan jaringan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah permukiman yang belum terlayani.
		Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi strategis.
		Implementasi teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur perumahan (misalnya, penggunaan material daur ulang).
		Pengembangan sistem informasi geospasial (GIS) untuk pemantauan dan evaluasi kualitas infrastruktur perumahan.
		Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan infrastruktur.
		Revitalisasi kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni dan produktif.
		Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di permukiman baru atau yang mengalami peningkatan kepadatan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman.
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Pemetaan dan Identifikasi Ruas Jalan Prioritas Berdasarkan Aksesibilitas dan Tingkat Pelayanan Infrastruktur
		Peningkatan Jalan dan Jembatan Penghubung Kawasan Produktif (Sentra Tani, UMKM, Sekolah, Puskesmas)
		Pembangunan Jalan Baru di Wilayah Terisolasi dan Tidak Terlayani Transportasi
		Rehabilitasi dan Perawatan Jalan Rusak Ringan dan Berat Secara Bertahap
		Peningkatan Konektivitas Antar-Kecamatan dan Antar-Wilayah Pusat Pertumbuhan Baru
		Pembangunan Jembatan Permanen di Lokasi yang Selama Ini Menggunakan Jembatan Kayu atau Rakit
		Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Daerah, dan Skema Kemitraan untuk Pembiayaan Infrastruktur Jalan
		Pengembangan Sistem Monitoring Digital Kondisi Jalan dan Jembatan
	Sasaran 3 Meningkatkan Konektivitas Transportasi	Penyusunan Rencana Induk Transportasi Kabupaten (RITK) yang mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara
		Identifikasi dan pemetaan ruas jalan strategis penghubung antar kecamatan dan desa prioritas
		Peningkatan dan pelebaran jalan menuju sentra produksi pertanian, perikanan, dan pariwisata
		Pembangunan jembatan permanen di wilayah dengan akses terbatas dan yang masih menggunakan jembatan kayu atau rakit
		Rehabilitasi dan perawatan jalan rusak di wilayah pusat kegiatan ekonomi dan sosial
		Pembangunan jalan baru di kawasan terisolasi dan daerah dengan aksesibilitas rendah
		Pengembangan dan pembangunan terminal terpadu antar moda (darat-laut) untuk konektivitas lintas kabupaten/kota
		Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Tapandullu dan pelabuhan lokal lainnya untuk mendukung distribusi logistik daerah
		Digitalisasi sistem monitoring dan pemeliharaan jalan dan jembatan melalui dashboard infrastruktur berbasis GIS
		Pembangunan halte dan fasilitas pendukung transportasi umum yang aman dan ramah disabilitas di kawasan urban dan semi-urban

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
		Integrasi sistem transportasi dengan perencanaan tata ruang berbasis RTRW dan RDTR terkini
		Kemitraan dengan swasta untuk penyediaan moda transportasi lokal berbasis energi terbarukan
		Evaluasi kinerja konektivitas wilayah secara berkala dengan pendekatan indikator pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi umum
		Penyusunan regulasi insentif untuk pembangunan infrastruktur transportasi berbasis kolaborasi dan skema pembiayaan alternatif
	Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Perubahan Iklim	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim berbasis potensi lokal dan risiko bencana
		Pemetaan dan rehabilitasi wilayah kritis melalui penanaman vegetasi dan penghijauan kawasan rawan longsor dan banjir
		Penguatan edukasi lingkungan hidup di sekolah, komunitas, dan perangkat desa melalui kampanye PHBS dan sekolah adiwiyata
		Penyusunan regulasi perlindungan sumber daya air dan zona penyangga (buffer zone) DAS Barakkang, Karama, dan Sungai Mamuju
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis desa dan TPS 3R di wilayah padat penduduk
		Penguatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju dalam pengawasan emisi industri dan pengelolaan limbah
		Revitalisasi ruang terbuka hijau kota dan pembangunan taman kota baru sebagai paru-paru kota
		Implementasi program penghijauan di kawasan sekolah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial melalui partisipasi masyarakat
		Pengembangan sistem informasi spasial kualitas lingkungan hidup berbasis data real-time
		Integrasi pengelolaan persampahan, air limbah, dan kualitas udara dalam RPPLH Kabupaten Mamuju
		Penataan kawasan pesisir sebagai zona adaptif perubahan iklim berbasis ekosistem mangrove dan perlindungan pantai
		Penguatan kebijakan insentif untuk perusahaan dan desa yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan
		Evaluasi dampak program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Mamuju

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(01)	*(02)*	*(03)*
	Sasaran 5 Meningkatnya Resiliensi Ketahanan Bencana Daerah	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten berbasis risiko dan adaptif terhadap perubahan iklim
		Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi dan lokalitas
		Pemetaan dan digitalisasi wilayah rawan bencana (banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan) berbasis GIS
		Pengembangan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan desa tangguh bencana
		Penyusunan dan sosialisasi peta jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah rawan bencana
		Revitalisasi dan pembangunan infrastruktur evakuasi serta logistik bencana di kecamatan prioritas
		Simulasi dan gladi bencana multi-bencana secara rutin di kecamatan prioritas
		Pembangunan dan optimalisasi gudang logistik bencana yang terintegrasi dengan sistem distribusi cepat
		Integrasi sistem pelaporan dan informasi bencana secara real-time dengan call center BPBD dan aplikasi mobile
		Penguatan peran desa dan kelurahan tangguh bencana melalui alokasi dana desa
		Penyusunan kebijakan dan peraturan daerah tentang mitigasi dan adaptasi bencana
		Pengembangan edukasi kebencanaan berbasis sekolah, keluarga, dan komunitas
		Penerapan indikator ketahanan bencana daerah (InaRISK/PRB) sebagai alat ukur resiliensi daerah
		Kolaborasi multipihak (pemerintah pusat/daerah, TNI/Polri, LSM, dunia usaha) dalam penanggulangan bencana
		Penguatan sistem pemulihan pasca-bencana yang inklusif dan cepat

Sumber: Data diolah, 2025

3.2.2 Arah kebijakan RPJMD 2025-2029

Berdasarkan strategi yang ada kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan. arah kebijakan pembangunan tersebut berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan program pembangunan daerah, yang

selanjutnya diimplementasikan sesuai dengan rencana waktu yang telah disepakati.

Tabel 3. 5 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN / PRIORITAS PEMBANGUNAN	KETERANGAN
1	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
			Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
			Penguatan Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan *Asset* Daerah
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Penguatan daya saing ekonomi dari potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas Tenaga Kerja
			Penguatan industri dan UMKM
			Peningkatan investasi
			Peningkatan produksi dari sektor-sektor unggulan daerah
			Pengembangan koperasi dengan sasaran strategis nasional yaitu Koperasi Merah Putih
			Integrasi Program MBG untuk mendukung penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan berbasis keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
			Pengembangan dan pengelolaan wisata Bahari pada Kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pengembangan komoditas perikanan budidaya
3	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil
			peningkatan kompetensi dan distribusi guru secara merata
			penguatan layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
			Integrasi Program MBG dengan pendidikan keluarga (beasiswa, literasi, dan dukungan gizi) sebagai upaya mencegah putus sekolah.

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN / PRIORITAS PEMBANGUNAN	KETERANGAN
			pemenuhan tenaga medis di wilayah kurang layanan
			pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan Posyandu
			peningkatan mutu layanan melalui digitalisasi sistem layanan dan rekam medis
			penurunan angka stunting melalui intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat
			Penguatan Sekolah Rakyat sebagai pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah dan kelompok rentan.
4	Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama	Mewujudkan masyarakat yang beradat, toleran dan kuat akan budaya kearifan lokal	mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya serta mendukung lembaga adat dan tokoh budaya sebagai mitra strategis Pembangunan
			penanaman nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok sosial
			integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan, kampanye kesadaran budaya melalui media digital, dan dukungan terhadap komunitas kreatif yang mengangkat tema budaya lokal
5	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang yang mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup	peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang yang mendukung konektivitas wilayah serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup
			Pembangunan dan rehabilitasi jalan desa, jembatan penghubung, serta penyediaan air bersih dan sanitasi layak
			Pembangunan dalam mendukung mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
			pemerataan pembangunan yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN / PRIORITAS PEMBANGUNAN	KETERANGAN
			Dukungan infrastruktur desa produktif untuk menunjang Program MBG (akses jalan tani, irigasi kecil, dan pasar desa).

Sumber: Data diolah, 2025

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, diperlukan arah kebijakan yang efektif dan efisien guna memastikan tercapainya pembangunan selama periode lima tahun. Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Tahapan pembangunan tahunan tersebut, yang tercantum dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju 2026-2030, dijabarkan secara rinci dalam Tabel 3.4.

Tabel 3. 6 Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Memperkuat pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan	**Memperkuat Peningkatan Pembangunan Daya Saing Daerah**	**Mewujudkan Penguatan Pembangunan Daya Saing Daerah**	**Penguatan Ketahanan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan**	**Konsolidasi Pencapaian Pembangunan Menuju Mamuju KEREN**
Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Penguatan daya saing ekonomi dari potensi unggulan daerah melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk pengembangan ide dan implementasi inovatif	Mendorong ekonomi melalui sistem kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan investasi besar serta optimalisasi potensi pariwisata melalui pengembangan destinasi, SDM pariwisata, promosi digital, dan kemitraan dengan swasta	Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang, termasuk penataan permukiman di daerah rawan bencana seperti pesisir, lereng gunung, dan daerah yang terpapar potensi longsor atau banjir	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan melalui forum konsultasi publik, sistem pelaporan masyarakat, serta keterbukaan data pemerintah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Penguatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan serta investasi berbasis potensi daerah	Selain itu, Penguatan Kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Komunitas dalam perekrutan tenaga kerja serta mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang profesional dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat	Peningkatan produksi dari sektor-sektor unggulan daerah dan fasilitasi akses permodalan dan inkubasi bisnis pemuda dengan kolaborasi perbankan dan koperasi	Mengembangkan sistem peringatan dini dan strategi tanggap darurat yang berbasis pada kondisi lingkungan untuk memperingatkan masyarakat tentang potensi bencana alam	Evaluasi berkala terhadap kontribusi sektoral terhadap PDRB dan penyempurnaan kebijakan daerah berbasis data
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas dengan menjamin akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua golongan, tanpa diskriminasi dan memberikan penyediaan fasilitas pendidikan dan program bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta kelompok rentan lainnya	Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dengan fasilitasi partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam menciptakan solusi sesuai dengan kebutuhan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pasar kerja	Melibatkan masyarakat dalam program konservasi dan restorasi lingkungan untuk meningkatkan keterlibatan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana	Evaluasi dampak program edukasi dan festival budaya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan yang merata dan berkualitas percepatan penanganan pasien melalui peningkatan koordinasi antar fasilitas layanan primer dan lanjutan	Mendorong penguatan komite sekolah sebagai mitra strategis pengelolaan Pendidikan	Pemantapan Koordinasi Antarlembaga Pengawasan	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman.
Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan	Mewujudkan masyarakat yang beradat, toleran dan kuat akan budaya kearifan lokal dengan melakukan kampanye sosial tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman serta upaya pelestarian budaya-budaya lokal	pemetaan dan penetapan kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi daerah	Penguatan kebijakan insentif untuk perusahaan dan desa yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Evaluasi kinerja konektivitas wilayah secara berkala dengan pendekatan indikator pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi umum
		Pengembangan sistem layanan kesehatan digital	Penguatan sistem pemulihan pasca-bencana yang inklusif dan cepat	Evaluasi dampak program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Mamuju

Sumber: Data diolah, 2025

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya dalam mencapai sasaran RPJMD. Program strategis Daerah dimaksud merupakan program prioritas daerah Tahun 2025-2029. Program pembangunan daerah disusun berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah yang direncanakan selama lima tahun, mulai dari tahun 2026 hingga 2030. Mengingat sifatnya yang strategis, pelaksanaan dan penganggaran program-program tersebut diprioritaskan. Penetapan program pembangunan daerah Kabupaten Mamuju juga mencerminkan komitmen dalam melaksanakan program unggulan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju selama masa jabatan mereka pada periode 2025-2029. Berikut adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah.

Tabel 3. 7 Program Prioritas RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
		Meningkatnya Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Funsgi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan Asset Daerah		Indeks Maturitas SPIP		
				Opini BPK		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya tata kelola anggaran daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan Daerah	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar. (%)		
			Meningkatkan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)		
		Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Kualifikasi Aspek Kompetensi dan Pengembangan Karier (Indeks)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Indeks Kualifikasi Aspek Mutasi, Rotasi, Promosi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin dan Peerlindungan (Indeks)		
				Indeks Kualifikasi Aspek Perencanaan, Pengadaan Sistem Informasi (Indeks)		
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing			**Laju Pertumbuhan ekonomi**		
				Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)		
		Meningkatkan Kontribusi PDRB Daerah		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
				Indeks Akses Keuangan Daerah		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Nilai Tukar Petani	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah		Pertumbuhan Investasi Daerah		
			Meningkatnya kemudaan berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang mendapatkan penempatan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan pangan (IKP)		
			Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro		
			Meningkatnya dukungan dan pendampingan koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab. (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Indeks Pembangunan Manusia		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat			**Tingkat Kemiskinan**		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (%)		
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan pembangunan Kepemudaan		Rata rata lama sekolah (RLS)		
				Harapan Lama Sekolah (HLS)		
				Indeks Pembangunan Pemuda		
			Meningkatnya Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	Indeks Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kapasitas pemuda dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kepemimpinan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
		Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat		
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan		Indeks Kesejahteraan Sosial		
				Indeks pembangunan Kualitas keluarga		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		Keluarga yang Berkualitas				
			Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Jumlah Keluarga Yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan perlindungan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender		
				Indeks Ketimpangan Gender		
				Indeks Perlindungan Anak		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
		Meningkatnya kemandirian desa		Indeks desa		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki penataan Desa yang berkualitas (%)	PROGRAM PENATAAN DESA	
Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama	Terwujudnya daerah yang aman untuk masyarakat serta menjunjung nilai-nilai lokal, beragama dan melestarikan budaya			**Nilai Pemajuan Kebudayaan**		
				Indeks kerukunan umat beragama		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum		Persentase Penurunan Angka Kriminalitas		
			Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang terintegrasi	Tercapainya Indeks Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Trantibum (Daerah)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum (daerah)		
		Meningkatkan penyelenggaraan edukasi dan festival seni budaya		Persentase peningkatan pengunjung edukasi dan festival budaya		
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik Daerah		Persentase penanganan konflik sosial		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dilaksanakan (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi	Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			**Indeks Kualitas Layanan Infrastuktur**		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		Rasio Permukiman Layak Huni		
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman melalui penataan dan peningkatan infrastruktur permukiman	Luas kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur		Indeks Pembangunan Infrastruktur		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatkan Konektivitas Transportasi		Konektivitas Jalan		
			Meningkatnya penyediaan panerangan jalan umum	Persentase penyediaan panerangan jalan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketersediaan perlengkapan transportasi	persentase tersedianya perlengkapan transportasi (%)		
			Meningkatnya ketersediaan data layanan angkutan	Persentase ketersediaan data layanan angkutan (%)		
			Meningkatnya tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c	Persentase ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c (%)		
			Meningkatnya rekomendasi uji KIR	Persentase rekomendasi uji KIR (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya penyelenggaraan layanan lalu lintas	Persentase penyelenggaraan layanan lalu lintas (%)		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemenuhan izin parkir	Persentase penyelenggaraan pemenuhan izin parkir (%)		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan dan mitigasi perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya kualitas layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

3.2.4 Lokasi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mamuju

Dalam arah pembangunan kewilayahan RPJMD Tahun 2025 2029 terdapat indikasi intervensi yang akan dilakukan di Kabupaten Mamuju yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Adapun indikasi intervensi di Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Lokasi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mamuju 2025-2029

LOKASI	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
Kecamatan Mamuju, Simboro	Penyediaan infrastruktur yang memadai
Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Balabalakang, Papalang, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Sampaga	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di pusat kecamatan
Seluruh Kelurahan di Wilayah Kabupaten Mamuju	Pusat Pelayanan Lingkungan Peningkatan sebaran infrastruktur dasar di pusat-pusat layanan skala lingkungan
Jalan arteri ruas Tapalang Barat-Sumare-Rangas-Mamuju- Tampa Padang-Belang Belang	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer
Jalan Topoyo - Tarailu, Tarailu - Kalukku, Kalukku - bts kota, jalan poros Kalukku, jalan Sultan Hasanuddin, Kalukku - Salubatu	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer 1
Jalan Kalukku - Bonehau - Kalumpang - Batuisi - batas Luwu Utara, jalan Batuisi - batas Toraja Utara, jalan Kalukku - Bonehau - Mambi	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer 2
Jalan Nuri, Diponegoro, jalan Bau Massepe, jalan Pongtiku, jalan Baharuddin Lopa, jalan Kelapa, jalan Emmy Saelan, jalan Kali Mamuju	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Nelayan, jalan Nelayan II, jalan BTN Graha Nusa, jalan KPU, jalan H. Basir, jalan BTN Tegar 77, jalan Kampung Baru, jalan Tanete Pao - Pasa'bu, jalan Atiek Sutedja, jalan Tengku Umar, jalan Ambo Tjaja, jalan Batu Ampa, jalan Toabo - Bunde	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder
Kecamatan Simboro, Mamuju, Kalukku	Pembangunan Jalan-Jalan Baru di Lingkungan Permukiman
Kabupaten Mamuju	Rencana Pembangunan jalur Kereta Api
Kabupaten Mamuju	Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang di Kabupaten Mamuju
Kecamatan Kalukku	Rencana Pengembangan Pelabuhan Belang Belang
Kecamatan Kalukku Kecamatan Simboro	Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Belang Belang dan Rencana Pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Belang Belang berupa Terminal Kontainer Pengembangan Kapasitas sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan *ferry*

LOKASI	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
Kabupaten Mamuju	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Kabupaten Mamuju	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Jaringan Listrik bawah tanah yang ada di jalan- jalan arteri dan kolektor
Kabupaten Mamuju	Pengembangan kapasitas infrastruktur telepon nirkabel melalui penataan lokasi menara telekomunikasi bersama
Kabupaten Mamuju	Penataan dan Normalisasi Wilayah Sungai (WS) Mamuju, (WS) Karema dan (WS) Kalukku
Kabupaten Mamuju	Pemeliharaan Sistem jaringan irigasi di semua daerah irigasi
Kabupaten Mamuju	Pemeliharaan dan Pengembangan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA)
Kecamatan Tapalang Barat, Mamuju, Simboro	Pembangunan jaringan pipa pada kawasan pesisir untuk mengurangi krisis air bersih
Kecamatan Mamuju	Pengembangan Sistem pembuangan air limbah (sewage) Terpusat
Kecamatan Simboro	Pemeliharaan Sistem IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
Kecamatan Mamuju, Simboro, Kalukku	Penataan Sistem Pengelolaan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Balabalakang, Papalang, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Sampaga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi Pembangunan TPS 3R (Tempat Penampungan Sampah dengan sistem Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh kecamatan
Kabupaten Mamuju	Pengembangan jalur khusus jalur evakuasi meliputi pemasangan atribut jalur menuju lokasi akhir tempat evakuasi bencana
Kabupaten Mamuju	Pemeliharaan saluran saluran pada ruas - ruas blok drainase
Kecamatan Mamuju, Simboro	Pengembangan Sistem Polder melalui pembangunan kolam retensi
Kabupaten Mamuju	Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran
Kabupaten Mamuju	Pengembangan Jalur dan koridor pelayanan Bus Rapid Transit (BRT)
Kecamatan Kalumpang	Reboisasi dan Penghijauan dan Peremajaan Hutan Lindung
Kecamatan Mamuju, Kalukku, Kalumpang, Bonehau, Sampaga	Pengendalian dan Pengawasan terhadap daerah sekitar kawasan resapan air
Semua Kecamatan	Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan
Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Kalukku	Pengelolaan dan pengendalian aktivitas kawasan pertambangan Galian C
Kecamatan Mamuju	Peningkatan dan Pengembangan prasarana untuk pelabuhan khusus dan tempat pelelangan ikan
Kabupaten Mamuju	Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung terhadap kawasan pariwisata di Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju	Peningkatan aksesibilitas jalan kawasan perumahan dan permukiman
Kabupaten Mamuju	Program Pengembangan Perumahan

LOKASI	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
Kawasan Kumuh dan RTLH sesuai SK	Program Pencegahan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kabupaten Mamuju	Revitalisasi pasar Sentral dan pasar-pasar tradisional
Kecamatan Mamuju, Simboro	Peningkatan sarana prasarana perkantoran pemerintah
Kabupaten Mamuju	Peningkatan prasarana dan sarana kawasan pendidikan
Kabupaten Mamuju	Peningkatan dan Pembangunan sarana dan Prasarana kesehatan
Kecamatan Simboro	Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Tipe A
Kecamatan Kalukku, Papalang	Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Tipe B
Kabupaten Mamuju	Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana ruang evakuasi bencana
Kabupaten Mamuju	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas militer dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di tingkat Kecamatan (Koramil)
Kabupaten Mamuju	Peningkatan dan Pembangunan jaringan sarana prasarana dan utilitas pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
Kecamatan Papalang, Kalukku, Mamuju	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi
Kecamatan Kalumpang, Bonehau	Perlindungan dan peremajaan terhadap kawasan lindung dan hutan lindung. Taman Nasional Gandang Dewata

Sumber: Data diolah dari RTRW Kabupaten Mamuju, 2025

3.2.5 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Kabupaten Mamuju dapat tercapai melalui implementasi program prioritas dan program perangkat daerah yang berfokus pada pemajuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut merupakan bentuk dukungan Kabupaten Mamuju dalam menjawab Program Strategis Nasional.

Tabel 3. 9 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Kabupaten Mamuju 2025-2029

No	Program Strategis Nasional/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	*Outcome* Program Prioritas Kabupaten Mamuju	Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Mamuju
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Meningkatnya Pemenuhan Standar	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Program Strategis Nasional/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	*Outcome* Program Prioritas Kabupaten Mamuju	Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Mamuju
		Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
		Meningkatnya Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman melalui penataan dan peningkatan infrastruktur permukiman	Program Kawasan Permukiman
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
2	Sekolah Rakyat	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
4	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5	Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Makan Bergizi Gratis		

No	Program Strategis Nasional/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	*Outcome* Program Prioritas Kabupaten Mamuju	Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Mamuju
7	Pembangunan dan revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
8	Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
9	Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya dukungan dan pendampingan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
10	Kemudahan Perizinan di Daerah	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Program Pelayanan Penanaman Modal

Sumber: Diolah 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju Keren

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah

Program Perangkat Daerah merupakan komponen penting dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamuju. Program-program yang direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah, serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap program yang diusulkan tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan jangka menengah, tetapi juga disusun berdasarkan kebutuhan, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di setiap wilayah. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Dengan adanya program-program yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Program perangkat daerah yang dimaksud pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah yang Disertai dengan Pagu Indikatif Kabupaten Mamuju, 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					403.363.553.051,00		405.437.877.810,00		405.437.877.810,00		405.437.877.810,00		408.875.370.747,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					310.648.366.340,00		310.648.366.340,00		310.648.366.340,00		310.648.366.340,00		310.648.366.340,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	310.648.366.340,00	100	310.648.366.340,00	100	310.648.366.340,00	100	310.648.366.340,00	100	310.648.366.340,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					92.075.756.811,00		94.124.606.170,00		94.097.857.002,00		94.069.770.374,00		97.477.772.351,00	
Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	Indeks Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan (%)	64.98	65.41	66.54	92.075.756.811,00	70.17	94.124.606.170,00	72.10	94.097.857.002,00	73.85	94.069.770.374,00	75.73	97.477.772.351,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					63.368.500,00		63.368.500,00		63.368.500,00		63.368.500,00		63.368.500,00	
Tersusunnya kurikulum muatan lokal sesuai potensi dan karakteristik daerah	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal (%)	0	1.36	2.71	63.368.500,00	4.07	63.368.500,00	5.42	63.368.500,00	6.78	63.368.500,00	8.14	63.368.500,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					202.914.000,00		213.059.700,00		223.712.684,00		234.898.318,00		246.643.234,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan	Rasio Guru terhadap Murid (Rasio)	1:20	1:20	1:20	202.914.000,00	1:20	213.059.700,00	1:20	223.712.684,00	1:20	234.898.318,00	1:20	246.643.234,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					66.553.400,00		66.553.400,00		66.553.400,00		66.553.400,00		66.553.400,00	
Meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan perizinan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan efisien	Persentase satuan pendidikan swasta yang memiliki izin operasional aktif (%)	100	100	100	66.553.400,00	100	66.553.400,00	100	66.553.400,00	100	66.553.400,00	100	66.553.400,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					306.594.000,00		321.923.700,00		338.019.884,00		354.920.878,00		372.666.922,00	
Meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan bahasa daerah	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan sastra di sekolah (%)	0	15.96	19.95	306.594.000,00	23.94	321.923.700,00	27.93	338.019.884,00	31.91	354.920.878,00	35.90	372.666.922,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					348.252.156.715,00		349.588.156.481,00		351.159.057.726,00		352.391.366.059,00		357.353.706.049,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					158.927.939.467,00		159.745.981.188,00		160.598.621.078,00		161.477.343.733,00		162.449.297.161,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	158.927.939.467,00	100	159.745.981.188,00	100	160.598.621.078,00	100	161.477.343.733,00	100	162.449.297.161,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sesuai standar dan tepat waktu (%)													
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS BINANGA
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS BAMBU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS SALISSINGAN
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RANGAS
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BOTTENG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS TAPALANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS DUNGKAIT
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS TAMPA PADANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS BERU-BERU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS RANGA-RANGA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS KEANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0013 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PUSKESMAS TOPORE
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS TARAILU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS TOMMO
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0016 - PUSKESMAS CAMPALOGA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0017 - PUSKESMAS LELING
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	1	1	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0018 - PUSKESMAS BUTTUADA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0019 - PUSKESMAS BONEHAU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0020 - PUSKESMAS KALUMPANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0021 - PUSKESMAS KARATAUN
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0022 - PUSKESMAS KARAMA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0023 - PUSKESMAS HINUA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0024 - PUSKESMAS TAPALANG BARAT
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					184.341.708.132,00		184.745.103.449,00		185.345.938.005,00		185.579.161.220,00		189.446.175.893,00	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100	184.341.708.132,00	100	184.745.103.449,00	100	185.345.938.005,00	100	185.579.161.220,00	100	189.446.175.893,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS BINANGA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS BAMBU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS SALISSINGAN
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RANGAS
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BOTTENG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS TAPALANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS DUNGKAIT
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS TAMPA PADANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS BERU-BERU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS RANGA-RANGA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS KEANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0013 - PUSKESMAS TOPORE
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS TARAILU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS TOMMO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0016 - PUSKESMAS CAMPALOGA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0017 - PUSKESMAS LELING
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0018 - PUSKESMAS BUTTUADA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0019 - PUSKESMAS BONEHAU
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0020 - PUSKESMAS KALUMPANG
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0021 - PUSKESMAS KARATAUN
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0022 - PUSKESMAS KARAMA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0022 - PUSKESMAS KARAMA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0023 - PUSKESMAS HINUA
	Indeks Layanan SPM Kesehatan (%)	92.62	95	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0024 - PUSKESMAS TAPALANG BARAT
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.400.123.739,00		3.484.626.832,00		3.571.242.504,00		3.660.023.566,00		3.751.024.155,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	53	58	63	3.400.123.739,00	68	3.484.626.832,00	73	3.571.242.504,00	78	3.660.023.566,00	83	3.751.024.155,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					411.362.000,00		419.646.050,00		428.137.201,00		436.840.632,00		445.761.648,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	92.5	92.5	93	411.362.000,00	94	419.646.050,00	95	428.137.201,00	96	436.840.632,00	97	445.761.648,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.171.023.377,00		1.192.798.962,00		1.215.118.938,00		1.237.996.908,00		1.261.447.192,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	1.171.023.377,00	100	1.192.798.962,00	100	1.215.118.938,00	100	1.237.996.908,00	100	1.261.447.192,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS BINANGA
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS BAMBU
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS SALISSINGAN
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS RANGAS
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BOTTENG
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS TAPALANG
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS DUNGKAIT
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS TAMPA PADANG
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS BERU-BERU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS RANGA-RANGA
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS KEANG
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS KEANG
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0013 - PUSKESMAS TOPORE
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS TARAILU
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS TOMMO
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0016 - PUSKESMAS CAMPALOGA
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0017 - PUSKESMAS LELING
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0018 - PUSKESMAS BUTTUADA
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0019 - PUSKESMAS BONEHAU
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0020 - PUSKESMAS KALUMPANG
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0021 - PUSKESMAS KARATAUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0022 - PUSKESMAS KARAMA
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0023 - PUSKESMAS HINUA
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0024 - PUSKESMAS TAPALANG BARAT
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					95.997.090.220,00		94.595.206.712,00		94.595.206.712,00		94.595.206.712,00		104.048.312.292,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.797.569.690,00		6.964.624.690,00		6.940.124.690,00		8.089.624.690,00		8.084.124.690,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	6.797.569.690,00	100	6.964.624.690,00	100	6.940.124.690,00	100	8.089.624.690,00	100	8.084.124.690,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					10.730.000.000,00		11.620.000.000,00		8.610.000.000,00		9.401.000.000,00		13.792.999.999,00	
Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	43.305	43.305	43.4	10.730.000.000,00	43.5	11.620.000.000,00	43.6	8.610.000.000,00	43.7	9.401.000.000,00	43.8	13.792.999.999,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	17.29	18	19		20		21		22		23		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	17.29	18	19		20		21		22		23		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					7.600.000.000,00		8.710.000.000,00		9.050.000.000,00		8.630.000.000,00		9.130.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	72.02	72.52	73.22	7.600.000.000,00	73.92	8.710.000.000,00	74.62	9.050.000.000,00	75.32	8.630.000.000,00	75.32	9.130.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.600.000.000,00		800.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	0	18	1.600.000.000,00	20	800.000.000,00	22	250.000.000,00	24	100.000.000,00	26	1.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.715.000.000,00		7.630.000.000,00		6.030.000.000,00		6.040.000.000,00		7.500.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik	73.48	74.38	75.28	6.715.000.000,00	76.18	7.630.000.000,00	77.08	6.030.000.000,00	76.38	6.040.000.000,00	77.98	7.500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Layak dan Aman) (Persentase)													
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					900.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	27.64	0	29	900.000.000,00	31	1.300.000.000,00	33	1.400.000.000,00	35	1.500.000.000,00	37	1.500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					10.964.520.530,00		11.355.788.734,00		10.715.082.022,00		10.850.000.000,00		12.150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	25.58	10.964.520.530,00	25.76	11.355.788.734,00	25.94	10.715.082.022,00	26.12	10.850.000.000,00	26.30	12.150.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					47.520.000.000,00		45.564.793.288,00		49.200.000.000,00		49.234.582.022,00		50.141.187.603,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	37.87	0	40.87	47.520.000.000,00	43.87	45.564.793.288,00	46.87	49.200.000.000,00	49.87	49.234.582.022,00	52.87	50.141.187.603,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	20	80.000.000,00	30	80.000.000,00	40	80.000.000,00	50	80.000.000,00	60	80.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.090.000.000,00		570.000.000,00		2.320.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	0	0	1	3.090.000.000,00	1	570.000.000,00	1	2.320.000.000,00	1	670.000.000,00	1	670.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	di daerah kabupaten/kota (%)													PENATAAN RUANG
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.185.147.008,00		3.185.047.008,00		3.184.947.008,00		3.184.847.008,00		3.184.747.008,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.185.147.008,00	100	3.185.047.008,00	100	3.184.947.008,00	100	3.184.847.008,00	100	3.184.747.008,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					646.000.000,00		646.000.000,00		646.000.000,00		651.000.000,00		651.000.000,00	
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase rumah tangga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menempati rumah (%)	20	20	20	646.000.000,00	20	646.000.000,00	20	646.000.000,00	20	651.000.000,00	20	651.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					420.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman melalui	Luas kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	0	0	15	420.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	270.000.000,00	10	270.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
penataan dan peningkatan infrastruktur permukiman														PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang tertata	Persentase Perumahan dan Permukiman yang tertata (%)	0	0	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					748.000.000,00		750.000.000,00		752.000.000,00		754.000.000,00		756.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik yang memadai dan berkelanjutan	Jumlah Infrastruktur publik yang memadai dan berkelanjutan (Lokasi)	0	0	18	748.000.000,00	19	750.000.000,00	20	752.000.000,00	21	754.000.000,00	22	756.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.185.147.008,00		3.185.047.008,00		3.184.947.008,00		3.184.847.008,00		3.184.747.008,00	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18.664.858.798,00		18.421.904.821,00		18.664.858.798,00		15.720.400.941,00		18.664.858.798,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.071.375.674,00		10.698.572.290,00		11.425.940.269,00		12.226.044.845,00		13.105.860.075,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	6.646.483.179,00	100	7.273.679.795,00	100	8.001.047.774,00	100	8.801.152.350,00	100	9.680.967.580,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.424.892.495,00	100	3.424.892.495,00	100	3.424.892.495,00	100	3.424.892.495,00	100	3.424.892.495,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.177.257.456,00		6.286.882.823,00		5.790.433.237,00		2.022.420.803,00		4.061.268.429,00	
Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang terintegrasi	Tercapainya Indeks Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Trantibum (Daerah)	100	100	552	7.177.257.456,00	552	6.286.882.823,00	552	5.790.433.237,00	552	2.022.420.803,00	552	4.061.268.429,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum (daerah)	100	100	552		552		552		552		552		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM					1.213.985.268,00		1.213.985.268,00		1.213.985.268,00		1.213.985.268,00		1.213.985.268,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya kualitas layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	60	67	70	1.213.985.268,00	73	1.213.985.268,00	75	1.213.985.268,00	78	1.213.985.268,00	80	1.213.985.268,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					202.240.400,00		222.464.440,00		234.500.024,00		257.950.025,00		283.745.026,00	
Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* (daerah)	100	100	552	202.240.400,00	552	222.464.440,00	552	234.500.024,00	552	257.950.025,00	552	283.745.026,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.167.260.298,00		4.167.260.298,00		4.167.260.298,00		4.167.260.298,00		4.167.260.298,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.228.676.000,00		3.228.676.000,00		3.228.676.000,00		3.228.676.000,00		3.228.676.000,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.228.676.000,00	100	3.228.676.000,00	100	3.228.676.000,00	100	3.228.676.000,00	100	3.228.676.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					138.783.000,00		138.783.000,00		138.783.000,00		138.783.000,00		138.783.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan	0	0	100	138.783.000,00	100	138.783.000,00	100	138.783.000,00	100	138.783.000,00	100	138.783.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pelayanan sosial sesuai standar (%)													
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					126.607.740,00		126.607.740,00		126.607.740,00		126.607.740,00		126.607.740,00	
Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan Ekonomi keluarga miskin dan rentan	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	-	-	100	126.607.740,00	100	126.607.740,00	100	126.607.740,00	100	126.607.740,00	100	126.607.740,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					184.067.000,00		184.067.000,00		184.067.000,00		184.067.000,00		184.067.000,00	
Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan Ekonomi keluarga miskin dan rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan (%)	100	100	100	184.067.000,00	100	184.067.000,00	100	184.067.000,00	100	184.067.000,00	100	184.067.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					481.852.108,00		481.852.108,00		481.852.108,00		481.852.108,00		481.852.108,00	
meningkatnya kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	481.852.108,00	100	481.852.108,00	100	481.852.108,00	100	481.852.108,00	100	481.852.108,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					7.274.450,00		7.274.450,00		7.274.450,00		7.274.450,00		7.274.450,00	
Meningkatnya kualitas Kesetiakawanan Sosial	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (%)	100	100	100	7.274.450,00	100	7.274.450,00	100	7.274.450,00	100	7.274.450,00	100	7.274.450,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.270.341.678,00		4.895.341.678,00		5.133.341.678,00		5.209.561.678,00		5.227.521.678,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.011.341.678,00		3.988.892.628,00		4.069.491.678,00		4.221.856.680,00		4.234.186.181,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	4.011.341.678,00	100	3.988.892.628,00	100	4.069.491.678,00	100	4.221.856.680,00	100	4.234.186.181,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20	22	24	30.000.000,00	25	30.000.000,00	27	30.000.000,00	28	30.000.000,00	30	30.000.000,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					584.000.000,00		193.000.000,00		298.000.000,00		203.000.000,00		208.000.000,00	
Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	70	70	80	584.000.000,00	80	193.000.000,00	90	298.000.000,00	90	203.000.000,00	100	208.000.000,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					405.000.000,00		385.449.050,00		429.050.000,00		388.224.998,00		398.207.497,00	
Meningkatnya Peningkatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	25	27	45	405.000.000,00	46	385.449.050,00	47	429.050.000,00	48	388.224.998,00	50	398.207.497,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					240.000.000,00		298.000.000,00		306.800.000,00		366.480.000,00		357.128.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	47	48	48	240.000.000,00	49	298.000.000,00	54	306.800.000,00	59	366.480.000,00	65	357.128.000,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.183.888.407,00		3.201.066.226,00		3.233.069.596,00		3.266.673.140,00		3.301.956.853,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.183.888.407,00		3.201.066.226,00		3.233.069.596,00		3.266.673.140,00		3.301.956.853,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.183.888.407,00	100	3.201.066.226,00	100	3.233.069.596,00	100	3.266.673.140,00	100	3.301.956.853,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	69.92	72.93	75.93	-	81.94	-	87.96	-	93.97	-	93.97	-	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					-		-		-		-		-	
Meningkatkan Layanan Lembaga dan Layanan Kualitas Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	11.5	12.3	13.2	-	14.1	-	15	-	15.9	-	16.8	-	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.608.900.807,00		3.608.900.807,00		3.608.900.807,00		3.608.900.807,00		5.900.562.765,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.095.925.807,00		3.095.925.807,00		3.095.925.807,00		3.095.925.807,00		3.413.562.765,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.095.925.807,00	100	3.095.925.807,00	100	3.095.925.807,00	100	3.095.925.807,00	100	3.413.562.765,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					138.500.000,00		138.500.000,00		138.500.000,00		138.500.000,00		532.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	0	0	100	138.500.000,00	100	138.500.000,00	100	138.500.000,00	100	138.500.000,00	100	532.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					302.475.000,00		302.475.000,00		302.475.000,00		302.475.000,00		1.785.000.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi (%)	100	100	100	302.475.000,00	100	302.475.000,00	100	302.475.000,00	100	302.475.000,00	100	1.785.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					46.700.000,00		46.700.000,00		46.700.000,00		46.700.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan (%)	90	90	95	46.700.000,00	100	46.700.000,00	100	46.700.000,00	100	46.700.000,00	100	90.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					25.300.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	55	60	62	25.300.000,00	64	25.300.000,00	66	25.300.000,00	68	25.300.000,00	70	80.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya tanah yang diganti rugi untuk fasilitas umum	Persentase tanah yang diganti rugi untuk fasilitas umum (%)	60	70	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	650	650	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Jumlah tanah untuk kepentingan umum (Laporan)	6	6	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Jumlah penggunaan tanah yang sesuai rencana tata ruang wilayah	Persentase penggunaan tanah yang sesuai rencana tata ruang wilayah (%)	60	70	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					12.593.832.679,00		12.393.832.679,00		12.593.832.679,00		11.697.787.695,00		12.593.832.679,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.232.679,00		5.074.452.679,00		5.156.094.679,00		5.245.900.879,00		5.344.687.699,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	5.000.232.679,00	100	5.074.452.679,00	100	5.156.094.679,00	100	5.245.900.879,00	100	5.344.687.699,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		99.000.000,00		96.800.000,00		126.480.000,00		117.128.000,00	
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	99.000.000,00	100	96.800.000,00	100	126.480.000,00	100	117.128.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					360.000.000,00		396.000.000,00		435.600.000,00		479.160.000,00		527.076.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang (%)	10	25	30	360.000.000,00	33	396.000.000,00	39	435.600.000,00	42	479.160.000,00	45	527.076.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	0	0	30	500.000.000,00	30	550.000.000,00	30	605.000.000,00	30	665.500.000,00	30	732.050.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	50	100.000.000,00	55	110.000.000,00	60	121.000.000,00	65	133.100.000,00	70	146.410.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					85.000.000,00		93.500.000,00		102.850.000,00		113.135.000,00		124.448.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	0.2	10	40	85.000.000,00	45	93.500.000,00	50	102.850.000,00	55	113.135.000,00	60	124.448.500,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	12.100.000,00	100	13.310.000,00	100	14.641.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus tindak Pidana	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)	0	0	100	6.000.000,00	100	6.600.000,00	100	7.260.000,00	100	7.986.000,00	100	8.784.600,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.392.600.000,00		6.009.280.000,00		6.008.728.000,00		4.859.975.816,00		5.520.042.880,00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan (%)	17	18	20	6.392.600.000,00	25	6.009.280.000,00	30	6.008.728.000,00	35	4.859.975.816,00	40	5.520.042.880,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.103.358.264,00		4.403.358.264,00		4.403.358.264,00		3.814.971.258,00		4.403.358.264,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.783.203.214,00		4.083.203.214,00		4.083.203.214,00		3.657.710.556,00		4.083.203.214,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.783.203.214,00	100	4.083.203.214,00	100	4.083.203.214,00	100	3.657.710.556,00	100	4.083.203.214,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					148.662.300,00		148.662.300,00		148.662.300,00		60.584.402,00		148.662.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	97	97	-	148.662.300,00	-	148.662.300,00	-	148.662.300,00	-	60.584.402,00	-	148.662.300,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					80.635.850,00		80.635.850,00		80.635.850,00		42.301.500,00		80.635.850,00	
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	93	93	-	80.635.850,00	-	80.635.850,00	-	80.635.850,00	-	42.301.500,00	-	80.635.850,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					83.103.800,00		83.103.800,00		83.103.800,00		49.374.800,00		83.103.800,00	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (%)	0	0	100	83.103.800,00	100	83.103.800,00	100	83.103.800,00	100	49.374.800,00	100	83.103.800,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					7.753.100,00		7.753.100,00		7.753.100,00		5.000.000,00		7.753.100,00	
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan (%)	-	-	100	7.753.100,00	100	7.753.100,00	100	7.753.100,00	100	5.000.000,00	100	7.753.100,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.906.102.473,00		3.906.102.473,00		3.906.102.473,00		3.906.102.473,00		3.906.102.472,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.680.773.478,00		3.086.102.473,00		3.086.102.473,00		3.086.102.473,00		2.622.140.877,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	2.680.773.478,00	100	3.086.102.473,00	100	3.086.102.473,00	100	3.086.102.473,00	100	2.622.140.877,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki penataan Desa yang berkualitas (%)	53.4	56.81	68.18	80.000.000,00	73.36	80.000.000,00	79.54	80.000.000,00	89.77	80.000.000,00	100	80.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya kerjasama antar desa	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin (%)	9.09	9.09	11.36	65.000.000,00	11.36	65.000.000,00	13.63	65.000.000,00	13.63	65.000.000,00	17.04	65.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					898.328.995,00		475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		956.961.595,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel (%)	59.09	68.18	73.86	898.328.995,00	73.86	475.000.000,00	79.54	475.000.000,00	90.9	475.000.000,00	100	956.961.595,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					182.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		182.000.000,00	
Meningkatnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat	Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan (%)	50	50	56.81	182.000.000,00	68.18	200.000.000,00	79.54	200.000.000,00	89.77	200.000.000,00	100	182.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.529.540.035,00		8.529.540.035,00		8.529.540.035,00		8.529.540.035,00		8.529.540.035,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.372.405.410,00		5.372.405.410,00		5.372.405.410,00		5.372.405.410,00		5.372.405.410,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	5.372.405.410,00	100	5.372.405.410,00	100	5.372.405.410,00	100	5.372.405.410,00	100	5.372.405.410,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					203.515.000,00		203.515.000,00		203.515.000,00		203.515.000,00		203.515.000,00	
Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2.47	2.47	2.46	128.775.000,00	2.45	128.775.000,00	2.44	128.775.000,00	2.43	128.775.000,00	2.43	128.775.000,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ASFR 15-19) (Angka)	43.1	43.10	43.09	74.740.000,00	43.08	74.740.000,00	43.07	74.740.000,00	43.06	74.740.000,00	43.05	74.740.000,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.050.664.475,00		2.050.664.475,00		2.050.664.475,00		2.050.664.475,00		2.050.664.475,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	60.68	60.68	61.60	1.943.604.475,00	61.63	1.943.604.475,00	61.65	1.943.604.475,00	61.67	1.943.604.475,00	61.69	1.943.604.475,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi Unmet Need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12.13	12.00	12.00	107.060.000,00	12.00	107.060.000,00	11.95	107.060.000,00	11.95	107.060.000,00	11.94	107.060.000,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					902.955.150,00		902.955.150,00		902.955.150,00		902.955.150,00		902.955.150,00	
Meningkatnya Jumlah Keluarga Yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	0	0	20	902.955.150,00	30	902.955.150,00	40	902.955.150,00	50	902.955.150,00	60	902.955.150,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.647.515.275,00		6.501.575.275,00		6.306.391.275,00		4.496.809.256,00		6.654.356.235,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.099.415.275,00		4.099.415.275,00		4.099.415.275,00		2.324.135.656,00		4.099.415.275,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	4.099.415.275,00	100	4.099.415.275,00	100	4.099.415.275,00	100	2.324.135.656,00	100	4.099.415.275,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.378.100.000,00		2.232.160.000,00		2.036.976.000,00		2.002.673.600,00		2.384.940.960,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyediaan penerangan jalan umum	Persentase penyediaan penerangan jalan umum (%)	14	17	20	1.798.100.000,00	23	1.630.660.000,00	26	1.411.826.000,00	29	1.351.508.600,00	32	1.705.159.460,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya tersedianya perlengkapan transportasi	persentase tersedianya perlengkapan transportasi (%)	20	25	30	26.000.000,00	35	28.600.000,00	40	31.460.000,00	45	34.606.000,00	50	38.066.600,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya ketersediaan data layanan angkutan	Persentase ketersediaan data layanan angkutan (%)	9	12	15	64.000.000,00	18	70.400.000,00	23	77.440.000,00	26	85.184.000,00	29	93.702.400,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c (%)	10	15	20	31.000.000,00	25	31.000.000,00	30	31.000.000,00	35	31.000.000,00	40	31.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya rekomendasi uji KIR	Persentase rekomendasi uji KIR (%)	45	50	55	25.000.000,00	60	27.500.000,00	65	30.250.000,00	70	33.275.000,00	75	36.602.500,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya penyelenggaraan layanan lalu lintas	Persentase penyelenggaraan layanan lalu lintas (%)	25	30	35	334.000.000,00	40	334.000.000,00	45	334.000.000,00	50	334.000.000,00	55	334.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemenuhan izin parkir	Persentase penyelenggaraan pemenuhan izin parkir (%)	0	0	22	100.000.000,00	27	110.000.000,00	33	121.000.000,00	55	133.100.000,00	77	146.410.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Persentase ketersediaan data layanan pelayaran (%)	100	100	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.308.737.163,00		4.308.737.163,00		4.308.737.163,00		3.811.717.015,00		4.308.737.163,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.701.337.163,00		3.701.337.163,00		3.701.337.163,00		3.288.217.015,00		3.701.337.163,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.701.337.163,00	100	3.701.337.163,00	100	3.701.337.163,00	100	3.288.217.015,00	100	3.701.337.163,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					406.500.000,00		406.500.000,00		406.500.000,00		358.500.000,00		406.500.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	406.500.000,00	100	406.500.000,00	100	406.500.000,00	100	358.500.000,00	100	406.500.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					200.900.000,00		200.900.000,00		200.900.000,00		165.000.000,00		200.900.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	100	100	100	200.900.000,00	100	200.900.000,00	100	200.900.000,00	100	165.000.000,00	100	200.900.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.900.563.210,00		3.650.563.210,00		3.900.563.210,00		3.808.983.799,00		4.200.563.210,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.018.959.372,00		3.018.959.372,00		3.018.959.372,00		3.018.959.372,00		3.018.959.372,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.018.959.372,00	100	3.018.959.372,00	100	3.018.959.372,00	100	3.018.959.372,00	100	3.018.959.372,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PERINDUSTRIAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Penerbitan izin untuk koperasi	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat (%)	0	0	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					29.646.870,00		29.646.870,00		29.646.870,00		29.646.870,00		29.646.870,00	
Meningkatnya pembinaan dan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)	12.2	25	12	29.646.870,00	12.3	29.646.870,00	12.4	29.646.870,00	12.5	29.646.870,00	12.6	29.646.870,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase KSP/USP yang sehat (%)	0	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian (%)	12	20	20	25.000.000,00	22	25.000.000,00	23	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab. (%)	4.2	20	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					172.956.968,00		172.956.968,00		172.956.968,00		172.956.968,00		172.956.968,00	
Meningkatnya Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan (%)	1.2	5	3	172.956.968,00	3	172.956.968,00	3	172.956.968,00	3	172.956.968,00	3	172.956.968,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.17.08 - PROGRAM					599.000.000,00		349.000.000,00		599.000.000,00		507.420.589,00		899.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	1.7	9	2	599.000.000,00	2	349.000.000,00	2	599.000.000,00	2	507.420.589,00	2	899.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.787.927.921,00		3.787.927.921,00		3.787.927.921,00		3.787.927.921,00		3.787.927.921,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.504.927.921,00		3.504.927.921,00		3.504.927.921,00		3.504.927.921,00		3.504.927.921,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantorÂ	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.504.927.921,00	100	3.504.927.921,00	100	3.504.927.921,00	100	3.504.927.921,00	100	3.504.927.921,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					85.000.000,00		85.000.000,00		25.000.000,00		85.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	70.00	70.15	85.000.000,00	70.30	85.000.000,00	70.51	25.000.000,00	70.75	85.000.000,00	70.81	25.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI					30.000.000,00		30.000.000,00		90.000.000,00		30.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	90.000.000,00	100	30.000.000,00	100	90.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha (%)	88.9	100	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					10.795.649.773,00		10.795.649.773,00		10.795.649.773,00		10.795.649.773,00		10.795.649.773,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.673.999.500,00		3.673.999.500,00		3.673.999.500,00		3.673.999.500,00		3.673.999.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas pemuda dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kepemimpinan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	0.47	0.45	0.50	3.673.999.500,00	0.56	3.673.999.500,00	0.62	3.673.999.500,00	0.68	3.673.999.500,00	0.74	3.673.999.500,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					7.026.650.273,00		7.026.650.273,00		7.026.650.273,00		7.026.650.273,00		7.026.650.273,00	
Meningkatnya prestasi Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	0	1.11	1.25	7.026.650.273,00	1.39	7.026.650.273,00	1.52	7.026.650.273,00	1.66	7.026.650.273,00	1.80	7.026.650.273,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	
Meningkatnya Partisipasi dan Aktivitas Pramuka di Kalangan Pelajar dan Pemuda	Persentase Lembaga Pramuka yang Aktif (%)	0	27.93	34.57	95.000.000,00	41.22	95.000.000,00	47.87	95.000.000,00	54.52	95.000.000,00	61.17	95.000.000,00	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					47.700.000,00		47.700.000,00		47.700.000,00		44.700.000,00		47.700.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					47.700.000,00		47.700.000,00		47.700.000,00		44.700.000,00		47.700.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	47.700.000,00	100	47.700.000,00	100	47.700.000,00	100	44.700.000,00	100	47.700.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.504.045.658,00		3.604.045.658,00		3.593.295.274,00		3.663.295.274,00		3.643.295.274,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.993.790.258,00		3.009.900.658,00		3.079.150.274,00		3.049.150.274,00		3.054.150.274,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantorÂ	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	2.993.790.258,00	100	3.009.900.658,00	100	3.079.150.274,00	100	3.049.150.274,00	100	3.054.150.274,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					315.000.000,00		365.000.000,00		265.000.000,00		365.000.000,00		290.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.26	2.26	2.26	315.000.000,00	3.4	365.000.000,00	3.4	265.000.000,00	4.53	365.000.000,00	4.53	290.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	43.33	3.33	6.67	100.000.000,00	10	100.000.000,00	13.33	150.000.000,00	16.67	150.000.000,00	33.33	150.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	10	-	10	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	20	25.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					71.110.400,00		80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0	25	71.110.400,00	25	80.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	100.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					24.145.000,00		24.145.000,00		24.145.000,00		24.145.000,00		24.145.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	1	1.15	1.30	24.145.000,00	1.43	24.145.000,00	1.53	24.145.000,00	1.61	24.145.000,00	1.65	24.145.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.708.906.075,00		3.708.906.075,00		3.708.906.075,00		3.708.906.075,00		3.708.906.075,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.013.275.375,00		3.013.275.375,00		3.013.275.375,00		3.013.275.375,00		3.013.275.375,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantorÂ	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.013.275.375,00	100	3.013.275.375,00	100	3.013.275.375,00	100	3.013.275.375,00	100	3.013.275.375,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					677.630.700,00		677.630.700,00		677.630.700,00		677.630.700,00		677.630.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	12	13	15	677.630.700,00	17	677.630.700,00	20	677.630.700,00	24	677.630.700,00	27	677.630.700,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Regulasi Pelestarian Naskah Kuno Yang Ditetapkan (%)	100	100	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00	
Meningkatnya tertib pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara efektif dan efisien.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan (%)	0	50	65	49.500.000,00	75	49.500.000,00	85	49.500.000,00	95	49.500.000,00	100	49.500.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00	
Terlindunginya arsip vital, arsip statis, dan arsip yang bernilai guna tinggi dari kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam, kelalaian, atau tindakan manusia.	Persentase arsip vital yang terlindungi melalui digitalisasi dan prosedur penyelamatan arsip (%)	0	30	50	20.500.000,00	70	20.500.000,00	85	20.500.000,00	95	20.500.000,00	100	20.500.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.150.503.278,00		11.650.503.278,00		6.150.503.278,00		11.650.503.278,00		9.015.080.725,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.795.503.278,00		4.380.503.278,00		3.895.503.278,00		4.080.503.278,00		4.081.451.435,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.795.503.278,00	100	4.380.503.278,00	100	3.895.503.278,00	100	4.080.503.278,00	100	4.081.451.435,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.050.000.000,00		2.950.000.000,00		1.000.000.000,00		2.950.000.000,00		2.150.629.290,00	
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21236	0	21461	1.050.000.000,00	21495	2.950.000.000,00	21535	1.000.000.000,00	21595	2.950.000.000,00	21595	2.150.629.290,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					840.000.000,00		2.580.000.000,00		840.000.000,00		2.580.000.000,00		2.005.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	35671,72	0	36396	840.000.000,00	36506	2.580.000.000,00	36674	840.000.000,00	36874	2.580.000.000,00	36874	2.005.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					465.000.000,00		1.740.000.000,00		415.000.000,00		2.040.000.000,00		778.000.000,00	
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	91.64	96.13	96.24	465.000.000,00	96.3	1.740.000.000,00	96.33	415.000.000,00	96.36	2.040.000.000,00	96.36	778.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					740.574.616,00		640.574.616,00		651.325.000,00		581.325.000,00		601.325.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					321.325.000,00		161.325.000,00		156.325.000,00		116.325.000,00		116.325.000,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	4.85	5.84	5.98	321.325.000,00	6.29	161.325.000,00	6.53	156.325.000,00	7.28	116.325.000,00	8.04	116.325.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	40	45	45	100.000.000,00	45	150.000.000,00	45	150.000.000,00	50	130.000.000,00	50	150.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					-		10.000.000,00		10.000.000,00		-		-	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	0	-	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	0	-	0	-	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					319.249.616,00		319.249.616,00		335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20	25	25	319.249.616,00	25	319.249.616,00	25	335.000.000,00	30	335.000.000,00	30	335.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					40.225.621.170,00		28.225.621.170,00		46.979.892.170,00		28.225.621.170,00		47.387.064.788,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.709.624.570,00		18.411.680.976,00		18.473.895.570,00		18.035.055.570,00		18.778.353.570,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	14.315.402.764,00	100	14.115.402.764,00	100	14.569.673.764,00	100	14.140.833.764,00	100	14.334.131.764,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	4.394.221.806,00	100	4.296.278.212,00	100	3.904.221.806,00	100	3.894.221.806,00	100	4.444.221.806,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					7.340.996.600,00		3.628.940.194,00		9.340.996.600,00		2.705.437.194,00		11.000.500.000,00	
Tersedianya Sarana Pertanian Yang Sesuai Kebutuhan	Indeks Ketersediaan sarana Pertanian (%)	100	100	100	6.420.000.000,00	100	2.920.000.000,00	100	8.420.000.000,00	100	2.025.500.000,00	100	8.575.500.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	0	0	90	920.996.600,00	95	708.940.194,00	95	920.996.600,00	100	679.937.194,00	100	2.425.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.980.000.000,00		3.975.000.000,00		14.435.000.000,00		5.290.128.406,00		14.700.574.047,00	
Tersedianya Prasarana Pertanian Yang Sesuai Kebutuhan	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	6.320.000.000,00	100	2.020.000.000,00	100	8.320.000.000,00	100	2.889.069.000,00	100	7.780.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Luas Lahan Perkebunan	Cakupan Luas Lahan Perkebunan (Ha)	0	0	500	5.660.000.000,00	750	1.955.000.000,00	750	6.115.000.000,00	850	2.401.059.406,00	1000	6.920.574.047,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Terkendalinya Penyebaran Kasus Kesehatan Dan Penyakit Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					560.000.000,00		575.000.000,00		2.585.000.000,00		560.000.000,00		610.000.000,00	
Terkendalinya Penyebaran Opt Dan Dpi Pada Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	430.000.000,00	100	430.000.000,00	100	2.430.000.000,00	100	430.000.000,00	100	430.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Meningkatnya Penanganan bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	0	95	130.000.000,00	95	145.000.000,00	100	155.000.000,00	100	130.000.000,00	100	180.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Meningkatnya Izin Usaha Pertanian Yang diterbitkan	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang diterbitkan (%)	0	0	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.910.000.000,00		1.400.000.000,00		2.062.637.171,00	
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian	Persentase penyuluh dan kelompok tani terbina (%)	100	100	100	575.000.000,00	100	575.000.000,00	100	1.075.000.000,00	100	575.000.000,00	100	1.237.637.171,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														, DAN PETERNAKAN
Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan dan Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan dan Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	100	100	100	825.000.000,00	100	825.000.000,00	100	835.000.000,00	100	825.000.000,00	100	825.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.607.222.401,00		4.607.222.401,00		4.607.222.401,00		4.607.222.401,00		4.607.222.401,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.952.876.401,00		3.952.876.401,00		3.952.876.401,00		3.952.876.401,00		3.952.876.401,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	3.952.876.401,00	100	3.952.876.401,00	100	3.952.876.401,00	100	3.952.876.401,00	100	3.952.876.401,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					49.517.000,00		49.517.000,00		49.517.000,00		49.517.000,00		49.517.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	95	100	100	49.517.000,00	100	49.517.000,00	100	49.517.000,00	100	49.517.000,00	100	49.517.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					318.282.000,00		318.282.000,00		318.282.000,00		318.282.000,00		318.282.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	0	100	318.282.000,00	100	318.282.000,00	100	318.282.000,00	100	318.282.000,00	100	318.282.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
merata dan terintegrasi														
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					68.779.500,00		68.779.500,00		68.779.500,00		68.779.500,00		68.779.500,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	0	100	68.779.500,00	100	68.779.500,00	100	68.779.500,00	100	68.779.500,00	100	68.779.500,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					12.983.000,00		12.983.000,00		12.983.000,00		12.983.000,00		12.983.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha yang berorientasi ekspor (Aduan)	100	0	100	12.983.000,00	100	12.983.000,00	100	12.983.000,00	100	12.983.000,00	100	12.983.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					146.220.500,00		146.220.500,00		146.220.500,00		146.220.500,00		146.220.500,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	0	100	146.220.500,00	100	146.220.500,00	100	146.220.500,00	100	146.220.500,00	100	146.220.500,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					58.564.000,00		58.564.000,00		58.564.000,00		58.564.000,00		58.564.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (%)	0	0	100	58.564.000,00	100	58.564.000,00	100	58.564.000,00	100	58.564.000,00	100	58.564.000,00	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					648.500.000,00		648.500.000,00		648.500.000,00		198.500.000,00		348.500.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN					593.500.000,00		593.500.000,00		593.500.000,00		143.500.000,00		293.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	38.1	39	40	593.500.000,00	40.5	593.500.000,00	42	593.500.000,00	44	143.500.000,00	46	293.500.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Berbasis Risiko	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Industri yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan informasi industri (%)	50	50	55	25.000.000,00	60	25.000.000,00	60	25.000.000,00	65	25.000.000,00	65	25.000.000,00	2.17.3.31.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					545.000.000,00		620.000.000,00		682.000.000,00		605.780.000,00		587.820.000,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					85.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		155.000.000,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	70	80	80	85.000.000,00	80	100.000.000,00	85	120.000.000,00	85	140.000.000,00	94	155.000.000,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN					400.000.000,00		440.000.000,00		462.000.000,00		425.780.000,00		412.820.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya Kualitas Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	80	90	90	400.000.000,00	90	440.000.000,00	90	462.000.000,00	99	425.780.000,00	100	412.820.000,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		40.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	80.000.000,00	100	100.000.000,00	100	40.000.000,00	100	20.000.000,00	3.32.2.07.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.679.809.645,00		36.097.135.367,00		36.468.183.661,00		36.833.305.483,00		37.003.902.914,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.620.266.945,00		29.008.747.267,00		29.368.550.061,00		29.727.277.383,00		29.923.560.414,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor					28.620.266.945,00		29.008.747.267,00		29.368.550.061,00		29.727.277.383,00		29.923.560.414,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN HUKUM
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN HUKUM
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN HUKUM
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN KERJASAMA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN KERJASAMA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN KERJASAMA
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN PEREKONOMIAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN PEREKONOMIAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN PEREKONOMIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0008 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0008 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0008 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0009 - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0009 - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0009 - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0010 - BAGIAN ORGANISASI
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0010 - BAGIAN ORGANISASI
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0010 - BAGIAN ORGANISASI
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0011 - BAGIAN UMUM
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0011 - BAGIAN UMUM
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0011 - BAGIAN UMUM
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0012 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0012 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0012 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					6.209.991.700,00		6.232.653.400,00		6.244.393.400,00		6.249.763.400,00		6.225.577.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					6.209.991.700,00		6.232.653.400,00		6.244.393.400,00		6.249.763.400,00		6.225.577.800,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN KERJASAMA
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					849.551.000,00		855.734.700,00		855.240.200,00		856.264.700,00		854.764.700,00	
Meningkatnya Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Capaian Program Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	849.551.000,00	100	855.734.700,00	100	855.240.200,00	100	856.264.700,00	100	854.764.700,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN PEREKONOMIAN
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					46.847.031.070,00		48.012.031.070,00		49.712.031.070,00		43.712.031.070,00		49.712.031.070,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.661.705.586,00		27.352.989.470,00		27.702.989.470,00		26.202.909.470,00		27.702.989.470,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor			100	100	26.661.705.586,00	100	27.352.989.470,00	100	27.702.989.470,00	100	26.202.909.470,00	100	27.702.989.470,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					20.185.325.484,00		20.659.041.600,00		22.009.041.600,00		17.509.121.600,00		22.009.041.600,00	
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100	100	100	20.185.325.484,00	100	20.659.041.600,00	100	22.009.041.600,00	100	17.509.121.600,00	100	22.009.041.600,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					4.672.812.866,00		4.672.812.866,00		4.672.812.866,00		4.672.812.866,00		4.672.812.866,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.857.937.601,00		3.857.937.601,00		3.857.937.601,00		3.857.937.601,00		3.857.937.601,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	99.75	100	100	3.857.937.601,00	100	3.857.937.601,00	100	3.857.937.601,00	100	3.857.937.601,00	100	3.857.937.601,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	99.92	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					334.094.365,00		334.094.365,00		334.094.365,00		334.094.365,00		334.094.365,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	60	100	100	334.094.365,00	100	334.094.365,00	100	334.094.365,00	100	334.094.365,00	100	334.094.365,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	60	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					480.780.900,00		480.780.900,00		480.780.900,00		480.780.900,00		480.780.900,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	84	100	100	195.244.100,00	100	195.244.100,00	100	195.244.100,00	100	195.244.100,00	100	195.244.100,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	90.21	100	100	118.730.186,00	100	118.730.186,00	100	118.730.186,00	100	118.730.186,00	100	118.730.186,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	98.04	100	100	166.806.614,00	100	166.806.614,00	100	166.806.614,00	100	166.806.614,00	100	166.806.614,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					181.770.314.491,00		182.643.825.682,00		183.528.328.367,00		185.909.967.962,00		185.317.757.139,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.420.657.004,00		12.452.657.004,00		12.417.657.004,00		12.445.157.004,00		12.417.657.004,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantorÂ	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	5.964.708.533,00	100	5.996.708.533,00	100	5.961.708.533,00	100	5.989.208.533,00	100	5.961.708.533,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantorÂ	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	6.455.948.471,00	100	6.455.948.471,00	100	6.455.948.471,00	100	6.455.948.471,00	100	6.455.948.471,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM					167.263.259.508,00		168.136.770.699,00		169.021.273.384,00		171.402.912.979,00		170.810.702.156,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40	689.963.936,00	42	689.963.936,00	43	689.963.936,00	45	689.963.936,00	45	689.963.936,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30		28		27		25		25		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan Daerah	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	2	5,5	166.245.868.572,00	4,0	167.119.379.763,00	4,5	168.003.882.448,00	4,0	170.385.522.043,00	3,5	169.793.311.220,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar. (%)	80	80	90		92		94		96		98		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatkan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	327.427.000,00	100	327.427.000,00	100	327.427.000,00	100	327.427.000,00	100	327.427.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					400.070.100,00		400.070.100,00		400.070.100,00		400.070.100,00		400.070.100,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	19,97	23,02	26,06	400.070.100,00	29,09	400.070.100,00	32,11	400.070.100,00	35,12	400.070.100,00	38,12	400.070.100,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.686.327.879,00		1.654.327.879,00		1.689.327.879,00		1.661.827.879,00		1.689.327.879,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	0.04	0.03	0.03	1.686.327.879,00	0.02	1.654.327.879,00	0.02	1.689.327.879,00	0.02	1.661.827.879,00	0.02	1.689.327.879,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Dokumen)	91153466677	130160197039	126154331355		129235371315		132394280558		135471677848		138789543699		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD	0.07	0.07	0.05		0.05		0.05		0.04		0.03		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dalam APBD (Ribu Rupiah)													
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.242.029.200,00		5.122.029.200,00		5.242.029.200,00		5.242.029.200,00		5.242.029.200,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.466.699.450,00		4.406.699.450,00		4.466.699.450,00		4.466.699.450,00		4.466.699.450,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantorÂ	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	4.466.699.450,00	100	4.406.699.450,00	100	4.466.699.450,00	100	4.466.699.450,00	100	4.466.699.450,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					775.329.750,00		715.329.750,00		775.329.750,00		775.329.750,00		775.329.750,00	
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Kualifikasi Aspek Kompetensi dan Pengembangan Karier (Indeks)	0.044	0.05	0.056	775.329.750,00	0.063	715.329.750,00	0.069	775.329.750,00	0.075	775.329.750,00	0.081	775.329.750,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Indeks Kualifikasi Aspek Mutasi, Rotasi, Promosi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin dan Perlindungan (Indeks)	0.215	0.239	0.24		0.253		0.265		0.278		0.29		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Indeks Kualifikasi Aspek Perencanaan, Pengadaan Sistem Informasi (Indeks)	0.136	0.139	0.145		0.151		0.158		0.164		0.17		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					258.443.250,00		228.443.250,00		258.443.250,00		258.443.250,00		258.443.250,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					258.443.250,00		228.443.250,00		258.443.250,00		258.443.250,00		258.443.250,00	
Meningkatnya Kompetensi ASN	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Jam)	1.57	1.57	1.57	258.443.250,00	1.57	228.443.250,00	1.57	258.443.250,00	1.57	258.443.250,00	1.57	258.443.250,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					137.927.878,00		137.927.878,00		137.927.878,00		137.927.878,00		137.927.878,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					112.831.233,00		112.831.233,00		112.831.233,00		112.831.233,00		112.831.233,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	0	100	112.831.233,00	100	112.831.233,00	100	112.831.233,00	100	112.831.233,00	100	112.831.233,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					25.096.645,00		25.096.645,00		25.096.645,00		25.096.645,00		25.096.645,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	100	100	25.096.645,00	100	25.096.645,00	100	25.096.645,00	100	25.096.645,00	100	25.096.645,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														INOVASI DAERAH
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					11.259.673.927,00		11.259.673.927,00		11.259.673.927,00		11.259.673.927,00		11.259.673.927,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.473.220.527,00		7.473.220.527,00		7.473.220.527,00		7.473.220.527,00		7.473.220.527,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	7.473.220.527,00	100	7.473.220.527,00	100	7.473.220.527,00	100	7.473.220.527,00	100	7.473.220.527,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.462.400.000,00		2.462.400.000,00		2.462.400.000,00		2.462.400.000,00		2.462.400.000,00	
Persentase Pengawasan Internal	Persentase Program Penyelenggaraan Pengawasan (%)	100	100	100	2.462.400.000,00	100	2.462.400.000,00	100	2.462.400.000,00	100	2.462.400.000,00	100	2.462.400.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.324.053.400,00		1.324.053.400,00		1.324.053.400,00		1.324.053.400,00		1.324.053.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	Persentase Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi (%)	100	100	100	1.324.053.400,00	100	1.324.053.400,00	100	1.324.053.400,00	100	1.324.053.400,00	100	1.324.053.400,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					46.854.035.083,00		47.462.437.083,00		47.457.437.083,00		46.574.140.363,00		47.459.237.083,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.208.574.303,00		38.639.435.193,00		38.619.509.120,00		37.953.874.613,00		38.651.486.551,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	7.314.391.686,00	100	7.322.908.259,00	100	7.320.985.406,00	100	7.317.838.012,00	100	7.326.985.417,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KANTOR KELURAHAN KAREMA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KANTOR KELURAHAN KAREMA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KANTOR KELURAHAN KAREMA
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KANTOR KELURAHAN RIMUKU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KANTOR KELURAHAN RIMUKU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KANTOR KELURAHAN RIMUKU
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KANTOR KELURAHAN BINANGA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KANTOR KELURAHAN BINANGA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KANTOR KELURAHAN BINANGA
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KANTOR KELURAHAN MAMUNYU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KANTOR KELURAHAN MAMUNYU
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KANTOR KELURAHAN MAMUNYU
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	4.849.760.618,00	100	4.849.760.618,00	100	4.849.760.618,00	100	4.849.760.618,00	100	4.846.760.618,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KANTOR KELURAHAN RANGAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KANTOR KELURAHAN RANGAS
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KANTOR KELURAHAN RANGAS
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KANTOR KELURAHAN SIMBORO
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KANTOR KELURAHAN SIMBORO
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KANTOR KELURAHAN SIMBORO
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	5.452.386.999,00	100	5.452.386.999,00	100	5.452.386.999,00	100	5.452.386.999,00	100	5.452.386.999,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KANTOR KELURAHAN GALUNG
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KANTOR KELURAHAN GALUNG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KANTOR KELURAHAN GALUNG
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KANTOR KELURAHAN KASAMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sesuai standar dan tepat waktu (%)													
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KANTOR KELURAHAN KASAMBANG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KANTOR KELURAHAN KASAMBANG
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KANTOR KELURAHAN DAYANGINNA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KANTOR KELURAHAN DAYANGINNA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KANTOR KELURAHAN DAYANGINNA
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	1.774.435.139,00	100	1.817.094.939,00	100	1.817.094.939,00	100	1.817.094.939,00	100	1.817.094.939,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	7.837.685.171,00	100	7.801.684.171,00	100	7.794.870.171,00	100	7.778.685.171,00	100	7.824.684.171,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KANTOR KELURAHAN BEBANGA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KANTOR KELURAHAN BEBANGA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KANTOR KELURAHAN BEBANGA
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KANTOR KELURAHAN KALUKKU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KANTOR KELURAHAN KALUKKU
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KANTOR KELURAHAN KALUKKU
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI SELATAN
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI SELATAN
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	2.170.142.712,00	100	2.198.470.754,00	100	2.198.470.754,00	100	2.178.421.471,00	100	2.198.470.754,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	1.695.206.356,00	100	1.730.297.356,00	100	1.739.961.276,00	100	1.714.000.156,00	100	1.737.985.356,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	1.726.186.549,00	100	1.763.186.549,00	100	1.754.186.549,00	100	1.754.186.549,00	100	1.754.186.549,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	1.694.683.673,00	100	1.851.307.348,00	100	1.851.307.348,00	100	1.774.079.632,00	100	1.851.307.348,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	2.036.466.488,00	100	2.094.466.488,00	100	2.094.466.488,00	100	1.865.919.135,00	100	2.094.466.488,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	1.657.228.912,00	100	1.757.871.712,00	100	1.746.018.572,00	100	1.451.501.931,00	100	1.747.157.912,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					705.413.530,00		737.666.330,00		746.562.670,00		707.512.070,00		754.441.980,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	262.147.830,00	100	260.836.830,00	100	262.443.830,00	100	262.723.830,00	100	264.425.480,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01 .0001 - KANTOR KELURAHAN KAREMA
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01 .0002 - KANTOR KELURAHAN RIMUKU
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01 .0003 - KANTOR KELURAHAN BINANGA
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01 .0004 - KANTOR KELURAHAN MAMUNYU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	39.211.500,00	100	39.211.500,00	100	39.211.500,00	100	39.211.500,00	100	39.211.500,00	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	32.043.370,00	100	32.043.370,00	100	32.043.370,00	100	32.043.370,00	100	32.043.370,00	7.01.0.00.0.00.03 .0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
														7.01.0.00.0.00.03 .0001 - KANTOR KELURAHAN GALUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	25.346.600,00	100	25.556.800,00	100	25.556.800,00	100	25.556.800,00	100	25.556.800,00	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	116.635.000,00	100	131.000.000,00	100	131.000.000,00	100	131.000.000,00	100	131.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05 .0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05 .0001 - KANTOR KELURAHAN BEBANGA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	32.500.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	31.840.340,00	100	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06 .0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	20.31	100	100	25.251.938,00	100	25.251.938,00	100	28.251.938,00	100	28.251.938,00	100	34.638.938,00	7.01.0.00.0.00.07 .0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	67.305.292,00	100	67.305.292,00	100	67.305.292,00	100	67.305.292,00	100	67.305.292,00	7.01.0.00.0.00.08 .0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	46.572.000,00	100	53.360.600,00	100	53.360.600,00	100	46.572.000,00	100	53.360.600,00	7.01.0.00.0.00.09 .0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	41.400.000,00	100	44.400.000,00	100	44.400.000,00	100	31.507.000,00	100	44.400.000,00	7.01.0.00.0.00.10 .0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100	17.000.000,00	100	18.700.000,00	100	22.989.340,00	100	11.500.000,00	100	22.500.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.372.082.213,00		7.434.566.640,00		7.418.462.493,00		7.380.389.887,00		7.392.466.832,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	2.503.286.112,00	100	2.496.280.539,00	100	2.491.596.392,00	100	2.499.263.786,00	100	2.488.414.731,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KANTOR KELURAHAN KAREMA
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KANTOR KELURAHAN RIMUKU
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KANTOR KELURAHAN BINANGA
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KANTOR KELURAHAN MAMUNYU
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	91.217	91.3	91.4	1.015.857.000,00	91.4	1.015.857.000,00	91.4	1.015.857.000,00	91.4	1.015.857.000,00	91.4	1.015.857.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KANTOR KELURAHAN RANGAS
	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KANTOR KELURAHAN SIMBORO
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.106.218.701,00	100	1.106.218.701,00	100	1.106.218.701,00	100	1.106.218.701,00	100	1.106.218.701,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KANTOR KELURAHAN GALUNG
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KANTOR KELURAHAN KASAMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KANTOR KELURAHAN DAYANGINNA
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	8.291.200,00	100	9.411.200,00	100	9.411.200,00	100	9.411.200,00	100	9.411.200,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	2.656.050.000,00	100	2.677.686.000,00	100	2.684.500.000,00	100	2.700.685.000,00	100	2.654.686.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KANTOR KELURAHAN BEBANGA
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KANTOR KELURAHAN KALUKKU
	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KANTOR KELURAHAN SINYONYOI SELATAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	12.000.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	7.500.000,00	100	12.500.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	12.5	100	100	18.997.200,00	100	43.231.200,00	100	18.997.200,00	100	10.997.200,00	100	25.997.200,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	13.457.000,00	100	13.457.000,00	100	15.457.000,00	100	15.457.000,00	100	15.457.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	15.000.000,00	100	24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	22.925.000,00	100	27.925.000,00	100	27.925.000,00	100	-	100	27.925.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	-	100	8.000.000,00	100	12.000.000,00	100	-	100	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN					88.141.400,00		121.287.400,00		128.523.680,00		107.870.998,00		128.989.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					7.948.000,00		7.948.000,00		7.948.000,00		7.948.000,00		7.948.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	11.802.000,00	100	11.802.000,00	100	11.802.000,00	100	11.802.000,00	100	11.802.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	4.240.000,00	100	4.240.000,00	100	4.240.000,00	100	4.240.000,00	100	4.240.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	19.640.000,00	100	22.290.000,00	100	22.290.000,00	100	22.290.000,00	100	22.290.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	14.500.000,00	100	14.500.000,00	100	14.500.000,00	100	14.500.000,00	100	14.500.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	6.550.000,00	100	6.550.000,00	100	5.500.000,00	100	6.550.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	25	100	100	6.935.400,00	100	15.935.400,00	100	17.171.680,00	100	18.590.998,00	100	17.637.800,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	-	100	12.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	7.518.000,00	100	7.518.000,00	100	5.000.000,00	100	7.518.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	5.504.000,00	100	6.504.000,00	100	6.504.000,00	-	-	100	6.504.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	6.572.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	-	-	100	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					325.153.742,00		336.492.500,00		348.476.300,00		289.992.500,00		343.449.100,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	66.443.000,00	100	66.443.000,00	100	66.443.000,00	100	66.443.000,00	100	66.443.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	34.793.500,00	100	34.793.500,00	100	34.793.500,00	100	34.793.500,00	100	34.793.500,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	31.360.000,00	100	31.360.000,00	100	31.360.000,00	100	31.360.000,00	100	31.360.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	29.050.000,00	100	29.050.000,00	100	29.050.000,00	100	29.050.000,00	100	29.050.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	34.650.000,00	100	34.650.000,00	100	34.650.000,00	100	34.650.000,00	100	34.650.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	27.033.042,00	100	29.500.000,00	100	29.500.000,00	100	22.500.000,00	100	29.500.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	50	100	100	26.824.200,00	100	16.196.000,00	100	26.529.800,00	100	16.196.000,00	100	24.652.600,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	-	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	100	-	100	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	16.500.000,00	100	18.150.000,00	100	-	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					154.669.895,00		192.989.020,00		195.902.820,00		134.500.295,00		188.402.820,00	
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	14.451.000,00	100	14.451.000,00	100	14.451.000,00	100	14.451.000,00	100	14.451.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KANTOR KECAMATAN MAMUJU
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	26.131.995,00	100	26.131.995,00	100	26.131.995,00	100	26.131.995,00	100	26.131.995,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KANTOR KECAMATAN SIMBORO
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	13.136.000,00	100	13.136.000,00	100	13.136.000,00	100	13.136.000,00	100	13.136.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	10.002.500,00	100	13.362.500,00	100	13.362.500,00	100	13.362.500,00	100	13.362.500,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	10.600.000,00	100	10.600.000,00	100	10.600.000,00	100	10.600.000,00	100	10.600.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUKKU
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	14.500.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	10.500.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KANTOR KECAMATAN PAPALANG
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	25	100	100	16.000.000,00	100	28.303.200,00	100	28.303.200,00	100	14.675.400,00	100	18.303.200,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	12.000.000,00	100	18.000.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KANTOR KECAMATAN TOMMO
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	7.000.000,00	100	15.069.725,00	100	15.069.725,00	100	7.000.000,00	100	15.069.725,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KANTOR KECAMATAN BONEHAU
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	30.848.400,00	100	30.848.400,00	100	30.848.400,00	100	5.643.400,00	100	30.848.400,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	8.086.200,00	100	10.000.000,00	100	-	100	12.500.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.243.521.431,00		4.243.521.431,00		4.243.521.431,00		54.243.521.431,00		4.243.521.431,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.610.943.668,00		2.545.563.068,00		2.590.563.068,00		2.841.410.718,00		2.571.390.345,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	2.610.943.668,00	100	2.545.563.068,00	100	2.590.563.068,00	100	2.841.410.718,00	100	2.571.390.345,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					580.000.000,00		580.000.000,00		550.000.000,00		705.000.000,00		580.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	0	0	100	580.000.000,00	100	580.000.000,00	100	550.000.000,00	100	705.000.000,00	100	580.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					776.324.763,00		779.299.763,00		749.299.763,00		50.132.352.113,00		750.403.086,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	0	100	776.324.763,00	100	779.299.763,00	100	749.299.763,00	100	50.132.352.113,00	100	750.403.086,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					86.728.000,00		91.728.000,00		86.728.000,00		177.353.000,00		92.478.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang aktif (%)	0	0	100	86.728.000,00	100	91.728.000,00	100	86.728.000,00	100	177.353.000,00	100	92.478.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					39.525.000,00		71.180.600,00		91.180.600,00		111.655.600,00		73.500.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dilaksanakan (%)	0	0	100	39.525.000,00	100	71.180.600,00	100	91.180.600,00	100	111.655.600,00	100	73.500.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					150.000.000,00		175.750.000,00		175.750.000,00		275.750.000,00		175.750.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	0	0	100	150.000.000,00	100	175.750.000,00	100	175.750.000,00	100	275.750.000,00	100	175.750.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					1.341.580.460.978,00		1.339.152.041.666,00		1.357.950.279.779,00		1.384.554.872.386,00		1.385.352.197.341,00	

Sumber: Data diolah, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Mamuju dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mamuju 2026-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,86	72,26	73,63	74,37	75,11	75,80	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,49	72	73	74	75	76	
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	74,66	87	89	91	93	95	
4	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	40	40	50	50	60	60	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,47	6,63	6,73	6,79	6,87	6,95	
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,15	6,73	6,43	6,22	5,92	5,70	
7	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,425	0,417	413	409	405	401	
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77,9	82,09	84,11	86,08	88	90,64	
9	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	Persen	24,96	25,36	25,56	25,76	25,96	25,36	
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,77	2,69	2,65	2,61	2,57	2,53	
11	Potensi Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	TON CO2 EQ	NA	47.163,7	56.739,22	66.107,24	65.724,31	75.098,38	
12	Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	TON CO2 EQ	NA	385.357,79	442.097,01	508.204,26	573.928,56	649.026,94	

Sumber: Data diolah, 2025

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	44,69	46	50	53	55	58	60	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,48	76	77	78	79	80	81	
3	Persentase Desa Mandiri	%	4,55	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	
4	Angka Ketergantungan	%	49.12	48,77	48,27	47,77	47,27	46,77	46,27	
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3.98	3.99	4.01	4.02	4.03	4.05	4.07	
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,28	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	25	37	31	32	33	34	43	
8	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	Orang	9.075	9.563	10.050	3.230	3.718	3.735	4.228	
9	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/Kota	Industri	101	101	119	140	166	189	219	
10	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	UKM	17.761	17.811	17.861	17.911	17.961	18.011	18.061	
11	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	IKM	1.411	1.461	1.511	1.561	1.611	1.661	1.711	
12	Jumlah Orang yang Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Orang	3860	4266	4627	5078	5484	5890	6296	
13	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	%	14,16	14,21	14,26	14,31	14,36	14,41	14,46	
14	Return on Asset (ROA) BUMD	%	N/A	1	3	5	7	9	12	
15	Nilai Tukar Petani	Poin	151,89	153,14	154,39	155,64	156,89	158,14	159,39	
16	Nilai Tukar Nelayan	Poin	106,07	107,32	108,57	109,82	111,07	112,32	113,57	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30.49	30.59	30.69	30.78	30.88	30.98	31.08	
19	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-5.81	-5.06	-4.31	-3.56	-2.81	-2.06	-1.31	
20	Proporsi Kontribusi PDRB Kab terhadap PDRB Provinsi	%	24.96	25.16	25.36	25.56	25.76	25.96	25.36	
21	Indeks Harga Konsumen	Indeks	117.06	118.16	119.26	120.36	121.46	122.56	123.66	
22	Indeks Literasi Keuangan	Indeks								
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.37	0.52	0.67	0.82	0.97	1.12	1.27	
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.57	3.64	3.67	3.7	3.73	3.77	3.78	
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	74.66	85.68	85.81	85.94	86.07	86.2	86.36	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161.71	159.35	157	154.64	152.28	149.93	147.57	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81.47	82.97	84.47	85.97	87.47	88.97	90.47	
4	Potensi Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	TON CO2 EQ		41,104.54	47,163.70	56,739.22	66,107.24	65,724.31	75,098.38	
5	Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	TON CO2 EQ		338,194.09	385,357.79	442.097,01	508.204,26	573.928,56	649.026,94	
6	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	544.03	594.32	644.61	694.9	745.19	795.48	845.77	
7	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	58.42	57.84	57.26	56.68	56.1	55.52	54.94	
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	75.24	76.12	77	79	81	83	85	
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	5.3	6	6.5	7	7.5	8	8.5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.67	1.64	1.62	1.61	1.59	1.58	1.57	
11	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	1.21	1.5	2	2.5	3	3.5	4	
12	Rasio Penduduk	%	105	104	104	103	103	103	102	
13	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	95.28	95.3	95.35	94.4	95.45	95.5	95.55	
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.26	0.32	0.38	0.44	0.5	0.56	0.62	
15	Tingkat Capaian Skor Lingkungan	Poin								
16	Tingkat Capaian Skor Ekonomi	Poin								
17	Tingkat Capaian Skor Sosial	Poin	72.79	74.26	75.79	77.61	79.12	80.79	82.46	
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	76.01	76.01	80	81	82	83	84	
19	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks								
20	Kapasitas Air Baku	m3/detik	18	20	22	24	26	28	30	
21	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	72.02	72.76	73.5	75	77	79	81	
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,15	6,97	6,73	6,43	6,22	5,92	5,70	
2	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0.425	0.421	0.417	0.413	0.409	0.405	0.401	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	77.9	80.02	82.09	84.11	86.08	88	90.64	
4	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	43	44	46	48	49	50	51	
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.35	8.49	8.66	8.81	8.96	9.11	9.24	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.77	2.73	2.69	2.65	2.61	2.57	2.53	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.29	13.83	14.01	14.16	14.3	14.44	14.59	
8	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	54,72 (2023)	54	54.6	55	56	57	58	
9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	81.7	61.4	61.51	61.52	61.53	61.54	61.55	
10	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	64.45	64.85	66.15	67.47	68.82	70.2	71.6	
11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0	72	74	76	78	80	82	
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	40	40	40	50	50	50	60	
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72.13	72.49	72.86	73.58	73.22	73.94	74.3	
14	Indeks Literasi Digital	Angka	41,24	43	45	47,5	50	52,5	55	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	64,71	65,50	66,30	67,10	67,70	68,40	69,10	
16	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%								
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61.92	62.17	62.42	62.67	62.92	63.17	63.42	
18	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.501	0,465	0.418	0.37	0.325	0.276	0.233	
19	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.86	72.15	72.26	73.63	74.37	75.11	75.8	
20	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	30.9	29.43	27.96	26.49	25.02	23.55	22.08	
21	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.47	6.24	6,47	6,63	6,73	6,79	6,87	
22	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	53.92	54.76	57.19	59.62	62.04	64.47	66.9	
23	Angka Numerasi SMP	Angka	54.86	56.36	57.86	59.36	60.86	62.36	63.86	
24	Angka Literasi SMP	Angka	57.76	58.86	59.69	61.06	62.16	63.26	64.36	
25	Angka Numerasi SD	Angka	48.85	51.75	54.65	57.55	60.45	63.35	66.25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26	Angka Literasi SD	Angka	52.7	55.2	57.7	60.2	62.7	65.2	67.7	
27	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77.9	80.02	82.09	84.11	86.08	88	90.64	
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.92	0	91.62	91.97	92.32	92.67	93.02	
29	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	55	80	85	90	93	95	97	
30	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	194	193	192	191	190	189	188	
31	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	30.9	29.43	27.96	26.49	25.02	23.55	22.08	
32	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	84.74	85.74	86.19	87.1	88.2	89	90	
33	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	87.88	88.45	89.02	90	90	90	90	
34	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	90.23	90.52	90.81	91.1	91.39	91.68	91.97	
35	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12.01	12.27	13.64	14.56	15.49	16.41	17.34	
36	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48	0.51	0.54	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2.65	2.81	2.89	2.97	3.05	3.12	3.2	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.42	2.5	2.75	2.8	2.85	2.9	3	
3	Indeks Integritas Nasional	Persentase	0	72	74	76	78	80	82	
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	0	77	79	81	83	84	85	
5	Persentase Penegakan Perda	%	0	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	66.4	68	70	75	78	80	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks Rasa Aman	Angka	0	76,5	78	79,5	81	82,5	84	
8	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	0	72	74	76	78	80	82	
9	Persentase Penegakan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	99.6	98.66	100	100	100	100	100	
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.6	3.62	3.64	3.66	3.68	3.7	3.72	
11	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	91.217	91.3	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	
13	Persentase Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Program Penyelenggaraan Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91.217	91.3	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	
16	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	%	31.5	33	35	40	45	50	55	
17	Kepemilikan akta kelahiran	%	93	95	97	99	100	100	100	
18	Perekaman KTP elektronik	%	96.69	98	99	100	100	100	100	
19	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	41.24	41.35	41.5	41.75	41.85	42	42.4	
20	Indeks SPBE	Indeks	2.42	2.49	2.55	2.75	2.8	2.9	3	
21	Indeks Survei Peniliaian Integritas	Indeks	65.45	67.45	70	72	75	80	85	
22	Nilai MCP KPK	Poin	72	73	75	77	80	82	85	
23	Proporsi Penduduk yang merasa Aman Berjalan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sendirian di Area Tempat Tinggalnya									
24	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	Persentase Unjuk Rasa yang Aman dan Damai	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD	Perda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
27	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
28	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	12	12	12	12	12	12	12	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80.19	83.16	86.12	89.09	92.06	94.61	97.16	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	92.86	93.54	94.22	94.9	95.58	96.26	96.64	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	55.25	55.93	56.61	57.29	57.97	58.65	59.33	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	31.83	36.81	41.79	46.77	51.74	56.72	61.7	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang		8	8	7	7	6	6	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase		29.43	27.96	26.49	25.02	23.55	22.08	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase		100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase		100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase		100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase		100	100	100	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%		18	19	20	21	22	23	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%		18	19	20	21	22	23	
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%		43.305	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%		43.305	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%		72.52	73.22	73.92	74.62	75.32	76.02	
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%		74.38	75.28	76.18	77.08	77.98	78.88	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%		100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%		40.87	43.87	46.87	49.87	52.87	55.87	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%		100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%		100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Layanan		40	45	50	55	60	65	
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%		100	100	100	100	100	100	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen		47.32	48.72	52%	36,94%	39.99	IKK	
2	Persentase Permukiman yang tertata	Persen		20	20	20	20	20	20	
3	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	Persen		20	20	20	20	10	20	
4	Luas kawasan permukiman kumuh	Luas		65	62	59	57	55	52	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Terwujudnya Peningkatan Ketentraman dan	Persen		100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
2	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen		100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Warga Negara mempertoleh layananInformasi Rawan bencana	%		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	
4	Persentase Warga negara dan aparatur yang memperolah Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	
5	Persentase Jumlah warga negara yang mendapatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		**20%**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	
6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai Dinyatakan sah dan legal	%		**10%**	**15%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	
7	Persentase penanganan pra bencana	%		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	
8	Persentase penanganan pasca bencana	%		**15%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	
9	Penyediaan peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	Persen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Nilai Akip PD	Predikat		B	AA	B	B	B	AA	
2	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen		80%	85%	90%	95%	95%	95%	
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatnya Produktivitasnya	Persen		60%	65%	70%	75%	80%	90%	
4	Peresentase Tenaga Kerja yang Di Tempatkan di Dalam Negeri	Persen		60%	65%	70%	75%	80%	90%	
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen		60%	70%	75%	80%	85%	90%	
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen		48%	50%	60%	70%	80%	90%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 10.000 Penduduk Perempuan)	Angka		10	5	4	3	2	1	
2	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen		30	35	37	38	40	42	
3	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen		100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen		100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen		30	30	30	30	30	30	
6	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen		30	30	30	30	30	30	
7	Partisipasi Perempuan di Lemabaga Swasta	Persen		30	30	30	30	30	30	
8	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen		30	30	30	30	30	30	
9	Rasio KDRT	Persen		4	3	3	2	2	2	
AH	**2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen		5.68	4.54	3.4	2.27	1.13	0	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen		100	100	100	100	100	100	
3	Persentase PSAT yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen		60	62	64	66	68	70	
AI	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen		30	20	20	20	20	20	
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen		N/A	20	20	20	20	20	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
AJ	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin		85,68	85,81	85,94	86,07	86,20	86,36	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen		8	9	10	11	12	13	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen		100	100	100	100	100	100	
AK	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Penerbitan akta perkawinan	Persen		42,87	45,00	47,00	50,00	55,00	70,00	
2	Penerbitan akta perceraian	Persen		43,87	46,00	48,00	50,00	55,00	70,00	
3	Penerbitan akta kematian	Persen		100	100	100	100	100	100	
4	Penyajian data kependudukan	ada/tdk ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Persentase Anak 0-17 yang Memiliki Akte Kelahiran	Persen		100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Anak 0-17 yang Memiliki KIA	Persen		31,50	35,00	40,00	45,00	50,00	80,00	
7	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen		100	100	100	100	100	100	
8	Persentase kepemilikan Identitas kependudukan Digital	Persen		2,32	3,32	4,32	5,32	7,32	10,32	
9	Persentase Perekaman KTP el	Persen		100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasrkan perjanjian kerjasama	Jumlah		5	10	15	20	25	30	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Desa yang memiliki penataan Desa yang berkualitas	Persen		56,81	68,18	73,86	79,54	89,77	100.00	
2	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Persen		9,09	11,36	11,36	13,63	13,63	17,04	
3	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Persen		68,18	73,86	73,86	79,54	90,9	100.00	
4	Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	Persen		50.00	56,81	68,18	79,54	89,77	100.00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks		61.40	61.50	61.51	61.52	61.53	61.54	
2	I Bangga	Indeks		61.40	61.50	61.51	61.52	61.53	61.54	
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka		2.47	2.46	2.45	2.44	2.43	2.43	
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Rate/ASFR 15-19)	Angka		43.10	43.09	43.08	43.07	43.06	43.05	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Angka		60.68	61.60	61.63	61.65	61.67	61.69	
6	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi Unmet Need)	Persen		12.00	12.00	12.00	11.95	11.95	11.94	
7	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen		0	20	30	40	50	60	
8	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen		100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Lansia Berdaya	Indeks		10	10	20	30	40	50	
10	Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks		10	10	20	30	40	50	
AL	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen		81.4	83	85	90	95	100	
2	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen		85	85	100	100	100	100	
3	Persentase Kepimilikan KIR Angkutan Umum	Persen		25	25	37	40	47	50	
4	Persentase Ketersediaan Data Layanan Angkutan	Persen		40	40	45	50	55	60	
5	Persentase tersedianya perlengkapan transportasi	Persen		35	35	40	45	50	50	
6	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen		75	75	80	100	100	100	
AM	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase Layanan Publik yang	Persen		50	60	70	80	90	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	diselenggarakan secara online dan terintegrasi									
2	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen		65	70	75	80	85	90	
AN	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen		9.27	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen		9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	
3	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen		2	2	2	2.1	2.2	2.2	
4	Persentase Koperasi Aktif	Persen		75.5	75.6	75.7	75.9	80	80.1	
5	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Persen		3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	
6	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	Persen		0	1	1	2	2	2	
7	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen		30	35	40	40	40	40	
8	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen		4	4	5	5	5	5	
9	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen		25	30	30	30	30	30	
10	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Persen		8	8	8.1	8.2	8.3	8.4	
11	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen		5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	
AO	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	Investor		59	65	72	79	86	93	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	Milyar/ Rupiah		560,000,000,000	598,000,000,000	636,000,000,000	674,000,000,000	712,000,000,000	750,000,000,000	
3	Rasio daya serap tenaga Kerja	Rasio		4,75	6,25	7,75	9,25	10,75	11,75	
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen		15	16	16	16	16	16	
AP	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen		1,86	2,48	3,10	3,72	4,34	4,96	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4.91	5.04	5.16	5.29	5.41	5.53	5.66	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	4,71	4,85	4,99	5,12	5,26	5,40	5,54	
AQ	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks		1.94	2	2.15	2.25	2.45	2.75	
AR	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persen		50	60	70	80	90	100	
AS	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	0	25	25	25	25	25	25	
AT	**2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai		80	85	90	93	95	**97**	
2	Nilai AKIP OPD	Predikat		CC (43.34)	B (53.36)	B (53.38)	BB (73.40)	BB (73.42)	BB (73.42)	
AT	**2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	Persen		50	50	55	60	65	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen		50	50	55	60	65	70	
AT	**3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton			21461	21495	21535	21595	21595	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton			36396	36506	36674	36874	36874	
3	Angka Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)		96.13	96.24	96.3	96.33	96.36	96.36	
4	Nilai AKIP	Predikat			B	B	BB	BB	BB	
AT	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen		4	7.69	10.71	12.9	14.29	25	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen		5.84	5.98	6.07	6.34	6.54	8.3	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen		54.02	55	57	58	59	60	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen		0.28	0.29	0.3	0.32	0.33	0.35	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen		6	6.25	6.5	6.7	7	7.5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AU	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Produksi Kakao	Ton		5.633	5.992	6.379	6.860	7.125	7.125	
2	Produksi Kelapa Sawit	Ton		88.055	104.184	122.340	145.923	159.375	159.375	
3	Produksi Kelapa Dalam	Ton		2.839	2.999	3.171	3.383	3.500	3.500	
4	Produksi Kopi Robusta	Ton		172	206	234	260	270	270	
5	Produksi Cengkeh	Ton		1.444	1.482	1.523	1.573	1.600	1.600	
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen		0	40	43	46	49	51	
7	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen		0	50	55	60	65	70	
8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen		38	40	42	45	48	50	
9	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen		70	73	76	79	81	85	
AV	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen		100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen		80	85	90	95	95	95	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		100	100	100	100	100	100	
AW	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Persen		5.5	5.8	6.2	6.4	6.8	7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen		39	40	40.5	42	44	46	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen		100	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen		50	55	60	60	65	65	
7	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen		3.99	4.01	4.02	4.03	4.05	4.07	
8	AKIP OPD	Predikat		BB	BB	BB	BB	BB	BB	
AX	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persenatse Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen		90	92	93	94	95	96	
8	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembangan	Persen		100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen		80	95	96	97	98	99	
AY	**4.01 SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen		0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen		60	60	60	60	60	60	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen		35	35	35	35	35	35	
AY	**4.02 SEKRETARIAT DPRD**									
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD	%		100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Yang Difasilitasi	%		100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengesahan Perda Yang Tepat Waktu	%		100	100	100	100	100	100	
AY	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	60	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	60	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang ekonomi dan sumberdaya alam	Persen	90,21	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	98,04	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	84	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan	Persen	86,55	100	100	100	100	100	100	
AZ	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase Peningkatan Nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen		0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	
2	Realisas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rupiah		130,160,197,039.00	126,154,331,355.00	129,236,371,315.00	132,394,280,558.00	135,471,677,848.00	138,789,543,699.00	
3	Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	Persen		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
4	Rasio Belanja diluar guru dan tenaga kesehatan	Persen		12.85	12.75	12.60	12.55	12.50	12.47	
5	Rasio PAD	Persen		10.46	10.06	10.22	10.38	10.53	10.69	
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen		60.73	60.73	60.73	60.73	60.73	60.73	
7	Opini Laporan Keuangan	Nilai		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
8	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen		1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
10	Manajemen Aset	Laporan		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.	Persen		6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	
BA	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio		67.75	68.09	68.43	68.77	69.12	69.46	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio		24	24.12	24.24	24.36	24.48	24.61	
BB	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio		5.15	5.18	5.20	5.23	5.25	5.28	
BC	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan,pembangunan daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Produk inovasi yang dimanfaatkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
BD	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,154	3,155	3,157	3,16	3,163	3,166	3,169	
2	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	
BE	**7.01 - KECAMATAN**									
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2.65	2.81	2.89	2.97	3.05	3.12	3.2	
BE	**8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen		80.02	82.09	84.11	86.08	88	90.64	

Sumber: Data diolah, 2025

4.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tabel 4. 4 Indikator SPM Kabupaten Mamuju, 2025-2030

No	SPM	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja 2026	Target Kinerja 2027	Target Kinerja 2028	Target Kinerja 2029	Target Kinerja 2030
1	**PENDIDIKAN**							
1,1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun	Persen	80,19	86,12	89,09	92,06	94,61	97,16
1,2	Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Persen	29,49	70,2	97,62	100	100	100
1,3	Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4	Persen	52,3	62,53	63,28	64,03	64,78	65,53
1,4	Angka Partisipasi Sekolah 7 sd 15	Persen	95,47	96,83	97,51	98,19	98,83	99,47
1,5	Skor Kemampuan Literasi SD	Persen	52,7	71,54	72,54	73,54	74,54	75,54
1,6	Skor Kemampuan Literasi SMP	Persen	57,76	75,62	76,52	77,42	78,32	79,22
1,7	Skor Kempuan Numerasi SD	Persen	48,85	62,57	65,07	67,57	70,07	72,57
1,8	Skor Kempuan Numerasi SMP	Persen	54,86	54,65	57,55	60,45	63,35	66,25
1,9	Iklim Inklusivitas SD	Persen	57,57	57,7	60,2	65,2	65,2	67,7
1.10	Iklim Inklusivitas SMP	Persen	54,46	71,54	72,54	73,54	74,54	75,54
1,11	Iklim Keamanan SD	Persen	73,82	70,51	72,01	73,51	75,01	76,51
1,12	Iklim Keamanan SMP	Persen	67,51	59,26	61,66	64,06	66,46	68,86
1,13	Iklim kebinekaan SD	Persen	69,54	57,86	59,36	62,7	65,2	67,7
1,14	Iklim kebinekaan SMP	Persen	69,26	59,69	61,06	62,16	63,26	66,25
1,15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 sd 18 tahun	Persen	31,83	41,79	46,77	51,74	56,72	61,7
2	**KESEHATAN**							
2,1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	94,59	100	100	100	100	100
2,2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	94,76	100	100	100	100	100
2,3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	97,69	100	100	100	100	100
2,4	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	80,35	100	100	100	100	100
2,5	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	93,16	100	100	100	100	100

No	SPM	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja 2026	Target Kinerja 2027	Target Kinerja 2028	Target Kinerja 2029	Target Kinerja 2030
2,6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	85,11	100	100	100	100	100
2,7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	90,55	100	100	100	100	100
2,8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,67	100	100	100	100	100
2,9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	98,53	100	100	100	100	100
2.10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	89,43	100	100	100	100	100
2,11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	97,92	100	100	100	100	100
2,12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	92,20	100	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM**							
3,1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	91,1	100	100	100	100	100
3,2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	80	100	100	100	100	100
4	**PERUMAHAN PERMUKIMAN**							
4,1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;	Persen	66,67	100	100	100	100	100

No	SPM	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja 2026	Target Kinerja 2027	Target Kinerja 2028	Target Kinerja 2029	Target Kinerja 2030
4,2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persen	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
5	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
5,1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100
5,2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
5,3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
5,4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
5,5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**							
6,1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100
6,2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100
6,3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100
6,4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100

No	SPM	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja 2026	Target Kinerja 2027	Target Kinerja 2028	Target Kinerja 2029	Target Kinerja 2030
6,5	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100

4.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB adalah serangkaian 17 aspirasi universal yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Indikator ini adalah alat ukur berbasis data yang spesifik dan terperinci, dirancang untuk melacak dan memantau kemajuan pencapaian setiap target dalam 17 tujuan tersebut mulai dari mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, hingga aksi iklim dan kesetaraan gender. Indikator TPB mengubah visi global yang besar menjadi peta jalan yang terukur, memastikan bahwa setiap negara secara konsisten bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Indikator TPB Kabupaten Mamuju, 2025-2029

No	Indikator TPB	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	155,01	145,84	136,64	128,5	119,14
2	Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani	%	67,63	68,15	68,79	69,43	69,98
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	%	3,78	3,72	3,67	3,61	3,55

No	Indikator TPB	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
4	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	%	1,5	1,43	1,36	1,29	1,23
5	Kejadian Malaria Per 1000 Orang	%	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32
6	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%	39,09	40,06	41	42,06	43,34
7	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	55,16	55,72	56,29	56,86	57,44
8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	93,31	93,63	93,95	94,29	94,64
9	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	93,31	93,96	94,61	95,28	95,97
10	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin	%	55,18	55,62	56,17	56,68	57,21
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	%	100,05	100,71	101,37	102,04	102,71
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	%	86,42	87,35	88,28	89,22	90,17
13	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	%	97,33	97,45	97,7	97,84	98,07
14	Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Dan Berkelanjutan	%	97,35	97,45	97,63	97,75	97,91
15	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	%	94,61	94,98	95,34	95,71	96,09
16	Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita	%	3,83	3,93	4,04	4,15	4,27
17	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	%	2,81	2,79	2,77	2,75	2,73
18	Jumlah Kantor Bank Dan ATM Per 100.000 Penduduk Dewasa	%	19	19	19	19	19
19	Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama	%	97,1	98,41	99,73	100	100

No	Indikator TPB	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
20	Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB Yang Tidak Terpenuhi)	%	22,93	21,91	21,12	20,34	19,46

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju 2025-2029

BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 berisikan kebijakan menengah kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 ini akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran kebijakan RPJPD Kabupaten Mamuju (2025-2045) untuk terwujudnya Kabupaten Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan. RPJMD ini memiliki peran strategis karena memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2025-2029, sesuai kondisi keuangan daerah dan dinamika lingkungan dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi demi mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif, masyarakat hingga dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mensukseskan program program pada RPJMD.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun RKPD mulai tahun 2026 sampai dengan 2029. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat maupun dunia usaha;
b. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan RKPD; dan
c. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;

Proses keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah dapat terwujud dan terukur dengan adanya manajemen risiko secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga akan tercapai tujuannya dan tercermin pada kualitas manusianya, integritas birokrasi yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah tersebut, diharapkan Kabupaten Mamuju akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya yaitu "***Mamuju KEREN, Maju, Adil dan Berkelanjutan***".

PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju Keren